



**WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Peraturan Daerah Kota Pontianak  
Nomor 6 Tahun 2014**

**tentang**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561 - 734294 Fax. 0561 - 733045 Pontianak 78111  
website : [www.bappeda.pontianakkota.go.id](http://www.bappeda.pontianakkota.go.id) - email : [bappeda@pontianakkota.go.id](mailto:bappeda@pontianakkota.go.id)



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pontianak.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selanjutnya di singkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit-Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW kota, serta memperhatikan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah rencana strategis lima tahunan SKPD yang menerapkan Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak, yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.
17. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

### Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.

### Pasal 3

Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi kota pontianak;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
- d. analisis permasalahan dan isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas dan indikasi pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah;
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
- k. penutup.

### Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan Renja SKPD tahunan.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kota;
- c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## Bagian Kedua

### Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

#### Pasal 8

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
  - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
  - c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
  - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
  - e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; dan
  - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

#### Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota Pontianak;
  - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Nasional sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Pontianak;
  - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak selaras dengan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota lain disekitarnya;
  - d. program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain disekitarnya;
  - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; dan
  - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lain disekitarnya.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

#### Bagian Ketiga

#### Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah

#### Pasal 14

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD.

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
  - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD kota.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Walikota.



Bagian Keempat  
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang kota.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar di tingkat kota dan nasional; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat kota yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

#### Pasal 23

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 24

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

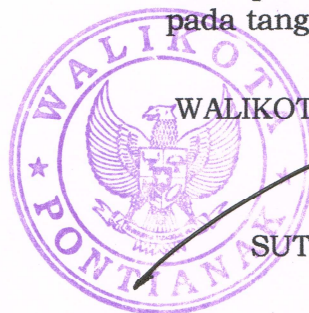
### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Oktober 2014



WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 – 2019

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Bahwasannya pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan, oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1 adalah Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah (RPJMD) Kota.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih periode.

Penyusunan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan program pada saat pergantian kepemimpinan daerah berdasarkan Visi, Misi dan arah pembangunan daerah serta diperlukan untuk mengikat komitmen Pemerintah Kota, Masyarakat, swasta dan pihak-pihak pemegang peran (*stakeholders*) dalam membangun Kota Pontianak.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

### 3. Prinsip-prinsip

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### 4. Pendekatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 menggunakan pendekatan:

- a. *Teknokratik*, yaitu Menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. *Partisipatif*, yaitu Melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
- c. *Politik*, yaitu Program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon *Kepala* Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam RPJMD;
- d. *Bottom up-top down*, yaitu Penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, kota, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

### 5. Tahapan

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 terdiri dari:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan;
- c. Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang;
- d. Perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Barat;
- e. Penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur Kalimantan Barat;

### 6. Muatan.

Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 terdiri dari:

- a. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah;
- b. Arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Strategi pembangunan daerah;
- d. Kebijakan umum;
- e. Program SKPD;
- f. Program lintas SKPD;
- g. Program kewilayahan;
- h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
- i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

perubahan kebijakan tingkat kota yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung diantaranya adalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan perubahan rencana tata ruang, serta perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan penanggungjawab urusan pemerintahan dan program-program prioritas serta indikator kinerja yang telah disusun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

# DAFTAR ISI



	hal
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.2.1 Maksud .....	2
1.2.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.4 Hubungan Antara RPJM Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	6
1.5 Sistematika Dokumen RPJM .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Kondisi Fisik Dasar .....	11
A. Administrasi Wilayah .....	11
B. Topografi .....	15
C. Geologi dan Jenis Tanah .....	15
D. Hidrologi .....	16
E. Klimatologi .....	17
2.1.2 Penggunaan Lahan .....	17
A. Kawasan Lindung .....	17
B. Kawasan Budidaya .....	22
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah .....	23
A. Wilayah Sungai dan Parit .....	23
B. Kawasan Wisata .....	23
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana .....	26
A. Banjir .....	27
B. Kebakaran dan Kabut Asap .....	28
C. Angin Putting Beliung .....	28
2.1.5 Kawasan Rawan Sosial .....	28
2.1.6 Demografi .....	29

<b>2.2</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....</b>	<b>32</b>
2.2.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	32
	A. Perkembangan Perekonomian .....	32
	B. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) .....	35
	C. PDRB Perkapita .....	37
	D. Kondisi Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan .....	38
	E. Indeks Pembangunan Manusia .....	41
	F. Penduduk Miskin .....	43
2.2.2	Kesejahteraan Sosial .....	45
	A. Angka Melek huruf .....	45
	B. Rata-Rata Lama Sekolah .....	45
	C. Angka Kematian Bayi .....	46
	D. Usia Harapan Hidup .....	47
2.2.3	Budaya, Pemuda dan Olah Raga .....	48
<b>2.3</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum .....</b>	<b>49</b>
2.3.1	Layanan Urusan Wajib .....	49
	A. Urusan Pendidikan .....	49
	B. Urusan Kesehatan .....	52
	C. Urusan Lingkungan Hidup .....	58
	D. Urusan Pekerjaan Umum .....	62
	E. Urusan Penataan Ruang .....	64
	F. Urusan Perencanaan Pembangunan .....	65
	G. Urusan Ciptakarya dan Perumahan .....	67
	H. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan .....	71
	I. Urusan Penanaman Modal .....	73
	J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	76
	K. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....	77
	L. Urusan Ketenagakerjaan .....	79
	M. Urusan Ketahanan Pangan .....	80
	N. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	83
	O. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	85
	P. Urusan Perhubungan .....	87
	Q. Urusan Komunikasi dan Informatika .....	88
	R. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	89
	S. Urusan Pemerintahan Umum .....	91
	T. Urusan Pemberdayaan Masyarakat .....	98
	U. Urusan Sosial .....	99
	V. Urusan Kebudayaan .....	100
	W. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan .....	101
2.3.2	Layanan Urusan Pilihan .....	102
	A. Urusan Pertanian .....	102
	B. Urusan Kehutanan .....	108
	C. Urusan Perikanan .....	109
	D. Urusan Pariwisata .....	111
	E. Urusan Industri dan Perdagangan .....	113
2.3.3	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan .....	117
	A. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....	117

	B. Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	119
<b>2.4</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah .....</b>	<b>121</b>
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah .....	121
	A. Pendapatan Per Kapita Penduduk .....	121
	B. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita .....	121
	C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita .....	122
2.4.2	Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah .....	123
	A. Jaringan Jalan .....	123
	B. Pengelolaan Sampah .....	124
	C. Jaringan Drainase .....	126
	D. Air Bersih .....	126
	E. Sanitasi Lingkungan .....	129
	F. Perumahan dan Permukiman .....	130
	G. Transportasi dan Perhubungan .....	132
	H. Jaringan Komunikasi .....	133
	I. Jaringan Listrik .....	133
2.4.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah .....	134
	A. Struktur Ruang Kota .....	134
	B. Pemanfaatan Ruang Kota .....	136
2.4.4	Iklim Investasi .....	138
	A. Perkembangan Investasi .....	138
	B. Angka Kriminalitas .....	139
	C. Jumlah dan Lama Perijinan .....	140
	D. Pajak-Pajak Daerah .....	141
2.4.5	Sumber Daya Manusia .....	143
	A. Kualitas Tenaga Kerja .....	143
	B. Dependency Ratio .....	145

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>146</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinerja Keuangan Daerah .....</b>	<b>146</b>
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	147
	A. Pendapatan Daerah .....	148
	B. Belanja Daerah.....	157
	C. Pembiayaan .....	162
3.1.2	Neraca Daerah .....	165
	A. Aset .....	165
	B. Kewajiban .....	169
	C. Ekuitas Dana .....	171
	D. Analisis Rasio terhadap Neraca Keuangan Daerah.....	173
<b>3.2</b>	<b>Proyeksi Kerangka Pendanaan dan Belanja Lima Tahun .....</b>	<b>176</b>
3.2.1	Proyeksi dan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	177
	A. Proyeksi Pendapatan .....	177
	B. Arah Pengelolaan Pendapatan .....	177
3.2.2	Proyeksi dan Arah Pengelolaan Belanja Daerah .....	178
	A. Proyeksi Belanja .....	178
	B. Arah Pengelolaan Belanja .....	179

3.2.3	Proyeksi dan Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah .....	180
A.	Proyeksi Pembiayaan .....	180
B.	Arah Pengelolaan Pembiayaan .....	180
3.2.4.	Kebijakan Umum Anggaran .....	183
A.	Pendapatan Daerah .....	183
B.	Belanja Daerah .....	183
C.	Pembiayaan Daerah .....	184
D.	Prediksi Ekonomi Makro .....	184
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>186</b>
<b>4.1</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Pembangunan .....</b>	<b>186</b>
4.1.1	Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup .....	186
4.1.2	Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah .....	187
A.	Tata Ruang .....	187
B.	Keciptakarya .....	187
C.	Jalan dan Perhubungan .....	188
D.	Sumber Daya Air dan Air Bersih .....	188
E.	Komunikasi dan Informatika .....	189
4.1.3	Demografi dan Tenaga Kerja .....	189
A.	Demografi .....	189
B.	Tenaga Kerja .....	189
4.1.4	Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat .....	189
A.	Perekonomian Kota dan Investasi .....	189
B.	Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM .....	190
C.	Pariwisata .....	190
D.	Ketahanan Pangan .....	191
E.	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan .....	191
F.	Energi .....	191
4.1.5	Sosial dan Budaya.....	192
A.	Sosial .....	192
B.	Pendidikan .....	192
C.	Kesehatan .....	193
D.	Kebudayaan .....	193
E.	Pemberdayaan Perempuan dan Anak .....	193
F.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga .....	193
G.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi .....	194
4.1.6	Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan .....	194
A.	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan Pemerintahan .....	194
B.	Sumber Daya Aparatur .....	195
C.	Hukum .....	195
D.	Kerjasama .....	195
E.	Pengelolaan Keuangan .....	195
F.	Pelayanan Publik .....	196
<b>4.2</b>	<b>Isu-Isu Strategis .....</b>	<b>196</b>
4.2.1	Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam .....	196
A.	Pencemaran .....	196
B.	Genangan dan Banjir .....	197

C.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	197
4.2.2	Dinamika Demografi dan Sosial Budaya .....	198
A.	Pertambahan dan Penyebaran penduduk .....	198
B.	Kualitas Sumber Daya Manusia .....	199
C.	Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda .....	199
D.	Gesekan Sosial .....	199
4.2.3.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....	200
A.	Pengelolaan Keuangan Daerah .....	200
B.	Reformasi Birokrasi .....	200
c.	Pengembangan E-Government .....	201
D.	Pegembangan Kerjasama Antar Daerah & Internasional ..	201
E.	Peningkatan Pelayanan Publik .....	201
4.2.4.	Tata Ruang dan Infrastruktur Perkotaan .....	202
A.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota .....	202
B.	Pengembangan Sistem Transportasi .....	202
C.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota .....	203
D.	Pengelolaan Air Bersih .....	204
E.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan .....	204
4.2.5.	Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat .....	204
A.	Kemiskinan .....	204
B.	Penguatan Ketahanan Pangan .....	205
C.	Peningkatan Daya Saing Global .....	206
D.	Pengangguran, Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja .....	206
F.	Pengembangan Pariwisata .....	207
G.	Pengembangan Perdagangan dan Jasa .....	207
<b>4.3</b>	<b>Analisis Lingkungan Strategis .....</b>	<b>208</b>
4.3.1.	Analisis Eksternal .....	208
A.	Peluang .....	209
B.	Tantangan .....	210
4.3.2.	Analisis Internal .....	210
A.	Kekuatan .....	210
B.	Kelemahan .....	211
4.3.3.	Analisis SWOT .....	212
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>215</b>
5.1	Visi .....	216
5.2	Misi .....	217
5.3	Tujuan dan Sasaran .....	220
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>242</b>
6.1.	Arah Kebijakan Jangka Menengah dalam Kerangka Pembangunan Jangka Panjang .....	242
6.2.	Skenario, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2015-2019 .....	244

<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>258</b>
7.1. Kebijakan Umum Pembangunan .....	258
7.2. Program Pembangunan Daerah .....	259
7.2.1. Program Pembangunan Penunjang Pencapaian Visi dan Misi..	259
7.2.2. Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi .....	269
7.2.3. Program Kewilayahan .....	269
A. Program Kewilayahan Internal .....	269
B. Program Kewilayahan Eksternal .....	272
7.2.4. Program Prioritas Berdasarkan Fokus Pembangunan Daerah .	273
<b>BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKASI PENDANAAN .....</b>	<b>309</b>
<b>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....</b>	<b>338</b>
<b>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>367</b>
10.1 Pedoman Transisi .....	367
10.2 Kaidah Pelaksanaan .....	368
<b>BAB XI PENUTUP .....</b>	<b>371</b>



# DAFTAR TABEL



	hal
Tabel II-1	Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kelurahan ..... 13
Tabel II-2	Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kota Pontianak ..... 13
Tabel II-3	Persebaran Sungai dan Parit di Kota Pontianak ..... 16
Tabel II-4	Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Pontianak ..... 20
Tabel II-5	Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Di Kota Pontianak ..... 21
Tabel II-6	Target Pencapaian RTH Privat di Kota Pontianak ..... 21
Tabel II-7	Potensi Wisata di Kota Pontianak ..... 25
Tabel II-8	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ..... 29
Tabel II-9	Jumlah Penduduk di Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2013 ..... 30
Tabel II-10	Laju Pertambahan Penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak ..... 30
Tabel II-11	Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2013 ..... 31
Tabel II-12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009 – 2013 ..... 31
Tabel II-13	Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2013 ..... 33
Tabel II-14	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010- 2013 ..... 34
Tabel II-15	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pontianak (Juta Rupiah), 2010-2013 ..... 35
Tabel II-16	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Pontianak (Juta Rupiah), 2010-2013 ..... 35
Tabel II-17	PDRB Per Kapita Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ..... 38
Tabel II-18	Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan Tahun 2009 - 2012 (Dalam Rupiah) ..... 38
Tabel II-19	Gambaran Perkembangan Kecamatan Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Tahun 2009-2012 ..... 39
Tabel II-20	Karakteristik Perkembangan Kecamatan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2012 ..... 39
Tabel II-21	Indeks Williamson Kota Pontianak Tahun 2009-2012 ..... 40
Tabel II-22	Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ..... 41
Tabel II-23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tahun 2009 – 2013 ..... 42
Tabel II-24	Perbandingan IPM Kota Pontianak dengan IPM se-Kalimantan dan se-Indonesia Tahun 2011-2013 ..... 42
Tabel II-25	Kondisi dan Indikator Kemiskinan di Kota Pontianak Tahun 2003-2013 ..... 43

Tabel II-26	Perbandingan Kondisi dan Indikator Kemiskinan Kota Pontianan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2013 .....	44
Tabel II-27	Angka Melek Huruf di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	45
Tabel II-28	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	45
Tabel II-29	Mortalitas/Angka Kematian di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	46
Tabel II-30	Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas di Kota Pontianak Tahun 2013 .....	47
Tabel II-31	Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	48
Tabel II-32	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	49
Tabel II-33	Nilai Rata- Rata UAN di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	50
Tabel II-34	Rasio Murid Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	50
Tabel II-35	Rasio Murid terhadap Ruang Kelas di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ...	51
Tabel II-36	Rasio Guru Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	51
Tabel II-37	Perkembangan Jumlah Guru di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	51
Tabel II-38	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Di Kota Pontianak Tahun 2008-2013 .....	53
Tabel II-39	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Tenaga Kesehatan Di Kota Pontianak Tahun 2008-2012 .....	53
Tabel II-40	Jumlah Kunjungan Pasien Pada Puskesmas Menurut Kecamatan Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	54
Tabel II-41	Capaian Kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	54
Tabel II-42	Capaian Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	55
Tabel II-43	Jumlah Kasus Gizi Buruk Yang Ditangani di Puskesmas Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	55
Tabel II-44	Angka Kesakitan Beberapa Penyakit Infeksi dan Non Infeksi Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	56
Tabel II-45	Sarana Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak .....	57
Tabel II-46	Kondisi Tenaga Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie Kota Pontianak .....	57
Tabel II-47	Distribusi Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kepesertaan Tahun 2013 .....	58
Tabel II-48	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun 2013 .....	58
Tabel II-49	Perkembangan Kualitas Udara di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	59
Tabel II-50	Perkembangan Kasus dan Penyelesaian Pencemaran Tahun 2010-2013 ....	59
Tabel II-51	Jumlah Rata-Rata Parameter Pencemar Udara di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	60
Tabel II-52	Perkembangan Pengelolaan Kebersihan Kota Pontianak Tahun 2009-2013	60
Tabel II-53	Prasarana dan Sarana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kota Pontianak Tahun 2009- 2013 .....	61
Tabel II-54	Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kota Pontianak	

	Tahun 2009-2013 .....	61
Tabel II-55	Ruang Lingkup Pelayanan Kebersihan di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	62
Tabel II-56	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2009-2013 .....	63
Tabel II-57	Rekapitulasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi Kota Pontianak Tahun 2013 .....	67
Tabel II-58	Rekapitulasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2010-2013 .....	68
Tabel II-59	Bantuan Material Jalan Lingkungan Tahun 2009-2013 .....	69
Tabel II-60	Kondisi Jalan Lingkungan (Gang) di Kota Pontianak Tahun 2013 .....	70
Tabel II-61	Perkembangan Bantuan Material Jalan lingkungan di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	71
Tabel II-62	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Pontianak .....	72
Tabel II-63	Kinerja Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	73
Tabel II-64	Perkembangan Surat Izin yang Diterbitkan dengan Permohonan Izin Tahun 2009-2013 .....	74
Tabel II-65	Standar Waktu Pelayanan Perizinan .....	74
Tabel II-66	Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Kota Pontianak Tahun 2009-2013 (dalam juta rupiah) .....	75
Tabel II-67	Rekapitulasi Rencana, Realisasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2009-2013 .....	75
Tabel II-68	Kinerja Pelayanan Masyarakat Tahun 2010-2013 .....	75
Tabel II-69	Perkembangan Koperasi di Kota Pontianak 2009-2013 .....	76
Tabel II-70	Kegiatan Pembinaan IKM Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	76
Tabel II-71	Jumlah Penerbitan KTP, KK dan KIPEM di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	77
Tabel II-72	Perkembangan Penerbitan Akta Catatan Sipil di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	78
Tabel II-73	Pelaksanaan Elektronik KTP ( <i>e-KTP</i> ) di Kota Pontianak Tahun 2013 .....	78
Tabel II-74	Prosentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Pontianak, 2012 .....	80
Tabel II-75	Jumlah Kelompok Tani di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	81
Tabel II-76	Jumlah Petani di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	81
Tabel II-77	Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Usahanya di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	81
Tabel II-78	Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama di Kota Pontianak Tahun 2011-2013 .....	82
Tabel II-79	Perkembangan IPM dan IPG Kota Pontianak dengan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2013 .....	84
Tabel II-80	Perkembangan IPG Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2013 .....	84
Tabel II-81	Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	85
Tabel II-82	Perkembangan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	85
Tabel II-83	Perkembangan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	86

Tabel II-84	Perkembangan Keluarga Sejahtera di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ....	86
Tabel II-85	Perkembangan Kelompok Kegiatan (POKTAN) di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	87
Tabel II-86	Jumlah Kendaraan yang Teregistrasi di Kota Pontianak Tahun 2009 -2013 ..	88
Tabel II-87	Jumlah Traffic Light, Terminal dan Halte di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	88
Tabel II-88	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	90
Tabel II-89	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan di Kecamatan Tahun 2009-2013 .....	91
Tabel II-90	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013 .....	92
Tabel II-91	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Tahun 2009-2013 .....	92
Tabel II-92	Jumlah Formasi Jabatan Tahun 2009-2013 .....	93
Tabel II-93	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009-2013	93
Tabel II-94	Realisasi Kinerja Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Tahun 2009-2013 .....	93
Tabel II-95	Realisasi Kinerja Pemeriksaan dan Pengendalian Pembangunan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	94
Tabel II-96	Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	96
Tabel II-97	Jumlah Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana dan TUN Tahun 2009-2013..	97
Tabel II-98	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	99
Tabel II-99	Pengadaan dan Ketersediaan Buku di Perpustakaan Tahun 2010-2013 .....	102
Tabel II-100	Jumlah Peminjaman, Judul Buku Baru dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2010-2013 .....	102
Tabel II-101	Lama Kunjungan Wisatawan Domestik, Mancanegara Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	110
Tabel II-102	Jumlah Objek Wisata Kota Pontianak Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .	112
Tabel II-103	Perkembangan Industri di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	113
Tabel II-104	Kinerja Indikator Bidang Perindustrian Kota Pontianak Tahun 2010-2013 ..	114
Tabel II-105	Kinerja Indikator Bidang Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2010-2013 ..	114
Tabel II-106	Jumlah Pedagang di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	115
Tabel II-107	Perkembangan Pasar Modern di Kota Pontianak Tahun 2013 .....	115
Tabel II-108	Perkembangan Pasar Tradisional yang Dibina di Kota Pontianak Tahun 2013	116
Tabel II-109	Kegiatan Bintibmas yang Dilaksanakan Satpol PP Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	119
Tabel II-110	Frekuensi Razia Layang-Layang Tahun 2010-2013 .....	120
Tabel II-111	Jumlah Keberhasilan Penertiban PKL Tahun 2010-2013 .....	120
Tabel II-112	Pendapatan Per Kapita Penduduk (Harga Berlaku) Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	121
Tabel II-113	Distribusi Prosentase Pengeluaran Per Kapita Penduduk Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2010-2012 .....	121

Tabel II-114	Persentase Rumah Tangga Menurut Pengeluaran Per Bulan Tahun 2011-2012 .....	122
Tabel II-115	Rata-rata Nilai Konsumsi Rumah Tangga Per Bulan Menurut Kelompok Konsumsi (Rupiah) Tahun 2010-2012 .....	122
Tabel II-116	Kondisi Jalan Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	123
Tabel II-117	Jenis Jalan di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	123
Tabel II-118	Perkembangan Pengelolaan Sampah Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	124
Tabel II-119	Jenis TPS yang Ada di Kota Pontianak tahun 2008-2013 .....	125
Tabel II-120	Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	125
Tabel II-121	Ruang Lingkup Pelayanan Kebersihan di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	125
Tabel II-122	Jumlah dan Panjang Saluran Drainase Menurut Jenisnya Tahun 2013 .....	126
Tabel II-123	Jumlah Pelanggan Berdasarkan Area Pelayanan Tahun 2009-2013 .....	128
Tabel II-124	Fasilitas Air Baku PDAM Kota Pontianak Tahun 2013 .....	128
Tabel II-125	Kinerja Penyediaan Air Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Tahun 2008-2013 .....	128
Tabel II-126	Rumah Tangga yang Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2013 .....	129
Tabel II-127	Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2012 .....	130
Tabel II-128	Luas Kawasan Kumuh di Kota Pontianak Tahun 2009-2012 .....	131
Tabel II-129	Luas Kawasan Kumuh Per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2013 .....	
Tabel II-130	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pontianak Tahun 2009-2013	131
Tabel II-131	Sarana Lalu Lintas yang Dimiliki Kota Pontianak Tahun 2013 .....	132
Tabel II-132	Data Terminal di Kota Pontianak .....	133
Tabel II-133	Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Kota Pontianak Hingga Tahun 2033 .....	136
Tabel II-134	Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Kota Pontianak Tahun 2009-2013 (juta rupiah) .....	138
Tabel II-135	Ketentuan Upah Minimum Di Kota Pontianak, 2008-2013 (Rupiah) .....	138
Tabel II-136	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan di Kota Pontianak Tahun 2009-2012 .....	139
Tabel II-137	Kinerja Pemenuhan Standar Waktu Pelayanan Perizinan Tahun 2009-2013	140
Tabel II-138	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009-2013 .....	144
Tabel II-139	Penduduk Berumur 5 (lima) Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan .....	144
Tabel II-140	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	145
Tabel III-1	Komposisi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Terhadap APBD Kota Pontianak Tahun 2010-2014 .....	148

Tabel III-2	Realisasi Pendapatan Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	149
Tabel III-3	Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	158
Tabel III-4	Komposisi Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2012-2013 .....	161
Tabel III-5	Rata – Rata Pertumbuhan Pembiayaan Dalam APBD Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	163
Tabel III-6	Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2009-31 Desember 2013 (Audited) .....	166
Tabel III-7	Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2009 – 31 Desember 2013 (Audited) .....	170
Tabel III-8	Neraca Ekuitas Dana Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2009 – 31 Desember 2013 (Audited) .....	172
Tabel III-9	Rasio Lancar Neraca Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	173
Tabel III-10	Rasio Quick Neraca Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	174
Tabel III-11	Rasio Hutang Terhadap Total Aset Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	175
Tabel III-12	Rasio Hutang Terhadap Modal Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	176
Tabel III-13	Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 .....	181
Tabel III-14	Prediksi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2015-2019 .....	185
Tabel IV-1	Matrik SWOT Analysis .....	213
Tabel V-1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Setiap Misi .....	220
Tabel VI-1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019 .....	246
Tabel VII-1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah .....	279
Tabel VIII-1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan ...	310
Tabel IX-1	Tabel Penetapan Indikator Makro Pembangunan Daerah .....	339
Tabel IX-2	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	340
Tabel IX-3	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum .....	348
Tabel IX-4	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Daya Saing .....	357

# DAFTAR GAMBAR



	hal
Gambar I-1	Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya di Berbagai Level Pemerintahan ..... 7
Gambar I-2	Bagan Alir Tahapan Pembangunan RPJM Kota Pontianak ..... 8
Gambar II-1	Peta Geografis Kota Pontianak ..... 12
Gambar II-2	Peta Wilayah Kelurahan di Kota Pontianak ..... 14
Gambar II-3	Peta Kualitas Air Tanah Kota Pontianak dan Sekitarnya ..... 17
Gambar II-4	Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya ..... 18
Gambar II-5	Penggunaan Lahan Kota Pontianak Tahun 2012 ..... 22
Gambar II-6	Grafik Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2013 ..... 33
Gambar II-7	Grafik Rata-rata Pertumbuhan Sektor Tahun 2020 -2013 ..... 36
Gambar II-8	Grafik Kontribusi Pertumbuhan Sektor Tahun 2013 ..... 36
Gambar II-9	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Pontianak ..... 43
Gambar II-10	Grafik Distribusi Kasus Kematian Ibu Maternal Menurut Kecamatan Tahun 2013 ..... 46
Gambar II-11	Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun 2009-2013 ..... 94
Gambar II-12	Grafik Prosentase Temuan Pemeriksaan yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi Tahun 2009-2013 ..... 94
Gambar II-13	Grafik Pertumbuhan Realisasi PAD di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .. 96
Gambar II-14	Gedung Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak ..... 100
Gambar II-15	Grafik Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Dalam Ton) Menurut Jenisnya Tahun 2009- 2013 ..... 103
Gambar II-16	Grafik Jumlah Produksi Sayuran Daun dan Sayuran Buah (Dalam Ton) Menurut Jenisnya Tahun 2009 – 2013 ..... 103
Gambar II-17	Grafik Jumlah Produksi Buah - Buah (Dalam Kwintal) Menurut Jenisnya Tahun 2009 – 2013 ..... 104
Gambar II-18	Grafik Luas Areal Penanaman, Jumlah Produksi serta Produktivitas Lidah Buaya Tahun 2009-2013 ..... 105
Gambar II-19	Grafik Potensi Produksi Lidah Buaya Pertahun (Dalam Ton/Ha) ..... 106
Gambar II-20	Grafik Potensi dan Nilai Penjualan Lidah Buaya Tahun 2009-2013 ..... 106



Gambar II-21	Grafik Pemotongan Ternak Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 .....	106
Gambar II-22	Grafik Populasi Ternak Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 .....	107
Gambar II-23	Grafik Produksi Daging di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 .....	108
Gambar II-24	Grafik Produksi Susu (Dalam Liter) di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 ..	108
Gambar II-25	Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Dalam Ton) Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	109
Gambar II-26	Grafik Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenisnya Tahun 2009 – 2013 .....	110
Gambar II-27	Grafik Luas Keramba (dalam m <sup>2</sup> ) Tahun 2009-2013 .....	110
Gambar II-28	Grafik Jumlah Kolam serta Keramba (dalam Unit/Pet) Tahun 2009-2013..	110
Gambar II-29	Grafik Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pontianak Tahun 2009-2013 .....	111
Gambar II-30	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata di Kota Pontianak Tahun 2009-2012 .....	111
Gambar II-31	Frekuensi Bencana Kebakaran (termasuk kebakaran lahan) di Kota Pontianak Tahun 2010-2013 .....	118
Gambar II-32	Diagram Distribusi Prosentase Pengeluaran Per Kapita Penduduk Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2010-2012 .....	121
Gambar II-33	Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak .....	127
Gambar II-34	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Pontianak Tahun 2033 .....	135
Gambar II-35	Peta Rencana Pola Ruang Kota Pontianak 2012-2033 .....	137
Gambar III-1	Komposisi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Terhadap APBD Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013.....	147
Gambar III-2	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	149
Gambar III-3	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	150
Gambar III-4	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 .....	150
Gambar III-5	Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	151
Gambar III-6	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	152
Gambar III-7	Pertumbuhan Hasil Perusahaan Milik Daerah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	152
Gambar III-8	Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	153
Gambar III-9	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	153
Gambar III-10	Komposisi Dana Perimbangan (Milyar) Kota Pontianak Tahun 2013.....	154
Gambar III-11	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	154
Gambar III-12	Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	155



Gambar III-13	Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013 .....	156
Gambar III-14	Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2009-2013 .....	156
Gambar III-15	Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 .....	157
Gambar III-16	Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 .....	159
Gambar III-17	Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dalam Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009 – 2013 .....	159
Gambar III-18	Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 .....	160
Gambar III-19	SKPD dengan Porsi Belanja Pegawai Terbesar Tahun 2012 .....	161
Gambar III-20	Komposisi Objek Belanja Langsung terhadap Belanja langsung Kota Pontianak 2009 -2013 .....	162
Gambar III-21	Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dalam Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2009 -2013 .....	164
Gambar III-22	Pertumbuhan Penerimaan Kembali Pinjaman (Rp. Juta) Tahun 2009-2013	164
Gambar VI-1	Skenario dan Fokus Pembangunan Pembangunan Tahunan Kota Pontianak Periode 2015-2019 .....	245



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peluang daerah untuk mengelola pembangunannya secara mandiri semakin terbuka lebar. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan.

Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014, maka untuk memberikan arah dan landasan pembangunan Kota Pontianak dalam periode ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, perlu disusun kembali RPJM untuk periode 2015-2019. Dokumen RPJM ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak, mengacu kepada RPJM Propinsi Kalimantan Barat dan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyusunan RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dilakukan melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Walikota terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD. Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan di Kota Pontianak. Hasil dari proses ini selanjutnya diselenggarakan dalam *Musrenbang* yang melibatkan para *stakeholder* yang ada di Kota Pontianak.

Secara substansial, RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1. Maksud**

RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas serta indikasi pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak.

### **1.2.2. Tujuan**

RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 disusun dengan tujuan :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan untuk periode tahun 2015-2019, disertai dengan program-program prioritas dengan berpedoman pada RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta mengacu kepada agenda jangka menengah propinsi dan nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (*Renstra*) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*) dalam periode 2015-2019 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (*Renja*) SKPD di Pemerintah Kota Pontianak;

3. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode Tahun Anggaran 2015-2019;
4. Menetapkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
5. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode 2015-2019.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);



28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).

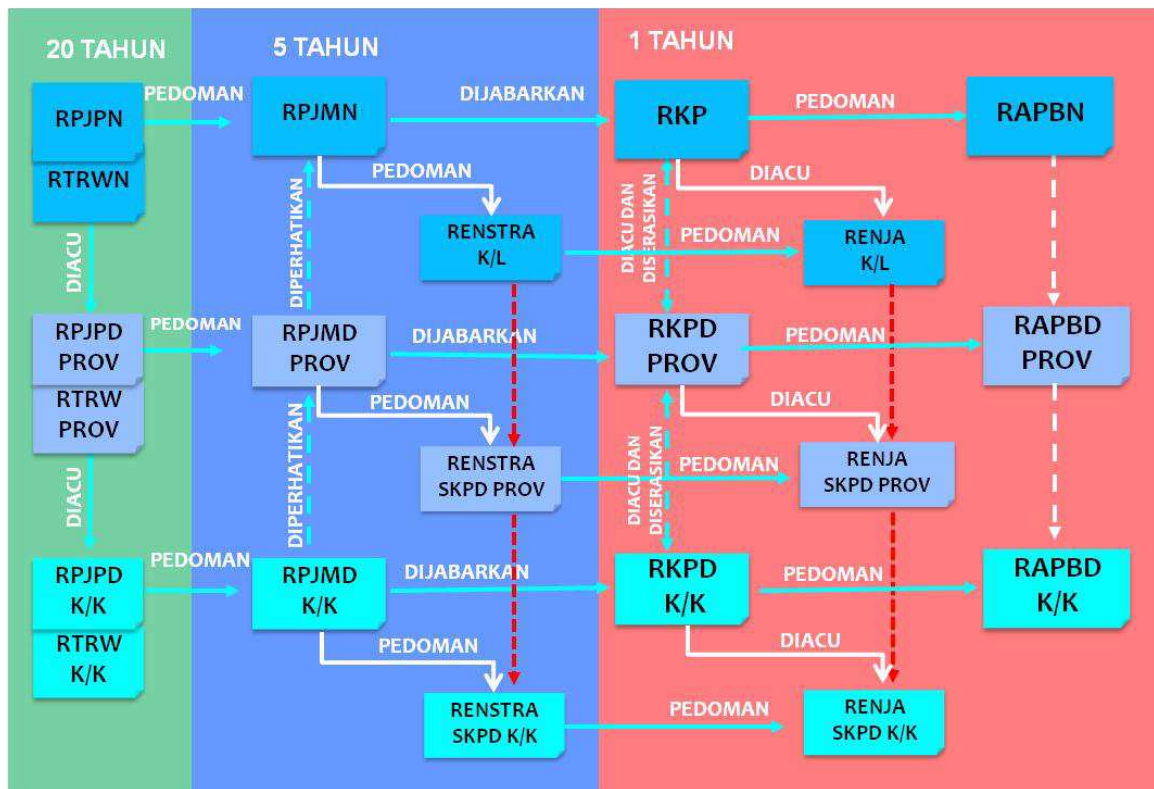
#### **1.4. HUBUNGAN ANTARA RPJM DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan nasional, sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJM ini disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kota Pontianak 2013-2033, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar menetapkan lokasi program sesuai pemanfaatan ruang Kota Pontianak.

RPJM Kota Pontianak diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah periode 2015-2019 yang dalam penyusunannya memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJM. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW. RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, RPJMD Kota Pontianak 2015-2019 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD dalam program strategis dan kegiatan operasional untuk menangani isu strategis dan mencapai visi dan misi untuk jangka waktu lima tahun. RPJM dijabarkan ke dalam RKPd sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar I-1.



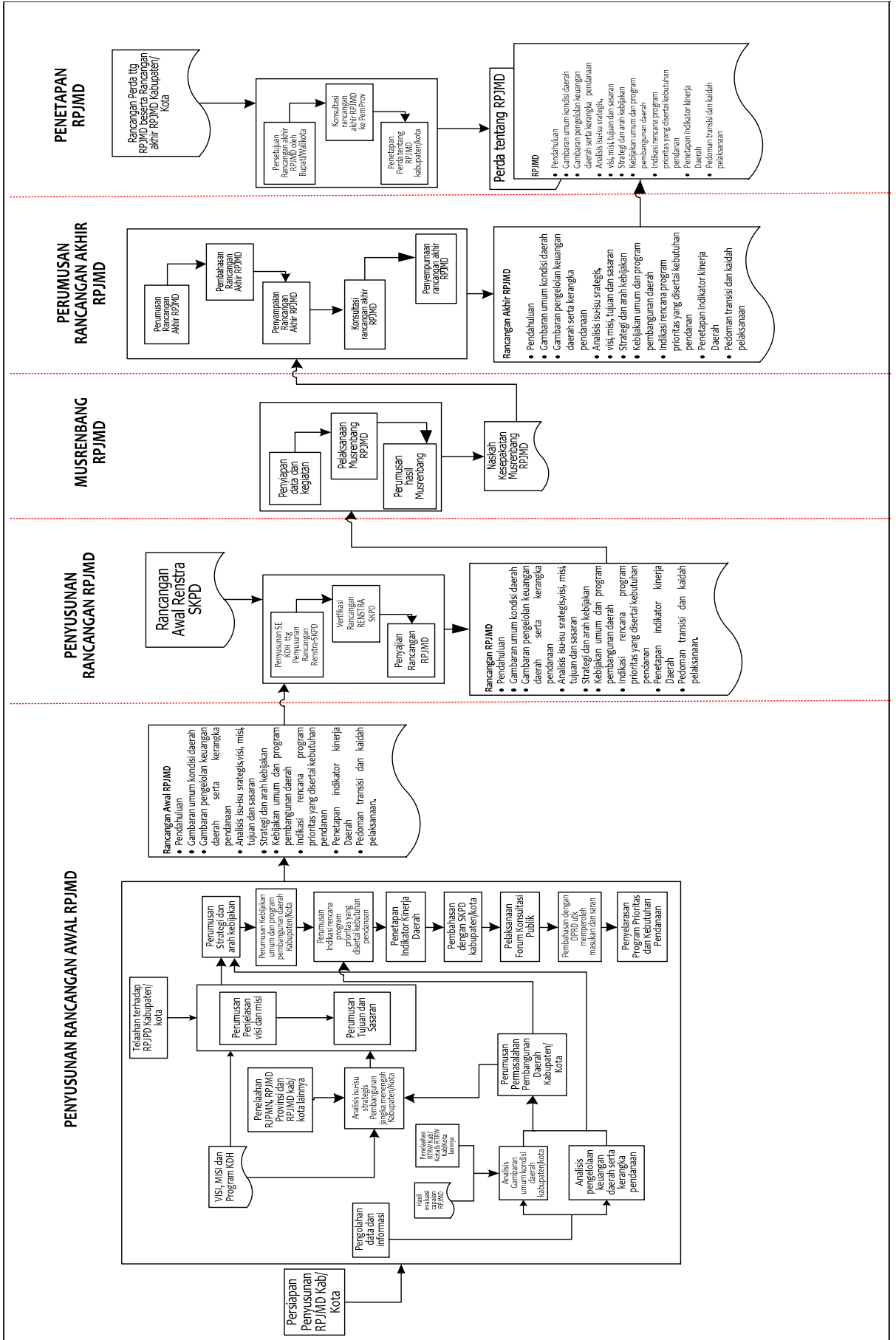
**Gambar I-1**  
**Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya di Berbagai Level Pemerintahan**

Penyusunan RPJM Kota Pontianak 2015-2019 melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dengan pembuatan rancangan awal dengan disertai pelaksanaan berbagai *Focus Group Discussion* untuk mendapatkan masukan terhadap tema-tema strategis yang akan dikembangkan di dalam draf rencana. Setelah tersusun draf rencana, kemudian dilakukan proses konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan kritisi dari masyarakat umum dan stakeholder pembangunan di Kota Pontianak. Hasil dari konsultasi publik ini digunakan sebagai penyempurnaan setelah melakukan dengar pendapat dengan DPRD Kota Pontianak.

Setelah dilakukan perbaikan dengan memasukkan saran dan kritisi dari DPRD dilaksanakanlah musrenbang RPJM untuk mencari kesepakatan dan kemufakatan terhadap substansi RTRW yang telah dibahas tersebut. Berdasarkan hasil Musrenbang maka dilakukan finalisasi terhadap dokumen draf RPJM untuk selanjutnya dilegalisasi menjadi sebuah peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya tahapan penyusunan RPJM Kota Pontianak ini dapat dilihat dalam bagan alir dalam gambar I-2 berikut.



**Gambar 1-2**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Pontianak**



## **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM**

Secara garis besar, substansi RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini terbagi menjadi sepuluh bab, dengan ringkasan isi masing-masing bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum penyusunan RPJM Kota Pontianak, juga menjelaskan hubungan antara RPJM dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya di berbagai level pemerintahan serta sistematika penyajian RPJM.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK**

Bagian ini memaparkan secara detil mengenai kondisi Kota Pontianak dari aspek geografi, demografi dan kesejahteraan penduduk. Selain itu juga digambarkan mengenai kondisi pelayanan umum yang telah dilakukan pemerintah Kota Pontianak diberbagai bidang urusan baik wajib maupun pilihan serta deskripsi tentang aspek daya saing kota Pontianak.

### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan kinerja keuangan Kota Pontianak di masa lalu serta kebijakan pengelolaannya. Di bagian akhir dideskripsikan mengenai analisis kerangka pendanaan untuk periode lima tahun kedepan.

### **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Menggali berbagai fenomena dan permasalahan terkait pembangunan yang berkembang di Kota Pontianak dan sekitarnya dan diikuti pengidentifikasian isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Pontianak

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini menguraikan visi dan nilai pengertian yang terkandung di dalamnya diikuti dengan jabaran misi, tujuan dan sasaran serta matrik yang menggambarkan keterkaitan elemen-elemen tersebut.

### **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan mengenai strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta arah kebijakan yang akan dilakukan dari setiap strategi tersebut yang diuraikan berdasarkan misi.

### **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bagian ini dipaparkan kebijakan umum dan program pembangunan yang didesain berdasarkan strategi serta indikator yang akan menjadi capaian kinerja

### **BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKASI PENDANAAN**

Menjelaskan indikasi program-program prioritas yang disusun menurut bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak disertai dengan indikasi pendanaannya dalam kurun waktu lima tahun

## **BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Untuk memberikan ukuran keberhasilan kinerja pencapaian visi dan misi kepala daerah, dibagian ini ditetapkan target-target capaian yang akan menjadi penilaian tingkat kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan di akhir masa rencana

## **BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

Pada bagian ini dijelaskan pedoman transisi untuk menjembatani RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dengan RPJMD periode sebelumnya dan RPJM yang akan disusun pada periode-periode berikutnya dalam kerangka RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025. Selain itu, juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai bahan acuan dan pedoman implementasi oleh para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Pontianak.

## **BAB XI PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan penutup RPJM Kota Pontianak.





## BAB II

# GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK

**D**ata dan informasi yang disajikan berhubungan dengan gambaran umum kondisi Kota Pontianak, mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing kota Pontianak. Informasi ini untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1 Kondisi Fisik Dasar

##### A. Administrasi Wilayah

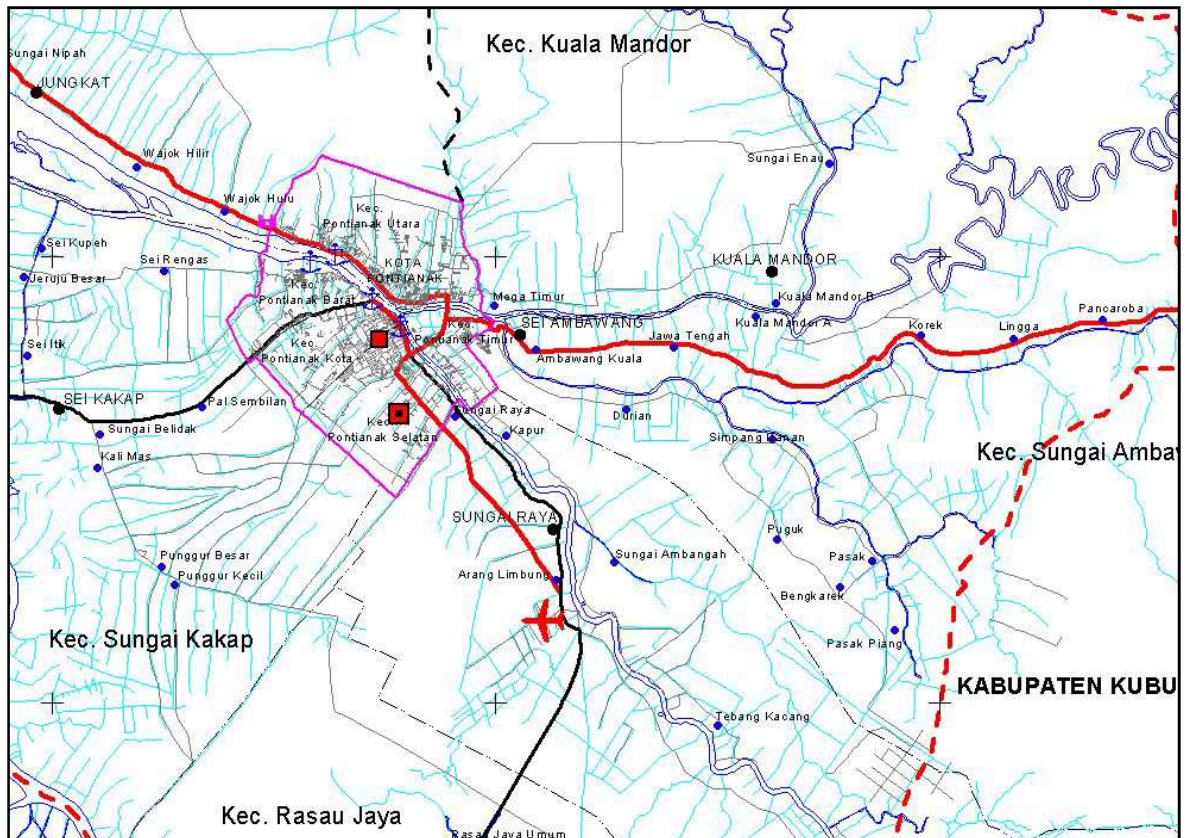
Secara geografi, wilayah Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa pusat pertumbuhan Regional yaitu Batam, Pekanbaru, Natuna, Jakarta, Balikpapan dan Pangkalan Bun. Kota Pontianak letaknya juga tidak jauh dari Negara Asean yang cukup berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Bahkan Kota Pontianak berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia, sehingga menjadi beranda terdepan Negara Indonesia dalam berinteraksi langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan, 534 Rukun warga (RW) dan 2.372 Rukun Tetangga (RT) dengan luas mencapai 107,82 km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Selatan : Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Timur : Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya



- Bagian Barat : Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Utara : Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya



**Gambar II-1**  
**Peta Geografis Kota Pontianak**

Kota Pontianak secara geografis berada pada  $0^{\circ}02'24''$  Lintang Utara sampai dengan  $0^{\circ}05'37''$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}23'01''$  Bujur Timur sampai dengan  $109^{\circ}16'25''$  Bujur Timur. Karena terletak di Lintasan Garis Khatulistiwa, maka Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau kota equator.

Dalam sistem Pulau Kalimantan, Kota Pontianak memiliki interaksi dalam sistem pelayaran Indonesia Bagian Barat dan Negara Tetangga (Malaysia, Singapura dan China). Maka dari itu peran Pelabuhan di Kota Pontianak sangat penting dalam kelancaran sistem angkutan Laut di wilayah Indonesia dan Internasional. Pelabuhan antar pulau Dwikora Kota Pontianak juga didukung dengan pelabuhan antar wilayah Kabupaten di Kalimantan Barat melalui pelabuhan Sheng Hie, pelabuhan ini melayani angkutan Pontianak-Ketapang, Pontianak-Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara), Pontianak-Sukadana (Kabupaten Kayong Utara) dan lain-lain.

**Tabel II-1**  
**Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kelurahan**

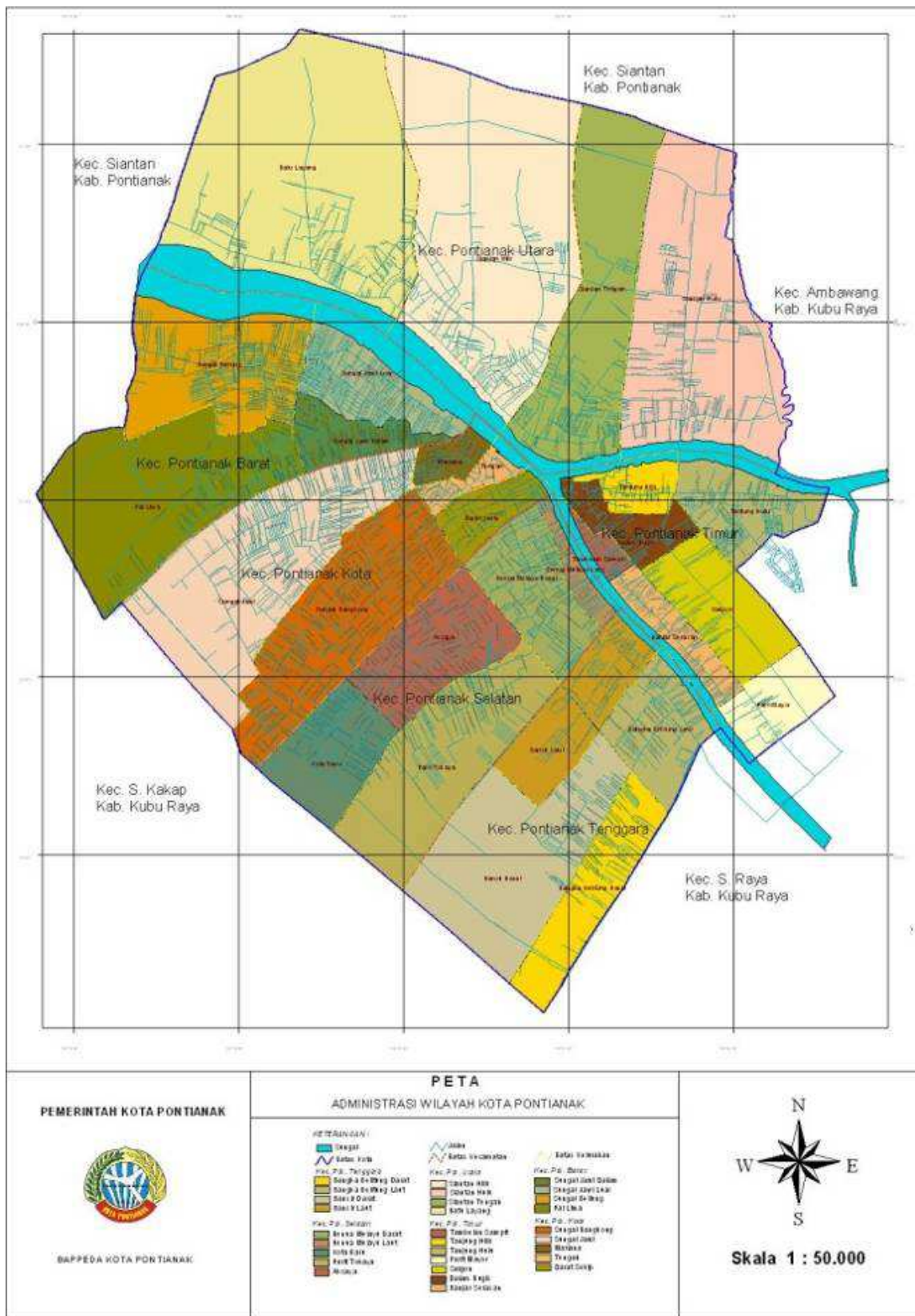
No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	% terhadap Kota Pontianak
1	Pontianak Barat	1 Pal Lima	5.80	5.38
		2 Sungai Jawi Dalam	2.34	2.17
		3 Sungai Jawi Luar	2.95	2.74
		4 Sungai Beliung	2.15	1.99
		<b>Sub Total</b>	<b>13.24</b>	<b>12.28</b>
2	Pontianak Timur	1 Parit Mayor	1.49	1.38
		2 Banjar Serasan	1.20	1.11
		3 Saigon	2.68	2.49
		4 Tanjung Hulu	1.97	1.83
		5 Tanjung Hilir	0.74	0.69
		6 Dalam Bugis	1.29	1.20
		7 Tambelan Sampit	0.41	0.38
<b>Sub Total</b>	<b>9.78</b>	<b>9.07</b>		
3	Pontianak Utara	1 Siantan Hulu	9.20	8.53
		2 Siantan Tengah	13.41	12.44
		3 Siantan Hilir	7.87	7.30
		4 Batu Layang	9.20	8.53
<b>Sub Total</b>	<b>39.68</b>	<b>36.80</b>		
4	Pontianak Selatan	1 Benua Melayu Darat	2.68	2.49
		2 Benua Melayu Laut	0.57	0.53
		3 Parit Tokaya	5.22	4.84
		4 Akcaya	3.19	2.96
		5 Kota Baru	2.56	2.37
<b>Sub Total</b>	<b>14.22</b>	<b>13.19</b>		
5	Pontianak Kota	1 Sungai Bangkong	6.20	5.75
		2 Darat Sekip	1.31	1.21
		3 Tengah	0.95	0.88
		4 Mariana	0.50	0.46
		5 Sungai Jawi	7.02	6.51
<b>Sub Total</b>	<b>15.98</b>	<b>14.82</b>		
6	Pontianak Tenggara	1 Bangka Belitung Darat	2.90	2.69
		2 Bangka Belitung Laut	2.33	2.16
		3 Bansir Darat	6.73	6.24
		4 Bansir Laut	2.96	2.75
<b>Sub Total</b>	<b>14.92</b>	<b>13.84</b>		
<b>Total Kota Pontianak</b>			<b>107.82</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Perwa No. 55 tahun 2008

**Tabel II-2**  
**Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kota Pontianak**

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Pontianak Selatan	5	89	399
Pontianak Tenggara	4	43	169
Pontianak Timur	7	71	331
Pontianak Barat	4	95	506
Pontianak Kota	5	120	494
Pontianak Utara	4	116	473
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>534</b>	<b>2.372</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014



**Gambar II-2**  
**Peta Wilayah Kelurahan di Kota Pontianak**





## B. Topografi

Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15 km dari muara sungai Landak terletak pada dataran rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan kelandaian kurang dari 2%.

Ketinggian air dari permukaan tanah pada saat banjir di wilayah kota rata-rata 50 cm. Pada pengamatan pasang surut melalui alat ukur (pada koordinat 0°00'55" LU dan 109°02'20" BT) diperoleh titik pasang tertinggi sebesar 2,42 meter, titik pasang terendah sebesar 0,07 meter dan muka laut rata-rata maksimal 0,89 meter).

Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter. Sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi salah satu urat nadi transportasi orang dan barang yang menghubungkan Kota Pontianak dengan wilayah pedalaman.

## C. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah.

Jenis batuan yang ada berupa batuan endapan Alluvium dan Litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan Alluvium tersusun dari sedimen, clastic dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sediment, clastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan estuary.



Komposisi tanah di sepanjang sungai merupakan terbentuk dari proses pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dibarengi dengan tropofluvent dan dalam kondisi tersaturasi permanen fluvaquent. Tropofluvent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk, termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan sungai Kapuas di dekatnya.

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada beberapa bagian wilayah terdapat tanah gambut dengan ketebalan mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

#### D. Hidrologi

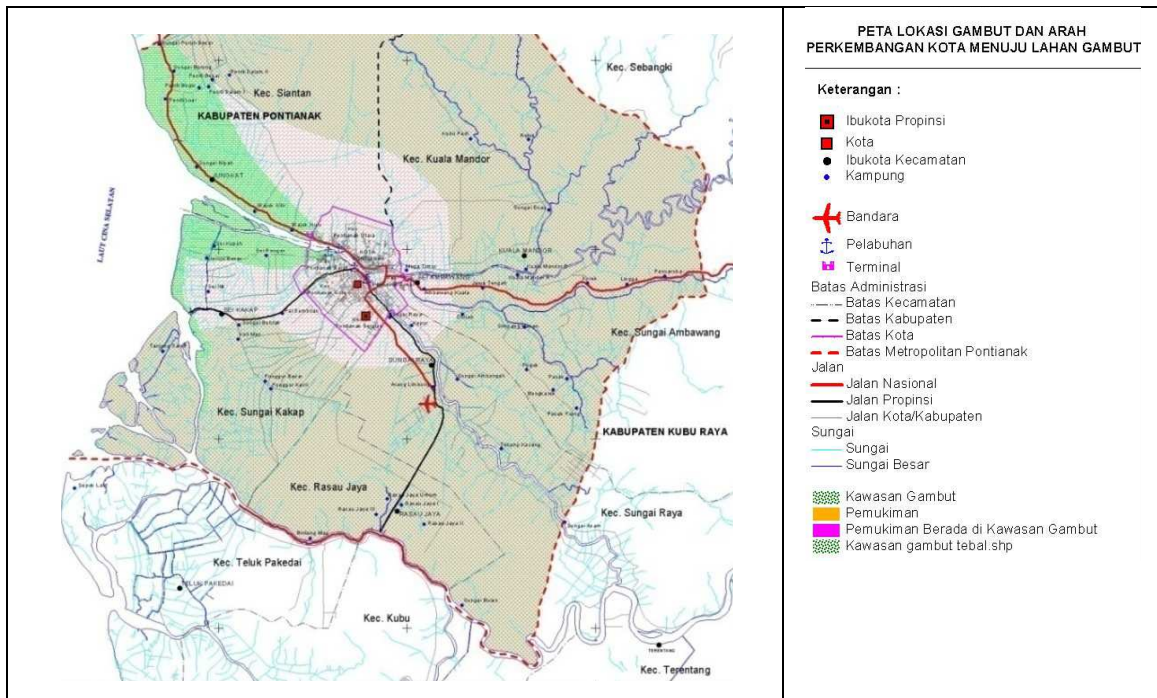
Kota Pontianak terbagi menjadi 3 bagian daratan oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Bagian utara meliputi Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat.

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut sistem jaringan drainase dibentuk oleh 3 sungai besar, saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Pada masing-masing wilayah bagian terbentuk jaringan drainase regional. Mengingat dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 sub sistem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Belitung, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

Subsistem Sungai Belitung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem sungai jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem sungai jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebelah timurnya. Batas antara subsistem sungai jawi dengan sub sistem Parit Tokaya adalah Jl. HA Salim, Jl. GS Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusnya.

**Tabel II-3**  
**Persebaran Sungai dan Parit di Kota Pontianak**

No	Kecamatan	Sungai/Parit	No	Kecamatan	Sungai/Parit
1	Pontianak Selatan	Parit Bansir	4	Pontianak Barat	Sungai Nipah Kuning
		Parit Besar			Parit Sungai Jawi
		Parit Tokaya			Parit Sungai Kapuas
		Sungai Kapuas Kecil			Sungai Kapuas Besar
2	Pontianak Tenggara	Parit Bangka	5	Pontianak Kota	Parit Besar
		Parit Haji Husin			Parit Sungai Jawi
		Sungai Raya			Parit Sungai Bakong
3	Pontianak Timur	Parit Bating	6	Pontianak Utara	Parit Sungai Kakap
		Parit Daeng Lasibak			Sungai Kapuas Besar
		Parit haji Yusuf Karim			Parit Jawa
		Parit Japon			Parit Makmur
		Parit Kongsu			Parit Malaya
		Parit Langgar			Parit Nanas
		Parit Mayor			Parit Pangeran
		Parit Pangeran Pati			Parit Sungai Kunyit
		Parit Semerakai			Parit sungai Putat
		Parit Tembani			Parit Sungai Sahang
		Parit Wan Bakar Kapur			Parit Sungai Selamat
		Sungai Kapuas Besar			Parit Wan Salim
		Sungai Kapuas Kecil			Sungai Kapuas Besar
		Sungai Landak			Sungai Landak



Sumber: Dokumen PMA-Pontianak Metropolitan Area

**Gambar II-3**  
**Peta Kualitas Air Tanah Kota Pontianak dan Sekitarnya**

## E. Klimatologi

Ditinjau dari iklim yang ada, Kota Pontianak mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu di Kota Pontianak mencapai 26,10-27,4°C dengan kelembaban udara 86-92% dan lama penyinaran matahari 34-78%.

Adapun besarnya curah hujan berkisar antara 3000-4000 mm per tahun sedangkan tinggi daratan hanya 0,10-1,5 m diatas permukaan laut, sehingga Kota Pontianak sangat rentan terhadap genangan air apabila terjadi pasang air laut yang disertai oleh hujan.

### 2.1.2 Penggunaan Lahan

#### A. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kota Pontianak 2013-2033, jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Pontianak meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya. Kawasan lindung di Kota Pontianak yang direncanakan adalah:

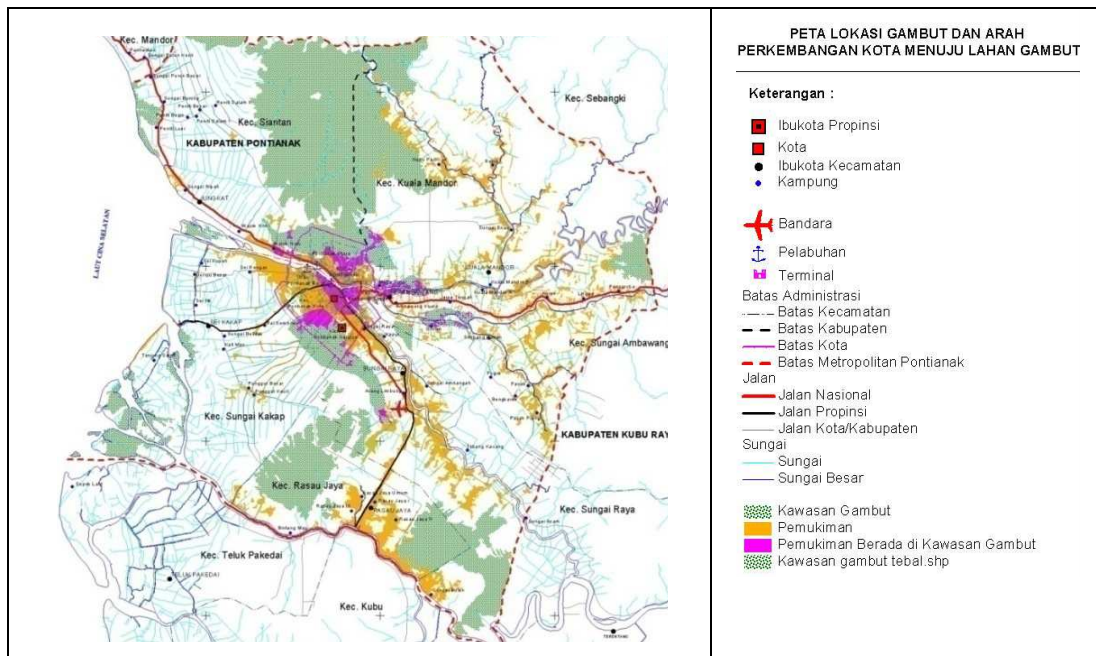
##### 1. Kawasan Lindung Gambut

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan bergambut. Yang dimaksud dengan kawasan bergambut adalah Kawasan yang unsur pembentuk

tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Kriteria kawasan bergambut adalah mempunyai kedalaman gambut lebih dari 4 meter penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990.

Adapun lokasi keberadaan gambut di Kota Pontianak sebagian kecil terdapat di Kecamatan Pontianak Tenggara dan sebagian besar terdapat di Kecamatan Pontianak Utara dengan luas keseluruhan lebih kurang sebesar 1.607 Ha atau sekitar 14,9 Persen dari luas kota secara keseluruhan. Kawasan bergambut dengan ketebalan 4 meter atau lebih merupakan kawasan lindung yang terkategori sebagai perlindungan kawasan bawahannya. Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
- Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.



Sumber: Dokumen PMA-Pontianak Metropolitan Area

**Gambar II-4**  
**Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya**

## 2. Kawasan Rawan Banjir dan Genangan

Seperti yang telah disebutkan diatas letak geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas serta topografinya yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0 - 2 %. Oleh karenanya terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi tergenang air antara lain:

- Parit Tokaya dan Sekitarnya : Kawasan Masjid Raya Mujahidin, Jalan KS. Tubun, Sutoyo, Suprpto dan Ahmad Yani
- Sungai Bangkong : jl. Aliyang dan Sekitarnya dan jalan Putri Daranante





- Wilayah Parit Bentasan Sekitar Sungai Malaya
- Wilayah sekitar Jeruju sampai Jl. Karet
- Wilayah Batu Layang
- Sebagian Besar wilayah Pontianak Timur yaitu Sekitar jalan Panglima Aim

### 3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air. Sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990, kondisi dan karakteristik permukiman perkotaan secara umum di Pontianak, maka kriteria yang dipakai untuk menentukan batas kawasan sempadan sungai ini adalah kawasan sepanjang sungai sekurang-kurangnya 15 meter di tepi kanan-kiri sungai besar dan 10 meter di tepi kanan-kiri sungai kecil dihitung dari titik pasang terendah sungai tersebut.

Kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak menurut kriteria di atas adalah kawasan sepanjang tepi kanan-kiri Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Malaya dan parit-parit primer seperti Sungai Nipah Kuning, Sungai Jawi, Sungai Raya dan lain-lain. Karena sudah terdapat banyak permukiman penduduk yang termasuk pada kawasan sempadan sungai, maka kawasan terbangun pada sempadan sungai dan parit primer direkomendasikan sebagai kawasan dengan intensitas kegiatan rendah dengan pembangunan terbatas. Sedangkan untuk lahan kosong yang masih ada pada kawasan sempadan sungai diarahkan sebagai jalur hijau yang bebas dari pembangunan kecuali untuk pembangunan yang mendukung fungsi perlindungan setempat.

### 4. Kawasan Perlindungan Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan maksimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, maka Benda Cagar Budaya di Kota Pontianak ditetapkan sebagai berikut:

- Keraton Kadriah Pontianak (238 tahun)
- Masjid Jami' Sultan Sy. Abdurrachman (238 th)
- Makam Kesultanan Pontianak Batulayang (200 th)
- Tugu Khatulistiwa (81 th)
- Masjid Baitannur (207 th)
- SDN 14 (107 th)
- Vihara Bodhisatva (180 th)
- Kantor Pos (72 th)
- Lapangan Keboen Sayoek (54 th)
- Rumah Adat Betang/Panjang
- Sumur Bor (79 th)
- Pelabuhan Seng Hie
- Kantor Bappeda (179 th)

## 5. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Secara Fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami dapat berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.

### Ruang Terbuka Hijau Publik

Luas total Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Pontianak adalah 1.445 Ha atau 13,41% dari total luas wilayah Kota Pontianak berupa taman kota, jalur hijau pada median dan tepi jalan, lapangan olah raga, pemakaman umum, hutan kota serta agrowisata/Kawasan Sentra Agro Bisnis.

**Tabel II-4**  
**Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Pontianak**

No	Jenis RTH	Luas Wilayah Kota Pontianak (ha)	Luas RTH (ha)	Prosentase (%)
1	Taman Kota	10.782	408,01	3,78
2	Jalur Hijau		115,45	1,07
3	Lapangan Olah Raga		62,69	0,58
4	Pemukaman Umum		44,56	0,41
5	Hutan Kota		10,95	0,10
6	Agrowisata/KSA		803,72	7,45
<b>Jumlah</b>		<b>10.782</b>	<b>1.445,38</b>	<b>13,41</b>

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2013

## RTH Privat

Ruang Terbuka Hijau Privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dan taman atap bangunan, diatur selalui beberapa strategi pengaturan KDH dalam RTH privat dapat dilihat pada **Tabel II-5** dan pengaturan RTH Privat dalam pekarangan dapat dilihat pada **Tabel II-6**berikut :

**Tabel II-5**  
**Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Di Kota Pontianak**

No	Jenis RTH	Luas Wilayah Kota Pontianak (ha)	Luas RTH (ha)	Prosentase (%)
1	Perumahan/Permukiman	10.782	162,44	1,51
<b>Jumlah</b>		<b>10.782</b>	<b>162,44</b>	<b>1,51</b>

Sumber : Masterplan RTH Kota Pontianak Tahun 2013-2018

**Tabel II-6**  
**Target Pencapaian RTH Privat di Kota Pontianak**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Proyeksi	KDB	KDH	Alokasi RTH Privat
1	Permukiman	4.358,000			
	a. Permukiman Kepadatan Tinggi	458,038	70 %	30 %	40,55
	b. Permukiman Kepadatan Sedang	1.374,114	60 %	40 %	216,19
	c. Permukiman Kepadatan Rendah	2.525,848	50 %	40 %	505,17
2	Perkantoran/Pelayanan Kota	129,63	60 %	40 %	20,54
3	Perkantoran/Pelayanan Kota	34,71	50 %	40 %	6,65
4	Fasilitas Kesehatan	357,50	60 %	40 %	48,37
5	Fasilitas Kesenian/kebudayaan dan Rekreasi	67,88	50 %	40 %	14,82
6	Militer	17,04	60 %	40 %	0,75
7	Perdagangan dan Jasa	714,64	80 %	10 %	14,07
8	Industri dan Pergudangan	257,74	50 %	20 %	26,41
9	Pembangkit Listrik	6,05	50 %	30 %	0,91
10	Prasarana Transportasi dan Fasilitas Perhubungan	15,09	50%	30 %	12,42
13	Lahan Cadangan/Pertanian dan lain-lain	21,55	70 %	40 %	2,59
<b>Jumlah</b>					<b>944,76</b>

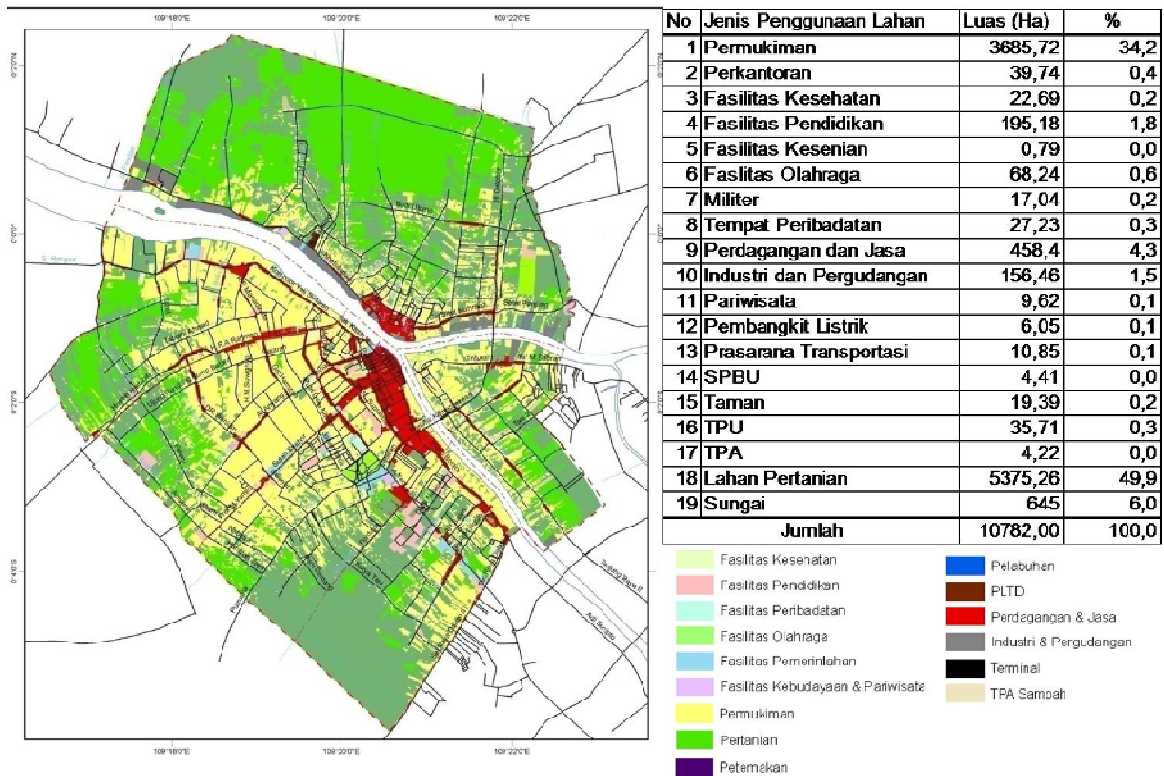
Sumber : Masterplan RTH Kota Pontianak Tahun 2013-2018





## B. Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan budidaya merupakan salah satu implementasi dari perhatian Pemerintah Kota Pontianak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota dengan tetap memperhatikan Keppres No. 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41 Tahun 2007 Tentang pedoman kriteria teknis Kawasan Budidaya. Untuk konteks Kota Pontianak, rencana pengembangan kawasan budidaya ini diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota. Kawasan budidaya tersebut terdiri dari perumahan, pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan pergudangan, pariwisata dan rekreasi, dan militer. Secara garis besar kondisi penggunaan lahan Kota Potianak (tahun 2012) dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033

**Gambar II-5**  
**Penggunaan Lahan Kota Pontianak Tahun 2012**

Dilihat dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya didominasi untuk peruntukkan lahan pertanian (kebun, tegalan da lahan kososng) sebesar 49,9% dari total luas wilayah kota Potianak, diikuti untuk perutukkan perumahan dan permukiman yang mencapai 34,2%. Sisanya 15,9% terbagi untuk peruntukkan fasilitas perkantora, perdaganga dan jasa, kesehata, pendidika, kesenian dan olahraga, rumah ibadah, perdagangan dan jasa, industry dan pergudanga, dan sarana dan prasarana perkotaan.

### 2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Pontianak memiliki potensi alam berupa 2 buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yang melintasi Kota Pontianak. Disisi lain Kota Pontianak juga berada pada posisi strategis yaitu dilalui oleh garis equator dengan segala peristiwa yang mempunyai daya tarik alami. Potensi ini membawa karakteristik tersendiri, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai Kota Air dan kota Khatulistiwa yang dapat dikembangkan.

#### A. Wilayah Sungai dan Parit

Kota Pontianak dilalui sungai terpanjang di Indonesia (1.143 km), yaitu Sungai Kapuas. Dengan panjangnya, sungai ini menghubungkan setiap kabupaten yang dilintasinya. Sungai ini menjadi urat nadi masyarakat setempat yang mana airnya biasanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti, untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Lintasannya yang panjang dan menghubungkan beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Barat, digunakan sebagai jalur transportasi air. Tidak heran hampir setiap saat, kapal bermotor, sampan, kapal tongkang pengangkut kayu dan bahan bakar, kapal nelayan, kapal angkut penumpang bahkan kapal muatan antar provinsi melintasi sungai ini. Sungai ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 300 jenis ikan dan berbagai kekayaan hayati yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

#### B. Kawasan Wisata

Sebagai kota yang didiami berbagai suku bangsa, serta merupakan pusat kegiatan pemerintahan, aktifitas ekonomi serta sosial budaya, kota Pontianak memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang tetap terjaga kelangsungannya. Hal tersebut dapat tercermin dari berbagai kegiatan budaya yang dilakukan masyarakatnya dan kemudian dikemas sedemikian buka menjadi pagelaran budaya yang diadakan secara berkala di Kota Pontianak, diantaranya sebagai berikut :

1. Peristiwa Seni dan Budaya yang setiap tahun diadakan di Kota Pontianak beriring dengan Hari **Ulang Tahun Pemerintah Kota Pontianak** jatuh pada tanggal 23 Oktober kemudian Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada acara/event ini ditampilkan tari-tarian, permainan rakyat, kerajinan rakyat yang berkembang di daerah Kalimantan Barat. Event-event tersebut diatas merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi daya tarik wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Kota Pontianak.
2. **Festival Budaya Bumi Khatulistiwa** : Diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun. Festival ini dipusatkan di Kota Pontianak dengan mengundang daerah-daerah lain di Pulau Kalimantan serta daerah-daerah di Pulau Sumatera diselenggarakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Maret pada tahun penyelenggaraannya. Dan pada festival ini dirangkaikan dengan peristiwa alam yang terjadi di Kota Pontianak yaitu kulminasi matahari.
3. **Gawai Dayak** : Diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei. Event ini diselenggarakan untuk menumbuh kembangkan budaya suku Dayak
4. yang masih berkembang seperti budaya seni, budaya sosial sebagai penduduk asli Kalimantan Barat.



5. **Naik Dango** : Naik Dango merupakan acara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat etnis Dayak yang biasa diselenggarakan pada Rumah Betang.
6. **Meriam Karbit/Keriang Bandong**: Festival Meriam Karbit biasanya diselenggarakan pada bulan Puasa (Ramadhan) menjelang Hari Raya Lebaran (Idul Fitri) dimana masyarakat yang berada di sisi Sungai Kapuas saling berhadapan dan membunyikan meriam karbit yang saling bersahutan. Perayaan ini diselenggarakan oleh masyarakat dengan memasang lampu minyak tanah dan lampu berwarna warni sehingga kelihatan menarik.
7. **Kulminasi Matahari di Tugu Khatulistiwa** yang terjadi 2 kali dalam setahun yaitu bulan maret dan September.
8. **Cap Go Meh/Barongsai**: Cap Go Meh adalah perayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat etnis China (Tionghoa) dengan menampilkan barongsai/naga. Penyelenggaraan jatuh pada 15 hari setelah Tahun Baru China (Tionghoa).

Disisi lain, jika diitinjau dari latar belakang sejarahnya, perkembangan Kota Pontianak tidak terlepas dari cikal bakalnya dari sebuah kota kerajaan yang meninggalkan berbagai peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan sebagai identitas lokal dalam bentuk konservasi dan preservasi bangunan bersejarah dan lingkungannya maupun menuangkannya dalam desain bangunan-bangunan baru penunjang kawasan. Selain itu sejalan dengan perkembangan fisik Kota Pontianak, terdapat berbagai tempat yang dikembangkan sebagai kawasan rekreasi yang menarik untuk dikunjungi.

Berikut ini beberapa situs budaya peninggalan sejarah dan kawasan yang dikembangkan menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak adalah sebagai berikut.



**Tabel II-7**  
**Potensi Wisata di Kota Pontianak**

Gambar	Uraian
 <p align="center"><b>Makam Batu Layang</b></p>	<p>Makam batu layang atau biasa di sebut dengan Taman Makam Kerajaan Pontianak adalah tempat dimakamkannya Raja pertama (Sultan Syarif Abdurrahman Alqadrie) hingga raja terakhir (Sultan Hamid II) serta beberapa keluarga raja. Tempat ini biasanya ramai di kunjungi, khususnya pada hari besar islam. Taman Makam ini terletak kurang lebih 2 Km dari Tugu Khatulistiwa yang dapat dikunjungi dengan menggunakan transportasi darat maupun transportasi air (sampan)</p>
 <p align="center"><b>Alun-alun Kapuas</b></p>	<p>Taman rekreasi ini terletak di jalan Rahadi Usman, tepatnya di depan kantor Walikota Pontianak. Taman ini diberi nama Taman Alun Kapuas menawarkan pemandangan unik tepian sungai Kapuas dengan dilengkapi taman dan air mancur menari yang tertata dengan baik. Taman ini merupakan alternatif tempat rekreasi keluarga yang murah, nyaman dan indah bagi keluarga.</p>
 <p align="center"><b>Tugu Khatulistiwa</b></p>	<p>Sekitar lima kilometer sebelah utara dari pusat Kota Pontianak, dapat ditemukan sebuah tugu khatulistiwa sebagai penanda garis 0<sup>0</sup> equator yang membagi bumi menjadi dua bagian. Kejadian alam yang unik dimana posisi titik perpotongan antara pusat matahari dengan garis Khatulistiwa disebut kulminasi, terjadi pada setiap tanggal 21-23 Maret dan September menjelang tengah hari. Puncak peristiwa kulminasi matahari ini dapat disaksikan hanya sekitar 5-10 menit. Sembari menunggu peristiwa kulminasi, di kawasan tugu diadakan serangkaian acara kesenian tradisional</p>
 <p align="center"><b>Keraton Kadriah</b></p>	<p>Keraton Kadriah Pontianak adalah pusat Pemerintahan Pontianak tempo dulu yang didirikan oleh Sultan Syarief Abdurrahman Alqadrie pada tahun 1771. Keraton ini memberikan daya tarik khusus bagi para pengunjung dengan banyaknya artefak atau benda-benda bersejarah sebagai saksi bisu sejarah perkembangan Kota Pontianak. Keraton Kadriah yang berada di daerah kampung dalam bugis, kecamatan Pontianak Timur ini, dapat di capai dalam waktu kurang lebih 15 menit dari pusat Kota Pontianak.</p>

Gambar	Uraian
 <p data-bbox="432 656 571 687"><b>Masjid Jami</b></p>	<p data-bbox="751 324 1414 645">Masjid Jami' adalah salah satu masjid besar peninggalan masa kesultanan Pontianak. Lokasinya berada di pinggir sungai yang indah dan masih asli, walaupun struktur dari masjid Jami' tersebut telah mengalami rekonstruksi. Setiap jum'at siang, kayu belian yang masih ada di dalam masjid turut bergema oleh suara adzan. Selama hari raya islam, masjid ini menjadi pusat beribadah bagi masyarakat dan warga sekitar yang memperingatinya. Masjid Jami' dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari pelabuhan Seng Hie atau dengan mobil melewati jembatan kapuas.</p>
 <p data-bbox="416 981 587 1012"><b>Sungai Kapuas</b></p>	<p data-bbox="751 730 1414 1021">Membelah Kota Pontianak menjadi 3 daratan, Sungai Kapuas sejak dahulu kala sudah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kota Pontianak. Tak hanya berperan dalam aspek ekonomi, juga berperan dalam membentuk budaya dan adat kebiasaan masyarakat Pontianak. Letaknya yang membelah tepat di tengah kota dan terhubung ke beberapa titik obyek wisata di sepanjang tepian sungai, merupakan suatu anugerah yang menyimpan potensi wisata yang masih berpeluang besar untuk dieksplorasi lebih jauh.</p>
 <p data-bbox="408 1456 595 1487"><b>Kawasan Beting</b></p>	<p data-bbox="751 1113 1414 1464">Lekat dengan sejarah pembentukan Kota Pontianak, kawasan Beting menyimpan berbagai romansa sejarah yang menggambarkan perkembangan kota Pontianak. Kondisi geografisnya yang terletak di kawasan pasang surut air sungai membentuk sebuah kawasan permukiman yang dilengkapi kanal-kanal dan gertak-gertak yang unik. Beting adalah Venesia-nya Pontianak, menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai sebuah kawasan wisata. Perlu komitmen dan usaha bersama-sama untuk mewujudkannya sebagai sebuah kawasan wisata yang idela, mengingat stigma negatif yang melekat di kawasan tersebut.</p>

#### 2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kota Pontianak yang berada di Pulau Kalimantan tidak dilalui dengan jalur gunung berapi aktif seperti kota-kota di hampir sebagian besar pulau lainnya. Tetapi karena kondisi permukaan lahan yang rendah serta dilalui oleh beberapa sungai besar, Kota Pontianak sangat dipengaruhi dengan arus pasang surut air sungai. Maka tidak jarang Kota Pontianak sering tergenang saat intensitas hujan meningkat apalagi jika bersamaan dengan pasang air sungai. Peristiwa alam lainnya yang pernah terjadi adalah Angin Puting Beliung dan Kabut Asap akibat kebakaran hutan.



## A. Banjir

Secara geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas serta topografinya yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0 - 2 %. Terdapat beberapa lokasi dengan potensi genangan yang cukup luas antara lain:

- Parit Tokaya dan Sekitarnya : Kawasan Masjid Raya Mujahidin, Jalan KS. Tubun, Sutoyo, Suprpto dan Ahmad Yani
- Sungai Bangkong : jl. Aliyang dan Sekitarnya dan jalan Putri Daranante
- Wilayah Parit Bentasan Sekitar Sungai Malaya
- Wilayah sekitar Jeruju sampai Jl. Karet
- Wilayah Batu Layang
- Sebagian Besar wilayah Pontianak Timur yaitu Sekitar jalan Panglima Aim
- Wilayah sekitar Parit H. Husin I dan Sungai Raya Dalam

Wilayah genangan yang terdapat di Kota Pontianak sebagian besar merupakan genangan sesaat yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi. Selain itu luasnya wilayah genangan di Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Banyaknya terjadi penyempitan saluran primer
- Keberadaan jembatan di beberapa saluran primer
- Bangunan di sepanjang bantaran sungai
- Terbatasnya ketersediaan daerah resapan
- Prilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke Sungai
- Kurangnya jalan paralel dengan parit dan Sungai
- Penyempitan jembatan di jalan Ahmad Yani, Tanjungpura dan Imam Bonjol
- Banyaknya bangunan di atas parit
- Kondisi permukaan wilayah kota berada pada permukaan yang rendah, dan jika permukaan air pasang tertingginya minus 40 sentimeter

Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah membongkar bangunan di atas parit, normalisasi parit, pengerukan parit, peninggian jalan, pengendalian perkembangan kawasan terbangun, terutama pada kawasan yang berfungsi sebagai resapan dan pengendalian kepadatan bangunan dan ketersediaan lahan resapan pada masing-masing kavling dengan aturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) melalui mekanisme perijinan bangunan (IMB).



## **B. Kebakaran dan Kabut Asap**

Kota Pontianak yang terletak di wilayah Equator dengan karakteristik temperature yang tinggi khususnya di musim-musim kemarau sering mengalami peristiwa cuaca yang berhubungan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang berlangsung pada tahun 2006 merupakan salah satu dampak kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Kebakaran hutan menghasilkan asap tebal yang bertahan lama di atmosfer. Visibility akan berkurang bahkan hingga kurang dari 100 m. Selain itu, polusi asap juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan gangguan terhadap sektor perhubungan.

## **C. Angin Puting Beliung**

Memasuki musim Panca Roba (Musim transisi dari musim kemarau ke musim hujan) Pontianak rentan terhadap Angin Puting Beliung. Itu disebabkan Pontianak merupakan dataran rendah dan daerah terbuka. Badai Angin kekuatannya dapat menghancurkan beberapa bangunan semi permanen di beberapa bagian wilayah kota. Kota Pontianak beberapa kali dilanda badai sesaat yang mampu memporak-porandakan sejumlah kawasan di Kota ini. Transportasi di beberapa kawasan sempat lumpuh, beberapa rumah warga atapnya melayang, kios-kios berantakan, warga dibuat ketakutan mendengar petir yang bersahut-sahutan. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Kota Pontianak.

### **2.1.5 Kawasan Rawan Sosial**

Kerawanan sosial adalah struktur sosial dari suatu komunitas atau masyarakat terkena *shock* atau *stress* yang biasanya disebabkan oleh perselisihan ekonomi, perubahan lingkungan, kebijakan pemerintah atau bahkan disebabkan oleh kejadian internal dan kekuatan yang dihasilkan dari kombinasi beberapa faktor.

Kota Pontianak memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan heterogen. Hal ini dikarenakan Pontianak memiliki daya tarik dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain, sehingga tingkat urbanisasi di Kota Pontianak cukup tinggi. Tingginya urbanisasi dan heterogenitas tersebut menciptakan kontribusi positif berupa terlaksananya pembangunan dan aktivitas perekonomian yang berkembang pesat. Namun demikian, dampak negatif dari kondisi ini adalah munculnya berbagai potensi kerawanan maupun konflik sosial Kota Pontianak. Kerawanan dan konflik sosial tersebut dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis masyarakat (dendam, benci, anti pati, dan sebagainya, sehingga pada gilirannya menghambat pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan *Environmental Vulnerability Index (EVI, 2003)*, dan Badan Pusat Statistik, Potensi Kerawanan Sosial dapat dipetakan dengan cara melihat beberapa indikator yaitu: Rawan Kemiskinan, Rawan Lingkungan dan Kesehatan, Rawan Prasarana Fisik, Rawan Modal Sosial, dan Rawan Perekonomian. Rawan kemiskinan dapat dipetakan dengan melihat jumlah rumah tangga miskin yang berada dalam suatu kawasan. Indikator rawan lingkungan dan kesehatan dilihat dari

keberadaan sanitasi lingkungan, kebersihan kawasan dan kejadian penyakit menular, sedangkan indikator prasarana fisik dapat dipetakan dengan melihat kondisi kekumuhan, ketersediaan prasarana fisik perkotaan, daerah genangan dan kepadatan penduduk. Indikator modal sosial dilihat dengan melihat jumlah dan aktivitas tempat ibadah, aktivitas masyarakat (arisan, kerja bakti, perkumpulan) dan pembinaan sosial. Indikator keamanan dan ketertiban dilihat dari kejadian tindak pidana, stigma umum masyarakat, petugas keamanan dan sistem keamanan lingkungan. Indikator perekonomian dilihat dari keberadaan sarana keuangan (bank, pegadaian), jasa, keberadaan industri besar dan menengah, serta pendapatan perkapita penduduk.

Dengan melihat indikator-indikator tersebut beberapa kawasan di Kota Pontianak dapat digolongkan menjadi kawasan rawan sosial adalah :

1. Kawasan Beting yang meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Hilir, Dalam Bugis dan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur.
2. Kawasan tertentu di wilayah Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara.
3. Kawasan tertentu di Wilayah Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat.

Kondisi tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui program multi sektoral yang dilaksanakan secara terpadu baik dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, perkuatan modal sosial maupun penguatan perekonomian. Diharapkan kedepan stigma negatif yang melekat pada beberapa kawasan di Kota Pontianak dapat dihilangkan.

### 2.1.6 Demografi

Jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 1990 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 431.328 jiwa, dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2000 meningkat menjadi 464.534 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 0,7 %, sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 565.856 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,96% sedangkan sampai dengan tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah penduduk mencapai 586.243 jiwa. Dari jumlah penduduk keseluruhan tersebut dalam periode 5 (lima) tahun antara tahun 2009-2013 pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak mencapai 1,77 %, dimana pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,68 % dan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 1,77 %.

**Tabel. II-8**  
**Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	%	Perempuan	%
2009	543.842	272.524	50,11%	271.317	49,89%
2010	554.764	277.971	50,11%	276.793	49,89%
2011	565.856	283.529	50,11%	282.327	49,89%
2012	575.843	288.533	50,11%	287.310	49,89%
2013	586.243	293.475	50,06%	292.498	49,89%

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

Dari sisi sex ratio, jumlah penduduk di Kota Pontianak didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau sebesar 1,004 %, sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, maka Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 130.078 jiwa dan wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah yang paling sedikit dalam jumlah penduduk ini lebih dikarenakan wilayah kecamatan ini baru terbentuk tahun 2007 yaitu hasil dari pemekaran kecamatan Pontianak Selatan.

**Tabel. II-9**  
**Jumlah Penduduk di Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2013**

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	L	P	TOTAL	
Pontianak Selatan	43.070	43.443	86.513	0,991
Pontianak Tenggara	23.209	24.218	47.427	0,958
Pontianak Timur	43.842	43.253	87.095	1,014
Pontianak Barat	65.245	64.833	130.078	1,006
Pontianak Kota	57.921	58.178	116.099	0,996
Pontianak Utara	60.458	58.573	119.031	1,032
<b>Kota Pontianak</b>	<b>293.745</b>	<b>292.498</b>	<b>586.243</b>	<b>1,004</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-10**  
**Laju Pertambahan Penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)				Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)	
	1990	2000	2010	2013	1990-2000	2000-2010
Pontianak Selatan	80,498	78,232	81,821	86.513	-0.3	0.4
Pontianak Tenggara	7,674	35,812	44,856	47.427	2.6	2.3
Pontianak Timur	48,758	60,895	82,370	87.095	2.2	3.1
Pontianak Barat	106,259	121,594	123,029	130.078	1.4	0.1
Pontianak Kota	80,893	72,682	110,111	116.099	-1.1	4.2
Pontianak Utara	87,246	95,319	112,577	119.031	0.9	1.7
<b>Kota Pontianak</b>	<b>431,328</b>	<b>464,534</b>	<b>554,764</b>	<b>586.243</b>	<b>0.7</b>	<b>1.8</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Pontianak tahun 2013 sekitar 5.438 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 kepadatan penduduk 5.341 jiwa/Km<sup>2</sup> maka terdapat peningkatan sebesar 1,79%. Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Pontianak Timur yaitu sebesar 9.920 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan total penduduk keseluruhan mencapai 87.095 jiwa atau 14,86 % dari total penduduk Kota Pontianak. Sedangkan kecamatan yang kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu 3.198 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan total penduduk sebesar 119.031 jiwa (20,30%).



**Tabel. II-11**  
**Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2013**

No	Kecamatan	Luas Km2	Jumlah Penduduk	%	Kepadatan Jiwa/Km
1	Pontianak Selatan	14,54	86.513	14,76 %	5.714
2	Pontianak Timur	8,78	87.095	14,86 %	9.920
3	Pontianak Barat	16,94	130.078	22,19 %	7.898
4	Pontianak Utara	37,22	119.031	20,30 %	3.198
5	Pontianak Kota	15,51	116.099	19,80 %	7.265
6	Pontianak Tenggara	14,22	47.427	8,09 %	3.335
<b>Kota Pontianak</b>		<b>107,82</b>	<b>586.243</b>	<b>100%</b>	<b>5.438</b>
<b>Tahun 2013</b>		<b>107,82</b>	<b>575.843</b>	<b>100%</b>	<b>5.341</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

Ket : Jumlah Penduduk sampai Bulan Maret Tahun 2013

Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk di Kota Pontianak pada tahun 2012 terbesar berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu mencapai 59.551 jiwa, hal ini mengartikan bahwa sebagian besar penduduk di Kota Pontianak didominasi pada kelompok umur produktif atau usia muda. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah penduduk yang berumur 75 tahun ke atas dengan jumlah 6.037 jiwa.

**Tabel. II-12**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009 – 2013**

Kelompok Umur	2009	2010	2011	2012	2013
0-4	52,249	51,685	52,628	51,185	54,439
5-9	55,264	53,990	54,972	52,702	56,866
10-14	49,804	50,688	51,546	52,305	53,420
15-19	51,415	53,845	55,629	57,387	58,092
20-24	57,332	58,129	59,866	59,551	62,148
25-29	54,427	53,515	53,491	52,576	54,660
30-34	45,009	46,325	47,539	48,782	49,403
35-39	40,352	41,869	42,802	44,726	44,453
40-44	35,362	36,606	37,213	39,040	38,450
45-49	29,300	30,602	31,464	33,155	32,688
50-54	23,751	24,734	24,719	26,694	25,263
55-59	16,307	17,962	18,856	20,802	19,896
60-64	12,967	13,531	13,605	14,666	13,976
65-69	9,191	9,416	9,411	10,025	9,630
70-74	5,392	6,001	7,058	7,061	7,759
75+	5,720	5,866	5,057	6,037	5,100
<b>Jumlah</b>	<b>543,842</b>	<b>554,764</b>	<b>565,856</b>	<b>575,843</b>	<b>586,243</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014



## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

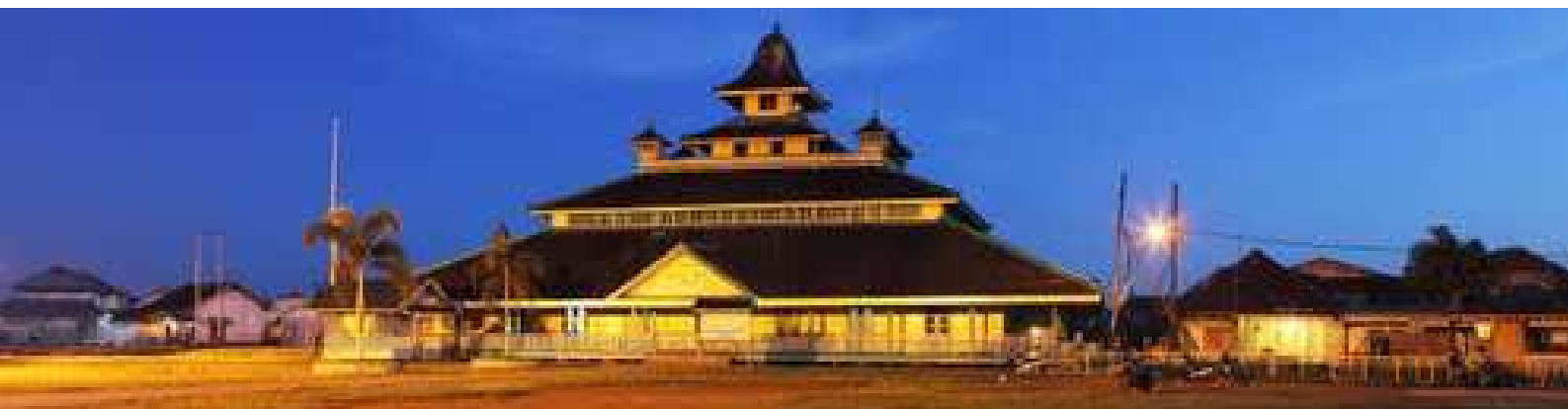
#### **A. Perkembangan Perekonomian**

Kondisi Perekonomian Kota Pontianak Tahun 2013 mengalami peningkatan dari Tahun 2012, terbentuk dari delapan sektor kegiatan ekonomi dari enam kecamatan, pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 sebesar 6,04 %, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 sebesar 6,07 % . Seluruh sektor ekonomi menyumbangkan pertumbuhannya, diantara empat sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak, sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami pertumbuhan diatas rata- rata pertumbuhan, sektor lainnya yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap PDRB yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Bangunan dan sektor jasa-jasa.

Kinerja sektor Pengangkutan dan Komunikasi menjadi pendorong utama perekonomian Kota Pontianak dimana kontribusi sektor tersebut dalam pertumbuhan mencapai 1,42 % dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sebesar 6,04 %. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,28 %, serta sektor Bangunan memberikan kontribusi pada pertumbuhan sebesar 1,02 % dan sektor Jasa- jasa memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,20 %. Keempat sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,92 % terhadap total pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sedangkan empat sektor lainnya rata-rata memberikan andil dibawah 0,05 % dan total keempat sektor tersebut menyumbang 1,12 % dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

#### **Struktur Perekonomian Daerah**

Kinerja perekonomian Kota Pontianak secara sektoral pada Tahun 2013 tumbuh sebesar 6,04 % dan ditandai dengan peningkatan pada setiap sektornya, meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,04 poin dibanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 6,07 %. Semua sektor ekonomi pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan-komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 8,71 %, diikuti oleh sektor Bangunan 5,95 %, sektor keuangan-persewaan-jasa perusahaan 5,68 %, sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 5,48 %, sektor jasa-jasa 5,28 %, , sektor Listrik dan air bersih 4,37 %, sektor Pertanian sebesar 4,01 % dan sektor industri pengolahan 3,74 %.

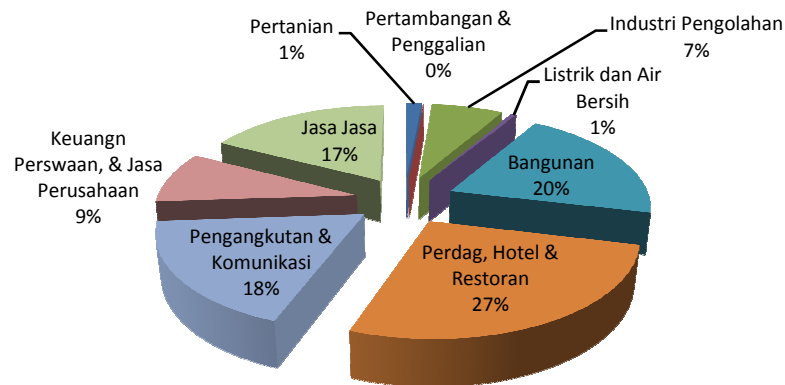


Peningkatan kinerja sektor Perdagangan Hotel dan Restoran pada 2013 antara lain diindikasikan dengan peningkatan volume bongkar melalui pelabuhan Kota Pontianak yang tercatat sebesar 1,41 juta ton atau meningkat 11,44 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,27 juta ton, demikian pula peningkatan penerimaan pajak restoran serta kecenderungan kenaikan rata-rata tingkat hunian hotel berbintang maupun non bintang semakin memperkuat sektor PHR pada perekonomian Kota Pontianak. Sementara dalam periode yang sama, sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor Industri Pengolahan meskipun pada tahun 2012 kinerja sektor ini menguat 0,21 poin dari tahun sebelumnya.

**Tabel II-13**  
**Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2013**

Sektor	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	1.46	1.45	1.44	1.42
2. Pertambangan & Penggalian	0.00	0.00	0.00	-
3. Industri Pengolahan	7.72	7.32	7.01	6.81
4. Listrik dan Air Bersih	0.52	0.50	0.49	0.48
5. Bangunan	19.54	19.54	19.80	19.98
6. Perdag, Hotel & Restoran	24.51	25.46	26.07	26.89
7. Pengangkutan & Komunikasi	18.12	18.36	18.47	18.32
8. Keuangn Perswaan, & Jasa Perusahaan	9.42	9.23	9.02	8.78
9. Jasa Jasa	18.71	18.14	17.70	17.31
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014



**Gambar II-6**  
**Grafik Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2013**

Struktur ekonomi Kota Pontianak Tahun 2013 didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 26,89%, diikuti oleh sektor Bangunan 19,98%, sektor Jasa-jasa sebesar 17,31% serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 18,32%, keempat sektor tersebut memberikan kontribusi dalam perekonomian sebesar 82,50%, sementara empat sektor lainnya seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan 8,78% , sektor Industri pengolahan 6,81%, sektor Pertanian 1,42% dan Sektor Listrik dan Air memberikan kontribusi sebesar 0,48%.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir, dari tahun 2010 hingga 2013 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, ekonomi Kota Pontianak rata-rata tumbuh sebesar 6,07% per tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,92%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,26%.

Selama periode 2010 – 2013 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi diatas rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pontianak adalah Sektor jasa-jasa sebesar 6,07%, di tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,13%. Sektor ini tumbuh lebih tinggi dari sektor lainnya, sebagai konsekuensi tumbuhnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan utamanya dalam penggunaan moda transportasi arus distribusi barang dan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, serta peningkatan volume bongkar muat di pelabuhan Pontianak berpengaruh positif pada sektor pengangkutan dan komunikasi.

**Tabel II-14**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010- 2013**

<b>Sektor</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. Pertanian	4,57	4,32	4,65	4,73	4.90
2. Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	3,61	2,34	2,5	2,71	3.06
4. Listrik dan Air Bersih	6,41	4,28	4,52	4,5	7.83
5. Bangunan	10,79	5,27	5,81	6,46	7.65
6. Perdag, Hotel & Restoran	4,40	6,24	5,97	6,66	8.13
7. Pengangkutan & Kom	6,28	9,11	9,04	9,19	8.03
8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh	3,49	5,55	5,64	6,03	6.91
9. Jasa Jasa	2,51	2,42	2,93	3,34	5.18
<b>PDRB</b>	<b>5,26</b>	<b>5,39</b>	<b>5,88</b>	<b>6,07</b>	<b>6.92</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu indictor untuk melihat stabilitas eknomi suatu daerah. Perkembangan laju inflasi di Kota Pontianak dalam kurun waktu 2009-2012 terlihat fluktuatif. Hal ini disebabkan pengaruh dari kondisi perekonomian nasional serta stabilitas stok harga barang-barang di dalam negeri khususnya di Kota Pontianak. Berikut gambaran laju inflasi dalam kurun waktu 2009-2012

## B. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Sektor yang tumbuh lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kinerja sektor ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan selama empat tahun terakhir sebesar 6,11%. Tersedianya pusat-pusat perbelanjaan modern, tempat hiburan, restoran/rumah makan serta didukung oleh fasilitas hotel/penginapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomis pengunjung, menjadi surga belanja bagi wisatawan domestik yang berasal dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat diluar Kota Pontianak, kondisi demikian secara signifikan berpengaruh positif pada sektor ini dan semakin memperkuat image bahwa Kota Pontianak sebagai Kota Perdagangan dan jasa.

**Tabel II-15**  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
Kota Pontianak (Juta Rupiah), 2010-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013
1. PERTANIAN	173.190,60	183.532,62	201.827,19	226.668,41	256.971,70
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	928.042,68	970.210,03	1.018.686,09	1.102.506,96	1.232.515,76
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	62.148,03	65.692,50	70.173,47	76.340,86	86.843,68
5. B A N G U N A N	2.098.743,43	2.455.471,44	2.718.010,13	3.113.355,55	3.612.923,98
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	2.618.791,70	3.080.804,65	3.541.953,16	4.099.401,92	4.862.804,02
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.001.903,32	2.276.931,47	2.554.660,61	2.903.983,00	3.313.661,19
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.093.283,78	1.183.848,59	1.283.783,64	1.417.487,33	1.588.803,21
9. JASA - JASA	2.198.512,69	2.351.375,47	2.524.187,90	2.783.346,71	3.131.553,42
<b>Jumlah</b>	<b>11.174.616,23</b>	<b>12.567.866,77</b>	<b>13.913.282,19</b>	<b>15.727.004,22</b>	<b>15.723.090,73</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2013

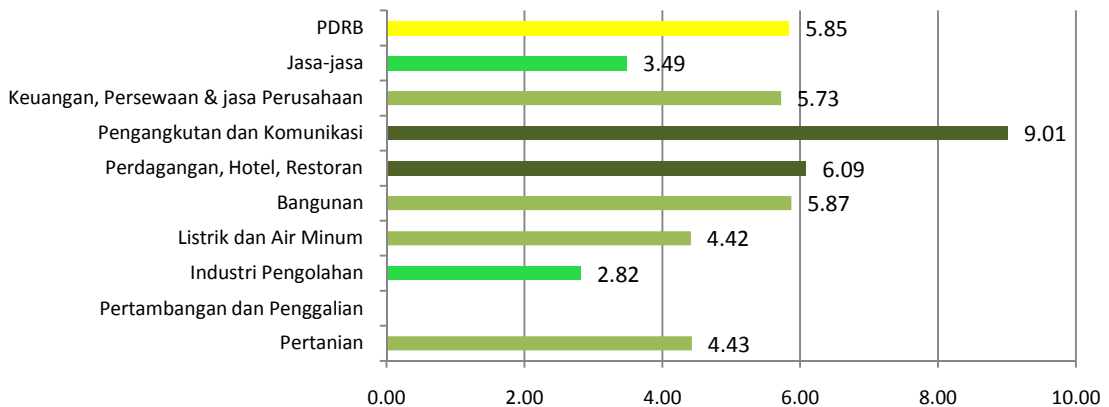
**Tabel II-16**  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Pontianak (Juta Rupiah),  
2010-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
1. PERTANIAN	84.131,69	87.763,84	91.860,58	96.204,73	100.062,54
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	529.553,34	541.932,89	555.503,61	570.582,82	591.928,32
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	37.023,45	38.608,08	40.290,56	42.104,35	43.942,63
5. B A N G U N A N	1.098.390,68	1.156.301,39	1.223.454,60	1.302.503,70	1.380.028,28
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.449.357,05	1.539.794,29	1.651.209,99	1.761.149,97	1.857.719,08
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.155.153,73	1.260.410,28	1.374.288,36	1.500.555,65	1.631.327,96
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	669.030,48	706.128,51	745.925,32	790.896,20	835.822,56
9. JASA - JASA	1.259.768,12	1.290.254,47	1.328.034,01	1.372.436,15	1.444.891,85
<b>Jumlah</b>	<b>6.282.408,54</b>	<b>6.621.193,74</b>	<b>7.010.567,02</b>	<b>7.436.433,57</b>	<b>7.885.723,22</b>

\*) Angka Perbaikan

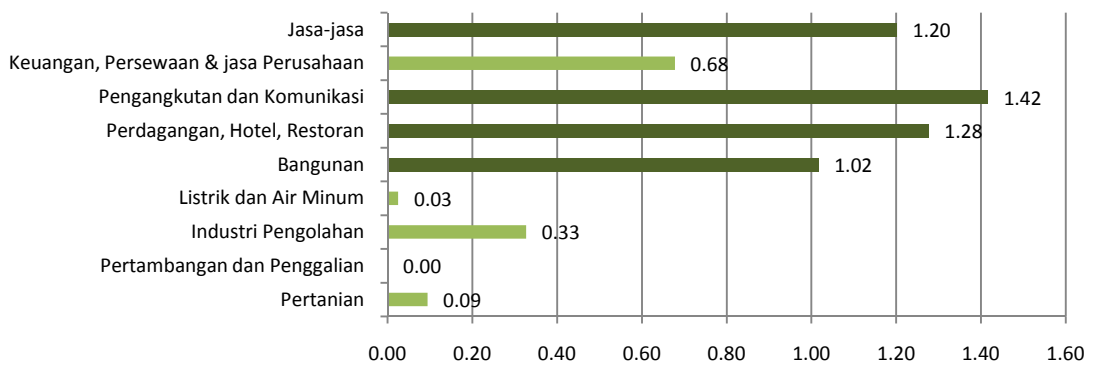
\*\*) Angka Sementara

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014



**Gambar II-7**  
**Grafik Rata-rata Pertumbuhan Sektor Tahun 2020 -2013**

Dalam kurun waktu empat tahun (2010-2012) hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kecendrungan pertumbuhan, meskipun demikian terdapat beberapa sektor yang mengalami perlambatan, pertumbuhan sektor-sektor tersebut cenderung menurun dan berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak (5,85 %) seperti Sektor pertanian 4,43 %, sektor Listrik dan Air bersih 4,42 %, sektor jasa-jasa 3,49 % dan sektor Industri pengolahan 2,82 %.



**Gambar II-8**  
**Grafik Kontribusi Pertumbuhan Sektor Tahun 2013**

Tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak yang dihitung atas dasar nilai tambah bruto harga berlaku mencapai 18,06 Trilyun Rupiah meningkat sebesar 2,34 Trilyun Rupiah dari Tahun 2012, empat sektor dominan yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Pontianak adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor Bangunan, serta sektor Jasa-jasa keempat sektor tersebut memberikan kontribusi nilai tambah bruto sebesar 15,02 Trilyun Rupiah atau sebesar 83,16 % terhadap total PDRB kota Pontianak.

Kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terus mengalami peningkatan selama tahun 2010 hingga tahun 2013, dengan kontribusi nilai tambah bruto rata-rata diatas 3,85 Trilyun Rupiah pertahun, serta dengan pertumbuhan rata-rata diatas 6 %, kontribusi sektor ini terhadap PDRB terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 24,51 % dan tahun 2013 meningkat sebesar 25,98 % dengan nilai tambah bruto sebesar 4,69 trilyun Rupiah.

Pembangunan fasilitas publik seperti perumahan, gedung kantor, rumah sakit, pusat perbelanjaan, gudang, sarana hiburan serta jalan jembatan dan lainnya baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta sebagai konsekuensi dari perkembangan penduduk daerah perkotaan mendorong tumbuhnya Sektor Bangunan selama empat tahun terakhir, tahun 2013 sektor ini berkontribusi sebesar 19,90 % terhadap total PDRB Kota Pontianak dengan nilai tambah sebesar 3,59 Trilyun Rupiah, selama empat tahun terakhir sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang signifikan meskipun pertumbuhannya mengalami perlambatan, tahun 2010 sektor bangunan rata-rata memberikan kontribusi nilai tambah sebesar 2,97 Trilyun Rupiah pertahun atau 19,71 % dari total nilai PDRB.

Sektor Jasa-jasa dalam perekonomian Kota Pontianak merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar setelah sektor Bangunan, dengan sumbangan nilai tambah bruto sebesar 3,19 Trilyun Rupiah, pada Tahun 2013 sektor ini bertahan pada pangsa 17,68 % dari total nilai PDRB. Apabila dilihat perkembangannya pada tahun 2010 kontribusinya hingga Tahun 2013 rata-rata kontribusinya mencapai 18,05%.

### **C. PDRB PerKapita**

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB per kapita merupakan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah pada satu satuan waktu. Indikator PDRB per kapita ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah walaupun sebenarnya masih kurang tepat. Semakin besar PDRB per kapita, secara kasar menunjukkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk pada wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah PDRB per kapita berarti kemakmuran penduduknya semakin rendah

Secara makro, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kota Pontianak mengalami kenaikan sebesar 12,86 % yaitu dari 27,30 Juta Rupiah pada tahun 2012 menjadi 30,81 juta rupiah pada tahun 2013. Apabila dilihat dari perkembangan nilai PDRB per kapita selama lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2009 hingga 2013, nilai PDRB per kapita telah mengalami peningkatan sebesar 33,3 % atau sebesar 10,26 Juta Rupiah.

Dari tabel dibawah terlihat perkembangan PDRB per kapita tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, serta Nilai PDRB perkapita apabila dibandingkan dengan nilai tukar rata-rata Dolar US terhadap Rupiah. Jika dinilai dengan Dolar US maka nilai PDRB per kapita penduduk Kota Pontianak pada tahun 2013 sebesar 2,95 Ribu US Dolar turun sebesar 295,26 US Dolar atau 9,08 % dibandingkan tahun 2012 kondisi ini terjadi karena sepanjang Tahun 2013 nilai tukar rupiah



terhadap nilai tukar rata-rata US Dolar melemah, meskipun jika menurut nilai Rupiah, PDRB Perkapita meningkat dari 27,31 Juta Rupiah menjadi 30,81 Juta Rupiah atau meningkat 12,85 %. Sedangkan ditinjau dari wilayah kecamatan, Pontianak Selatan memiliki rata-rata pendapatan perkapita paling tinggi, disusul oleh kecamatan Pontianak Kota. Untuk lebih jelasnya lihat taabel-tabel berikut ini.

**Tabel II-17**  
**PDRB Per Kapita Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Tahun	Penduduk Pertengahan Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	PDRB Perkapita (US \$)	Nilai Tukar Rata-Rata US\$ thd Rp.
2009	543.841	20.547.580	1.966,21	10.450
2010	555.594	22.620.585	2.489,33	9.087
2011	565.856	24.588.026	2.800,78	8.779
2012	575.843	27.304.475	3.250,34	8.400
2013	586.243	30.815.578	2.955,08	10.428

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2013

**Tabel II-18**  
**Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013 (Dalam Rupiah)**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
<b>HARGA BERLAKU</b>						
1	Pontianak Selatan	27.125.789,26	30.551.066,39	33.112.036,96	37.302.636,37	41.032.900,01
2	Pontianak Tenggara	14.997.716,48	16.777.024,79	18.847.406,15	21.636.555,70	24.103.123,05
3	Pontianak Timur	10.740.987,26	12.219.100,74	13.926.922,78	15.916.325,00	17.858.116,65
4	Pontianak Barat	11.364.073,42	13.024.460,92	14.472.251,16	16.361.750,98	18.226.990,59
5	Pontianak Kota	23.105.921,98	25.994.630,71	28.645.778,05	32.193.029,70	35.412.332,67
6	Pontianak Utara	16.429.891,05	18.359.407,06	19.941.376,44	22.389.108,90	24.404.128,70
<b>HARGA KONSTAN</b>						
1	Pontianak Selatan	15.583.248,57	16.408.112,94	16.871.250,22	17.997.532,63	18.825.419,13
2	Pontianak Tenggara	9.363.926,24	9.843.807,12	9.996.391,67	10.560.968,06	10.972.845,81
3	Pontianak Timur	5.808.283,32	6.135.194,34	6.323.108,69	6.685.272,71	6.986.109,98
4	Pontianak Barat	6.408.830,14	6.762.574,33	7.033.457,27	7.479.782,24	7.853.771,35
5	Pontianak Kota	13.582.222,86	14.238.601,81	14.769.741,28	15.722.635,79	16.461.599,67
6	Pontianak Utara	9.323.887,07	9.872.567,22	10.175.410,82	10.674.920,98	11.144.617,50

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2013

Ket : \* prediksi BAPPEDA Kota Pontianak

#### D. Kondisi Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

##### Tipologi Klassen

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah Prima cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah Potensia (*high income but low growth*), daerah berkembang (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*.)

Tabel II-19

## Gambaran Perkembangan Kecamatan Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Tahun 2012

Kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Perkapita (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Thd Kota Pontianak	PDRB Perkapita Thd Kota Pontianak
1. Pontianak Selatan	5,39	37.302.636,37	<	>
2. Pontianak Tenggara	6,38	21.636.555,70	>	<
3. Pontianak Timur	5,39	15.916.325,00	<	<
4. Pontianak Barat	6,37	16.361.750,98	>	<
5. Pontianak Kota	6,63	32.193.029,70	>	>
6. Pontianak Utara	6,07	22.389.108,90	=	<
Kota Pontianak	6,07	27.304.474,89	6,07	27.304.474,89

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2013

Ket :data tahun 2013 belum dirilis

Dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita Kota Pontianak maka dapat digambarkan kategori masing-masing kecamatan sebagai berikut.

Tabel II-20

## Karakteristik Perkembangan Kecamatan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2012

	Tumbuh Cepat	Tumbuh Lambat
PDRB Per Kapita Besar	<b>PRIMA</b>	<b>POTENSIAL</b>
	KEC. PONTIANAK KOTA	KEC. PONTIANAK SELATAN
PDRB Per Kapita Kecil	<b>BERKEMBANG</b>	<b>RELATIF TERTINGGAL</b>
	KEC. PONTIANAK TENGGARA	KEC. PONTIANAK TIMUR
	KEC. PONTIANAK BARAT	
	KEC. PONTIANAK UTARA	

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2013

- Kecamatan yang masuk dalam kategori daerah Prima cepat-tumbuh (*high growth and high income*), adalah Kecamatan Pontianak Kota, dengan Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dari Kota Pontianak. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat di kecamatan ini relatif paling sejahtera dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada di kuadran lainnya
- Kecamatan yang dikategorikan sebagai Daerah Potensial (*high income but low growth*), adalah kecamatan Pontianak Selatan, dimana nilai PDRB perkapitanya lebih tinggi dari PDRB perkapita Kota Pontianak namun pertumbuhan ekonominya masih berada dibawah

pertumbuhan Kota Pontianak. Masyarakat kecamatan yang berada di kudran ini masih dapat dikatakan relatif lebih sejahtera meskipun pertumbuhannya masih rendah.

- c. Terdapat tiga Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah berkembang (*high growth but low income*), yaitu; Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara, dengan kondisi mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Kota Pontianak namun dari sisi nilai PDRB perkapita masih berada dibawah Kota Pontianak karena relatif jumlah penduduk di tiga kecamatan ini lebih besar dari kecamatan lainnya.
- d. Kecamatan yang dikategorikan sebagai Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah Kecamatan Pontianak Timur, dengan kondisi baik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang berada dibawah Kota Pontianak, dapat diartikan bahwa masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur dalam kondisi tingkat kesejahteraannya yang berada dibawah kecamatan lainnya.

### Indeks Williamson

Indeks Williamsion digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, dalam hal ini antar wilayah kecamatan dengan menggunakan perhitungan PDRB per kapita antar kecamatan yang ada. berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapat hasilnya sebagai berikut:

**Tabel II-21**  
**Indeks Williamson Kota Pontianak Tahun 2009-2012**

Tahun	Indeks Williamson
2009	0,34
2010	0,34
2011	0,35
2012	0,33
2013*	NA

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2013  
Ket : \* Data belum dirilis

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai indeks mendekati angka nol. Jika mengacu kepada standar yang berlaku dimana:

- a. Jika indeks mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kota Pontianak adalah rendah atau pembangunan antar wilayah merata
- b. Jika indeks mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kota Pontianak adalah tinggi atau pembangunan antar wilayah belum merata

Berdasarkan klasifikasi tersebut, nilai indeks Williamson Kota Pontianak yang berkisar pada angka 0,33-0,35 mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan semakin baik. Atau dengan kata lain ketimpangan pembangunan masih ada akan tetapi tingkatnya tidak terlalu jauh/tinggi.

## E. Indeks Pembangunan Manusia

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran kemajuan pembangunan manusia secara umum, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, tampak bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kota Pontianak cukup signifikan. Angka IPM Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 72,41 pada tahun 2009 menjadi 74,21 pada tahun 2012, untuk angka IPM tahun 2013 data BPS belum dirilis, akan tetapi berdasarkan prediksi akan terjadi kenaikan menjadi 75,09.

Kenaikan IPM ini diperkirakan karena dampak dari investasi di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM baru akan terlihat nyata dalam jangka panjang. Pembangunan di Kota Pontianak telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun jumlah persentasenya. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak mengalami penurunan dari 52.80 ribu jiwa di tahun 2008 menjadi 34.39 ribu jiwa di tahun 2010, atau turun dari 9,29 % di tahun 2008 menjadi 5,77 % di tahun 2012.

**Tabel II-22**  
**Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	72.41	72.96	73,43	74,21	74,64
- Angka Melek Huruf (%)	94.08	94.97	95,02	95,73	96,07
- Usia Harapan Hidup (Tahun)	67.04	67.22	67,40	67,58	67,88
- Pengeluaran Riil per kapita (Rp 000/bln)	637.00	638.64	642,47	645,46	647,82
- Lama sekolah (tahun)	9.20	9.36	9,45	9,85	9,86

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

Indikator utama Pembangunan pada analisis mikro ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tujuan dari IPM, yaitu:

1. Dimensi Umur Panjang dan Sehat, indikator dari dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup. Di Kota Pontianak angka harapan hidup pada tahun 2012 sebesar 67,58 tahun, sementara standart UNDP nilai maksimum angka harapan hidup 85 tahun.
2. Dimensi Pengetahuan, indikator pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di Kota Pontianak angka melek huruf pada tahun 2012 sebesar 95,73, sementara standart UNDPD nilai maksimum angka melek huruf 100; adapun rata-rata sekolah di Kota Pontianak 9,45 tahun sedangkan standart UNDP 15 tahun.
3. Dimensi Kehidupan yang layak, indikator dari dimensi ini adalah pengeluaran perkapita riil perbulan yang disesuaikan. Pada tahun 2012 pengeluaran riil perkapita Kota Pontianak Rp. 645.460,- sedangkan standart UNDP Rp. 737,720,-.

**Tabel II-23**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat,**  
**Tahun 2009 – 2013**

Kab/Kota	IPM				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Sambas	64,46	64,93	65,80	66,19	66,81
2. Bengkayang	67,18	67,55	67,98	68,50	69,38
3. Landak	67,21	67,55	68,16	69,05	69,58
4. Pontianak	68,41	68,75	69,07	69,42	70,13
5. Sanggau	68,19	68,55	68,97	69,50	70,30
6. Ketapang	67,41	67,89	68,63	69,05	69,74
7. Sintang	68,00	68,31	68,77	69,14	69,81
8. KapuasHulu	69,79	70,03	70,33	70,52	70,97
9. Sekadau	66,63	66,99	67,52	68,47	68,99
10. Melawi	68,45	68,67	69,01	69,39	69,86
11. Kayong Utara	65,07	65,38	65,75	66,19	66,83
12. KubuRaya	66,77	67,56	68,06	68,86	69,32
<b>13. KotaPontianak</b>	<b>72,41</b>	<b>72,96</b>	<b>73,43</b>	<b>74,21</b>	<b>74,64</b>
14. KotaSingkawang	68,47	68,86	69,21	69,77	70,66
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>68,79</b>	<b>69,15</b>	<b>69,66</b>	<b>70,31</b>	<b>70,93</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2013

Pencapaian angka IPM Kota Pontianak sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan peningkatan dan merupakan IPM tertinggi diantara kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian peringkat angka IPM Kota Pontianak antarkota se-Kalimantan selama 2 (dua) tahun tidak mengalami perubahan, dimana pada tahun 2011 dan 2012, Kota Pontianak berada pada rangking ke-8. Sedangkan untuk perbandingan antarkota se-Indonesia, pada tahun 2011 Kota Pontianak berada pada rangking ke-89 meningkat menjadi rangking ke-87 pada tahun 2012, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-24**  
**Perbandingan IPM Kota Pontianak dengan IPM Kota se-Kalimantan dan se-Indonesia Tahun 2011-2013**

Provinsi	Kota Se-Kalimantan	Nilai IPM			Rangking Se-Kalimantan			Dari 98 Kota Se-Indonesia		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
KALTIM	Balikpapan	78.85	79.38	79,87	1	1	1	8	8	NA
KALTENG	Palangkaraya	78.78	79.30	79,52	2	2	2	9	9	NA
KALTIM	Samarinda	77.63	78.26	78,79	3	3	3	31	29	NA
KALTIM	Bontang	77.52	77.85	78,40	4	4	4	32	34	NA
KALTIM	Tarakan	77.19	77.76	NA	5	5		35	35	NA
KALSEL	Banjarbaru	75.43	76.28	76,86	6	6	5	70	65	NA
KALSEL	Banjarmasin	74.24	74.83	75,28	7	7	6	83	82	NA
KALBAR	<b>Pontianak</b>	<b>73.43</b>	<b>74.21</b>	<b>74,64</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	NA
KALBAR	Singkawang	69,21	69,77	70,66	9	9	8	97	98	NA
	<b>KALBAR</b>	<b>69,66</b>	<b>70,31</b>	<b>70,93</b>	-	-	-	<b>NA</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>72,77</b>	<b>73,29</b>	<b>73,81</b>	-	-	-	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>NA</b>

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014, diolah

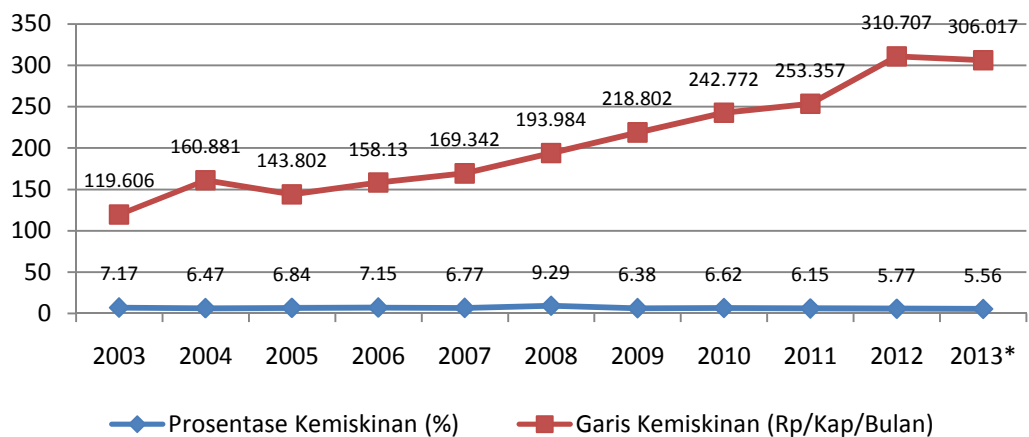
## F. Penduduk Miskin

Selama satu dekade yang ditampilkan pada Tabel 3.5 menunjukkan trend penurunan baik dari prosentasenya maupun jumlah absolutnya. Pada tahun 2003 prosentase penduduk miskin sebesar 7,17 % dan terus menerus mengalami penurunan hingga menyentuh angka 5,77 % pada tahun 2012. Selain itu, indeks Kedalaman Kemiskinan juga semakin mengecil, dari 0,97 di tahun 2003 menjadi 0,66 di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Sedangkan untuk kondisi 2013 belum dapat disajikan karena masih menunggu perhitungan dari BPS.

**Tabel II-25**  
**Kondisi dan Indikator Kemiskinan di Kota Pontianak Tahun 2003-2013**

Tahun	Penduduk Miskin (000)	Prosentase (%)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
2003	34,60	7,17	0,97	0,19	119.606
2004	31,50	6,47	0,83	0,16	160.881
2005	36,50	6,84	1,29	0,33	143.802
2006	36,50	7,15	1,05	0,30	158.130
2007	37,70	6,77	0,57	0,13	169.342
2008	52,80	9,29	1,94	0,64	193.984
2009	36,56	6,38	1,15	0,39	218.802
2010	36,60	6,62	1,26	0,33	242.772
2011	34,39	6,15	0,84	0,20	253.357
2012	32,53	5,77	0,66	0,14	310.707
2013	32,80	5,56	0,83	0,18	306.017

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014



**Gambar II-9**  
**Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Pontianak**

Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan pola yang sedikit berbeda dengan indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu hanya berubah 0,05 point. Tahun 2003 indeks keparahan sebesar

0,19 menjadi 0,14 pada 2010, dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil. Di sisi lain, Garis kemiskinan tahun 2003 s/d 2012 juga mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu mencapai sebesar 159,78 %. Tahun 2003 garis kemiskinan hanya sebesar Rp. 119.606,- perkapita/bulan dan terus meningkat hingga Rp.310.707,- perkapita/bulan pada tahun 2012.

Dapat dilihat bahwa trend angka kemiskinan menurun dari tahun 2003 hingga 2012. Sedangkan nilai Garis Kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak secara keseluruhan berhasil dalam penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2012 jumlah penduduk miskin Kota Pontianak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 menjadi 32,53 Ribu Jiwa, dengan prosentase sebesar 5,77 % ini merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam sepuluh tahun terakhir setelah terjadi dua kali krisis di Tahun 2005 dan Tahun 2008. Beberapa program bantuan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Pontianak antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Beras Miskin (Raskin), Beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin (BSM) serta bantuan lainnya.

**Tabel II-26**  
**Perbandingan Kondisi dan Indikator Kemiskinan Kota Pontianak dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2013**

Kab/Kota	2012 (September)					2013 (September)				
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (RP/Kap/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (RP/Kap/Bln)
1. Sambas	45,3	8,87	1,12	0,22	253.410	51,2	9,90	1,58	0,39	278.704
2. Bengkayang	15,2	6,73	0,89	0,22	225.635	18,4	8,01	1,11	0,23	240.704
3. Landak	42,6	12,4	1,50	0,30	233.870	49,5	14,18	2,65	0,83	252.336
4. Pontianak	13,7	5,64	0,90	0,22	222.737	15,6	6,30	0,82	0,19	240.081
5. Sanggau	18,7	4,40	0,43	0,07	206.445	20,4	4,71	0,52	0,10	222.877
6. Ketapang	53,5	11,90	2,13	0,61	284.036	58,8	12,85	1,87	0,45	310.504
7. Sintang	32,5	8,55	1,17	0,32	319.886	39,0	10,09	1,21	0,22	358.693
8. KapuasHulu	23,2	9,94	1,74	0,51	278.446	26,4	11,11	1,13	0,19	304.138
9. Sekadau	11,1	5,93	0,50	0,07	214.316	13,2	6,93	0,91	0,17	229.464
10. Melawi	22,6	12,09	2,43	0,74	330.611	26,0	13,70	1,56	0,29	371.723
11. Kayong Utara	10,2	10,15	1,18	0,21	195.683	11,1	10,87	1,22	0,22	207.989
12. KubuRaya	32,8	6,27	0,58	0,12	247.828	32,1	6,04	0,45	0,06	269.835
<b>13. KotaPontianak</b>	<b>33,4</b>	<b>5,76</b>	<b>0,69</b>	<b>0,14</b>	<b>306.017</b>	<b>32,8</b>	<b>5,56</b>	<b>0,83</b>	<b>0,18</b>	<b>341.422</b>
14. KotaSingkawang	10,4	5,31	0,74	0,22	294.960	13,0	6,50	0,70	0,11	320.211
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>365,1</b>	<b>7,96</b>	<b>1,24</b>	<b>0,33</b>	<b>239.162</b>	<b>70,93</b>	<b>8,74</b>	<b>1,30</b>	<b>0,32</b>	<b>270.306</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat, tren perkembangan angka kemiskinan dalam periode tahun 2012-2013 memberikan gambaran positif dimana terjadi penurunan secara jumlah maupun prosentase kemiskinan, sedangkan di daerah lain kebanyakan justru memperlihatkan kecenderungan kenaikan.



## 2.2.2. Kesejahteraan Sosial

### A. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Di Kota Pontianak dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD masih cukup tinggi. Tahun 2013 angka melek huruf di Kota Pontianak diperkirakan mencapai angka 96,54% dibandingkan realisasi di tahun 2012 mencapai 95,73%.

Terdapat sekitar 3,46% warga yang buta huruf di Kota Pontianak disebabkan oleh kriteria pengukuran yang digunakan BPS adalah setiap warga usia 15 tahun ke atas bukan hanya pada rentang usia sekolah, sehingga diduga masih ada penduduk usia lanjut yang buta huruf masuk dalam pencacahan tersebut. Apabila didasarkan atas usia wajib sekolah, dapat dipastikan tidak terdapat warga Kota Pontianak yang buta huruf.

**Tabel II-27**  
**Angka Melek Huruf di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
- Angka Melek Huruf (%)	94.08	94.97	95,02	95,73	96,07

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

### B. Rata- Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang diformulasikan oleh UNDP untuk menilai keberhasilan pembangunan. Program Wajib Belajar 9 tahun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994 melalui Inpres I tahun 1994. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah untuk kota Pontianak, kurun waktu 2009 ke 2012 mengalami peningkatan dari 9,20 ke 9,85 dan diprediksikan akan meningkat menjadi 9,87 di tahun 2013. Hal ini memperlihatkan bahwa rata-rata penduduk Kota Pontianak di tahun 2012 bersekolah selama 9,36 tahun, atau setingkat kelas 3 SMP. Kondisi ini berarti Pemerintah Kota Pontianak secara umum telah berhasil mencapai tujuan Program Wajib Belajar 9 Tahun, akan tetapi perlu lebih banyak usaha untuk mencapai target berikutnya yaitu Wajib Belajar 12 tahun.

**Tabel II-28**  
**Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	9.20	9.36	9,45	9,85	9,86

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

### C. Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dari angka kematian (Mortality). Angka kematian yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat antara lain angka kematian ibu (jumlah kasus kematian ibu), angka kematian neonatus (jumlah kasus kematian neonatus), angka kematian bayi, angka kematian kasar dan jumlah kasus kematian balita. Data kematian yang dipaparkan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

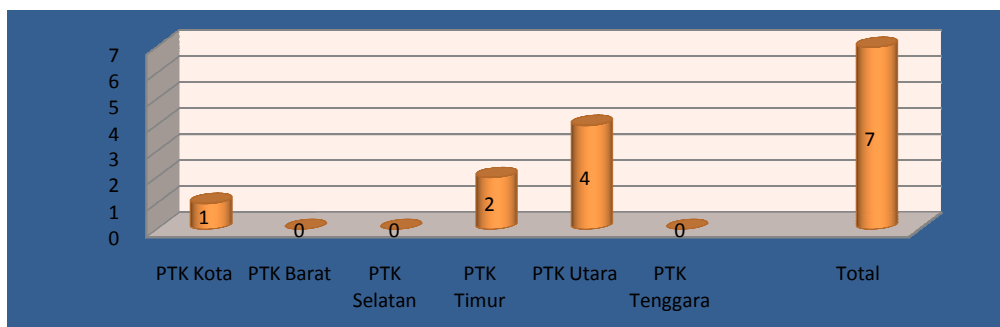
**Tabel II-29**  
**Mortalitas/Angka Kematian di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Mortalitas	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kasus Kematian Ibu	7	12	17	12	7
Kasus Kematian Bayi	33	30	138	77	45
Angka Kematian Bayi per 1000 pddk KH		2,5	11,3	6,1	4,0
Jumlah Kasus Kematian Balita	0	31	154	77	54
	(kasus)	(kasus)	(kasus)	(kasus)	(kasus)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

Bila dilihat dari tabel di atas, Jumlah kasus kematian ibu mengalami peningkatan dari tahun 2009–2011 dan dari tahun 2011-2013 mengalami penurunan. Kasus kematian ibu pada tahun 2013 ini disebabkan oleh Pendarahan, Eklamsi, Gagal jantung, Diabetes Mellitus, Emboli air ketuban dll. Untuk kasus kematian bayi mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2011 sebanyak 138 kasus menjadi 77 kasus pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami penurunan lagi menjadi 45 kasus.

AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Jumlah kasus kematian balita tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebanyak 154 kasus (Bayi dan anak balita sebanyak 154 kasus) dan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 54 kasus. Usia kematian terbesar pada ibu tahun 2013 yaitu pada usia 20-34 tahun sebanyak 2 orang sedangkan pada usia  $\geq 35$  thn sebanyak 1 orang, hal ini banyak faktor penyebab antara lain karena pasien datang terlambat ketempat pelayanan kesehatan, kemungkinan kurang upaya deteksi dini kasus atau lemahnya manajemen penanganan kasus eklampsia Pendarahan, Gagal jantung, Diabetes Mellitus, Steven Jhonson, Emboli air ketuban dll.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

**Gambar II-10**  
**Grafik Distribusi Kasus Kematian Ibu Maternal Menurut Kecamatan Tahun 2013**

Pada grafik di atas dapat terlihat bahwa kematian ibu maternal terdapat di 3 kecamatan di Kota Pontianak. Jumlah kematian ibu maternal terdapat di kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Timur dan Pontianak Utara, sedangkan di kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara tidak ada kematian ibu maternal. Jumlah kelahiran bayi hidup tertinggi di puskesmas Perum 2 sebanyak 973 orang sedangkan jumlah kasus bayi lahir mati tertinggi terdapat di puskesmas Kampung Dalam dan Siantan hilir Pontianak Utara masing-masing sebanyak 5 kasus. Sehingga total kelahiran bayi yang lahir hidup di seluruh wilayah kerja Puskesmas Kota Pontianak sebanyak 11.316 orang dan total keseluruhan bayi yang lahir mati sebanyak 27 orang atau 2,38 per 1000 KH.

**Tabel II-30**  
**Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas di Kota Pontianak Tahun 2013**

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN			% LAHIR MATI
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	
1	Pontianak Kota	Jend. Urip	486	0	486	0.00
		Alianyang	672	2	674	0.30
		Pal III	788	3	791	0.38
		Karya Mulya	303	0	303	0.00
2	Pontianak Barat	Perum I	733	1	734	0.14
		Perum II	973	0	973	0.00
		KomYos	604	0	604	0.00
		Pal V	226	1	227	0.44
3	Pontianak Selatan	Gg. Sehat	947	1	948	0.11
		Purnama	776	0	776	0.00
4	Pontianak Tenggara	Kp. Bangka	525	3	528	0.57
		Paris II	388	2	390	0.51
5	Pontianak Timur	Saigon	233	1	234	0.43
		Kp. Dalam	637	5	642	0.78
		Tambelan Sampit	150	0	150	0.00
		Banjar Serasan	210	0	210	0.00
		Tanjung Hulu	368	0	368	0.00
		Parit Mayor	80	0	80	0.00
6	Pontianak Utara	Siantan Hilir	521	5	526	0.95
		Siantan Tengah	566	1	567	0.18
		Siantan Hulu	372	1	373	0.27
		Telaga Biru	352	0	352	0.00
		Khatulistiwa	406	1	407	0.25
JUMLAH (KOTA)			11316	27	11343	0.24
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 LAHIR HIDUP (DILAPORKAN)					2.38	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

#### D. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator umum bagi taraf hidup, maka semakin tinggi usia harapan hidup menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat di suatu wilayah juga semakin tinggi. Angka Harapan Hidup Kota Pontianak berdasarkan data BPS Tahun 2012 adalah 67,58 tahun yang mana jauh meningkat dibandingkan tahun 2011 yang baru mencapai 67,40 tahun. Diprediksikan di tahun 2013 usia harapan hidup masyarakat kota Pontianak akan mencapai 67,77 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Pontianak telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mana akan berdampak pada usia harapan hidup yang juga semakin tinggi

**Tabel II-31**  
**Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
- Usia Harapan Hidup (Tahun)	67.04	67.22	67,40	67,58	67,88

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

### 2.2.3. Budaya, Pemuda dan Olahraga

Kota Pontianak didiami oleh berbagai macam suku bangsa, 4 suku/etnis yang dominan diantaranya adalah Dayak, Jawa, Bugis, dan mayoritas suku Melayu. Dari berbagai suku yang ada tersebut tidak terjadi pertikaian atau perselisihan yang berbau SARA. Mereka hidup berdampingan secara rukun dan damai. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Pontianak merupakan masyarakat yang terbuka dan menerima kehadiran masyarakat luar atau pendatang. Akan tetapi bukan berarti potensi gesekan sosial tidak ada, potensi tersebut selalu dimungkinkan terjadi. Berkaca kepada apa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, dimana terjadi keributan yang diawali dengan isu SARA. Untuk itu hal ini harus selalu menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama.

Sedangkan dari segi kebangsaan, bangsa asing yang ada di Pontianak prosentasenya sangat kecil. Dari pengamatan di lapangan hanya terdapat bangsa Tionghoa atau Cina, dan India yang sebagian besar telah menjadi warga negara Indonesia dan menetap secara turun temurun di Pontianak. Mereka sebagian besar hidup secara berkelompok di pusat kota. Terhadap kehadiran warga keturunan ini masyarakat Pontianak dapat menerima dengan baik.

Pontianak juga sangat kaya dengan budaya atau kesenian daerah. Budaya atau kesenian suatu bangsa atau daerah merupakan jati diri suatu bangsa atau daerah tersebut, sekaligus merupakan aset wisata setempat. Adapun kesenian daerah yang ada di kota Pontianak adalah tari rebana dan masih banyak lagi kesenian budaya daerah. Guna menunjang upaya pelestarian budaya daerah tersebut terdapat sanggar-sanggar kesenian yang saat ini berjumlah 165 buah.

Upaya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas perorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan peran aktif 44 buah organisasi kepemudaan dan karang taruna. Karang taruna ini terdapat pada setiap kelurahan, dan masing-masingnya didukung oleh 1 organisasi olah raga yaitu KONI yang membawahi pemcab berbagai cabang olah raga di Pontianak. Kegiatan olah raga ini ditunjang dengan sarana yang cukup memadai seperti gelanggang olahraga, lapangan sepak bola, bulu tangkis, basket, volly dan lain-lain yang lokasinya tersebar di kota Pontianak.



## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Secara umum aspek pelayanan umum menyangkut dua hal yaitu layanan urusan wajib yang terdiri dari 23 urusan, serta urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 5 urusan pilihan. Berikut digambarkan kondisi pelayanan umum yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dalam periode 2009-2013.

### 2.3.1. Layanan Urusan Wajib

#### A. Urusan Pendidikan

Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak adalah menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketrampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Untuk menuju ke arah itu arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengesampingkan pendidikan, peningkatan profesionalisme dan pengetahuan pengajar serta mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk mengetahui sejauhmana kinerja yang telah dicapai dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pontianak, tabel di bawah ini merangkum capaian kinerja pelaksanaan urusan pendidikan di kota Pontianak dalam periode 2010-2013. Secara umum capaian kinerja yang telah diraih adalah memuaskan, bahkan beberapa indikator melebihi ekspektasi.

Tabel II-32  
Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2010 – 2013

No.	Indikator Kinerja Kunci	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.98	20.71	26.72	37.52
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	92.01	93.58	99.83	99.83
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	142.94	119.14	116.09	114.47
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	120.45	101.11	107.80	106.49
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	107.38	99.53	104.61	111.12
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77.24	69.73	97.43	103,38
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	139.37	98.00	102.19	101,00
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	110.25	65.50	90.32	94,04
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.09	0.10	0.06	0,13
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.26	0.29	0.14	0,08
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1.46	1.44	1.14	0,12
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	89.26	99.05	99.05	99,79
14	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.15	98.23	99.41	99,90
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.88	106.09	96.68	104,85
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	149.81	126.39	114.83	119,84
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	47.92	64.05	66.33	69.81
18	Guru yang sudah sertifikasi	14.55	20.61	40.98	58.14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

APK di tingkat SD/MI tahun 2010 merupakan yang tertinggi yaitu 142,94 dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 131,64% yang artinya dalam jumlah siswa SD/MI yang ada di Kota Pontianak terdapat siswa yang usianya di luar usia SD/MI sehingga APK melebihi 100%. APK tingkat SLTP/MTs tahun 2012 sebesar 104,61% meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 99.53%. Sedangkan APK tingkat SMU/SMK/MA tahun 2009 sebesar 97,13% jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadinya peningkatan sebesar 102,19%.

Ditinjau dari kualitas lulusan atau rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), pada tahun 2012 rata-rata nilai UAN di wilayah Kota Pontianak mencapai nilai 7.09 meningkat 0.34 poin dibandingkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,9. UAN per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-33**  
**Nilai Rata- Rata UAN di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	6.50	6.60	6.95	7,15	7,50
2	SLTP/MTs	6,50	7,20	7,30	7,52	7,38
3	SMU/SMK/MA	6,65	6,96	7.18	7,09	7,25
<b>Rata-rata Nilai UAN Keseluruhan</b>		<b>6,55</b>	<b>6.92</b>	<b>7,14</b>	<b>7,25</b>	<b>7,38</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

Rata-rata nilai UAN tertinggi berada pada jenjang pendidikan SLTP/MTs, sedangkan terendah berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Rata-rata Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2009 sebesar 363,33 murid per sekolah meningkat pada tahun 2010 sebesar 436,33 murid per sekolah. Apabila dilihat secara keseluruhan masih terjadi fluktuasi rata-rata rasio murid terhadap sekolah. Penurunan terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah rata-rata sebesar 352,33 murid per sekolah.

**Tabel II-34**  
**Rasio Murid Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	395	469	402	390	337
2	SLTP/MTs	350	323	324	315	279
3	SMU/SMK/MA	345	517	341	352	228
<b>Rata-rata</b>		<b>363.33</b>	<b>436.33</b>	<b>355.66</b>	<b>352.33</b>	<b>281</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

Rasio murid terhadap guru untuk semua jenjang pendidikan tahun 2009 rata-rata sebesar 16,00 murid per guru. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 15,67 murid per guru atau – 4,1 %. Berdasarkan jenjang pendidikan selama tahun 2009-2013 yang dimulai dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI dengan rasio murid terhadap guru pada tahun 2009 sebanyak 19 murid per guru dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan sebanyak 21

murid per guru. Rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 14 murid per guru dari jika dibandingkan pada tahun 2012 tetap sama. Demikian pula rasio murid terhadap guru untuk tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 15 murid pada tahun 2009, dibandingkan tahun 2010 terjadi peningkatan 21 murid per guru.

**Tabel II-35**  
**Rasio Murid terhadap Ruang Kelas di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	22	36	33	26	31
2	SLTP/MTs	35	41	36	37	32
3	SMU/SMK/MA	34	59	30	32	32
<b>Rata-rata</b>		<b>40,33</b>	<b>45,33</b>	<b>33,00</b>	<b>31,66</b>	<b>31,66</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-36**  
**Rasio Guru Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	20,89	20,81	20,11	14,85	23,30
2	SLTP/MTs	24,31	22,97	25,49	13,77	15,12
3	SMU/SMK/MA	23,63	24,50	30,88	29,23	19,08
<b>Rata-rata</b>		<b>22,94</b>	<b>22,76</b>	<b>25,49</b>	<b>19,28</b>	<b>19,16</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

Melihat perkembangan rasio guru terhadap sekolah untuk semua jenjang pendidikan tahun 2009 dengan rata-rata sebesar 22,94 guru per sekolah di bandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 19,28 guru per sekolah. Jika dilihat secara jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI tahun 2009 sebanyak 20,89 guru per sekolah namun jika dibandingkan dengan tahun 2012 menurun sebanyak 14,85 guru persekolah. Rasio guru terhadap sekolah untuk tingkat SLTP/MTs dengan rata-rata sebanyak 25,49 guru per sekolah pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 13,77 guru per sekolah. Sedangkan untuk rasio guru terhadap sekolah pada tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 23,63 guru per sekolah pada tahun 2009 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 29,23 guru per sekolah.

**Tabel II-37**  
**Perkembangan Jumlah Guru di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Jenjang	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Guru TK	15	130	106	110	868
2	Guru SD	2.273	2.383	2.271	2.256	3.697
3	Guru SLTP	1.016	1.057	996	1.012	2.246
4	Guru SMU/SMK/MA	927	950	892	888	2.429
<b>Jumlah</b>		<b>4.231</b>	<b>4.520</b>	<b>4.265</b>	<b>4.266</b>	<b>9.240</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014



Dari perkembangan selama tahun 2009-2013 menggambarkan kebutuhan guru di Kota Pontianak yang terus berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan, terutama untuk guru pada bidang studi dan guru sekolah kejuruan. Kekurangan guru disebabkan juga oleh adanya moratorium pemerintah pusat terhadap penerimaan guru baru dan adanya guru-guru yang pensiun.

Untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan dari tahun 2009 - 2013 dalam rangka memberikan bentuk pelaksanaan pembinaan kepada tenaga pendidik yang dimulai dari melaksanakan kegiatan pemilihan guru berprestasi dari seluruh jenjang pendidikan yang dapat dilihat pada tahun 2009 dengan jumlah sekolah yang mengikuti sebanyak 83 sekolah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 tidak ada peningkatan yaitu diikuti 83 sekolah sedang pada tahun 2011 diikuti oleh 45 orang. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk dari penghargaan untuk guru yang ada di Kota Pontianak dengan merealisasikan setiap tahun 3 guru berprestasi dari masing-masing jenjang pendidikan SD sampai SLTA. Selanjutnya mereka yang berprestasi diikutsertakan pada pemilihan guru berprestasi pada jenjang selanjutnya.

## **B. Urusan Kesehatan**

Tujuan pembangunan kesehatan kota Pontianak adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perspektif ini, pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kota Pontianak berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau dapat dilihat dari penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan. Akses masyarakat Pontianak terhadap sarana pelayanan kesehatan telah cukup baik. Salah satunya diperlihatkan dari angka rata-rata jumlah penduduk terhadap tenaga medis dokter umum Tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan sebesar 6,64% begitu juga tenaga medis dokter gigi sebesar 4,74% tenaga medis dokter spesialis sebesar 80,10%, tenaga medis perawat dan bidan masing- masing mengalami peningkatan sebesar 5,60% dan 5,00%. Kondisi ini menunjukkan jumlah SDM sudah memadai dari segi rasio dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pontianak dan sudah optimalnya pemberdayaan tenaga yang ada.



**Tabel II-38**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Di Kota Pontianak Tahun 2008-2013**

No	Jenis Pendidikan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dokter Umum	34	39	40	41	46	38
2	Dokter Gigi	22	22	17	24	24	18
3	Dokter Spesialis	1	3	4	3	1	1
4	Magister (Kesehatan & Non Kesehatan)	13	16	18	16	14	15
5	SKM	36	37	55	56	46	50
6	Apoteker	4	7	10	13	13	10
7	D4 Gizi / S1 Gizi	2	2	5	5	6	6
8	Sarjana non kesehatan	19	14	14	14	15	15
9	AKZI	22	32	38	41	40	42
10	D4 Kesling	1	2	2	2	2	3
11	AKFAR	9	15	14	17	18	18
10	AKG	15	17	21	22	25	29
11	APK/AKL	16	18	20	22	18	18
12	AKPER	44	58	52	60	50	55
13	SPPH	27	26	25	24	22	22
14	SMAK	36	36	36	37	34	34
15	SPAG	17	14	7	7	4	4
16	SPTG/SPRG	49	51	49	49	45	42
17	SMF/SAA	26	25	25	25	20	21
18	D3 Analisis	7	9	13	15	14	16
18	Perawat/SPK	93	89	82	75	109	54
19	Bidan/D3 Bidan/D4 Bidan	104	114	106	115	110	114
20	Sekolah non Kesehatan	54	44	49	49	40	39
21	Paramedis Pembantu (lain-lain)		69	69	69	56	66
22	S1 Fisioterapi		1	1	1	1	0
23	D3 ARO	2	2	2	2	2	2
24	D3 Atem	2	2	2	3	2	2
25	D3 Fisioterapi		2	2	2	2	1
26	D3 ATRO	1	1	1	1	1	1
27	D3 Radioterapi		1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>651</b>	<b>763</b>	<b>782</b>	<b>811</b>	<b>781</b>	<b>737</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-39**  
**Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Tenaga Kesehatan Di Kota Pontianak Tahun 2008 – 2013**

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		Jml	Rasio Nakes	Jml	Rasio Nakes	Jml	Rasio Nakes	Jml	Rasio Nakes	Jml	Rasio Nakes	Jml	Rasio Nakes
1	Dokter Umum	99	19	115	21.8	106	19.3	108	19.1	110	19.7	112	19.4
2	Dokter Gigi	52	10	34	6.5	34	6.2	41	7.2	42	7.4	44	7.5
3	Dokter Spesialis	83	40	171	32.4	104	18.9	88	15.5	92	15.9	101	17.4
4	Dokter Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tenaga Farmasi (termasuk Apoteker)	135	26	141	26.7	118	21.4	140	24.7	154	26.7	37	6.31
6	Tenaga Gizi	87	17	82	15.5	85	15.45	91	16.07	96	16.74	97	16.5
7	Perawat	1082	207	1129	214.1	1092	198.4	1183	211.3	1233	215	1291	220.2
8	Bidan	279	53	277	52.5	251	46	271	48	287	50	295	50.32
9	Tenaga Kesmas	137	26	40	8	63	11.4	94	16.6	85	14.7	106	18.08
10	Tenaga Sanitasi	68	13	55	10.4	51	9.3	66	11.7	49	8.5	45	7.67
11	Tenaga Teknisi Medis	180	35	175	33.2	122	21.3	185	31.8	197	34.1		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-40**  
**Jumlah Kunjungan Pasien Pada Puskesmas Menurut Kecamatan**  
**Di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pontianak Selatan	56.383	50.487	48.816	44.576	47.875
2	Pontiana Tenggara	47.111	46.871	43.242	40.673	62.816
3	Pontianak Timur	115.904	115.445	111.329	108.933	113.760
4	Pontianak Barat	126.186	113.572	106.427	103.231	97.826
5	Pontianak Kota	127.405	151.394	145.811	150.348	131.094
6	Pontianak Utara	136.787	136.795	121.197	130.608	147.205
<b>Jumlah</b>		<b>609.872</b>	<b>614.564</b>	<b>576.822</b>	<b>578.369</b>	<b>600.576</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dalam pengembangan upaya kesehatan diantaranya Puskesmas di wilayah kerja Kota Pontianak dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui pengembangan Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas Unggulan merupakan Puskesmas yang memiliki pelayanan pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun Puskesmas Unggulan tersebut diantaranya :

- Puskesmas Aliyang dengan pengembangan pelayanan dan perawatan persalinan serta pengobatan pada sore hari;
- Puskesmas Siantan Hilir dengan pengembangan pelayanan UGD 24 jam, rawat inap dan perawatan persalinan;
- Puskesmas Kampung Bali dengan pengembangan pelayanan gigi;
- Puskesmas Karya Mulya dengan pengembangan pelayanan dan perawatan persalinan;
- Puskesmas Kom Yos Sudarso dengan pengembangan pelayanan VCT HIV-AIDS;
- Puskesmas Saigon dengan pengembangan pelayanan perawatan gizi buruk (TFC); dan
- Puskesmas Kampung Dalam dengan pengembangan pelayanan dan perawatan persalinan.

**Tabel II-41**  
**Capaian Kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Gakin dan Masyarakat rentan	100	100	100	100	100
2	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	14,42	100	86,3	59,67	94,49
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10,65	100	100	100	11,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-42**  
**Capaian Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat Di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Cakupan Balita yang naik berat badannya (N / D)	70.5	64	61.58	73.20	72.50
2	Cakupan balita bawah garis merah/ditemukan dan dirujuk ke unit rawat disarana kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3.3	2.12	11.07	0.57	0.64
3	Cakupan balita mendapat kapsul vit A 2x per tahun	89.45	79.75	85.74	87.78	85.45
4	Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah 90 tablet	98.9	95.68	94.07	95.59	95.79
5	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	0	2.6	0	100.00	100.00
6	Kec Bebas Rawan Gizi	50	66.67	66.67	83.33	83.33
7	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

Indikator penimbangan balita K/S, D/S, N/S dan D/K menunjukkan peningkatan atau stabil tetapi tidak untuk indikator Keberhasilan Program Penimbangan (N/D). Indikator N/D terus menunjukkan penurunan selama 3 Tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya intake makanan pada balita yang lebih jauh disebabkan oleh 2 hal yaitu krisis ekonomi dan dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan kemampuan daya beli menurun dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memantau pertumbuhan balita atau perilaku/pola pengasuhan balita, selain itu posyandu balita yang belum mencapai seluruh RW.

**Tabel II-43**  
**Jumlah Kasus Gizi Buruk Yang Ditangani di Puskesmas Di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Marasmus	43	30	41	52	8
2.	Kwashiorkor	0	0	0	0	0
3.	Gizi Buruk	43	30	41	52	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

Dari tabel di atas dapat diambil informasi bahwa kasus gizi buruk (Giruk) terbanyak selama 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2012 (52 kasus) sementara kasus gizi buruk paling sedikit terjadi pada Tahun 2013 (8 kasus). Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 41 kasus yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Kasus gizi buruk untuk tahun 2009 paling banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Perumnas II sebanyak 7 kasus sedangkan pada tahun 2010 terjadi di wilayah kerja Puskesmas Siantan tengah dan Kampung Dalam masing-masing 6 kasus. Pada tahun 2011 kasus gizi buruk tertinggi terjadi di wilayah kerja puskesmas Kampung Dalam sebanyak 8 kasus. Apabila diamati menurut kecamatan, kasus gizi buruk paling banyak terjadi di Kecamatan Pontianak Utara yaitu pada tahun 2009 sebanyak 15 kasus, pada Tahun 2010 sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2011 sebanyak 19 kasus berada Kecamatan Pontianak Timur.

**Tabel II-44**  
**Angka Kesakitan Beberapa Penyakit Infeksi dan Non Infeksi Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Jenis Penyakit	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>A</b>	<b>Penyakit Infeksius</b>					
	1. DBD					
	- Angka Kesakitan per 100,000 pddk (Inciden Rate/IR)	738,6	14,2	28,3	23,1	17,06
	- Angka kematian (Case Fatality Rate/CFR)	1,8	1,3	1,3	2,2	4,0
	2. TB Paru					
	- Angka Kesakitan per 100,000 pddk	121,8	77,4	83,5	87,5	79
	- Angka Kematian		2,0	1,2	2,1	1,7
	3. ISPA					
	- Angka Kesakitan Pneumonia per 1000 balita	11,8	28,1	NA	17,2	23,9
	4. Diare					
	- Angka Kesakitan per 1000 pddk	22,2	66	NA	19,82	26,81
	- Angka Kematian	0	0	0	0	0
	5. Malaria					
	- Api per 1000 pddk	0,08	2,8	0,3	0,15	0,04
	6. Tetanus Neonatorum (TN)					
	Angka Kesakitan (orang)	1	2	3	2	2
<b>B</b>	<b>Penyakit Non Infeksius</b>					
	Gizi					
	- Status Gizi					
	KEP total	18,71	19,2	20,88	12,50	
	- Kasus Gizi Buruk	43	30	41	52	43
	-Marasmus	43	30	41	52	43
	-Kwashiorkor	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

Selain melalui puskesmas, Pemerintah Kota Pontianak juga memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhamad Alkadrie untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tidak bias ditangani oleh puskesmas. Sejak tahun 2012 kota pontianak telah mengoperasikan rumah sakit dengan konsepl pelayanan tidak menggunakan sistem kelas tetapi menggolongkan berdasarkan jenis penyakit sehingga tidak akan ada pelayanan yang dibedakan. Artinya tarif pelayanan untuk rawat inap, jasa sarana dan untuk tindakan operasi, dan pemeriksaan tidak ada perbedaaan.

Namun untuk tarif rawat inap hanya dibedakan berdasarkan biaya akomodasi kamar. Sehingga diharapkan tercipta pelayanan tanpa kelas, tidak membedakan atau dikriminasi pelayanan karena alasan kemampuan membayar.

Mengingat operasional rumah sakit yang baru seumur jagung, tentunya masih banyak kelengkapan fasilitas dan peralatan serta sumber daya manusia yang perlu dilengkapi. Disisi lain dengan keterbatasan dana yang ada, tentunya tidak semua kekurangan-kekurangan tersebut dengan serta merta dapat ditanggulangi, dan akan disempurnakan secara bertahap sesuai prioritasnya. Berikut kondisi sarana dan prasarana RSUD Kota Pontianak.

**Tabel II-45**  
**Sarana Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Kota Pontianak**

No	Sarana Rumah Sakit	Jumlah *
		buah
1	Perinatologi	10
2	Kelas VVIP	-
3	Kelas VIP	-
4	Kelas I	-
5	Kelas II	-
6	Kelas III	63
7	ICU	9
8	PICU	9
9	NICU	-
10	HCU	-
11	ICCU	9
12	Ruang Isolasi	-
13	Ruang UGD	26
14	Ruang Bersalin	14
15	Ruang Operasi	-
<b>Jumlah</b>		<b>140</b>

Sumber: RSUD Kota Pontianak, 2014

\*sampai maret 2013

**Tabel II-46**  
**Kondisi Tenaga Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Kota Pontianak**

No	Jenis Tenaga	Jumlah *		
		Kebutuhan (Orang)	Ketersediaan (orang)	Kekurangan (Orang)
1	Dokter Spesialis	9	7	2
2	Dokter Umum	9	3	6
3	Dokter gigi	2	2	0
4	Apoteker	3	3	0
5	Perawat Umum	108	20	88
6	Bidan	21	7	14
7	Perawat Gigi	2	3	-1
8	Asisten Apoteker	12	6	6
9	Penata Rontgen	7	1	6
10	Perawat Bedah	6	1	5
11	Penata Anestesi	3	2	1
12	Analisis	12	6	6
13	Sanitarian	4	3	1
14	Tenaga Gizi	4	4	0
15	Rehabilitasi Media	2	2	0
16	Rekam Medis	5	1	4
17	ATEM	2	1	1
18	Umum	91	30	61
<b>Jumlah</b>		<b>302</b>	<b>102</b>	<b>200</b>

Sumber: RSUD Kota Pontianak, 2014

\*sampai maret 2013

Selama kurun waktu 2013 jumlah kunjungan total pasien ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak adalah 19.560 orang yang meliputi pasein rawat jalan, rawat inap dan pasien IGD. Berdasarkan jenis kepesertaan pasien, pasien terbanyak adalah pasien umum, diikuti pasien ASKES, Jamkesmas dan Jamkesko.

**Tabel II-47**  
**Distribusi Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie**  
**Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kepesertaan Tahun 2013**

Bulan	Jenis Kepesertaan Pasien					Jumlah
	Umum	Askes	Jamkesmas	Jamkesko	Jampersal	
Januari	198	257	-	19	-	474
Februari	160	378	-	24	-	562
Maret	97	332	15	27	-	471
April	271	437	77	48	-	833
Mei	594	579	179	91	10	1.453
Juni	578	585	192	163	34	1.552
Juli	716	816	153	299	47	2.031
Agustus	917	674	209	197	70	2.067
September	1.094	861	327	312	38	2.632
Oktober	1.317	752	287	174	27	2.557
November	1.009	971	328	296	15	2.619
Desember	1.068	788	234	209	10	2.309
<b>JUMLAH</b>	<b>8.019</b>	<b>7.430</b>	<b>2.001</b>	<b>1.859</b>	<b>251</b>	<b>19.560</b>

Sumber: RSUD Kota Pontianak, 2014

Setelah setahun operasionalnya RSUD Kota Pontianak, kinerja pelayanan yang dilakukan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari angka Penggunaan Tempat Tidur / Tingkat Hunian Rumah Sakit yang mencapai 71,85% jika dibandingkan nilai standar 60% - 85%. Sementara itu dari total 2.255 pasien yang dirawat 93,88% keluar hidup (sembuh) dan hanya 6,11% saja yang mati. Kedepan sejalan dengan perbaikan manajemen serta penambahan peralatan, fasilitas dan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, kinerja pelayanan menjadi lebih baik lagi.

**Tabel II-48**  
**Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie**  
**Kota Pontianak Tahun 2013**

No.	Sarana Yankes	Jumlah Tempat Tidur	Pasien Keluar (Hidup+Mati)			Pasien Keluar Mati			Pasien Keluar Mati >= 48 Jam			Jumlah Hari Perawatan	Lama Dirawat (LD)	BOR (%)	LOS	TOI
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P					
1	RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie	99	869	1,248	2,117	52	40	92	26	20	46	13,748	11,537	71,85	5.45	4.87
	- Ruang Perawatan	70	672	684	1356	25	14	39	16	10	26	11768	9386			
	- Ruang Kebidanan	14	0	375	375	0	0	0	0	0	0	605	829			
	- Ruang ICU	5	66	63	129	23	23	46	10	10	20	1375	549			
	- Ruang Perinatologi	10	131	126	257	4	3	7	0	0	0	0	773			
	<b>J U M L A H</b>		869	1,248	2,117	52	40	92	26	20	46	13,748	11,537	71,85 %	5.45	4.87

Sumber: RSUD Kota Pontianak, 2014

### C. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat



mewujudkan hal tersebut maka perlu upaya pengelolaan yang sungguh-sungguh.

Perkembangan kualitas udara buruk di Kota Pontianak selama tahun 2010-2013 menunjukkan penurunan hal ini dapat dilihat dari prosentase kualitas udara memburuk pada tahun 2010 sebesar 9,32% menurun pada tahun 2011 menjadi 1,92% atau 7 hari dalam setahun dan tahun 2012 menurun kembali menjadi 1,37% atau 5 hari dalam satu tahun, ini menunjukkan bahwa rata-rata kualitas udara memburuk dari tahun ke tahun menurun sehingga cuaca buruk di Kota Pontianak juga menurun. Sedangkan untuk prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara sedang sebesar 11,51% pada tahun 2010 dan menurun pada tahun 2011 menjadi 4,93% atau 18 hari dalam satu tahun dan prosentase kualitas baik dimana rata-rata cuaca untuk hari baik sebesar 93,15% atau 340 hari dalam satu tahun serta tahun 2012 cuaca sedang sebesar 6,30% atau 23 hari dalam satu tahun dan cuaca kualitas udara baik sebesar 92,33% atau 337 hari dalam satu tahun.

**Tabel II-49**  
**Perkembangan Kualitas Udara di Kota Pontianak Tahun 2010-2013**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1	Prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara memburuk	%	9,32	1,92	1,37	3,27
2	Prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara Sedang	%	11,51	4,93	6,30	7,38
3	Prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara Baik	%	79,18	93,15	92,33	89,34

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-50**  
**Perkembangan Kasus dan Penyelesaian Pencemaran Tahun 2010-2013**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kasus Pencemaran	kasus	17	38	25	17
2	Jumlah Penyelesaian Kasus Pencemaran	kasus	17	38	25	17
3	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	kasus	17	38	25	17

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2014

Sedangkan jumlah kasus pencemaran yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup tahun 2010 sampai dengan 2013 bervariasi, dimana tahun 2010 dan 2013 jumlah kasus pencemaran sebanyak 17 kasus dari kasus tersebut dapat diselesaikan semuanya, tahun 2011 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran sebanyak 38 kasus dan tahun 2012 sebanyak 25 kasus dari kasus tersebut dapat diselesaikan semua.

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambient ini dilakukan dalam upaya memperoleh data kualitas udara ambient Kota Pontianak bulanan dengan 5 parameter yaitu PM 10, Ozon, NO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>2</sub>. Selain itu juga dilakukan kalibrasi peralatan *Fix Station* dan pengadaan suku cadang AQMS dan pengambilan uji petik emisi kendaraan bermotor serta mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemantauan Udara Ambient Tingkat Nasional di Medan dengan prosentase

kualitas udara. Dengan tersedianya data kualitas udara tersebut dapat memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat terhadap perubahan kualitas udara ambient terutama pada musim kemarau, serta sebagai bahan/ data untuk pengendalian pencemaran udara ambient Kota Pontianak.

Pada saat ini Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Gedung Laboratorium Lingkungan untuk uji emisi dilapangan, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) laboratorium lingkungan seluas 10 m<sup>3</sup> dan pengadaan mobil laboratorium lingkungan serta sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, sehingga memudahkan dalam melakukan pengkajian/analisis beban pencemaran/ tingkat kerusakan kualitas lingkungan hidup berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara ambient tersebut. Berikut dapat dilihat rata-rata parameter pencemar udara dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

**Tabel II-51**  
**Jumlah Rata-Rata Parameter Pencemar Udara di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	PM 10	49,50	30,52	33,02	34,48	30.79
2	SO <sub>2</sub>	15,08	14,55	12,62	14,26	13,78
3	CO	5,74	4,11	4,98	4,98	4,44
4	O <sub>3</sub>	16,79	14,72	16,68	15,63	15.72
5	NO <sub>2</sub>	TD	TD	TD	TD	TD

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2014

Urusan lingkungan hidup juga menyangkut masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dapat dilihat perkembangan kinerja pengolahan sampah selama tahun 2009-2013 secara umum menunjukkan peningkatan baik sarana dan prasarana serta penanganan masalah persampahan di Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang dapat diangkut pertahun pada tahun 2012 sebanyak 438.252m<sup>3</sup>/tahun dari jumlah sampah sebanyak 526.377 m<sup>3</sup>/tahun atau jumlah sampah yang dapat diangkut sebesar 83,26%, jika dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah volume sampah sebanyak 407.934 m<sup>3</sup>/tahun dengan jumlah sampah yang diangkut sebesar 73,85%. untuk lebih jelas melihat perkembangan pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II-52**  
**Perkembangan Pengelolaan Kebersihan Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013*
1.	Jumlah produksi sampah	m <sup>3</sup> /tahun	552.367	567.834	502.146	526.377	586.243
2.	Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA	m <sup>3</sup> /tahun	407.934	410.606	397.897	438.252	438.750
<b>Persentase (%)</b>		<b>m<sup>3</sup>/tahun</b>	<b>73,85</b>	<b>72,32</b>	<b>79,24</b>	<b>83,26</b>	<b>74,84</b>

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 20 13

Ket : Data Sementara

Dalam pengelolaan persampahan di perlukan sarana dan prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPS). Untuk melihat perkembangan sarana dan prasarana TPS selama tahun 2009-2013 dapat dilihat dari jumlah TPS dan Transferdepo pada tahun 2012 sebanyak 111 buah jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 147. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dari pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kebersihan Pertamanan yang berkomitmen untuk menutup TPS liar yang ada dan meminimalisir jumlah TPS. Untuk lebih jelasnya mengenai keberadaan jumlah TPS dan Transferdepo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II-53**  
**Prasarana dan Sarana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)**  
**di Kota Pontianak Tahun 2009- 2013**

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)	buah	-	147	103	111	129
2.	Jumlah Transferdepo	buah	2	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>149</b>	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>131</b>

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 20 14

**Tabel II-54**  
**Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2009- 2013**

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah armada angkutan sampah (dumptruck)	buah	17	23	23	23	23
		Operasional/buah		15	15	14	17
2.	Jumlah armada angkutan sampah (armroll)	buah	10	11	13	23	23
		Operasional/buah		10	12	19	18
3.	Jumlah kendaraan pick up	buah	3	3	3	6	7
4.	Jumlah Buldozer	buah	-	1	1	1	1
5.	Jumlah Excavator	buah	1	1	1	2	2
6.	Jumlah Kontainer	buah		30	32	68	79
7.	Jumlah Motor Gerobak	buah	1	2	7	12	15
<b>Jumlah</b>			<b>32</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>135</b>

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 20 14

Untuk melayani dalam pengangkutan sampah selama tahun 2009 - 2013 dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang telah tersedia pada tahun 2012 dengan keseluruhan sebanyak 135 unit jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 32. Peningkatan armada ini terjadi pada jenis Armroll, kontainer, pick Up dan motor gerobak, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jumlah penduduk yang telayani kebersihan dari tahun 2009 sebanyak 406.418 jiwa atau sebesar 74,73 % dan tahun 2012 meningkat dengan jumlah sebanyak 480.276 jiwa atau sebesar 83,28%.

Kondisi ini menunjukkan kinerja pengelolaan sampah semakin hari semakin membaik. Diharapkan kedepan dapat mencapai tingkat pelayanan 100%, artinya tidak ada lagi sampah yang tertinggal dan pelayanan mencakup sleuruh wilayah dan penduduk Kota Pontianak.

**Tabel II-55**  
**Ruang Lingkup Pelayanan Kebersihan di Kota Pontianak Tahun 2009- 2013**

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Luas Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA)	Ha	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
2.	Luas wilayah Kota Pontianak	Km <sup>2</sup>	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82
3.	Jumlah Penduduk Kota Pontianak	Jiwa	543.842	554.764	565.856	576.694	647.622
4.	Jumlah Penduduk yang terlayani kebersihan	Jiwa	406.418	429.072	456.922	480.276	480.276

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 20 14

Sarana TPA yang dimiliki Kota Pontianak Ruang saat ini seluas 26,6 Hektar dengan model pengolah berupa *open dumping* serta sebagian kecil dengan cara *control landfill*. Kedepan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa model pengelolaan sampah di TPA diharuskan menggunakan metode *sanitary landfill*. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan pendanaan yang lebih banyak lagi mengingat metode pengolahan sampah ini memerlukan penanganan khusus secara intensif. Selain itu saat ini Pemerintah Kota Pontianak sedang merintis kerjasama pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan Kota Boras Swedia yang telah lama terkenal dengan efektifitas mereka dalam mengolah sampah menjadisumber energi biogas dan listrik. Diharapkan dengan kerjasama ini kedepan akan membawa penanganan sampah kota Pontianak menjadi lebih baik.

#### **D. Urusan Pekerjaan Umum**

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Pontianak adalah menyangkut pembangunan di bidang sumber daya air dan kebinamargaan yang mana disesuaikan dengan pembagian fungsi dan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Di bidang sumber daya air dilakukan pengelolaan sungai dan saluran drainase kota dalam rangka pengendalian genangan dan banjir. Sedangkan di bidang bina marga dilakukang pengelolaan jalan dan jembatan yang masuk dalam kategori jalan kota (SK Walikota Pontianak).

Dalam kurun waktu 2009-2013 kinerja pengelolaan drainase cukup baik. Hal ini ditunjangkoordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Balai Wilayah Sungai I WS Kapuas selaku perpanjangan Kementerian PU dalam mengelola sistem drainase kota secara keseluruhan. Saat ini di Kota Pontianak tercatat 5 saluran primer yang pengelolaannya menjadi kewenangan Balai Sungai dan Pemerintah Provinsi dengan total panjang mencapai 131.870 meter dengan sebagian besar tanpa konstruksi penguatan.

Fokus pembangunan sumber daya air ke depan adalah memastikan genangan dan banjir tidak terjadi, khususnya dalam mengantisipasi perubahan iklim yang ekstrem dan perubahan fisik lahan kota. Selain itu focus lainnya yang harus dilakukan adalah memastikan kuantitas dan kualitas sediaan air baku bagi proses pengolahan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Kota Pontianak. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah intrusi air laut pada waktu musim kemarau menyebabkan kadar garam pada air baku sangat tinggi sehingga mengganggu proses pengolahan air bersih. Disisi lain akibat belum terbangunnya instalasi pengumpul air limbah domestik, air sungai tercemar yang akhirnya menyebabkan semakin menurunnya kualitas air baku, belum lagi akumulasi pencemaran akibat PETI dan aktifitas di sepanjang pinggiran sungai Kapuas berdampak pada Kota Pontianak. Untuk mengatasi hal ini, semua pihak dari berbagai level pemerintahan perlu duduk bersama merumuskan langkah penanganannya.

**Tabel II-56**  
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2009-2013**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Panjang Jalan (Jenis Permukaan)						
	- Aspal	Km	203.842	222.053	224.005	236.954	239.618
	- Kerikil/ Telford	Km	5.680	6.388	6.388	-	-
	- Tanah	Km	23.525	19.464	19.464	15.764	15.764
	- Beton	Km	19.679	9.787	9.787	6.926	7.708
2	Panjang jalan (Kondisi)						
	- Baik	Km	77.544	185.457	195.217	199.255	217.169
	- Sedang	Km	92.111	4.187	4.407	4.208	3.137
	- Rusak	Km	61.184	7.670	7.560	7.276	8.580
	- Rusak Berat	Km	21.887	60.379	52.460	48.905	36.904
3	Panjang jalan yang dipelihara	Km	252.726	257.692	259.644	259.644	263.090
4	Peningkatan kualitas jalan	%	0,27	1,96	0,76	-	-
5	Peningkatan rasio jalan yang permukaanya aspal	%	2,60	8,93	0,88	-	-
6	Tingkat pemenuhan kebutuhan lebar jalan	%	100	100	100	-	-
7	Jembatan						
	- Baik	Buah	-	132	132	132	154
	- Sedang	Buah	-	-	-	-	-
	- Rusak	Buah	-	-	-	-	-
8	Jumlah alat berat yang dimiliki	Unit	27	37	37	154	175
9	Jumlah alat berat yang dalam kondisi baik	Unit	19	26	27	147	175
10	Persentase jalan yang dilengkapi trotoar	%	20	20	20	20	20
11	Tingkat penataan persimpangan jalan	%	15	20	20	20	20
12	Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	100	100	100	100	100
13	Terpenuhinya kebutuhan penerangan di jalan umum pada malam hari	%	70	70	70	70	70
14	Prosentase peningkatan jalan dengan kondisi baik	%	19,679	9,787	9,787	37,48	NA
15	Tingkat kepadatan per ruas jalan utama	LHR	4,187	4,187	4,407	-	-
16	Tingkat pemenuhan kebutuhan lebar jalan	%	7,670	7,670	7,560	-	-
17	Tingkat pemenuhan kebutuhan jembatan	%	60,588	60,379	52,460	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, 2014

Pengelolaan jalan-jalan kota dalam kurun waktu 2009-2013 secara umum telah dilakukan dengan baik hal ini terlihat dari panjang jalan yang memiliki kondisi baik terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tersebut, konsentrasi diarahkan untuk meningkatkan volume jalan-jalan strategis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Juga dilakukan peningkatan jalan-jalan kota dengan cara betonisasi. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi semakin tingginya muka air genangan yang berdampak pada kerusakan aspal jalan. Dengan membeton jalan, umur jalan semakin lama dan biaya pemeliharaan semakin rendah. Tantangan kedepan adalah menciptakan akses antar wilayah yang lebih baik dengan membangun jalan-jalan baru untuk mengurangi beban jalan-jalan di tengah kota. Pembangunan jalan baru juga diarahkan pada kawasan utara Pontianak untuk merangsang pertumbuhan sehingga terjadi pemertaan pertumbuhan wilayah.

#### **E. Urusan Penataan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk pembangunan jangka panjang. Pemanfaatan ruang Kota Pontianak untuk 20 tahun kedepan mengacu kepada RTRW Kota Pontianak 2013-2033 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Berdasarkan amanat Perda tersebut, perlu tindak lanjut penyusunan rencana yang lebih rinci sebagai dasar pengendalian ruang seperti RDTR dan peraturan zonasi, Rencana Detil Kawasan Strategis, serta rencana-rencana rinci sektoral lainnya.

Pemanfaatan ruang di Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian peruntukkan melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana



detail tata ruang kawasan strategis. Disamping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung.

Namun demikian dalam hal Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, masih terkendala dengan instrument dan mekanisme pelaksanaannya. Masih kurangnya aturan yang terkait dengan Peraturan Zonasi, Insentif bagi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Disinsentif bagi yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, serta Sanksi bagi pelanggar aturan Rencana Tata Ruang. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang ini, saat ini kewenangan pengeluaran IMB telah ditetapkan menjadi domain BP2T, akan tetapi kajian teknis serta pertimbangannya tetap mengikutsertakan instansi-instansi terkait.

Kendala utama dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat kurangnya aparatur pengawasan dan kurangnya rencana detail teknis operasional dari rencana tata ruang yang ada. Disisi lain basis data bangunan belum mencakup keseluruhan bangunan yang berdiri/ada sehingga pengendalian bangunan-bangunan tidak berijin lebih banyak dilakukan dengan cara pasif/menunggu pengajuan dari masyarakat dan menunggu pemutihan. Izin yang diterbitkan pada tahun 2009 sebanyak 928 izin meningkat pada tahun 2010 menjadi 1.597, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2011 menjadi 2.053 serta tahun 2012 meningkat kembali menjadi 3.277.

Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan Permendagri no 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, didalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis berdasarkan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini berupa kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan pusat kota.

Kawasan strategis lainnya yang dikembangkan adalah kawasan strategis sosial budaya Keraton Kadriah dan Makam Batulayang. Mengingat kawasan strategis ini lebih banyak berada di kawasan utara dan timur Kota Pontianak, kawasan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhankawasan dalam rangka mereduksi ketimpangan perkembangan wilayah.

#### **F. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah vital, karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan berawal dari perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pendekatan teknokratik, demokratik, partisipatif, politis dan *bottom-top down* dilakukan secara simultan. sehingga keterlibatan stakeholder, legislatif dan masyarakat merupakan keharusan.

Perencanaan pembangunan Kota Pontianak diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan implementatif dalam arti mempunyai tujuan dan



antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif dalam arti menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti Gas Rumah Kaca, MDGs, *sustainable development* serta muatan yang bersifat spesifik.

Terobosan yang dilakukan BAPPEDA kota Pontianak selaku institusi yang memegang kewenangan pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah memadukan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP). Kehadiran SIPP ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perencanaan. Dengan SIPP masyarakat luas dapat mengetahui secara langsung/online usulan-usulan kegiatan pembangunannya apakah dipenuhi ataukah sebaliknya, semua dilakukan secara transparan. Sehingga tidak ada lagi sikap skeptis dan anggapan bahwa Musrenbang merupakan ajang seremonial belaka yang tidak menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah bagaimana produk perencanaan yang dihasilkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, bagaimana dokumen yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan operasional teknis dalam keputusan-keputusan pembangunan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dapat memuaskan berbagai pihak serta dilaksanakan sesuai aturan dan selesai pada waktu sesuai ketentuan.

Dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dan KUA PPAS serta perubahannya pada lima tahun terakhir selalu dilaksanakan tepat waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan penetapan APBD yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang menjadi tantangan dalam proses perencanaan tahunan ini adalah menetapkan prioritas program dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan strategis dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Disatu sisi harus dipastikan bahwa pembangunan di setiap sektor dan urusan pembangunan dapat terus berjalan, disisi lain keterbatasan dana yang dimiliki mengharuskan prioritasasi beberapa urusan yang secara strategis memang urgen untuk didahulukan.

Selain penyelenggaraan perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi lain yang juga dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pontianak adalah pengendalian pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan (monev RKPD) secara rutin telah dilaksanakan, akan tetapi menghadapi berbagai kendala. Diantaranya adalah keterlambatan data realisasi kegiatan SKPD sebagai bahan monev di lapangan. Hal ini seringkali terjadi sehingga menyebabkan laporan pengendalian juga terlambat dibuat, sehingga berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dalam RKPD seringkali terlambat ditindaklanjuti. Untuk mengantisipasi ini BAPPEDA Kota Pontianak sedang mengembangkan sebuah sistem informasi online untuk melakukan monev atau yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG). Diharapkan dengan memanfaatkan sistem ini tidak lagi terjadi hal-hal yang disebutkan di atas.

Sebagai reaksi dinamika perkembangan kota yang sedemikian cepat, selain melaksanakan proses perencanaan yang ideal juga dilakukan berbagai kajian, studi dan evaluasi dalam berbagai bidang/urusan pembangunan. Hal ini selain untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi juga dalam rangka memberikan dasar/*guideline* bagi pengambil keputusan untuk menetapkan

berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan Kota Pontianak. Diharapkan setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Pontianak telah dikaji secara mendalam baik efek positif ataupun dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih, ketidaksinkronan, ataupun kontra produktif.

## G. Urusan Cipta Karya dan Perumahan

Penyediaan perumahan di Kota Pontianak dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pembangunan rumah formal oleh pihak pengembang. Dengan keterbatasan wilayah kota Pontianak, untuk mengatasi kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat, perlu didorong pengembangan hunian layak huni secara vertikal.

**Tabel II-57**  
**Rekapitulasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi Kota Pontianak Tahun 2013**

Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah (Unit)	
	Rumah tak layak huni	Sanitasi
<b>Pontianak Kota</b>	<b>4</b>	<b>170</b>
Mariana	1	31
Tengah	1	41
Sungai Jawi		40
Darat Sekip		24
Sungai Bangkong	2	34
<b>Pontianak Barat</b>	<b>5</b>	<b>230</b>
Sungai Beliang	2	65
Paal lima	1	55
Sungai Jawi Dalam	1	50
Sungai Jawi Luar	1	60
<b>Pontianak Selatan</b>	<b>4</b>	<b>120</b>
Parit Tokaya	0	23
Benua Melayu Darat	1	17
Benua Melayu Laut	1	29
Akcaya	1	25
Kota Baru	1	26
<b>Pontianak Tenggara</b>	<b>4</b>	<b>60</b>
Bansir Darat	0	14
Bansir Laut	3	16
Bangka Belitung Darat	0	15
Bangka Belitung Laut	1	15
<b>Pontianak Timur</b>	<b>4</b>	<b>348</b>
Tanjung Hilir	0	66
Tanjung Hulu	0	40
Dalam Bugis	2	56
Banjar Serasan	0	40
Parit Mayor	2	40
Saigon	0	50
Tambelan Sampit	0	56
<b>Pontianak Utara</b>	<b>5</b>	<b>272</b>
Batulayang	1	107
Siantan Hilir	1	55
Siantan Tengah	2	55
Siantan Hulu	1	55
<b>Kota Pontianak</b>	<b>26</b>	<b>1200</b>

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, 2014

Disisi lain upaya Pemerintah kota Pontianak mengatasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan serta perbaikan sarana-sarana pendukung perumahan. Pendekatan ini sejak tahun 2009 telah berhasil mengurangi kawasan kumuh sampai 64,76% dari awalnya seluas 247,77 ha hingga menjadi 87,29 ha saja di tahun 2012. Upaya lainnya dilakukan dengan cara memberikan bantuan perbaikan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni baik dengan menggunakan dana APBD kota Pontianak, juga melalui pemerintah pusat dan dana pihak ketiga. Dalam kurun waktu 2009-2012 sebanyak 3.958 unit rumah telah mendapatkan bantuan.

**Tabel II-58**  
**Rekapitulasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2010-2013**

No	Kelurahan	TA. 2010					TA. 2011					TA. 2012						
		PNPM		Menamping PAKET (APBD)	PERKIM APBN (Unit)	JUML AH	PNPM		(AP BD)	PERKIM		JU AH	PNPM		PERKIM	CSR PT. DIAMOND NDOSATRI/	JUMLAH	
		APBN (Unit)	APBD (Unit)				APBD (Unit)	APBD (Unit)		APBN (Unit)	BPPS (Unit)		BSPS APBN-P (Unit)	PAKET APBN (Unit)				APBN (Unit)
<b>A PONTIANAK TIMUR</b>																		
1	Tanjung Hilir			26		26			8		23	31	18		9	196	223	
2	Banjar Serasan			12		12			11		22	33		9	114	123		
3	Parit Mayor			7		7			8		22	30	10	10		20		
4	Saigon			8		8			8		22	30	14	9	73	96		
5	Dalam Bugis			8		8			10		22	32		9	223	232		
6	Tanjung Hulu			7		7			9		23	32	10	9	50	69		
7	Tambelan Sampit			8		8			10		22	32		9		9		
<b>Jumlah</b>		-	-	76	-	76	-	64	-	156	220	52	-	64	656	-	772	
<b>B PONTIANAK KOTA</b>																		
1	Sungai Jawi			10	33	43			16			16	20	11	27		58	
2	Darat Sekip			8		8			13			13		10			10	
3	Mariana			8		8			8			8	11	10			21	
4	Sungai Bangkong			9		9			8			8	15	11		5	31	
5	Tengah			10		10			7			7		10			10	
<b>Jumlah</b>		-	-	45	33	78	-	52	-	-	52	46	-	52	27	5	130	
<b>C PONTIANAK SELATAN</b>																		
1	Kota Baru			8		8			9			9		11			11	
2	Benua Melayu Darat	5	4	6		15	1	8				9	3	5		5	13	
3	Akcaya			1		1		1				1		6			6	
4	Parit Tokaya			8		8		8				8	20	10			30	
5	Benua Melayu Laut			9		9		9				9	16	3			19	
<b>Jumlah</b>		5	4	32	-	41	1	35	-	-	36	36	3	35	-	5	79	
<b>D PONTIANAK BARAT</b>																		
1	Paal Lima			10		10	3	6	8			17	17	5	6	84	112	
2	Sungai Jawi Luar			11		11			11		32	43		14	91		105	
3	Sungai Jawi Dalam			9		9			6		34	40	3	8	62		73	
4	Sungai Beliang			15		15			17		47	64		14	85		99	
<b>Jumlah</b>		-	-	45	-	45	3	6	42	-	113	164	17	8	42	322	-	389

No	Kelurahan	TA. 2010					TA. 2011					TA. 2012						
		PNPM		Peningkatan PAKET	PERKIM		PNPM		PERKIM		JU ML	PNPM		PERKIM		CSR PT. DIAMOND		
		APBN	APBD		APBN	AH	APBD	APBN	(AP BD)	BPPS (Unit)		BSPS APBN-P (Unit)	PAKET APBN	APBN	(Unit)		APBN	(Unit)
		(Unit)	(Unit)	(APBD)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)		
<b>E PONTIANAK UTARA</b>																		
1	Batulayang			13	33	46		8	25	64	189	23	15	219		257		
2	Siantan Hulu			9	34	43		9		28	123	12	15	68		95		
3	Siantan Tengah			10		10		9		42	71		6			6		
4	Siantan Hilir		1	10		11		15	25	24	86		5	66		71		
<b>Jumlah</b>		-	1	42	67	110	-	41	50	158	469	35	-	41	353	-	429	
<b>F PONTIANAK TENGGARA</b>																		
1	Bansir Laut			10		10				23	43		7			7		
2	Bansir Darat			9		9					18		10			10		
3	Bangka Belitung Laut			8		8					16	2	10			12		
4	Bangka Belitung Darat			6		6					12		5			5		
<b>Jumlah</b>		-	-	33	-	33	-	-	-	23	89	-	2	32	-	-	34	
<b>TOTAL</b>		5	5	273	100	383	3	7	266	50	450	1,030	186	13	266	1,358	10	1,833

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, 2014

Untuk mengatasi kekumuhan kawasan juga dilakukan dengan peningkatan/perbaikan jalan-jalan gang/jalan lingkungan melalui kegiatan perbaikan melalui pihak ketiga dan dengan bantuan material jalan lingkungan berupa semen dan batu. Hal positif yang didapat dari pelaksanaan program ini adalah memacu partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Di tahun 2012, tercatat sebanyak 6.436 zak semen dibagikan kepada masyarakat dengan total jalan gang yang diperbaiki sebanyak 232 gang.

**Tabel II-59**  
**Bantuan Material Jalan Lingkungan Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Jumlah Semen (Zak)	Jumlah Batu (m3)	Anggaran Pembiayaan
1	2009	19.145	19	1.447.235.000
2	2010	23.360	0	1.794.366.000
3	2011	49.722	0	3.907.000.000
4	2012	36.231	0	2.923.740.000
5	2013	36.431		4.000.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>109.313</b>	<b>19</b>	<b>14,072,341,000</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-60**  
**Kondisi Jalan Lingkungan (Gang) Di Kota Pontianak Tahun 2013**

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi Jalan			
			Baik	%	Rusak	%
<b>PONTIANAK TIMUR</b>						
1	Tanjung Hilir	39	35	89,74	4	10,26
2	Banjar Serasan	102	87	85,29	15	14,71
3	Parit Mayor	41	37	90,24	4	9,76
4	Saigon	98	82	83,67	16	16,33
5	Dalam Bugis	62	61	98,39	1	1,61
6	Tanjung Hulu	118	89	75,42	29	24,58
7	Tambelan Sampit	29	26	89,66	3	10,34
<b>Jumlah</b>		<b>489</b>	<b>417</b>	<b>85,28</b>	<b>72</b>	<b>14,72</b>
<b>PONTIANAK KOTA</b>						
1	Sungai Jawi	258	224	86,82	34	13,18
2	Darat Sekip	63	60	95,24	3	4,76
3	Mariana	41	36	87,80	5	12,20
4	Sungai Bangkong	294	282	95,92	12	4,08
5	Tengah	48	37	77,08	11	22,92
<b>Jumlah</b>		<b>704</b>	<b>639</b>	<b>90,77</b>	<b>65</b>	<b>9,23</b>
<b>PONTIANAK SELATAN</b>						
1	Kota Baru	111	59	53,15	52	46,85
2	Benua Melayu Darat	53	52	98,11	1	1,89
3	Akcaya	105	57	54,29	48	45,71
4	Parit Tokaya	83	40	48,19	43	51,81
5	Benua Melayu Laut	43	28	65,12	15	34,88
<b>Jumlah</b>		<b>395</b>	<b>236</b>	<b>59,75</b>	<b>159</b>	<b>40,25</b>
<b>PONTIANAK BARAT</b>						
1	Paal Lima	96	47	48,96	49	51,04
2	Sungai Jawi Luar	168	155	92,26	13	7,74
3	Sungai Jawi Dalam	196	162	82,65	34	17,35
4	Sungai Beliung	215	114	53,02	101	46,98
<b>Jumlah</b>		<b>675</b>	<b>478</b>	<b>70,81</b>	<b>197</b>	<b>29,19</b>
<b>PONTIANAK UTARA</b>						
1	Batulayang	102	29	28,43	73	71,57
2	Siantan Hulu	167	63	37,72	104	62,28
3	Siantan Tengah	174	72	41,38	102	58,62
4	Siantan Hilir	189	72	38,10	117	61,90
<b>Jumlah</b>		<b>632</b>	<b>236</b>	<b>37,34</b>	<b>396</b>	<b>62,66</b>
<b>PONTIANAK TENGGARA</b>						
1	Bansir Laut	40	32	80,00	8	20,00
2	Bansir Darat	38	31	81,58	7	18,42
3	Bangka Belitung Laut	71	64	90,14	7	9,86
4	Bangka Belitung Darat	147	144	97,96	3	2,04
<b>Jumlah</b>		<b>296</b>	<b>271</b>	<b>91,55</b>	<b>25</b>	<b>8,45</b>
<b>TOTAL 2013</b>		<b>3.191</b>	<b>2.277</b>	<b>71,36</b>	<b>914</b>	<b>28,64</b>
<b>TOTAL 2012</b>		<b>2.993</b>	<b>1.907</b>	<b>63,72</b>	<b>1.086</b>	<b>36,28</b>

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, 2014

**Tabel-61**  
**Perkembangan Bantuan Material Jalan lingkungan di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Kecamatan	Realisasi Bantuan									
		2009		2010		2011		2012		2013	
		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
		1.447.235.000,-		1.794.366.000,-		3.907.000.000,-		2.923.740.000,-		4.000.000.000,-	
		Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak
1	Pontianak Barat			53	5.025	100	13.230	57	10.300	90	10.100
2	Pontianak Kota	37	3.390	38	4.350	84	11.957	47	11.205	70	9.500
3	Pontianak Selatan	32	3.130	48	5.040	58	8.300	35	6.500	40	6.500
4	Pontianak Tenggara	18	1.850	20	2.265	22	3.425	6	750	20	1.000
5	Pontianak Timur	27	2.350	28	2.450	44	5.625	20	2.450	40	3.500
6	Pontianak Utara	42	3.100	48	4.240	76	8.205	38	5.026	70	5.743
	<b>Jumlah</b>	<b>208</b>	<b>18.620</b>	<b>244</b>	<b>23.370</b>	<b>384</b>	<b>50.742</b>	<b>203</b>	<b>36.231</b>	<b>330</b>	<b>36.431</b>

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, 2014

Tugas berat yang menanti dari penyelenggaraan urusan ini adalah bagaimana memperbaiki sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman yang kondisinya semakin menurun. Perbaikan sektor sanitasi ini meliputi penyediaan air bersih, penyediaan sarana pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kondisi penyediaan air bersih di Kota Pontianak saat ini baru mencapai 74,10%, masih cukup jauh dari target MDGs sebanyak 80% yang harus dipenuhi di tahun 2015. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan air bersih ini adalah penyediaan air baku, tingkat kebocoran yang masih tinggi serta keterbatasan biaya investasi untuk pembaharuan jaringan lama dan pemasangan jaringan baru. Kendala lainnya adalah masalah keterbatasan dan kualitas air baku terutama pada musim kemarau yang mengganggu distribusi dan kontinuitas penyediaan air kepada penduduk.

Perilaku hidup bersih dan sehat dicapai melalui edukasi dan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat. Memerikan pemahan bahwa lingkungan hidup dan perilaku yang sehat akan sangat berpengaruh kepada kualitas hidup. Memang tidak mudah untuk mengubah perilaku masyarakat dengan cepat akan tetapi apabila dilakukan secara terus menerus diharapkan dapat memperbaiki perilaku yang tidak baik dari sisi sanitasi.

#### **H. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan**

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan diperlukan data dan informasi baik yang sudah berjalan maupun sedang berjalan untuk perencanaan kepemudaan dan keolahragaan ke depan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Kota Pontianak sampai tahun 2013 mempunyai 44 organisasi pemuda yang tersebar di 6 kecamatan. Beragam OKP tersebut bergerak sesuai dengan visi, misi dan tujuan didirikannya, ada yang bergerak dibidang politik, ekonomi, pengembangan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Kemunculan OKP tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bukan justru sebaliknya.

Melalui program peningkatan peran serta kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak mengadakan kerjasama dengan Negara lain seperti Jepang, Korea, Malaysia, Australia dan Negara lainnya melalui Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN). Pada Tahun 2011 peserta PPAN berjumlah 4 orang terdiri dari 3 orang siswa/siswi SLTA dan 1 orang mahasiswa, tahun 2012 jumlah peserta dari SLTA bertambah menjadi 4 orang dan mahasiswa 1 orang. Tahun 2013 menurun menjadi 3 orang dan semuanya berasal dari siswa/siswi SLTA.

Tahun 2009 sampai tahun 2011 Kota Pontianak belum berhasil mengirim pemuda terbaik untuk kegiatan Kapal Pemuda Nusantara karena gugur (tidak lulus seleksi) pada tingkat provinsi. Baru pada tahun 2012 Kota Pontianak berhasil mengirim peserta untuk kegiatan Kapal Pemuda Nusantara dengan jumlah peserta 4 orang dan diikuti selama 1 bulan. Tahun 2013 untuk kegiatan yang sama Kota Pontianak hanya berhasil sebagai cadangan.

Kegiatan PPAN diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan kedisiplinan di kalangan generasi muda, dan dapat melatih pemuda Indonesia dalam bekerjasama
2. Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan serta mampu bekerjasama dan bersinergi dengan pemuda Negara lain.
3. Belajar, menjalin persahabatan, menambah wawasan dan mengenal lebih banyak budaya Negara lain.

Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2009, kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan bidang Pemuda dan Olahraga sudah cukup baik. Tercatat bahwa berturut turut dalam rentang waktu tersebut, Kota Pontianak menjadi juara umum dalam perhelatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROP) serta Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalbar (POPDA) dengan perolehan jumlah medali yang cukup signifikan meningkat. Disisi lain dalam pembinaan pemuda, even kepemudaan yang dilakukan sudah cukup banyak dan mengikutsertakan hampir merata dari berbagai golongan pemuda, sehingga memberikan hasil

**Tabel II-62**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Pontianak**

No.	Kecamatan/Kelurahan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>I</b>	<b>Kecamatan Pontianak Barat</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
1	Kel. Sei Jawi Dalam	46	46	23	23	23
2	Kel. Sei Beliang	33	33	23	23	23
3	Kel. Sei Jawi Luar	21	21	41	41	41
4	Kel. Pal V	18	18	21	21	21
<b>II</b>	<b>Kecamatan Pontianak Kota</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
1	Kel. Sei Jawi	12	12	23	23	23
2	Kel. Mariana	9	9	22	22	22
3	Kel. Sei Bangkong	31	31	20	20	20
4	Kel. Darat Sekip	4	4	20	20	20
5	Kel. Tengah	13	13	20	20	20
<b>III</b>	<b>Kecamatan Pontianak Selatan</b>	<b>178</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
1	Kel. Parit Tokaya	69	50	50	50	50
2	Kel. Bangka Belitung	48	27	27	27	27
3	Kel. Benua Melayu Darat	9	30	30	30	30
4	Kel. Benua Melayu Laut	0	0	0	0	0
5	Kel. Akcaya	25	25	25	25	25
6	Kel. Kota Baru	27	27	27	27	27
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Pontianak Timur</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
1	Kel. Parit Mayor	8	8	11	11	11
2	Kel. Banjar Serasan	5	5	10	10	10
3	Kel. Dalam Bugis	8	8	5	5	5
4	Kel. Tanjung Hulu	16	16	10	10	10
5	Kel. Tanjung Hilir	10	10	5	5	5
6	Kel. Saigon	4	4	6	6	6
7	Kel. Tambelan Sampit	8	8	5	5	5
<b>V</b>	<b>Kecamatan Pontianak Tenggara</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
1	Kel. Bansir Laut	22	22	22	22	22
2	Kel. Bansir Darat	20	20	20	20	20
3	Kel. Bangka Belitung Laut	20	20	20	20	20
4	Kel. Bangka Belitung Darat	21	21	21	21	21
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Pontianak Utara</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
1	Kel. Batu Layang	10	10	20	20	20
2	Kel. Siantan Hulu	22	22	14	14	14
3	Kel. Siantan Hilir	8	8	24	24	24
4	Kel. Siantan Tengah	29	29	20	20	20
	<b>Total</b>	<b>576</b>	<b>557</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak



yang cukup baik dan memberikan manfaat bagi terciptanya sumber daya pemuda yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan Kota Pontianak.

**Tabel II-63**  
**Kinerja Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Indikator Kinerja	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pemuda berprestasi	-	6	9	10	6
2	Atlet berprestasi	23	18	16	23	
3	Jumlah even kepemudaan	-	-	4	4	2
4	Jumlah cabor yang dibina	12	13	18	17	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak, 2014

### I. Urusan Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, Kota Pontianak masih memerlukan dukungan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk menjalankan urusan ini, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bertindak sebagai fasilitator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Pontianak.

Untuk meningkatkan pelayanan yang prima diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kemajuan di Bidang Pelayanan, salah satu upaya tersebut berupa pelayanan satu atap, berupa 8 Jenis Pelayanan Perizinan yakni ijin Siup, Situ/Ho, TDP, IMB, Siau Izin Ops Perhubungan, Siujk Reklame dan Jasa Medik. Selain itu Pemerintah Kota Pontianak juga memberikan keringanan dalam mengurus perijinan, antara lain :

- 1 Tindak lanjut UU No 28 Thn 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Pemerintah Kota Pontianak mulai 1 Juni 2011 telah membebaskan semua perizinan dari pembayaran retribusi kecuali 4 jenis izin ( IMB, HO, Trayek, Perikanan)
- 2 Tindak lanjut UU No 28 Thn 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Pemerintah Kota Pontianak mulai 1 Juni 2011 telah membebaskan semua perizinan dari pembayaran retribusi kecuali 4 jenis izin ( IMB, HO, Trayek, Perikanan)

Untuk melihat perkembang perizinan di Kota Pontianak telah terdata jumlah permohonan izin masuk dari tahun 2010-2012 dengan peningkatan rata-rata sebesar 2,01% dan izin yang diterbitkan rata-rata peningkatan sebesar 5,42%, dimana tahun 2010 dengan jumlah izin yang masuk sebesar 11.210 izin namun yang diterbitkan sebanyak 10.670 izin, terjadi peningkatan pada tahun 2011 menjadi 12.700 izin masuk dengan izin yang diterbitkan sebesar 12.015 izin sedangkan tahun 2012 sebanyak 12.015 izin masuk sedangkan yang diterbitkan sebanyak 12.718 izin, dengan jumlah permohonan izin yang paling tinggi yakni permohonan SITU/HO kenaikan yang besar didalam pengurusan izin SITU/HO mengindikasikan usaha mikro, kecil dan menengah tumbuh cukup signifikan.

**Tabel II-64**  
**Perkembangan Surat Izin yang Diterbitkan dengan Permohonan Izin Tahun 2009 – 2013**

URAIAN	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013*)	
	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT
SIUP	1.500	1.440	2.016	1.931	2.672	2.628	2.672	2.628
SITU					2.156	2.030	2.156	2.030
HO	4.000	3.942	4.004	3.666	1.725	1.591	1.725	1.591
TDP	1.500	1.168	1.897	1.971	2.182	2.167	2.182	2.167
IMB	1.300	1.382	1.597	1.983	.301	3.277	3.301	3.277
SIAU	100	62						
Operasional Perhubungan			97	52	52	66	73	74
SIUJK	163	156	635	606	232	209	232	209
Reklame	200	206	150	120	4	9		
Jasa Medik	33	33	35	35				
Izin Rumah Sakit					4	5	4	5
Izin Apotek					24	24	24	24
Izin Penyelenggara Optikal					2	1	2	1
Pelatihan/Pendidikan Luar Sekolah	94	76	94	93				
Perikanan	4	4	8	8	2	6	4	3
Situ	202	145	200	224	269	301	182	168
TDI/IUI	120	84	70	63	113	91	113/19	91/20
Izin Pembuangan Limbah Cair					8	12	8	12
Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1.894	1.913	1.897	1.833	269	301	269	301
Izin mendirikan bangunan reklame/tower							4	9
Izin klinik							4	5
Izin pedagang eceran obat							2	2
Tanda daftar usaha pariwisata							261	301
<b>JUMLAH</b>	<b>11.210</b>	<b>10.670</b>	<b>12.700</b>	<b>12.585</b>	<b>12.015</b>	<b>12.718</b>	<b>13.237</b>	<b>12.918</b>

Sumber : BP2T Kota Pontianak

Ket : \*) sampai dengan bulan Juni 2013

Pelayanan perijinan yang telah diterbitkan sebagai standar prosedur pelayanan yang lebih baik tidak lepas dari standar waktu yang telah ditentukan sehingga penerbitan surat ijin dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun ketentuan standar waktu pelayanan sebagai berikut :

**Tabel II-65**  
**Standar Waktu Pelayanan Perizinan**

No.	Jenis Ijin	Lama Waktu Pelayanan (hari)
1	SIUP	1
2	SITU/HO(*)	12
3	TDP	1
4	IMB	14
5	SIUJK	1
6	Perikanan	6
7	SIUAU	5
8	Trayek	8
9	TDG	7
10	TDI/IUI	4
11	Klinik	7
12	Rumah Sakit	10
13	Pedagang Eceran Obat	7
14	Optikal	7
15	Apotek	8
16	TDUP	7
17	Penanaman Modal	1

Sumber : BP2T Kota Pontianak

Perkembangan ekonomi di Kota Pontianak tahun 2010-2013 dapat dilihat dari jumlah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kurun empat tahun terakhir perkembangan penanaman modal di Kota Pontianak cukup menggembirakan. perbaikan infrastruktur dan perbaikan pelayanan perijinan memberikan dampak meningkatnya investasi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut

**Tabel II-66**  
**Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 (dalam juta rupiah)**

No.	URAIAN	2010		2011		2012		2013	
		Realisasi	2009*	Realisasi	2010*	Realisasi	2011*	Realisasi	2012
1	Jumlah Investasi PMDN	194.284,60	196.336,60	194.302,99	194.284,60	563.924,34	194.302,99	560.915,34	563.924,34
2	Jumlah investasi PMA	25.112,72	25.091,34	25.112,72	25.112,72	71.951,69	25.112,72	175.921,07	71.951,69
<b>TOTAL INVESTASI</b>		<b>219.397,32</b>	<b>221.427,94</b>	<b>219.415,71</b>	<b>219.397,32</b>	<b>635.879,03</b>	<b>219.415,71</b>	<b>647.077,55</b>	<b>635.876,03</b>

Sumber : BP2T Kota Pontianak, 2014 diolah

**Tabel II-67**  
**Rekapitulasi Rencana, Realisasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2009-2013**

No	Tahun	PMDN						PMA					
		Rencana		Realisasi		Tenaga Kerja		Rencana		Realisasi		Tenaga Kerja	
		Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	WNI	Asing	Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	WNI	Asing
1	2009	22	1.175.518,71	16	196.336,60	1.221	-	47	373.451,09	11	25.091,34	2.194	39
2	2010	22	1.164.885,27	16	194.284,60	1.215	-	49	375.355,26	11	25.112,72	2.220	39
3	2011	20	639.885,27	14	194.302,99	1.521	-	45	360.355,26	10	25.112,72	2.416	38
4	2012	20	639.649,87	15	568.924,34	921	-	46	375.306,51	12	71.951,69	2.967	35
5	2013	19	708.410,87	13	560.915,34	985	-	43	369.525,26	13	175.921,07	3.263	25

Sumber : BP2T Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-68**  
**Kinerja Pelayanan Masyarakat Tahun 2010 – 2013**

No	Keterangan	Satuan	2010	2011	2012	2013*)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di BP2T	%	75,17	83,11	73,25	74,01
2	Prosentase surat izin yang diterbitkan dengan permohonan izin	%	99,81	99,81	97,50	92,70
3	Prosentase izin yang diterbitkan dengan objek yang harus berizin	%	86,79	97,55	97,50	92,70
4	Tingkat kesesuaian waktu pelayanan dan perizinan dengan ketentuan	%	80,10	85,00	90,00	90,00
5	Prosentase pendapatan retribusi dari target yang ditentukan	%	95,39	97,80	98,07	81,64

Sumber : BP2T Kota Pontianak

Ket : \*) sampai dengan bulan Juni 2013

Sedangkan untuk data kinerja pelayanan perijinan terhadap masyarakat terjadi peningkatan dari tahun 2010-2011, dimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan sebesar 75,17% meningkat menjadi 83,11% dan tahun 2012 sebesar 73,25%, prosentase surat izin yang diterbitkan dengan permohonan izin tahun 2010-2011 dengan nilai yang tetap yakni 99,81% dan tahun 2012 sebesar 97,50%, dan prosentase izin yang diterbitkan dengan objek yang harus berizin sebesar 86,79% meningkat menjadi 97,55% dan tahun 2012 sebesar 97,50% serta prosentase pendapatan retribusi dari target yang ditentukan sebesar 95,39% meningkat menjadi 97,80% tahun 2011 dan meningkat tahun 2012 sebesar 98,07%.

## J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan perekonomian Kota Pontianak tidak terlepas dari peranan koperasi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian, mengingat lebih mudah pengelolaannya dan usahanya dari anggota untuk anggota sehingga lebih mudah untuk berhubungan. Dengan kenyataan tersebut maka komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk mengembangkan koperasi akan ditingkatkan pada masa mendatang. Berikut kinerja urusan koperasi dan UKM.

**Tabel II-69**  
**Perkembangan Koperasi di Kota Pontianak 2009 - 2013**

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013*
1	Jumlah Koperasi	Unit	757	770	780	790	790
2	Jumlah Induk Koperasi/Koperasi sekunder /level Provinsi	Buah	5	5	5	5	5
3	Jumlah Anggota	Orang	117.933	130.301	40.651	40.873	40.873
4	Pelaksanaan RAT	Unit	105	109	109	109	109
5	Koperasi Aktif	Unit	441	452	461	471	471
6	Koperasi tidak Aktif	Unit	316	320	319	320	320
7	Permodalan						
	- Modal Sendiri	Rp Milyar	235,784	244,066	248,962	249,025	249,025
	- Modal dari Luar	Rp Milyar	72,200	148,690	165,221	165,211	165,211
8	Volume Usaha	Rp Milyar	757,648	89,868	99,853	99,853	99,853
9	Sisa Hasil Usaha	Rp Milyar	20,189	22,924	25,471	25,471	25,471
10	Jumlah KUD	Buah	2	2	2	2	2
11	Jumlah Non KUD	Buah	755	766	779	787	792

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2014

**Tabel II- 70**  
**Kegiatan Pembinaan IKM Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Tahun	Pelatihan		
		Packaging ( IKM )	Kerajinan ( IKM )	Makanan ( IKM )
1	2009	-	-	-
2	2010	-	-	-
3	2011	-	-	-
4	2012	50	150	20
5	2013	100	125	350
<b>Jumlah</b>		<b>150</b>	<b>275</b>	<b>370</b>

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2014

Pengembangan usaha kecil dan menengah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan latihan keterampilan yang sifatnya teknis serta pendidikan mengenai manajemen usaha, efektifitas proses produksi sampai dengan pengemasan produk. Hambatan yang dihadapi UKM adalah akses modal yang terbatas serta pemasaran produk. Untuk itu perlu dilakukan inovasi dan penguatan peran pemerintah daerah untuk mencari peluang akses pasar tidak hanya di dalam negeri akan tetapi juga meliputi pangsa pasar ekspor, tentunya dengan disertai peningkatan kualitas produk yang mumpuni.

#### K. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Bidang kependudukan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di Kota Pontianak pada 5 (lima) Tahun terakhir 2009-2013 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui pendataan penduduk datang maupun pergi serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KIPEM (Kartu Penduduk Musiman) sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tujuan dari program ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pendapatan penduduk dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan identitas status diri melalui kepemilikan KTP, KK dan KIPEM.

**Tabel II-71**  
**Jumlah Penerbitan KTP, KK dan KIPEM di Kota Pontianak Tahun 2010-2013**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013 *
1	KTP/e-KTP	73.405	62.448	55.619	335.340
2	KK	58.996	53.178	50.221	20.060
3	KIPEM	1.651	1.757	1.198	759

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak

Ket : \* data KTP/e-KTP sampai bulan September, KK sampai bulan Juli, KIPEM sampai bulan Agustus 2013

Pada tahun 2011 dimulainya pelaksanaan program e-KTP, mulai dari sosialisasi sampai dengan pelayanan penerapan e-KTP. Terdapat peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2010 hingga 2013, jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 601.715 jiwa meningkat menjadi 626.819 pada tahun 2011, tahun 2012 kembali bertambah menjadi 660.261 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 645.622 jiwa yang terdiri dari laki- laki 326.750 jiwa atau 50,61% dan perempuan 318.872 jiwa atau 49,39%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2009 jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 628.312 jiwa dengan laki- laki 319.666

jiwa atau 50,88% dan perempuan 308.646 jiwa atau 49,12%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebesar 145.255 jiwa atau 22,49% dengan luas wilayah 37.22 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sebesar 47.086 jiwa atau 7,29% dengan luas wilayah 14.83 km<sup>2</sup>. (data setelah konsolidasi oleh Kemendagri).

Perkembangan penerbitan KTP dari tahun 2010-2013 mengalami penurunan rata-rata sebesar 14,91%, namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 335.340 KTP. Penerbitan KK juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,41%, dan penerbitan KIPEM terjadi penurunan menurun pada tahun 2012 dibanding tahun 2010 dan 2011 sebesar 13%.

Kumulasi perekaman e-KTP secara Mobile di SMA dan di Kelurahan sebanyak 4.256 WK. Total perekaman adalah 354.343 atau 94,50% dari jumlah alokasi e-KTP yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebanyak 374.935 WK. Penerimaan e-KTP yang sudah jadi dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 337.717 keping atau 95,31% WK, sedangkan penyerahan kepada penduduk mulai dilaksanakan hari Senin, 25 Juni 2012 dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tempat, peralatan dan petugas operator yang tersedia. Jumlah e-KTP yang telah didistribusikan sampai tahun 2013 sebanyak 335.706 keping atau 95,92%. Selanjutnya untuk masyarakat yang telah melaksanakan e-KTP telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah 316.645 orang atau sebanyak 84,45% dari target wajib e-KTP berjumlah 455.109 orang.

**Tabel II-72**  
**Pelaksanaan Elektronik KTP ( e-KTP) di Kota Pontianak Tahun 2013**

Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Target E-KTP	Realisasi E-KTP	% E-KTP
Pontianak Barat	99.768	82.192	79.548	96,78
Pontianak Selatan	71.477	58.885	53.513	90,88
Pontianak Kota	88.380	72.811	70.068	96,23
Pontianak Timur	61.009	50.261	50.390	100,26
Pontianak Utara	101.844	83.903	69.824	83,51
Pontianak Tenggara	32.631	26.883	26.453	98,40
<b>Jumlah</b>	<b>455.109</b>	<b>374.935</b>	<b>349.796</b>	<b>93,30</b>

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 2014

**Tabel II-73**  
**Perkembangan Penerbitan Akta Catatan Sipil di Kota Pontianak Tahun 2010-2013**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Akta Kelahiran	39.737	34.172	11.653	18.861
2	Akta Kematian	1.065	1.219	1.156	1.246
3	Akta Perkawinan	1.358	1.285	1.302	1.337
4	Akta Perceraian	35	49	63	45
<b>Jumlah</b>		<b>42.195</b>	<b>36.725</b>	<b>14.174</b>	<b>21.489</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, 2014

Tahun 2011 pelayanan akta kelahiran menurun sebesar 14% dibandingkan tahun 2010, tahun 2012 penurunannya lebih signifikan yaitu sebesar 65,90%. Pada tahun 2012 ada penambahan syarat dalam pembuatan akta kelahiran berupa penetapan dari Pengadilan Negeri, hal ini bisa menjadi penyebab menurunnya antusias masyarakat dalam membuat akta kelahiran. Pada tahun 2013 penambahan syarat tersebut tidak diberlakukan kembali, hal ini berdampak pada kenaikan jumlah penerbitan akta kelahiran pada tahun 2013 sebesar 61,86%. Pelayanan akta kelahiran langsung jadi juga dilakukan di Kelurahan-Kelurahan dengan maksud untuk mempermudah masyarakat yang ingin memiliki akta kelahiran. Mekanisme “jemput bola” juga dilakukan melalui kerjasama pelayanan akta kelahiran dengan 9 rumah sakit dan rumah sakit bersalin, 26 Bidan Praktek Mandiri (BPM) dan 1 puskesmas. Penerbitan Akta Kematian pada tahun 2011 meningkat sebesar 14,46% dari tahun 2010, tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 5,17% dari tahun 2011 dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 7,79%. Perkembangan penerbitan akta catatan sipil yang lainnya seperti pengesahan anak, pengakuan anak, akta hilang, adopsi dan lain-lain, dari Tahun 2010–2013 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen akta catatan sipil untuk membuktikan status hukum seseorang atau warga masyarakat semakin tinggi.

#### **L. Urusan Ketenagakerjaan**

Salah satu Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan dari laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), prosentase kesempatan kerja, prosentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan dibidang tenaga kerja selama periode tahun 2009 - 2013 telah melaksanakan program kerja yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Perlindungan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Perlindungan dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan.

Melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja pada tahun 2011 diberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja kecantikan/rambut yang ditujukan kepada anak putus sekolah dan pencari kerja usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan, sehingga setelah dibina dan dilatih dapat mencari pekerjaan ataupun membuka usaha sendiri berupa keterampilan merias wajah dan rambut.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memfasilitasi Dewan Pengupahan Kota Pontianak untuk membahas upah minimum yang setiap tahunnya mengalami peningkatan besaran nilai upah. Pada tahun 2009 standar UMK hanya sebesar Rp.785.000,- dan meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp.845.000,- meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.895.000,- dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp.995.000,- dan meningkat lagi untuk tahun 2013 menjadi



Rp.1.165.000,-. Untuk menekan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyebarkan brosur serta pamflet kepada pekerja maupun pengusaha serta mekanisme pengaduan kepada Dinsosnaker jika terjadi pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh pekerja maupun oleh pengusaha.

**Tabel II-74**  
**Prosentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Pontianak, 2012**

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	2,63	3,92	3,10
Tidak/Belum Tamat SD	9,07	7,69	8,56
SD	17,43	9,04	14,37
SMP/TSANAWIYAH	15,36	14,83	15,17
SMP KEJURUAN	0,81	0,00	0,52
Paket B	0,00	0,38	0,14
SMA/ALYAH	27,56	22,31	25,65
SMK	9,32	12,56	10,50
Paket C	0,73	0,00	0,46
Program Diploma I/II	0,98	2,43	1,51
Program Diploma III	2,40	7,59	4,29
Program D.IV/S1	12,16	18,10	14,33
Program S.2/S3	1,54	1,16	1,40
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Pontianak (Kota Pontianak Dalam Angka 2013)

Apabila ditinjau dari latar belakang pendidikan dari tenaga kerja yang bekerja, terlihat bahwa proporsi terbesar adalah tamatan SMA/ sederajat ke bawah (78,47%), hanya sebagian kecil saja (21,53%) yang merupakan tamatan DI sampai S2/S3. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian bersama, karena untuk dapat bersaing dalam kompetisi pasar tenaga kerja kedepan dalam kerangka pasar bebas, tenaga kerja kita harus berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas tentu saja yang memiliki tingkat pendidikan yang ideal didukung keterampilan teknis handal.

#### **M. Urusan Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pertanian. Ketahanan pangan dapat terjadi apabila ditunjang oleh pengembangan pertanian yang baik. Peningkatan hasil pertanian di Kota Pontianak tidak terlepas dengan kerja keras petani dalam mengelola sawah maupun tanaman sayuran dan buah-buahan yang dimilikinya, dalam mengembangkan hasil tani para petani membentuk kelompok tani seKota Pontianak dengan jumlah 97 kelompok tani pada tahun 2010 dan bertambah menjadi 26 kelompok tani pada tahun 2011 sehingga jumlah kelompok tani menjadi 123 kelompok tani, dimana kelompok tani terbanyak pada kecamatan pontianak utara yakni sebanyak 42 kelompok tani dan bertambah pada tahun 2012 menjadi 64 kelompok tani hal ini disebabkan lahan pertanian terluas berada di Kecamatan Pontianak Utara.

Dengan dibentuknya kelompok tani dan bertambahnya kelompok tani SeKota Pontianak, maka bertambah pula petani yang ada, dimana jumlah petani pada tahun 2010 sebanyak 1.566 orang dan bertambah pada tahun 2011 menjadi 1.825 orang terjadi peningkatan rata-rata 14,19%, dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan juni bertambah kembali menjadi 1.992 orang, semakin bertambah jumlah petani di Kota Pontianak diharapkan dapat menambah hasil pertanian yang berguna untuk kebutuhan masyarakat Kota Pontianak khususnya.

**Tabel II-75**  
**Jumlah Kelompok Tani di Kota Pontianak Tahun 2010 - 2013**

No.	Kecamatan	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013*)
1	Pontianak Barat	kelompok	9	11	20	20
2	Pontianak Kota	kelompok	8	10	16	18
3	Pontianak Selatan	kelompok	10	15	22	22
4	Pontianak Tenggara	kelompok	8	20	30	30
5	Pontianak Timur	kelompok	23	25	42	43
6	Pontianak Utara	kelompok	39	42	64	67

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak  
Ket : \*) sampai dengan Bulan Juni 2013

**Tabel II-76**  
**Jumlah Petani di Kota Pontianak Tahun 2010 - 2013**

No.	Kecamatan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013*)
1	Pontianak Barat	213	250	374	374
2	Pontianak Kota	132	145	201	240
3	Pontianak Selatan	186	235	317	322
4	Pontianak Tenggara	123	300	316	318
5	Pontianak Timur	113	191	516	526
6	Pontianak Utara	799	871	994	1.061

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak  
Ket : \*) sampai dengan Bulan Juni 2013

**Tabel II-77**  
**Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Pontianak Tahun 2010 - 2013**

No.	Kecamatan	Jenis Usaha	satuan	Tahun			
				2010	2011	2012	2013*)
1	Pontianak Barat	Pertanian	orang	93	103	121	121
		Peternakan	orang	46	56	115	115
		Perikanan	orang	74	91	138	138
2	Pontianak Kota	Pertanian	orang	83	96	135	164
		Peternakan	orang	11	11	14	14
		Perikanan	orang	38	38	52	62
3	Pontianak Selatan	Pertanian	orang	128	128	199	199
		Peternakan	orang	35	25	13	13
		Perikanan	orang	23	82	105	110
4	Pontianak Tenggara	Pertanian	orang	52	120	136	138
		Peternakan	orang	53	30	30	30
		Perikanan	orang	18	150	150	150
5	Pontianak Timur	Pertanian	orang	55	65	173	178
		Peternakan	orang	26	26	10	15
		Perikanan	orang	100	100	333	333
6	Pontianak Utara	Pertanian	orang	648	698	716	766
		Peternakan	orang	119	119	185	194
		Perikanan	orang	32	54	93	101

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pontianak  
Ket : \*) sampai dengan bulan Juni 2013



Sedangkan jumlah petani terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Utara dengan jumlah sebanyak 799 orang pada tahun 2010 dan bertambah pada tahun 2011 menjadi 786 orang. Adapun rincian petani berdasarkan jenis usahanya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdiri dari pertanian, peternakan dan perikanan dengan didominasi jumlah pertanian tahun 2010 berjumlah 1.059 orang petani, tahun 2011 berjumlah 1.210 orang petani dan meningkat kembali menjadi 1.480 orang petani menjadi 2012. Adapun peningkatan rata-rata jumlah pertanian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 10,24%, peternakan meningkat rata-rata sebesar 6,21% kemudian perikanan meningkat rata-rata 28,51%.

Perkembangan jumlah stok beras di Kota Pontianak terjadi peningkatan di tahun 2011 sebanyak 75,454 ton dan meningkat sebanyak 2.239 ton menjadi 77.693 ton. Mengingat beras merupakan kebutuhan pangan paling pokok bagi masyarakat Kota Pontianak, kecukupan ketersediaannya harus selalu dipastikan. Untuk pasokan pangan, terutama beras ini, Pontianak sangat tergantung dengan hasil produksi dari wilayah hinterlandnya serta kriman pasokan dari luar pulau khususnya Jawa. Untuk melihat perkembangan harga bahan kebutuhan pokok utama di Kota Pontianak tahun 2011 sampai dengan bulan juni 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel II-78**  
**Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama di Kota Pontianak Tahun 2011-2013**

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2011	2012	2013*)
1	Beras	Rp/kg	8.700	10.181	10.500
2	Gula	Rp/kg	10.000	11.906	13.390
3	Minyak goreng	Rp/kg	11.000	10.046	11.593
4	Daging sapi	Rp/kg	72.375	89.906	110.000
	Daging ayam	Rp/kg	24.625	24.687	24.375
5	Telur	Rp/btr	1.031	1.116	1.237
6	Jagung	Rp/kg	5.037	6.333	6.218

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pontianak  
Ket : \*) sampai dengan bulan Juni 2013

Perkembangan jumlah stok beras di Kota Pontianak terjadi peningkatan di tahun 2011 sebanyak 75,454 ton dan meningkat sebanyak 2.239 ton menjadi 77.693 ton. Mengingat beras merupakan kebutuhan pangan paling

pokok bagi masyarakat Kota Pontianak, kecukupan ketersediaannya harus selalu dipastikan. Untuk pasokan pangan, terutama beras ini, Pontianak sangat tergantung dengan hasil produksi dari wilayah hinterlandnya serta kriman pasokan dari luar pulau khususnya Jawa. Untuk melihat perkembangan harga bahan kebutuhan pokok utama di Kota Pontianak tahun 2011 sampai dengan bulan juni 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

#### **N. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang mendapat perhatian khusus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan akses dan partisipasi perempuan terhadap, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan jabatan publik. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan dengan fokus pada peningkatan akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan area bermain yang aman dan nyaman serta penguatan lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan berupa penanganan kasus anak dan perempuan sebanyak 7 kasus terdiri traficiking, KDRT, terlantar, pencabulan, pencurian, penipuan dan perkosaan, dimana pada tahun 2011 banyaknya kasus berjumlah 52 kasus dan tahun 2012 dan 2013 sebanyak 35 kasus dan 24 kasus. Sedangkan untuk kasus anak pada tahun 2011 sebanyak 37 kasus, menurun pada tahun 2012 menjadi 26 kasus dan pada tahun 2013 menurun kembali menjadi 19 kasus, serta untuk penanganan kasus perempuan pada tahun 2011 sebanyak 15 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2012 menjadi 9 kasus serta tahun 2013 menjadi 5 kasus. Upaya yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan kasus tersebut memberikan penyuluhan dan pelayanan terhadap mereka yang mendapatkan kasus sehingga dapat ditempatkan di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak sampai permasalahannya selesai.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan INPRES No.9 tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pengarusutamaan gender di Kota Pontianak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

**Tabel II-79**  
**Perbandingan IPM dan IPG Kota Pontianak dengan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2013**

Provinsi/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		Indek Pembangunan Gender			Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan	
	2011	2012	2011	2012	2013 <sup>*)</sup>	(Tahun)		(%)		(Tahun)		(%)	
						L	P	L	P	L	P	L	P
Kalimantan Barat	69,66	70,31	64.78	65.62	66,33	64.85	68.77	94.66	87.9	7.58	6.63	65.98	34.95
Kota Singkawang	69,21	69,77	59.54	60.05	60,82	65.41	69.36	93.9	86.86	7.89	7.38	73.33	26.67
Kota Pontianak	73.43	74.21	67.46	68.39	69,05	65.48	69.43	98.55	94.25	10.22	9.47	67.01	32.99

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013  
Ket : \*) Angka Perkiraan BPPAKB

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum masih terjadi kesenjangan gender di Kota Pontianak karena nilai IPG lebih kecil dari nilai IPM. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kota lain di Kalbar serta Provinsi Kalbar, angka IPG kota Pontianak jauh lebih tinggi, artinya kesenjangan gender relatif lebih baik kondisinya di kedua wilayah tersebut.

Disisi lain Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Berdasarkan data di bawah, terlihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Pontianak tahun 2012 membaik kondisinya bila dibandingkan tahun 2011. Kondisi di Kota Pontianak ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi di Kalimantan Barat pada umumnya serta di kota Singkawang.

**Tabel II-80**  
**Perkembangan IPG Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2013**

Provinsi/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender			Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Pendapatan Kerja (%)
	2011	2012	2013 <sup>*)</sup>			
Kalimantan Barat	56,39	59,34	60,69	7.27	45.37	34.02
Kota Singkawang	53,34	54,19	54,55	8.00	47.14	26.67
Kota Pontianak	64,4	64,95	69,28	13.33	52.89	32.99

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013  
Ket : \*) Angka Perkiraan BPPAKB



## O. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

**Tabel II-81**  
**Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Peserta KB Baru	14.432	13.807	16.401	20.595	23.123
2	Peserta KB Aktif	57.510	58.395	59.066	60.861	62.879

Sumber : BPMPAKB Kota Pontianak, 2014

Sasarannya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan indikator peningkatan peserta KB baru, peserta KB pria, pengetahuan masyarakat tentang KB serta penurunan kasus yang terjadi pada peserta KB. Perkembangan pelaksanaan Keluarga Berencana di Kota Pontianak, jumlah peserta KB baru dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11%, pencapaian jumlah peserta KB baru kumulatif sampai tahun 2013 sebesar 23.123 akseptor atau 160,34% dari PPM sebesar 14.421 sedangkan pencapaian pada bulan Desember 2013 sebesar 1.586 akseptor atau 10,99% dari PPM sebesar 14.421 yang terdiri dari MKJP sebesar 344 akseptor atau 14,71% dari PPM sebesar 2.339 dan non MKJP sebesar 1.242 akseptor atau 10,28% dari PPM sebesar 12.082. Sedangkan untuk peserta KB aktif dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2%, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya merencanakan jumlah keluarga semakin meningkat. Pencapaian jumlah peserta KB aktif sampai tahun 2013 sebesar 62.879 akseptor atau 69,26% dari PUS lapangan sebesar 90.785, yang terdiri dari MKJP sebesar 17.984 akseptor atau 28,60% dari peserta KB aktif dan non MKJP sebesar 44.895 akseptor atau 71,40% dari peserta KB aktif.

**Tabel II-82**  
**Perkembangan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pontianak Utara	17,100	17,786	17,473	17,934	18,676
2	Pontianak Selatan	14,510	14,617	14,514	14,711	14,971
3	Pontianak Timur	12,718	13,150	13,505	14,077	14,675
4	Pontianak Barat	17,458	17,790	18,000	18,487	19,163
5	Pontianak Kota	15,494	15,672	15,829	15,975	16,237
6	Pontianak Tenggara	6,475	6,430	6,619	6,813	7,063
<b>Kota Pontianak</b>		<b>83,755</b>	<b>85,445</b>	<b>85,940</b>	<b>87,997</b>	<b>90,785</b>

Sumber : BPMPAKB Kota Pontianak, 2014

Kota Pontianak kembali mendapat penghargaan untuk “Peserta KB aktif dengan prosentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang terbanyak di Kalimantan Barat tahun 2013 dari Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan program KB akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kegagalan KB akan berakibat pada ledakan jumlah penduduk dan menimbulkan masalah sosial karena keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan pangan, dan sebagainya. Sehingga, jumlah pengangguran akan meningkat, jumlah kemiskinan bertambah, dan seterusnya.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2%. Jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (MKJP) (pil, suntik, kondom) meningkat dari 39.607 peserta pada tahun 2009 menjadi 44.895 peserta pada tahun 2013 dan jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (non MKJP) yaitu IUD, MOP, MOW dan Implant dari 17.903 peserta pada tahun 2009 menjadi 17.984 pada tahun 2013. Perkembangan penggunaan alat kontrasepsi di Kota Pontianak secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2 % Jika dilihat dari jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah jenis IUD, Suntikan dan Pil, hal ini disebabkan adanya kemudahan masyarakat dalam menggunakannya.

**Tabel II-83**  
**Perkembangan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Jenis Kontrasepsi	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	IUD	14,844	14,890	14,800	14,800	14,487
2	MOP	356	385	383	516	525
3	MOW	1,628	1,635	1,636	1,701	1,761
4	Kondom	685	835	980	1,321	1,413
5	Suntikan	19,450	19,770	20,150	20,882	21,958
6	Pil	19,472	19,680	19,896	20,387	21,524
7	Implant	1,075	1,200	1,221	1,254	1,211
<b>Jumlah</b>		<b>57,510</b>	<b>58,395</b>	<b>59,066</b>	<b>60,861</b>	<b>62,879</b>

Sumber : BPMPAKB Kota Pontianak, 2014

Masalah yang kita hadapi saat ini masih ada keluarga yang berada dalam kondisi prasejahtera, adalah kewajiban kita semua untuk meningkatkan mereka sehingga mencapai keluarga sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan keluarga dari berbagai aspek kehidupan termasuk segi kesehatannya.

**Tabel II-84**  
**Perkembangan Keluarga Sejahtera di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Tingkatan Tahapan KS	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Pra KS	1,316	925	445
2	KS I	19,883	17,543	17,707
3	KS II	56,415	59,197	60,849
4	KS III	41,529	44,462	46,201
5	KS III Plus	22,680	24,609	26,342

Sumber : BPMPAKB Kota Pontianak, 2014



**Tabel II-85**  
**Perkembangan Kelompok Kegiatan (POKTAN) di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Nama Kelompok	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	BKB	16	16	16	33	34
2	BKR	8	8	8	10	10
3	BKL	7	7	7	33	33
4	UPPKS	198	198	198	198	188
Jumlah		229	229	229	274	265

Sumber : BPMPAKB Kota Pontianak, 2014

Untuk BKB di 6 kecamatan masih memiliki kegiatan, BKR hanya 3 kecamatan yang memiliki kegiatan yaitu Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara, BKL dari 6 kecamatan hanya 4 yang memiliki kegiatan yaitu Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara.

Pada tahun 2013 jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan UPPKS adalah 1.543 keluarga, jumlah KS I yang menjadi anggota kelompok kegiatan UPPKS adalah 621 keluarga, jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS yang berstatus PUS adalah 1.189 keluarga, jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS yang berstatus PUS ber KB adalah 850 keluarga, jumlah keluarga prasejahtera/KS I yang menjadi anggota UPPKS yang berstatus PUS adalah 513 keluarga, jumlah KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS berusaha adalah 415 keluarga.

Institusi Masyarakat adalah lembaga maupun perorangan yang secara sukarela melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu melaksanakan program KB melalui berbagai penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat dalam upaya mencapai keluarga kecil yang berkualitas. Perkembangan kelompok institusi dan kelompok keluarga sejahtera ini agak mengalami stagnasi bahkan ada yang tidak aktif. Mengingat selama ini kelompok-kelompok institusi masyarakat telah terbukti cukup berperan dalam membantu memasyarakatkan program KB di Kota Pontianak, hal ini perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang dengan pembentukan kelompok yang baru maupun mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang tidak aktif.

#### **P. Urusan Perhubungan**

Urusan Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian. Salah satu urusan perhubungan berkaitan dengan sektor transportasi yang memiliki peranan cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa. Pada saat ini aktivitas masyarakat sedang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan. Jumlah kendaraan yang teregistrasi SeKota Pontianak rata pertumbuhannya pertahun sebanyak 4,16%, dimana tahun tahun 2010 sebanyak 265.953 kendaraan meningkat pada tahun 2013 menjadi 307.131 kendaraan.

**Tabel II-86**  
**Jumlah Kendaraan yang Teregistrasi di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sedan, Jeep dan sejenisnya	24.032	26.296	28.245	31.174	33.018
2	Bus, Micdro Bus dan sejenisnya	286	330	320	353	340
3	Mobil Barang, Pick-Up, Truck, DSJ	12.128	13.271	15.194	16.621	17.719
4	Kendaraan Khusus (Alat Berat)	38	218	165	236	204
5	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	204.215	225.838	250.972	253.910	255.850
<b>Total</b>		<b>240.699</b>	<b>265.953</b>	<b>294.896</b>	<b>302.294</b>	<b>307.131</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kota Pontianak, 2014, diolah

**Tabel II-87**  
**Jumlah Traffic Light, Terminal dan Halte di Kota Pontianak Tahun 2010 – 2013**

No.	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013*
1	Jumlah traffic light	buah	16	16	16	16
2	Jumlah terminal	buah	10	9	9	9
3	Jumlah halte	buah	23	23	16	16
4	Rambu lalu Lintas	buah	721	920	1157	1395

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kota Pontianak

Ket : \*) sampai dengan bulan Juni 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah traffic light yang ada di Kota Pontianak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 16 buah. Jumlah terminal yang dimiliki Kota Pontianak Tahun 2010 sebanyak 10 buah sedangkan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 9 buah. Jumlah Halte yang dimiliki pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 sebanyak 23 buah sedangkan untuk Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebanyak 16 halte. Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 jumlah Traffict Light/lampu lalu lintas/apill sebanyak 16 buah. Jumlah Traffick light Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang menggunakan tenaga listrik sebanyak 17 buah dan Tahun 2012 serta 2013 sebanyak 16 buah.

#### **Q. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah secara efektif dan efisien.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/*global area network*) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja

dapat berjalan semakin lancar. Sampai dengan akhir tahun 2013, semua kantor baik instansi-instansi teknis sampai dengan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah tersambung dengan internet.

Beberapa instansi seperti telah mengembangkan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. BPKAD mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terhubung ke SKPD lainnya dan mengembangkan Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada) serta Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). BAPPEDA telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) dalam proses Musrenbang dan sedang mengembangkan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) secara online untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian pembangunan.

Layanan-layanan publik juga sudah mulai diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti yang telah dilakukan LPSE, Penerimaan Siswa Secara Online oleh Dinas Pendidikan, layanan informasi perijinan oleh BP2T, layanan porta [www.pontianakkota.go.id](http://www.pontianakkota.go.id) yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Sistem Informasi Produk Hukum Daerah oleh Bagian Hukum Setda Kota Pontianak. Selanjutnya dengan konsep e-gov, kedepan tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terliat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan.

#### **R. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Kota Pontianak selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Dalam upaya membentuk masyarakat madani Pemerintah Kota Pontianak melakukan pembinaan kesatuan bangsa, serta melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik.

Kondisi umum Kota Pontianak di tahun 2009 sampai dengan juli 2013 cukup kondusif. Menurut laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Satkorpulsida (Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah) sampai dengan bulan juli 2013 kasus penipuan hingga saat ini masih merupakan kasus yang paling menonjol, disusul oleh kasus pencurian dengan pemberatan dan penggelapan. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang.

Peredaran narkoba dan minuman keras yang semakin meluas juga perlu mendapatkan perhatian mengingat dampak negatif dari konsumsi barang tersebut secara nyata berhubungan dengan keamanan dan ketertiban sosial. Di sisi lain adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik

antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

**Tabel II-88**  
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**  
**Kota Pontianak Tahun 2010-2013**

No	Uraian	Satuan	Tahun				Ket
			2010	2011	2012	2013*	
1	Jumlah rapat koordinasi KOMINDA	Pertemuan	12	12	12	6	
2	Jumlah rumah ibadah	Unit	394	394	394	394	
3	Jumlah pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kecamatan	Kecamatan	3	3	3	6	
4	Jumlah LSM (terbina dan terintegrasi)	LSM	5	5	5	5	
5	Jumlah Ormas (terbina dan terintegrasi)	Ormas	31	47	64	74	Yang mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
6	Jumlah LSM	LSM	5	5	5	5	
7	Jumlah LSM yang memiliki legalitas (aktif)	LSM	5	5	5	5	
8	Jumlah Organisasi Masyarakat	Ormas	31	47	349	423	Terdaftar dan Terdata
9	Jumlah partai Politik di Kota Pontianak	Partai Politik	44	38	38	12	
10	Jumlah partai Politik yang menyampaikan laporan penggunaan bantuan yang tertib dan tepat waktu	Partai Politik	15	15	15	15	
11	Jumlah tenaga linmas	Orang	-	-			Satpol PP Kota Pontianak
12	Jumlah tenaga linmas yang diberdayakan	Orang	29	29			
13	Jumlah Poskamling	Unit	324	324			
14	Jumlah Poskamling yang diberdayakan	Unit	249	249			
15	Jumlah anggota FKUB	Orang	19	19	19	19	

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Sosial Politik Kota Pontianak, Ket : \* sampai Bulan Juni 2013

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Untuk pelaksanaan kegiatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Terpadu dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian, serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung pada pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaian;
- b. Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;

- c. Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
- d. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

## S. Urusan Pemerintahan Umum

### Otonomi dan Pelayanan Masyarakat

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan dan kecamatan merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan umum kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur Kecamatan dan Kelurahan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat dari jumlah pelayanan yang diberikan, waktu penyelesaian pelayanan, transparansi pelayanan, keadilan dalam memberikan pelayanan dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

**Tabel II-89**  
**Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan di Kecamatan**  
**Tahun 2009 – 2013**

Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
Kec. Pontianak Barat	17,936	18,525	18,710	14,172	3,647
Kec. Pontianak Selatan	84,966	57,591	53,241	16,537	1,028
Kec. Pontianak Kota	26,467	86,402	85,723	83,591	1,365
Kec. Pontianak Utara	37,402	30,200	24,271	22,636	1,223
Kec. Pontianak Timur	13,658	13,222	15,997	8,729	2,835
Kec. Pontianak Tenggara	9,435	12,455	18,081	4,261	573

Sumber : Laporan Kecamatan

Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan dan Kelurahan pada umumnya terdiri dari pengurusan Surat Keterangan, Kematian, Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Nikah, Keterangan Waris, Surat Kelahiran, Keterangan KTP Sementara, Surat Keterangan Masuk Sekolah, jual beli, hibah dan hak bersama. Selain itu juga meliputi pengurusan Rekomendasi, SITU, Legalisir Kredit, Legalisir KPR, Izin Sementara, Keterangan Domisili dan Izin Bangunan, Surat Keterangan Penduduk Sementara, Keterangan Pindah Kelurahan / Kecamatan /Kabupaten/ Provinsi, Salah nama, Keterangan Kedatangan, Keterangan Kependudukan dan pengurusan akta tanah, Legalisir KTP/KK/Akte/Keterangan Kematian/Keterangan Tidak Mampu, Pembuatan KK, KIPEM dan Pembuatan KTP.

### Kepegawaian

Secara umum kondisi kepegawaian di jajaran Pemerintahan Kota Pontianak cukup baik. Apabila dilihat dari tingkat efisiensinya terus meningkat. Hal ini terlihat dari rasio jumlah pegawai dengan

jumlah penduduk yang hanya 1,1. Jumlah pegawai di Kota Pontianak terus berkurang sejalan dengan program moratorium penerimaan pegawai ditambah dengan pegawai yang pensiun.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sekolah Dasar mengalami penurunan sebesar 6,47% dimana tahun 2009 sebanyak 129 orang menurun pada tahun 2013 menjadi 74 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 136 orang pada tahun 2009 dan menurun pada tahun 2013 menjadi 106 orang dengan rata-rata penurunan sebesar 5,40% dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas juga mengalami penurunan sebesar 0,06% dimana tahun 2009 sebanyak 2.422 orang menurun menjadi 1.964 orang pada tahun 2013, namun untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan S1/D4 dan S2 mengalami peningkatan rata-rata 1,96% dan 0,14%.

**Tabel II-90**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009 – 2013**

No.	Pendidikan	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD	Orang	129	114	96	84	74
2	SLTP	Orang	136	128	115	109	106
3	SLTA	Orang	2.422	2.365	2.233	2.080	1.964
4	D1 - D3	Orang	2.197	2.280	2.307	2.218	2.195
5	S1 / D4	Orang	2.166	2.332	2.395	2.362	2.350
6	S2	Orang	167	140	153	161	172
<b>JUMLAH</b>			<b>7.217</b>	<b>7.359</b>	<b>7.299</b>	<b>7.014</b>	<b>6.861</b>

Sumber : BKD Kota Pontianak Tahun 2014

Sedangkan Pegawai Berdasarkan Golongan juga mengalami penurunan sebesar 1,29% dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dimana tahun 2009 sebanyak 7.217 orang mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 6.861 orang. Pegawai yang mengalami penurunan terdapat pada Pegawai Golongan I yakni penurunan sebesar 14,33%, dan untuk Pegawai Golongan II, Golongan III dan Golongan IV mengalami peningkatan rata-rata 18,65%, 23,60% dan 24,84% dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut :

**Tabel II-91**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Tahun 2009 – 2013**

No	Golongan	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Golongan I	Orang	66	64	58	39	41
2	Golongan II	Orang	1,317	1434	1391	1234	1.127
3	Golongan III	Orang	3,061	2923	2877	2761	2.769
4	Golongan IV	Orang	2,773	2938	2973	3021	2.924
<b>JUMLAH</b>			<b>7.217</b>	<b>7.359</b>	<b>7.299</b>	<b>7.055</b>	<b>6.861</b>

Sumber : BKD Kota Pontianak Tahun 2014

**Tabel II-92**  
**Jumlah Formasi Jabatan Tahun 2009 – 2013**

No.	Eselon	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Eselon II	Orang	27	27	27	31	25
2	Eselon III	Orang	112	115	119	123	116
3	Eselon IV	Orang	522	516	533	548	524
4	Eselon V	Orang	-	30	32	34	30
<b>JUMLAH</b>			<b>661</b>	<b>688</b>	<b>711</b>	<b>718</b>	<b>695</b>

Sumber : BKD Kota Pontianak Tahun 2013

Jumlah Formasi Jabatan yang telah terpenuhi sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 720 orang yang terdiri dari Eselon II sebanyak 31 orang, Eselon III sebanyak 123 orang, eselon IV sebanyak 535 orang dan untuk eselon V sebanyak 33 orang. Sedangkan rasio jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak untuk Tahun 2013 sampai dengan bulan juni adalah 0,6 artinya jumlah pegawai perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah pegawai laki-laki..

**Tabel II-93**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2013**

No	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013*
1	Laki - laki	Orang	2.751	2.770	2.693	2.564	2.465
2	Perempuan	Orang	4.466	4.589	4.606	4.490	4.396
<b>JUMLAH</b>			<b>7.217</b>	<b>7.359</b>	<b>7.299</b>	<b>7.054</b>	<b>6.861</b>

Sumber : BKD Kota Pontianak Tahun 2013

### **Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan**

Dalam rangka mewujudkan *good and clean government* di Pemerintah Kota Pontianak, diperlukan dukungan aparaturnya yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparaturnya yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparaturnya sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional. Hal ini penting agar pengawasan yang dilakukan berkualitas dan dapat memberikan masukan perbaikan serta mencegah terjadi penyelewengan.

**Tabel II-94**  
**Realisasi Kinerja Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Tahun 2009-2013**

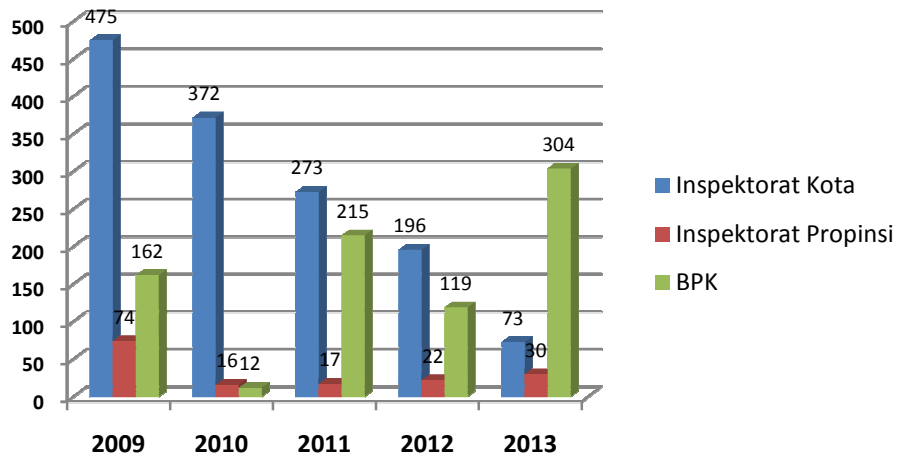
NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013*
1	Pemeriksaan kasus masuk dari pengaduan masyarakat	18	15	20	14	1 (khusus)
2	Kasus yang telah selesai ditangani dari pengaduan masyarakat	18	15	20	14	1 (khusus)
3	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Kota Pontianak

Ket : \* Bulan Maret 2013

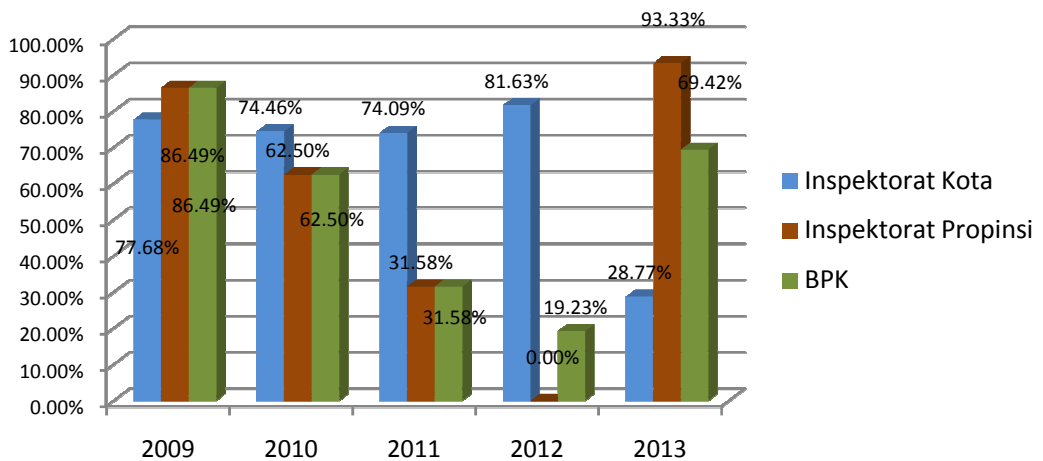


Dari pemeriksaan tata kelola keuangan dan pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pontianak, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat ataupun BPK, terlihat kecenderungan terjadi penurunan jumlah temuan kasus. Di tahun 2009 hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak menghasilkan 475 temuan dengan jumlah dimana 369 temuan (77,68%) telah selesai ditindaklanjuti sesuai saran. Kondisi tersebut jauh menurun di tahun 2012 dimana hasil pemeriksaan menemukan 196 temuan dengan 160 diantaranya (81,63) telah selesai ditindaklanjuti sesuai saran.



Sumber : Inspektorat Kota Pontianak  
Ket : \* Bulan Juni 2013

**Gambar II-11**  
**Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun 2009-2013**



Sumber : Inspektorat Kota Pontianak  
Ket : \* Bulan Maret 2013

**Gambar II-12**  
**Grafik Prosentase Temuan Pemeriksaan yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi Tahun 2009-2013**

Dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Kalbar, di tahun 2009 dihasilkan sebanyak 74 temuan dimana sebanyak 64 temuan (86,49%) telah diselesaikan sesuai saran, kondisi tersebut di tahun 2012 menjadi 22 temuan dimana belum ada satupun yang ditindaklanjuti penanganannya sesuai saran. Sedangkan dari hasil pemeriksaan BPK RI di tahun 2009 terdapat 162 temuan dengan 307 rekomendasi dan 158 diantaranya (51,47%) telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Kondisi tersebut di tahun 2012 menjadi 119 temuan dengan 182 rekomendasi, dimana sebanyak 35 temuan (19,23%) telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

**Tabel II-95**  
**Realisasi Kinerja Pemeriksaan dan Pengendalian Pembangunan Inspektorat Kota Pontianak**  
**Tahun 2009-2013**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah temuan hasil pemeriksaan	475	372	273	196	220
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan	475	372	274	196	220
Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai saran (TS)	369	277	203	160	164
Prosentase temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai saran (TS)	77,68%	74,46%	74,09%	81,63%	74,54%
Jumlah temuan yang ditindaklanjuti belum sesuai saran (TB)	1	34	-	-	-
Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti	105	61	70	36	56
Prosentase temuan yang belum ditindaklanjuti	22,11%	16,40%	25,55%	18,37%	71,23%

Sumber : Inspektorat Kota Pontianak

Ket : \* Bulan Juni 2013

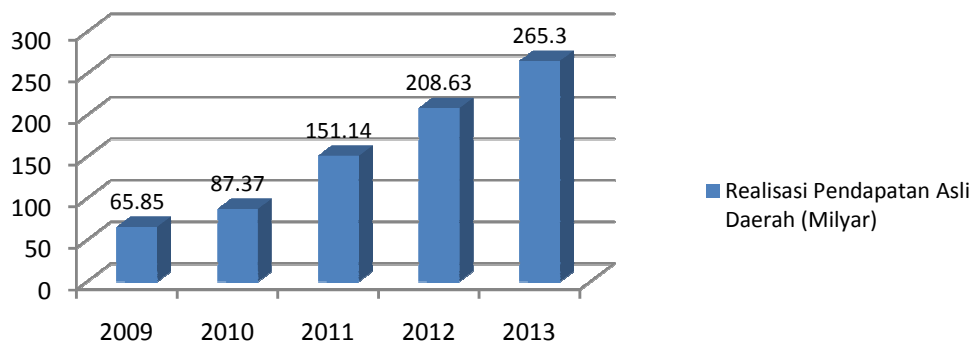
Dari tabel-tabel di atas terlihat bahwa secara umum terjadi perbaikan dalam tata kelola keuangan, penyelenggaraan pemerintahan (kebijakan) serta pelaksanaan pembangunan, yang mana ditunjukkan dari jumlah temuan yang menunjukkan tren yang semakin menurun, disisi lain hal yang sama juga dari sisi jumlah temuan kerugian yang negara juga relatif semakin menurun.

### **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan dan aset daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*. Ketiga sistem tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan upgrading sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan aset daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam menerapkan sistem dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset serta kebijakan sertifikasi aset pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari perbaikan yang terus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut di tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Pontianak mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian dalam pelaporan keuangan daerah, tahun sebelumnya mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dilakukan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya menyangkut pajak-pajak daerah. Upaya ini telah berhasil meningkatkan PAD Kota Pontianak sampai 4 kali lipat terhitung mulai tahun 2009, dimana PAD mencapai 65,85 Milyar saja tumbuh menjadi 265,5 Milyar di tahun 2013. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Ke depan upaya ini harus terus dilakukan dengan menggali potensi-potensi wajib pajak yang belum optimal penarikannya. Akan tetapi disisi lain perlu dilakukan perbaikan menyangkut pengelolaan aset-aset daerah yang dirasa masih jauh dari optimal. Hal ini juga merupakan catatan khusus yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kota Pontianak dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI.



**Gambar II-13**  
**Grafik Pertumbuhan Realisasi PAD di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

## Hukum

Dari sisi pelayanan penunjang supremasi hukum, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas perUndang-Undangan, pelayanan informasi hukum, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum. Dari data pencapaian kinerja pelayanan hukum mulai tahun 2009 sampai tahun 2012 terlihat bahwa jumlah produk hukum yang ditetapkan kecenderungannya semakin meningkat, sedangkan terhadap jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditelaah serta jumlah fasilitasi penanganan dan advokasi permasalahan hukum cenderung fluktuatif tiap tahun dikarenakan tergantung pada jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditetapkan serta jumlah permasalahan hukum yang ditangani.

**Tabel II-96**  
**Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Tahun	SK Walikota	Peraturan Daerah	Peraturan Walikota
2009	979	11	47
2010	873	8	41
2011	873	14	54
2012	693	14	66
2013 s/d Mei			1

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

**Tabel II-97**  
**Jumlah Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana dan TUN Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Jumlah Penyelesaian perkara perdata, pidana dan TUN
1.	2009	-
2.	2010	2 perkara
3.	2011	12 perkara
4.	2012	13 perkara
5.	2013 s/d Mei	3 perkara

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

### **Kerjasama**

Dalam rangka mempercepat pembangunan dan perkembangan daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan kerjasama antar daerah sesama Pemerintah Kota maupun dengan Pemerintah Kabupaten baik secara Regional maupun Nasional. Adapun kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak selama tahun 2009-2013 adalah:

1. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Nasional;
2. Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Nasional;
3. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan

Manfaat yang dirasakan dalam kerangka kerja sama tersebut adalah bertukar pengalaman *best practices* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan antar anggota sehingga dapat melakukan perbaikan dengan mengimplementasikan hal-hal positif yang telah berhasil dilakukan anggota lainnya. Asosiasi tersebut juga berguna sebagai forum diskusi dan penyampaian pendapat maupun sikap bersama kepada pemerintah pusat terhadap hal-hal tertentu yang perlu mendapat perhatian.

Selain melakukan kerja sama dengan daerah lain, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan kesepakatan dan kerjasama antara dengan Pihak ketiga. Di tahun 2013, terjadi 20 kesepakatan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang urusan seperti kerja sama pengelolaan aset daerah, kerjasama investasi dan lain-lain. Pemerintah Kota Pontianak mendorong kerjasama yang lebih luas dengan pihak ketiga tentunya yang memberikan manfaat serta keuntungan bagi masyarakat Kota Pontianak.

### **Organisasi dan Perangkat Daerah**

Sejalan dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, agenda besar yang harus segera diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah pelaksanaan reformasi birokrasi. Kota Pontianak merupakan satu dari 30 kota lain yang termasuk dalam pilot project penerapan birokrasi reformasi di daerah di tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, diamanatkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merespon tuntutan reformasi birokrasi dimaksud, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak yang didalamnya berisi tahapan dan rencana aksi yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak. Selain itu juga dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Perbaikan-perbaikan terhadap area perubahan tersebut secara bertahap telah dilakukan sampai tataran SKPD, walaupun diakui masih diperlukan usaha lebih keras lagi untuk menjadikannya optimal. Hal yang menjadi kendala dalam implementasi reformasi birokrasi ini adalah kesiapan sumber daya aparatur yang masih belum memahami secara akurat apa yang dimaksud serta tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Selain itu kelengkapan perangkat pelaksanaannya juga yang masih belum tersedia.

Masih dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi, sampai tahun 2013 terdapat 2 SKPD yang telah mendapatkan dan menerapkan ISO 9001:2008 mengenai Manajemen Mutu. Sertifikasi ISO ini sebagai indikator kinerja pemerintahan umum merupakan bentuk penghargaan atas penilaian mutu pelayanan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, secara bertahap setiap SKPD di Pemerintah Kota Pontianak diharapkan mendapatkan sertifikat ISO ini sebagai jaminan kualitas layanan kepada masyarakat.

#### **T. Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan Pusat Perhatian dalam Proses Pembangunan saat ini sebagaimana yang di atur dalam Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan Paradigma Pemberdayaan, artinya pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada umumnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat Kota Pontianak dilakukan dengan melalui kegiatan pembinaan bulan bakti gotong royong masyarakat yang dilaksanakan selama bulan Mei setiap tahunnya, yang terdiri dari 4 bidang yaitu;

- Bidang Kemasyarakatan yang dilakukan berupa rapat koordinasi, Perbaikan 100 gang dan perbaikan MCK.
- Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan berupa rapat koordinasi, pengelolaan lingkungan, AMDAL, UKL dan UPL serta pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau.
- Bidang Sosial Budaya yang dilakukan berupa rapat koordinasi, penyuluhan tentang narkoba dan kenakalan remaja.

- Bidang Ekonomi yang dilakukan berupa rapat koordinasi, kemitraan masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga penghasilan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dilaksanakan berbagai macam kursus/diklat keahlian seperti kursus reparasi hp, kursus rias pengantin, tata rias rambut/salon dengan bekerjasama dengan praktisi/tenaga ahli di bidangnya. Diharapkan dengan bekal keahlian dan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk merintis usaha dan membuka lapangan kerja baru sehingga lebih berdaya.

#### U. Urusan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga seperti keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi salah satu sasaran program pembangunan.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Berikut data PMKS di Kota Pontianak dalam kurun 2010-2013.

**Tabel II-98**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pontianak Tahun 2010 – 2013**

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1.	Orang Terlantar	Jiwa	72	55	44	44
2.	KK miskin	KK	2.501	2.501	2.501	15.271
3.	Anak Panti Asuhan	orang	1.147	1.308	1.514	1.515
4.	Anak Jalanan	orang	82	82	0	0
5.	Anak terlantar diluar panti	orang	35	30	30	30
6.	Penyandang cacat remaja	orang	104	104	104	
7.	Anak cacat ringan	orang	30	25	30	
8.	wanita rawan sosial	orang	180	175	500	
9.	Gepeng lokal	orang	89	40	30	25
10.	orang gila/ psikotik terlantar	orang	24	32	177	57
11.	korban bencana sosial / pengungsi	Jiwa	304	96	115	30
12.	mayat terlantar	Mayat	23	13	7	10
13.	pengemis / gelandangan	Orang	149	90	105	25

Sumber : Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Pontianak, 2014



**Gambar II-14**  
**Gedung Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak**

Kota Pontianak memiliki beberapa sarana sosial seperti panti asuhan sebanyak 32 buah yang dikelola oleh pihak non pemerintah dan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dibawah pengelolaan Pemerintah Kota Pontianak. PLAT tidak hanya difungsikan sebagai tempat penanganan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi juga untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan manusia, serta juga difungsikan sebagai tempat penguatan kapasitas anak. Berdirinya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak, juga bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan

sosial anak secara terintegrasi dan mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan sosial anak dari keterlantaran, eksploitasi, diskriminasi dan tindak kekerasan fisik, psikis maupun tindak kekerasan seksual.

## **V. Urusan Kebudayaan**

Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kota Pontianak mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat. Saat ini telah terbentuk sanggar seni dan budaya sejumlah 165. Akan tetapi akibat keterbatasan sumberdaya dan sumber dana yang ada, hanya 35 sanggar seni budaya saja yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Pontianak.

Selain melakukan pembinaan sanggar seni dan budaya, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pendataan dan pemantauan terhadap benda-benda yang memiliki nilai sejarah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010, yang termasuk dalam klasifikasi Benda Cagar Budaya yang terdapat di Kota Pontianak adalah:

1. Istana Kadriah Keraton Kesultanan Pontianak Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Ali Bin hamid Assegaf pernah dipugar Depdikbud Prov tahun 1923 M Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1992-1996



2. Masjid Sultan Abdurahman Alk Rumah Ibadah Kesultanan Pontianak Muharam Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Usman Mohdar Al-Idrus pernah dipugar Depdikbud Prov 1237 H Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1994-1998
3. Komplek Makam Batulayang Kesultanan Makam Kesult Pontianak tahun 1808 M Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Mohdar alkadrie pernah dipugar Depdikbud Prov Pontianak Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1984-1988
4. Tugu Khatulistiwa tugu Kolonial Belanda tahun 1928 Kel. Batulayang Kota Pontianak Hamdi Kec. Pontianak Utara
5. Masjid Baitan Nur Rumah Ibadah Kesult Pontianak th. 1216 H Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Abdul Gawi Obet 1802 M Kec. Pontianak Timur
6. SDN 46 (sekarang SDN 14) Sekolah Kolonial Belanda tahun 1928 Jl. Tamar Kel. Tengah Kota Pontianak Kec. Pontianak Kota
7. Bekas Gedung PBI Bangunan Kemerdekaan/NICA thn. 1945 Jl. Zainuddin Kel Tengah Kota Pontianak Sekarang Gedung Pramuka Kec. Pontianak Kota Kwarcab Pontianak
8. Kelenteng/Vihara Bodhisatva Karaniyah Metta Rumah Ibadah tahun 1689 M Komplek Pasar Kapuas Indah Kota Pontianak Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota
9. Kantor Pos Bangunan Kolonial Belanda tahun 1937 Jl. Rahadi Usman Kota Pontianak
10. Lapangan Keboen Sajoek (PSP) Situs Kemerdekaan th. 1945-1950 Jl. AR. Hakim Kota Pontianak digunakan oleh pejuang untuk Kel. Tengah Kec. rapat akbar menentang DIKB Pontianak Kota
11. Sumur Bor Situs/Mesin Kolonial Belanda tahun 1930 Kantor Camat Kota Pontianak, Pontianak Kota Jl. Pangeran Natakusuma
12. Pelabuhan Teng Seng Hie Situs Abad 18-19 M Jl. Sultan Muhammad Kota Pontianak Pelabuhan Rakyat I Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan
13. Bekas Komplek Kantor Residen Bangunan abad 20 M Jl. Zainuddin Kel. Tengah Kota Pontianak Sekarang BAPPEDA Kota Ptk. Borneo Barat Kec. Pontianak kota.

#### **W. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan**

Untuk mendukung pelaksanaan urusan kearsipan, Pemerintah Kota Pontianak membentuk unit kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Pontianak yang bertugas mengelola arsip-arsip penting daerah serta mengelola perpustakaan daerah. Pelaksanaan pembangunan dibidang perpustakaan tidak terlepas dari peningkatan minat baca masyarakat, yang dapat diwujudkan dengan meningkatkan ketersediaan jumlah buku yang ada di perpustakaan daerah dan taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah Kota Pontianak. Selanjutnya untuk melihat perkembangan perpustakaan daerah selama tahun 2010-2013, dengan kegiatan pengadaan jumlah buku tahun 2010 sebanyak 1.812 buku jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah pengadaan buku meningkat menjadi 2.646 buku dan tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 2.004 buku, dari pengadaan buku ini dapat memberikan jumlah ketersediaan buku di perpustakaan dari tahun 2010 sebanyak 17.297 buku jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah buku meningkat menjadi 19.943 buku dan meningkat kembali pada tahun 2012 menjadi 21.247 buku dengan rata-rata peningkatan menjadi 36,70%.

**Tabel II-99**  
**Pengadaan dan Ketersediaan Buku di Perpustakaan Tahun 2010 – 2013**

No	Keterangan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan	1.812	2.646	2.004	2.196
2	Jumlah buku yang tersedia dipustakaan	17.297	19.243	21.247	23.443
<b>Jumlah Buku</b>		<b>19,109</b>	<b>21,889</b>	<b>23,251</b>	<b>25.639</b>

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Kota Pontianak, 2014  
Ket : \*) sampai dengan bulan Juni 2013

Bertambahnya minat baca masyarakat dan aparaturnya pemerintahan Kota Pontianak ditunjang dengan ketersediaannya buku-buku perpustakaan maupun penambahan buku baru. Pada tabel dibawah dapat kita lihat tingginya minat baca masyarakat Kota Pontianak, hal ini terbukti dengan jumlah buku yang dipinjam rata-rata meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 17,89% pada tahun 2010 sebanyak 5.324 buku dengan peminjaman perhari sebanyak 23 buku dan tahun 2011 sebanyak 3.306 buku dengan peminjaman buku perhari sebanyak 30 buku serta tahun 2012 sebanyak 4.170 buku dengan peminjaman perhari sebanyak 35 buku. Untuk jumlah judul buku yang baru setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 35,26% dimana tahun 2010 sebanyak 8.672 buku, tahun 2011 sebanyak 9.204 buku dan tahun 2012 sebanyak 9.872 buku. Untuk jumlah pengunjung perpustakaan juga terjadi peningkatan rata-rata sebesar 30,49%, dimana tahun 2010 sebanyak 4.590 orang dengan rata-rata pengunjung perhari sebanyak 24 orang, tahun 2011 sebanyak 4.229 dengan rata-rata pengunjung perhari sebanyak 21 orang dan tahun 2012 sebanyak 6.353 pengunjung perpustakaan dengan rata-rata pengunjung perhari sebanyak 29 orang.

**Tabel II-100**  
**Jumlah Peminjaman, Judul Buku Baru dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2010 - 2013**

No.	Uraian	Satuan	Tahun (buku)			
			2010	2011	2012	2013*)
1	Jumlah Judul buku yang dipinjam	Judul	5.324	3.638	4.170	2.067
2	Peminjaman buku perhari	Buah	23	30	35	18
3	Jumlah judul buku yang baru	Judul	8.672	9.204	9.872	-
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia dipustakaan	eksemplar	17.297	19.243	21.247	-
5	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	4.590	4.229	6.353	3.371
6	Rata - rata pengunjung prhari	Orang	24	21	29	28

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Kota Pontianak  
Ket : \*) sampai dengan bulan Juni 2013

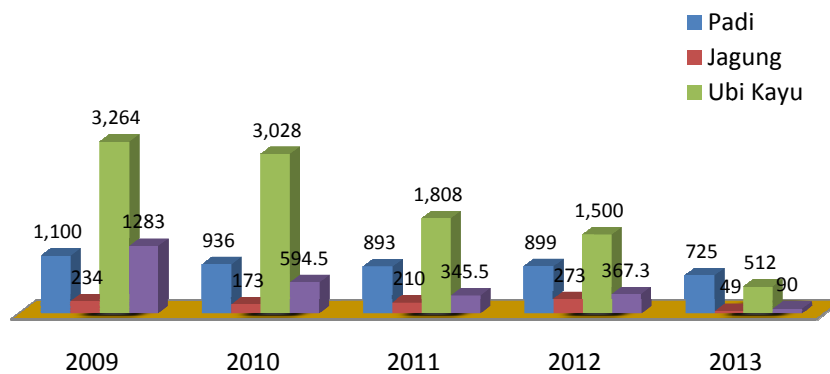
### 2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

#### A. Urusan Pertanian

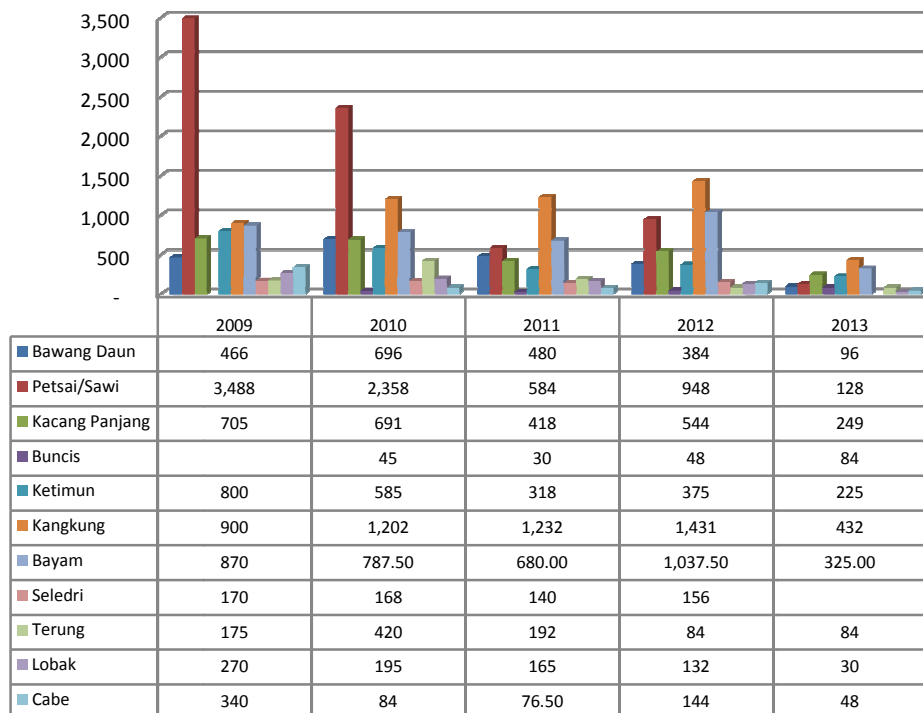
Pembangunan bidang pertanian perikanan dan kehutanan telah diupayakan secara maksimal melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana di bidang pertanian guna meningkatkan produksi dan

produktivitas produk-produk pertanian baik itu tanaman pangan, sayuran, buah-buahan serta tanaman hias maupun penanganan pasca panen dan peningkatan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun berstatus sebagai wilayah perkotaan dan memiliki fungsi sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, sektor pertanian tetap berkembang dan menjadi mata pencaharian sebagian kecil penduduknya. Produksi pertanian yang dihasilkan meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar, sayuran dan buah-buahan. Untuk mendukung perkembangan pertanian dilakukan perluasan areal tanaman pertanian Jagung seluas 25 hektar dan perluasan areal Padi seluas 350 hektar dan perluasan areal sayuran seluas 7 hektar.



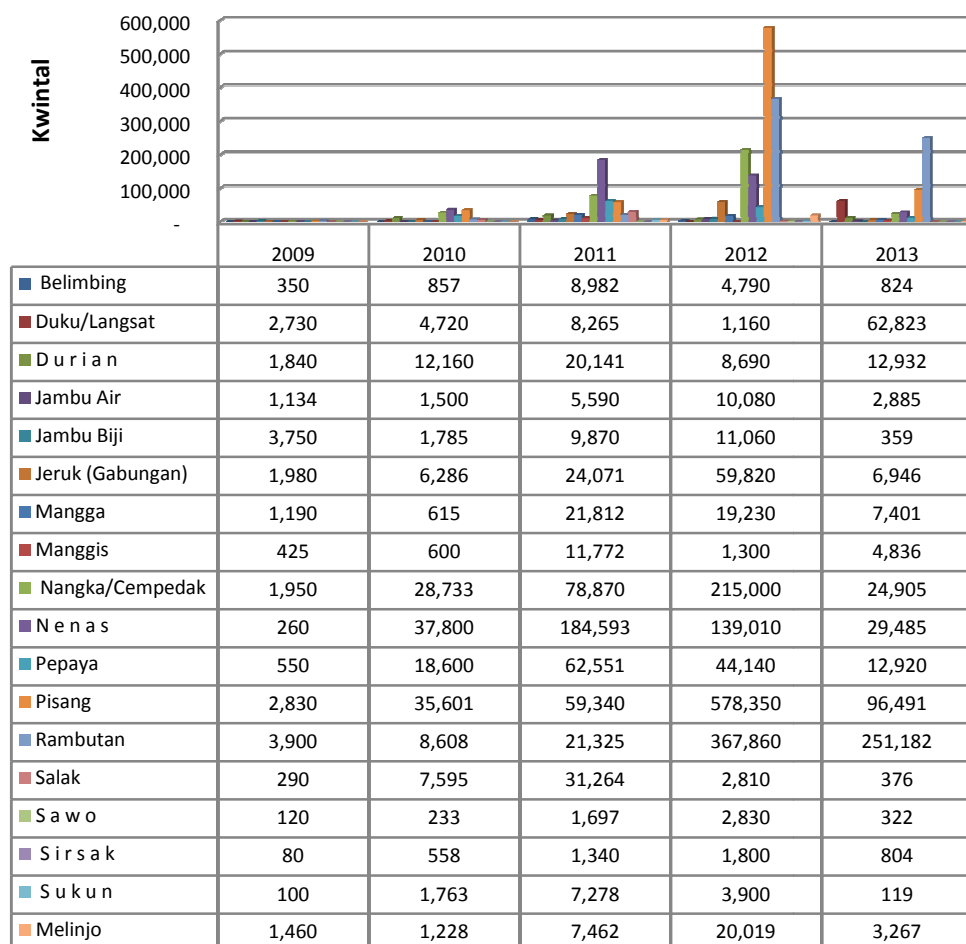
**Gambar II-15**  
**Grafik Jumlah Produksi Tanaman Pangan ( Dalam Ton)**  
**Menurut Jenisnya Tahun 2009- 2013**



**Gambar II-16**  
**Grafik Jumlah Produksi Sayuran Daun dan Sayuran Buah ( Dalam Ton) Menurut Jenisnya**  
**Tahun 2009 – 2013**

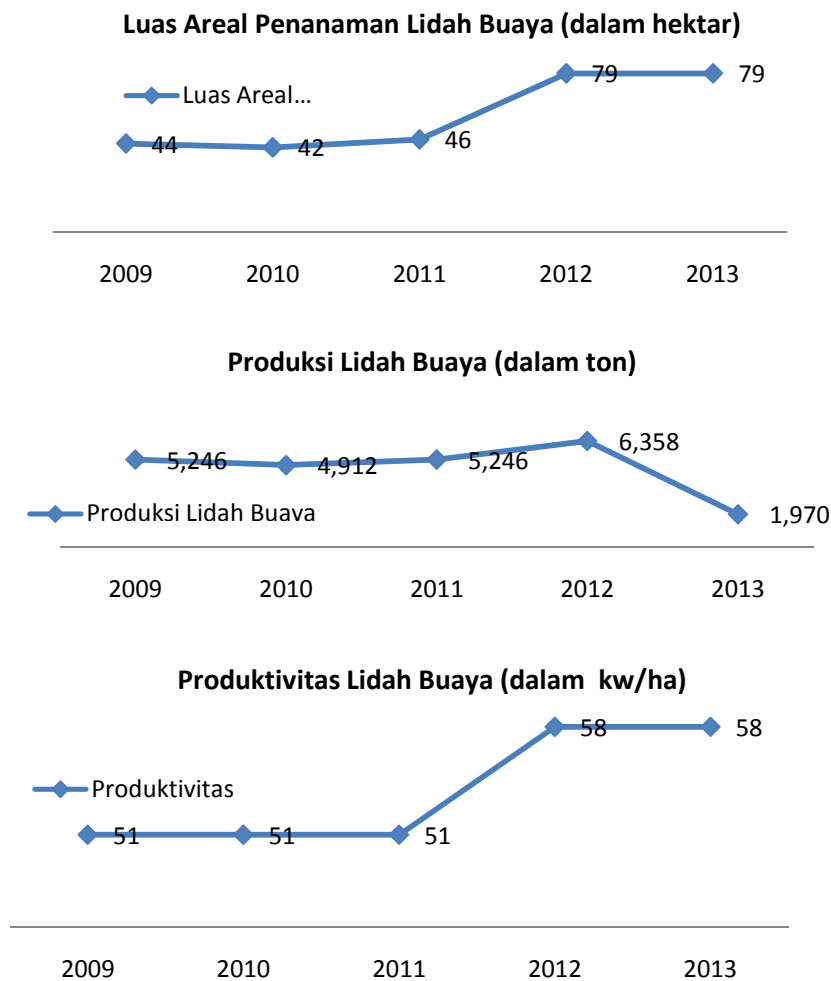
Selain melakukan perluasan areal tanam, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pertanian, Perikanan melakukan optimalisasi prasarana fisik, lahan dan air, berupa peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dengan membangun Jalan Usaha Tani (JUT) maupun Pengelolaan Air dengan bantuan pompanisasi, jaringan irigasi bagi petani sayuran di Kecamatan Pontianak Utara dan sekitarnya serta pembuatan shadow house selain itu Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan juga telah melakukan pembagian bibit sayuran, pupuk dan obat-obatan. Selain itu telah dikembangkan produk sayuran organik yang juga telah masuk di beberapa supermarket yang ada di Kota Pontianak.

Disisi lain untuk mendukung peningkatan produksi buah-buahan di Kota Pontianak Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak telah memiliki Balai Benih Induk Hortikultura yang terletak di Gg Flora Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Pada tahun 2009 dilakukan perluasan areal buah lengkeng seluas 5 hektar, Durian seluas 5 hektar dan Pepaya Hawaii 10 hektar. Untuk pengembangan bibit buah-buahan terutama Pepaya yang pernah menjadi primadona di Kota Pontianak, Dinas ini telah melakukan kerjasama dengan BPTP untuk melakukan pemuliaan bibit Pepaya dan menyusun GAP Pepaya.



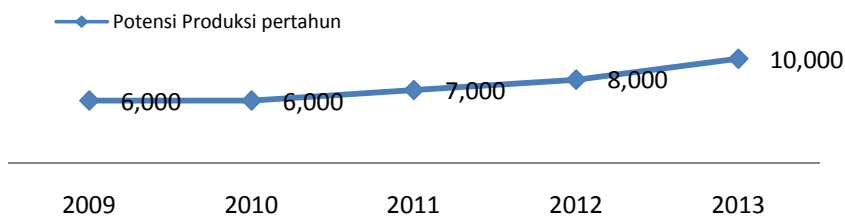
**Gambar II-17**  
**Grafik Jumlah Produksi Buah - Buahan ( Dalam Kwintal )**  
**Menurut Jenisnya Tahun 2009 – 2013**

Selain mengembangkan tanaman pangan, sayuran dan buah, pertanian kota juga mengembangkan tanaman-tanaman produktif lain seperti tanaman hias anggrek dengan membangun Orchid Center. Orchid Center merupakan tempat pembudidayaan Anggrek pada UPTD Agribisnis pada Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Pontianak yang dilengkapi dengan laboratorium kultur jaringan selain memproduksi Anggrek Hibrida dan Anggrek spesies juga memproduksi bibit hasil kultur jaringan bibit lidah buaya.

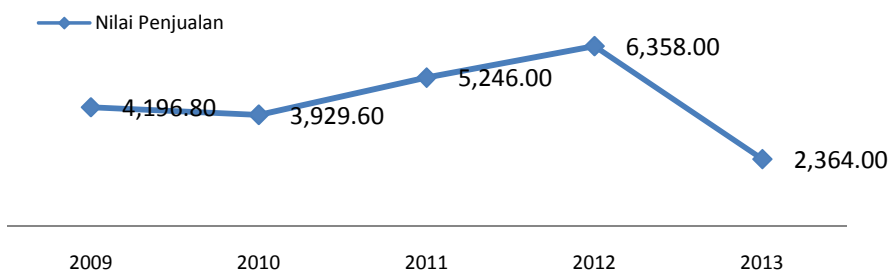


**Gambar II-18**  
**Grafik Luas Areal Penanaman, Jumlah Produksi serta Produktivitas Lidah Buaya**  
**Tahun 2009-2013**

Lidah Buaya merupakan primadona unggulan Kota Pontianak yang memiliki multi manfaat. Pada UPTD Aloe vera Center terdapat laboratorium kultur jaringan yang masih terus beroperasi dan laboratorium Aloe vera Powder. Luas areal penanaman lidah buaya mengalami penambahan luasan areal dari tahun ke tahun sejalan dengan potensi produksinya. Nilai penjualan lidah buaya tiap tahun mengalami kenaikan sejalan dengan pangsa pasar yang masih terbuka luas. Pengolahan lidah buaya menjadi berbagai produk olahan turut mendorong kenaikan penjualan lidah buaya di Kota Pontianak.

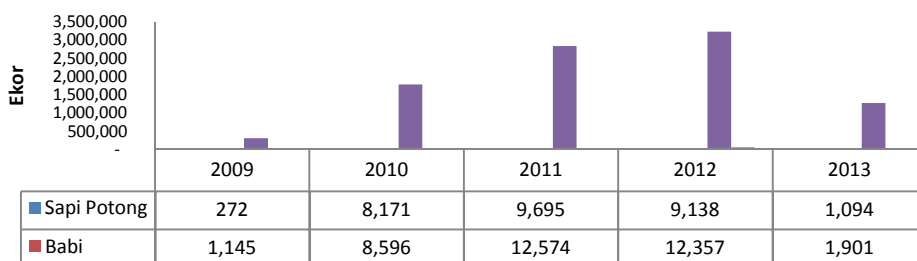


**Gambar II-19**  
**Grafik Potensi Produksi Lidah Buaya Pertahun (Dalam Ton/Ha)**



**Gambar II-20**  
**Grafik Potensi dan Nilai Penjualan Lidah Buaya Tahun 2009-2013**

Di dalam urusan pertanian masuk pula di dalamnya peternakan dimana tujuan penyelenggaraannya adalah mengoptimalkan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana di bidang peternakan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas produk-produk peternakan seperti Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Bebek/Itik, Ayam, dan Babi dengan kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Peran Pemerintah Kota Pontianak cukup optimal dalam menyediakan daging yang ASU (Aman, Sehat, Utuh) dengan dimilikinya Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi, Babi, Unggas dan melakukan pengawasan pemotongan di luar RPH pada hari besar keagamaan dan melakukan pengawasan terhadap produk olahan peternakan.



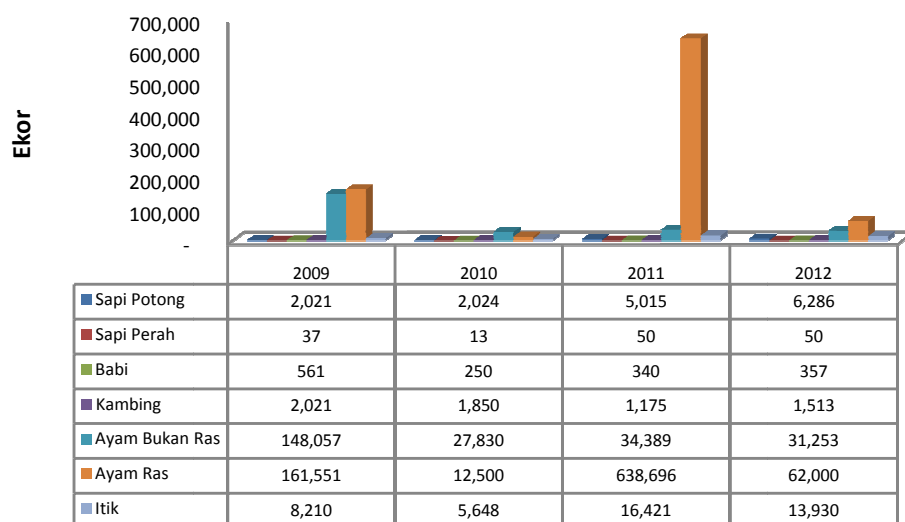
**Gambar II-21**  
**Grafik Pemotongan Ternak Kota Pontianak Tahun 2009 - 2013**

Jumlah pemotongan Sapi di Kota Pontianak dari tahun 2009 sampai dengan 2011 terus meningkat, data tahun 2009 untuk komoditas Sapi merupakan data pemotongan yang telah diawasi di RPH Sapi dan pada tahun 2012 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga daging sapi dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembatasan kuota daging impor sehingga Madura yang biasa merupakan daerah pengirim sapi potong untuk Kota Pontianak turut mengurangi kuota ke Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki Rumah Potong Hewan Sapi yang terletak di Jl. Nipah Kuning (Pelabuhan Rakyat) Kecamatan Pontianak Barat selain itu juga terdapat Rumah Potong Hewan Babi yang terletak di Pontianak Utara dan Rumah Potong Unggas di Kecamatan Pontianak Timur yang masih berfungsi sangat baik sampai dengan sekarang yang selalu diperhatikan operasionalnya maupun untuk peningkatan sarana prasarannya baik pengadaan sarana prasarana baru maupun rehabilitasi. Untuk pemotongan Babi dan Ayam sejak tahun 2009 terus mengalami kenaikan. Pemotongan Kambing pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 2.304 ekor dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6.257 ekor.

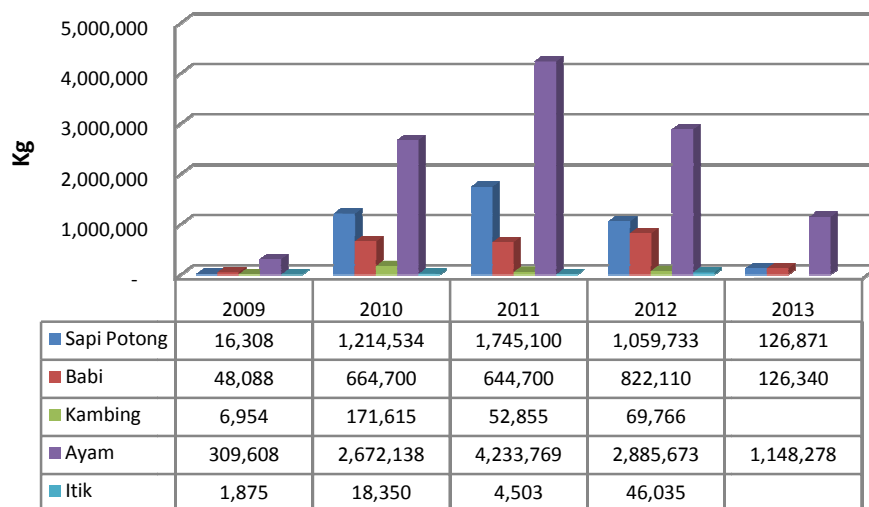
Produksi daging Ayam di Kota Pontianak menempati urutan pertama mengingat preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi daging ayam lebih tinggi mengingat harga daging ayam lebih murah dibandingkan dengan harga daging lainnya, sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 selanjutnya 2012 mengalami penurunan menjadi 2.885.673 kg. Selanjutnya produksi kedua terbanyak yaitu sapi potong juga mengalami penurunan di tahun 2012 karena kebijakan pembatasan import daging sapi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Produksi berikutnya yang cukup tinggi yaitu daging babi yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Produksi daging Kambing menempati posisi keempat dalam pemenuhan daging untuk masyarakat di Kota Pontianak. Produksi daging itik juga turut meningkat dari tahun ke tahun.

Kedepan kebijakan dalam program pengembangan Kawasan Usaha Peternakan diarahkan dengan satu kawasan khusus budidaya sapi potong dalam rangka pemenuhan swasembada daging yang dicanangkan pemerintah pusat sekaligus untuk mengatasi keluhan masyarakat akan dampak pencemaran lingkungan dari limbah dihasilkan.

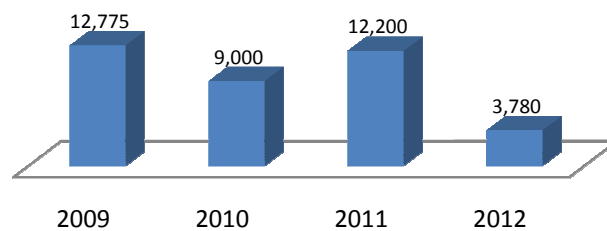


**Gambar II-22**  
**Grafik Populasi Ternak Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**





**Gambar II-23**  
**Grafik Produksi Daging di Kota Pontianak Tahun 2009 - 2013**



**Gambar II-24**  
**Grafik Produksi Susu (Dalam Liter) di Kota Pontianak Tahun 2009 - 2013**

## B. Urusan Kehutanan

Kota Pontianak sebagai kota yang sedang berkembang dihadapkan pada masalah mulai menurunnya daya dukung lingkungan akibat akumulasi berbagai dampak aktifitas yang terjadi. Untuk menanggulangi hal tersebut, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah menetapkan dan mengelola hutan kota sebagai bagian dari pemenuhan RTH.

Melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hutan Kota, pemerintah kota Pontianak menetapkan kawasan seluas 22,25 Ha di 6 Kecamatan sebagai kawasan hutan kota yakni:

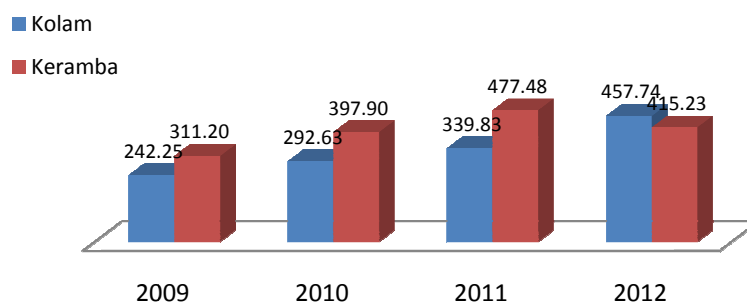
- Lingkungan Untan seluas 5 Ha di Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara
- Komplek Stadion Atletik Ampera seluas 4 Ha di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota
- Fasilitas Jalan Umum Pemerintah Kota Pontianak Jalan Sulawesi seluas 0,25 ha di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan dan Areal depan gedung pemuda KNPI Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Akcaya seluas 0,25 ha

- d. Kecamatan Pontianak Utara dengan lokasi
- Buffer Zone Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Kelurahan Batu Layang seluas 3 ha
  - Areal Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Kelurahan Siantan Hilir seluas 2 ha
  - Buffer Zone Raiser Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Siantan Hilir seluas 2 Ha
  - Buffer Zone Sub Terminal Agribisnis Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Siantan Hilir seluas 1 Ha
  - Buffer Zone UPTD RPH Babi Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Siantan Hilir seluas 3 Ha
  - Buffer Zoner Sirkuit Balap Motor Kelurahan Batulayang seluas 1 ha.
- e. Buffer Zone Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dengan lokasi seluas 0,5 ha
- f. Buffer Zone gedung Bulutangkis Kota Pontianak dan SMKN 9 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat seluas 0,25 ha

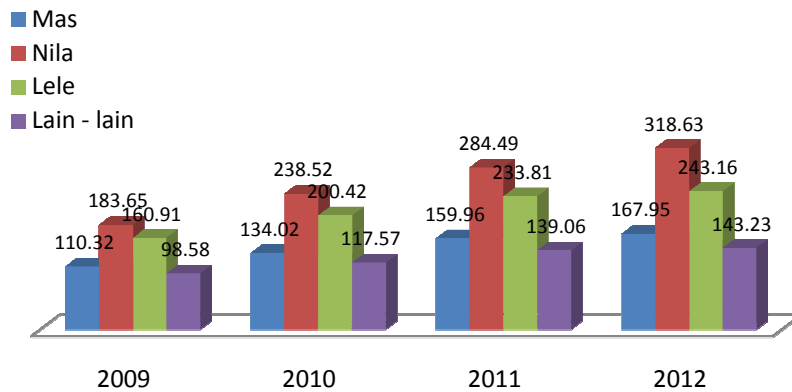
Kawasan hutan kota tersebut selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga diharapkan dapat berfungsi memberikan perlindungan wilayah sekitarnya.

### C. Urusan Perikanan

Tujuan penyelenggaraan urusan perikanan adalah mengoptimalkan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk meningkatkan luas kolam/keramba, produksi dan produktivitas produk-produk perikanan budidaya seperti ikan Nila, lele, Mas, dan lainnya maupun perikanan tangkap dengan kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kota sangat memperhatikan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Kota Pontianak mulai dari penyediaan bibit di Balai Benih Ikan (BBI), penyediaan pakan, pemberian penyuluhan sampai dengan pemasaran untuk perikanan budidaya serta memberikan layanan bagi perikanan tangkap dengan membangun tempat pendaratan ikan (TPI), cold storage dan memberikan bantuan mesin motor kapal dan peralatan lainnya bagi nelayan. Diharapkan beberapa upaya tersebut dapat memberikan peningkatan bagi pembangunan bidang perikanan. Kinerja urusan perikanan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

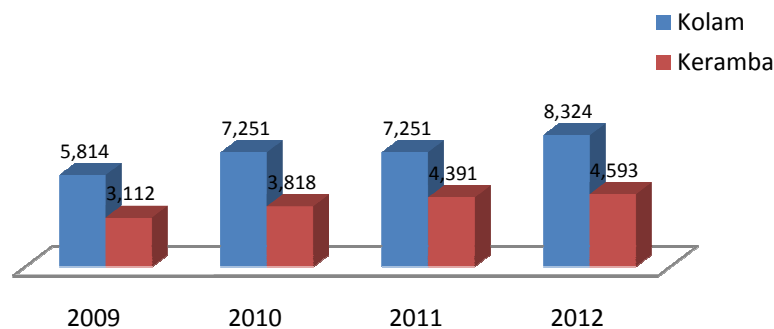


**Gambar II-25**  
**Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Dalam Ton) Kota Pontianak**  
**Tahun 2009-2013**

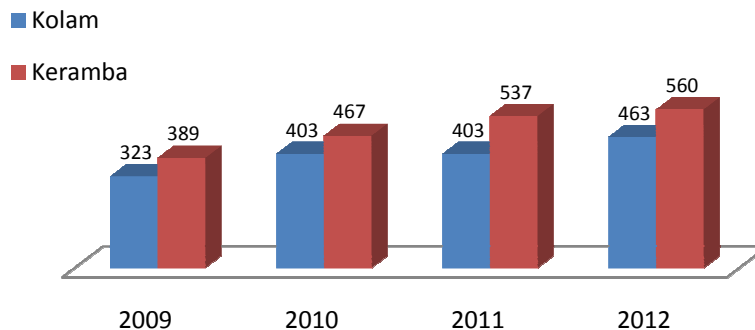


**Gambar II-26**  
**Grafik Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenisnya Tahun 2009 – 2013**

Produksi perikanan budidaya kolam maupun keramba di Kota Pontianak mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan air tawar (ikan lele, nila, mas dan lainnya) yang dapat dilihat pada tabel diatas. Seiring dengan hal tersebut itu terjadi pula peningkatan jumlah dan luasan kolam maupun keramba budidaya yang ada yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar II-27**  
**Grafik Luas Keramba (dalam m<sup>2</sup>) Tahun 2009-2013**



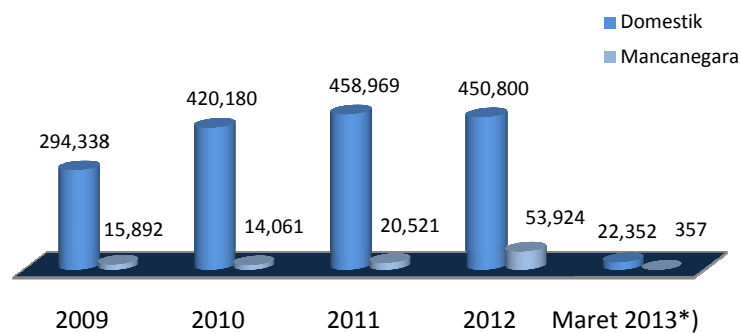
**Gambar II-28**  
**Grafik Jumlah Kolam serta Keramba ( dalam Unit/Pet) Tahun 2009-2013**

Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam mengoptimalkan atau meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di bidang kehutanan untuk meningkatkan ketersediaan hutan kota dan bibit tanaman penghijauan di Kota Pontianak.

#### D. Urusan Pariwisata

Sebagai kota yang heterogen dan memiliki berbagai keunikan budaya, adat istiadat serta keunikan geografinya, pariwisata merupakan salah satu urusan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian kota selain sektor perdagangan dan jasa. Keterkaitan tiga sektor tersebut amatlah erat sehingga pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas pengaruhnya dari dua sektor lainnya tersebut.

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan wisata. Dalam lima tahun terakhir angkanya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 310.230 orang, dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 504.724 orang dengan peningkatan rata – rata per tahun sebesar 18,6% dan sampai bulan Maret 2013 jumlah kunjungan wisata sebesar 22.709 orang. Peningkatan ini terjadi pada wisatawan domestik dari periode 2009-2012 dengan rata – rata sebesar 16,7% dan juga wisatawan manca negara yakni rata – rata sebesar 65,7%.



**Gambar II-29**  
**Grafik Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

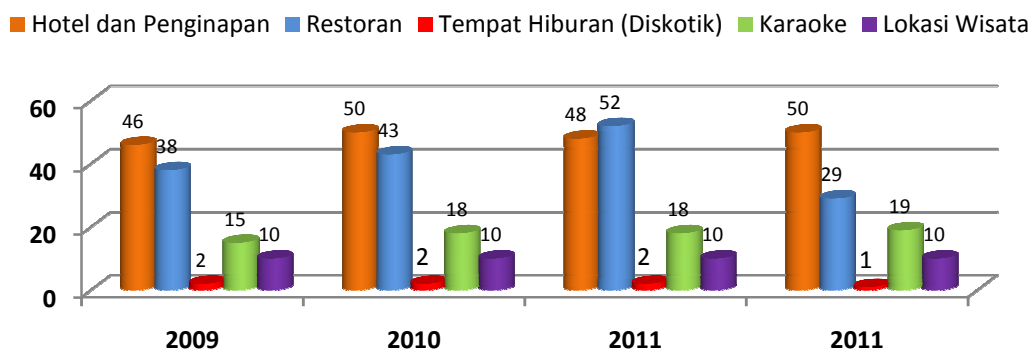
Hasil pendataan pada hotel dan penginapan di Kota Pontianak bahwa lamanya rata – rata kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Pontianak tidak mengalami peningkatan. Hal ini dapat tergambar periode tahun 2009 – 2013 lamanya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara selalu sama yakni rata – rata 1 - 3 hari.

**Tabel II-101**  
**Lama Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara Di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Domestik	Hari	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
2	Mancanegara	Hari	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata merupakan salah satu factor yang penting di dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah kota Pontianak dalam lima tahun terakhir melakukan perbaikan berbagai infrastruktur dasar perkotaan dalam rangka memacu pertumbuhan sector-sektor strategis, termasuk di dalamnya Pariwisata. Disisi lain sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang telah terbangun seperti hotel berbintang dan hotel non berbintang mengalami peningkatan jumlahnya pada tahun 2009 dengan jumlah hotel sebanyak 46 buah terjadi peningkatan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 48 buah atau rata – rata peningkatan jumlah hotel sebesar 0.02%. Peningkatan ini diikuti oleh sektor restoran mengalami peningkatan rata – rata sebesar 0.08%, dan karaoke dengan peningkatan rata – rata sebesar 0.12% sedangkan untuk tempat hiburan (diskotik) dan lokasi wisata tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing sebanyak 2 dan 8 buah.



**Gambar II-30**  
**Grafik Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata di Kota Pontianak Tahun 2009-2012**

Kota Pontianak memiliki objek wisata yang sangat potensial dan dapat menunjang pengembangan kepariwisataan. Selama periode tahun 2009 – 2012 terdapat 10 objek wisata yang dipelihara antara lain : 1.) Tugu Khatulistiwa; 2) Keraton Kadariah; 3) Masjid Jami'; 4) Makam Batu Layang; 5) Taman Alun Kapuas; 6) Aloe Vera Centre; 7) Rumah Melayu; 8) Rumah Betang; 9) Vihara Bodhisatva Karaniya Metta; 10) Museum. Pada periode tahun tersebut terdapat 4 potensi wisata yang telah dikembangkan yakni : 1.) Tugu Khatulistiwa; 2) Taman Alun Kapuas; 3) Aloe Vera Centre; 4) Museum, namun pada tahun 2013 jumlah objek wisata berkurang menjadi 7 objek wisata

**Tabel II-102**  
**Jumlah Objek Wisata Kota Pontianak Di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah objek wisata yang dipelihara	Lokasi	10	10	10	10	10
2	Jumlah potensi wisata yang telah dikembangkan	Lokasi	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak

## E. Urusan Industri dan Perdagangan

### Perindustrian

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang industri, Kota Pontianak melakukan pembinaan terhadap industri menengah, besar dan industri rumah kecil dan rumah tangga. Mengingat keterbatasan lahan serta sumber daya yang dimiliki, industri kurang begitu berkembang di Kota Pontianak, yang mana terlihat dari kontribusinya dalam PDRB Kota Pontianak hanya 7,01%. Akan tetapi bukan berarti sektor ini dapat dipandang sebelah mata karena terbukti industri kecil dan menengah mampu bertahan selama krisis ekonomi melanda dan menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Dalam kurun waktu 2009-2013 telah banyak yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak untuk memajukan sektor ini. Gambaran perkembangan sektor industri dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

**Tabel II-103**  
**Perkembangan Industri di Kota Pontianak Tahun 2009 - 2013**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
<b>A. Industri Menengah ( Asset 200 juta s/d 10 Milyar )</b>							
1.	Unit Kerja	Unit	848	862	902	907	915
2.	Tenaga Kerja	Orang	4240	4310	4510	4535	4270
3.	Nilai Produksi	Rp Juta	50,880	51,720	54,120	54,420	54,900
4.	Jumlah Industri menengah per Jenis Kerajinan		848	862	902	907	915
a.	Kulit	Unit					
b.	Kayu	Unit	45	45	46	46	45
c.	Logam/Logam Mulia	Unit	18	19	21	19	20
d.	Anyaman/Gerabah/Keramik	Unit	11	11	12	10	8
e.	Dari Kain Tenun	Unit	2	2	2	2	2
f.	Industri Makanan/Minuman	Unit	367	371	383	387	390
g.	Tekstil	Unit	25	26	28	29	31
h.	Pakaian jadi	Unit	18	19	21	19	21
i.	Kertas	Unit					
j.	Penerbitan, Percetakan, dan reproduksi media rekaman	Unit	45	46	48	50	53
l.	Kimia	Unit	1	2	3	3	3
m.	Karet	Unit	4	4	4	4	4
n.	Mesin dan perlengkapannya	Unit	35	35	37	37	39
o.	Mesin Listrik dan Perlengkapannya	Unit	42	42	43	43	43
p.	Radio, televisi dan peralatan komunikasi dan perlengkapannya	Unit					
q.	Industri peralatan kedokteran, alat cukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam	Unit	1	1	1	1	1
r.	Kendaraan Bermotor	Unit	170	171	173	175	177
s.	Alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat dan lebih	Unit	33	33	36	36	35
t.	Furnitur dan industri pengolahan lainnya	Unit	30	33	41	43	40
u.	Daur ulang	Unit	1	2	3	3	3
<b>B. Industri Besar ( Asset &gt; 10 Milyar )</b>							
1.	Unit Kerja	Unit	34	34	34	34	34
2.	Tenaga Kerja	Orang	1230	1239	1235	1235	1235
3.	Nilai produksi	Rp Juta	782,009	782,009	782,009	782,009	782,009
<b>C. Rumah Kecil dan Rumah Tangga ( Asset Rp. 0 s/d 200 Juta )</b>							
1.	Jumlah Unit Kerja	Unit	816	885	940	1031	1074
2.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1632	1770	1880	2062	2148
3.	Nilai produksi	Rp Juta	2,040	2,213	2,350	2,578	2,685

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2013

**Tabel II-104**  
**Kinerja Indikator Bidang Perindustrian Kota Pontianak Tahun 2010 - 2013**

No	Uraian	Satuan	TAHUN			
			2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi PDRB dari sektor perindustrian	%	8.18	7.92	7.67	-
	- Pontianak Selatan	JT Rp	117,692.74	121,670.76	124,778.48	-
	- Pontianak Tenggara	JT Rp	29,007.13	30,542.56	31,694.90	-
	- Pontianak Timur	JT Rp	40,488.53	46,622.03	52,762.44	-
	- Pontianak Utara	JT Rp	608,601.54	637,215.51	687,687.01	-
	- Pontianak Barat	JT Rp	54,664.20	57,557.54	70,466.11	-
	- Pontianak Kota	JT Rp	119,756.06	125,077.69	135,118.01	-
2	Jumlah Industri RT, Kecil, Menengah	unit	1747	1842	1938	1989
3	Jumlah Industri	unit	1781	1876	1972	2023
4	Peningkatan kemampuan teknologi industri	%	10.05	20.18	27.3	
5	Peningkatan nilai produksi Industri RT, Kecil, Menengah	JT Rp	1,013	2537	528	587
6	Prosentase Industri Tangga, Kecil, Menengah yang dibina	%	9.79	13.36	34.21	65.66
7	Tingkat aplikasi teknologi industri	%	8.11	8.92	11.2	
8	Klasifikasi usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	%	98.09	98.19	98.28	98.32
9	Prosentase Industri Rumah Tangga, Kecil, Menengah yang dibina program kemitraan	%	20.4	24.73	29.5	-
10	Pembangunan sentra usaha mikro, kecil dan menengah terpadu	%	-	0.02	0.02	-

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2013

### Perdagangan

Cakupan pelayanan yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak dalam bidang perdagangan adalah memberikan bimbingan teknis pelaksana, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran, pemantauan pengadaan dan penyaluran (distribusi) barang dan jasa, perlindungan konsumen serta urusan perizinan serta pengembangan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, promosi dagang di dalam dan luar negeri. Pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-105**  
**Kinerja Indikator Bidang Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2010 - 2013**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan jasa	%	21.30	21.56	21.65	
2	Peningkatan jumlah pasar tradisional	Lokasi	7	7	7	7
3	Peningkatan jumlah pasar modern	Lokasi	18	25	30	30
4	Peningkatan usaha perdagangan	%	6.24	6.86	7.89	
5	Terkendalnya harga sembako	%	4.71	5.18	5.96	
6	Penurunan jenis barang kadaluarsa yang beredar	Jenis	4	4	-	
7	Peningkatan total nilai ekspor kota pontianak melalui pelabuhan laut	USD	-	114.94	2.25	
8	Peningkatan total nilai impor	USD	-	146.23	261.77	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2013



**Tabel II-106**  
**Jumlah Pedagang di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No.	Klasifikasi	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pedagang Skala Besar	202	210	221	232	240
2	Pedagang Skala Menengah	173	182	191	201	210
3	Pedagang Skala Kecil	809	575	621	652	680
<b>Kota Pontianak</b>		<b>1184</b>	<b>967</b>	<b>1033</b>	<b>1085</b>	<b>1130</b>

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2013

### Pasar

Cakupan pelayanan bidang meliputi pembinaan teknis, pembinaan dan penataan pasar, registrasi dan retribusi. Sebagai kota yang berkembang dari sector perdagangan, keberadaan pasar memiliki arti strategis dalam perekonomian kota. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mendorong berkembangnya sentra-sentra perdagangan di seluruh wilayah Kota Pontianak, khususnya di lokasi pusat-pusat pelayanan sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah Kota Pontianak. Hal ini memberikan peluang berkembangnya sector ini dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasar sebagai media bertransaksi antara penjual dan pembeli merupakan sarana yang vital dalam kegiatan perdagangan. Untuk itu perkembangannya mendapat perhatian penting. Pemerintah Kota Pontianak melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya bagi penjual dengan modal yang terbatas dengan pangsa pasar menengah ke bawah. Disisi lain pemerintah Kota Pontianak juga mendorong pihak swasta untuk berinvestasi membangun pasar-pasar modern untuk menyasar pangsa pasar menengah ke atas. Berikut data dan informasi perkembangan pasar di Kota Pontianak selama kurun waktu 2009-2013.

**Tabel II-107**  
**Perkembangan Pasar Modern di Kota Pontianak Tahun 2013**

No	Nama Pasar	Alamat	Luas Tanah (M2)	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Jumlah PKL Yang Ditampung	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Tahun Dibangun	Kel	Kec
1	Matahari Mega Mall	Jl. A. Yani Komp. A.Yani Mega Mall	-	-	-	-	-	2008	Parit Tokaya	Pontianak Selatan
2	Matahari Mall	Jl. Jend. Urip	9,820	22,000	HGB	75	551	1999	Tengah	Pontianak Kota
3	Carrefour	Jl. Jend Urip Komp Matahari Mall	9,820	1,900	Sewa	-	82	2011	Tengah	Pontianak Kota
4	Ramayanan Dept Store	Jl. Tanjungpura	10,000	7,000	-	-	-	-	B.M. Laut	Pontianak selatan
5	Swalayan Mitra Anda	Jl. Hasanudin	2,077	3,795	Hak Milik	Tidak ada	147	1992	S.J. Luar	Pontianak Barat

No	Nama Pasar	Alamat	Luas Tanah ( M2)	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Jumlah PKL Yang Ditampung	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Tahun Dibangun	Kel	Kec
6	Swalayan Mitra Mart I	Jl. HRA. Rahman	1,903	2,979	Hak Milik	Tidak ada	127	2002	S.J. Dalam	Pontianak Barat
7	Swalayan Mitra Mart II	Jl. St. Abdurrahman	-	-	Hak Milik	Tidak ada	20	-	S. Bangkong	Pontianak Kota
8	Swalayan Garuda Mitra	Jl. HRA Rahman	2,576	1,872	Hak Milik	Tidak ada	215	1991	S.J. Dalam	Pontianak Barat
9	Swalayan Harum Manis	Jl. Agus salim	712	1,622	HGB	Tidak ada	58	1984	B.M. Darat	Pontianak selatan
10	Swalayan Kaisar	Jl. Pattimura	-	-	-	-	-	-	Darat sekip	Pontianak Kota
11	Swalayan Citra Jeruju	Jl. Kom Yos Sudarsi No.33	-	-	-	-	-	-	S.J. Luar	Pontianak Barat
12	Swalayan Sitra Siantan	Jl. Gst Mahmud No.8	1,350	1,105	Hak Milik	Tidak ada	82	2002	Siantan Hilir	Pontianak Utara
13	Swalayan Kaisar Siantan	Jl. Gst Mahmud	-	-	-	-	-	-	Siantan Hilir	Pontianak Utara
14	Swalayan Purnama	Jl. Purnama	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Pontianak selatan
15	Swalayan Citra Niaga	Jl. Gajahmada Komp.Ps. Flamboyan	-	-	-	-	-	-	B.M.Darat	Pontianak selatan
16	Swalayan Citra Utama	Jl. Imam Bonjol	-	-	-	-	-	-	Bansir Laut	Pontianak selatan
17	Swalayan Ligo Mitra	Jl. Gajahmada	1400	3357	Hak Milik	Tidak ada	127	-	B.M.Darat	Pontianak selatan

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2013

**Tabel II-108**  
**Perkembangan Pasar Tradisional yang Dibina di Kota Pontianak Tahun 2013**

No.	Pasar	Kelurahan	Kecamatan	Binaan
1	Pasar Dahlia	Sei Jawi Dalam	Pontianak Barat	D-PPK-UKM
2	Pasar Pagi Ibu	Sei Jawi Dalam	Pontianak Barat	
3	Pasar Teratai	Sei Jawi Luar	Pontianak Barat	D-PPK-UKM
4	Pasar Pagi Milinium	Sei Jawi Luar	Pontianak Barat	
5	Pasar Landak	Sei Beliung	Pontianak Barat	
6	Pasar UKA	Sei Beliung	Pontianak Barat	
7	Pasar Sore	Sei Beliung	Pontianak Barat	
8	Pasar Nipah Kuning	Sei Beliung	Pontianak Barat	
9	Pasar Sepakat	Pal Lima	Pontianak Barat	
10	Pasar Mawar	Darat Sekip	Pontianak Kota	
11	Pasar Cempaka	Darat Sekip	Pontianak Kota	D-PPK-UKM
12	Pasar Kemuning	Sei Bangkong	Pontianak Kota	D-PPK-UKM
13	Pasar Pagi Mariana	Mariana	Pontianak Kota	
14	Pasar Pagi Wahidin	Sei Bangkong	Pontianak Kota	
15	Pasar Rakyat ( Pancasila 5)	Sei Bangkong	Pontianak Kota	
16	Pasar Rakyat ( H.Udin)	Sei Jawi	Pontianak Kota	
17	Pasar Flamboyan	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	D-PPK-UKM
18	Pasar Diponegoro	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
19	Pasar Kampung Bali	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
20	Pasar Antasari	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
21	Pasar Setiabudi	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
22	Pasar Hijas	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
23	Pasar Siam	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
24	Pasar Seroja	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
25	Pasar Rakyat ( Purnama )	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	

No.	Pasar	Kelurahan	Kecamatan	Binaan
26	Pasar Ampera	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	
27	Pasar Kamboja	Benua Melayu Laut	Pontianak Selatan	
28	Pasar Tanjungpura	Benua Melayu Laut	Pontianak Selatan	
29	Pasar Rakyat ( H Thaha )	Bangka Beliang Darat	Pontianak Tenggara	
30	Pasar Rakyat ( H Abd Saleh )	Bangka Beliang Darat	Pontianak Tenggara	
31	Megamall A Yani	Bansir Darat	Pontianak Tenggara	
32	Pasar Kenanga	Dalam Bugis	Pontianak Timur	D-PPK-UKM
33	Pasar Anggrek	Dalam Bugis	Pontianak Timur	
34	Pasar Seruni	Saigon	Pontianak Timur	
35	Pasar Puring	Siantan Tengah	Pontianak Utara	D-PPK-UKM
36	Pasar Parit Nenas	Siantan Tengah	Pontianak Utara	
37	Pasar Jagung Bakar	Siantan Hulu	Pontianak Utara	
38	Pasar Batu Layang	Batu Layang	Pontianak Utara	
39	Pasar Gst Mahmud	Siantan Hilir	Pontianak Utara	
40	Pasar Pekong	Siantan Hilir	Pontianak Utara	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2013

Sarana pendukung aktivitas perekonomian Kota Pontianak adalah pasar tradisional dan pasar modern. Sampai dengan tahun 2013 terdapat sebanyak 7 buah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak. Daya tampung pasar tradisional untuk pedagang dengan berbagai jenis dagangannya relatif sangat terbatas. Adapun pasar tradisional yang sudah diperbaiki atau direvitalisasi, antara lain adalah Pasar Dahlia, Pasar Cempaka, Pasar Puring, Pasar Kemuning, Pasar Teratai dan Pasar Flamboyan.

### 2.3.3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

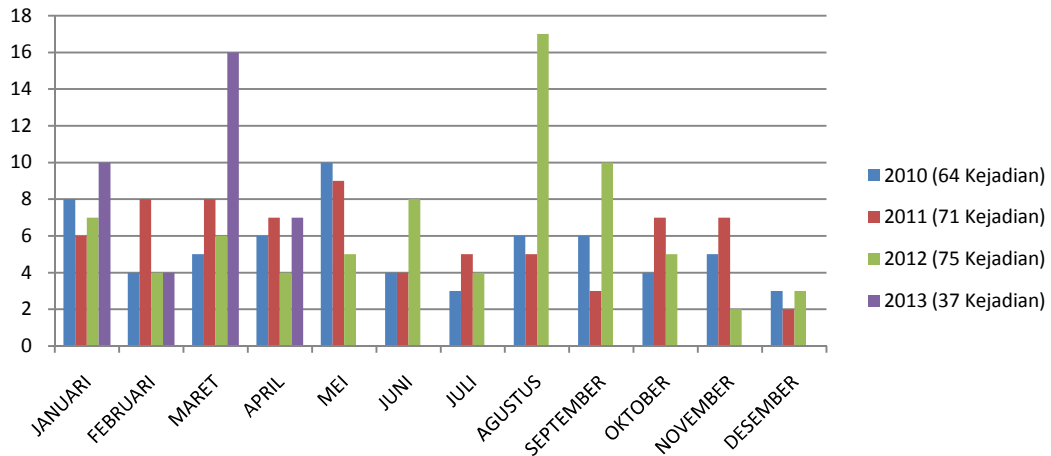
#### A. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana merupakan hal yang tak terduga dan acap kali terjadi. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindak tanggap terhadap kejadian bencana, maka Pemerintah Kota Pontianak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mewujudkan sistem pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas, profesional dan terpadu. Dalam operasionalnya di BPBD terdapat dua gugus tugas tanggap bencana yaitu Pasukan Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana.

Dalam penanggulangan kebakaran di Kota Pontianak tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang bernaung dibawah yayasan pemadam kebakaran swasta dengan jumlah sebanyak 16 buah yayasan dengan personil secara keseluruhan sebanyak 1.006 (aktif dan non aktif) yang dapat dikerahkan apabila terjadi bencana kebakaran, serta sarana kendaraan sebanyak 16 unit fire truk, fire jip sebanyak 12 unit, trailer sebanyak 22 unit dan portable fire sistem sebanyak 25 unit. Seluruh kekuatan yang ada pada pemadaman kebakaran swasata dapat memberikan bantuan dalam penanggulangan kebakaran yang sering terjadi di Kota Pontianak. Adapaun yayasan kebakaran swasta tersebut adalah sebagai berikut:

- Badan Pemadam Api Siantan
- Yayasan Pemadam Kebakaran Panca Bhakti

- Yayasan Pemadam Kebakaran Budi Pekerti
- Pemadam Kebakaran Mitra Bhakti
- Pemadam Kebakaran Merdeka
- Pemadam Kebakaran Mitra Jawi
- Yayasan Pemadam Kebakaran Khatulistiwa
- Perkumpulan Pemadam Kebakaran Bintang Timur
- Persatuan Pemadam Kebakaran Jeruju
- Unit Pemadam Kebakaran Gotong Royong
- Yayasan Bhakti Tiga Serumpun
- Pemadam Kebakaran Hikmah
- Pemadam Kebakaran Swadesi Borneo
- Pemadam Kebakaran Pesat
- Pemadam Kebakaran Pandu Siaga
- Pemadam Kebakaran Pemuda Pancasila



**Gambar II-31**  
**Frekuensi Bencana Kebakaran (termasuk kebakaran lahan)**  
**di Kota Pontianak Tahun 2010-2013**

Kejadian bencana yang kerap kali terjadi Kota Pontianak adalah bencana kebakaran, banjir, kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, dan angin puting beliung. Untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut dilakukan berbagai sosialisasi dan penanggulangan tanggap bencana baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok masyarakat serta anggota pemadam kebakaran swasta. Disisi lain tim reaksi cepat akan segera aktif apabila terjadi bencana dengan memberikan bantuan yang diperlukan bagi korban seperti bantuan kebutuhan dasar (sandang), bantuan makanan siap saji, serta bantuan konseling.

Dalam penanggulangan setiap kejadian bencana, BPBD berwenang mengkoordinasikan setiap aksi tindak penanganan dari berbagai komponen tanggap bencana yang ada. Disamping itu BPBD juga berwenang mengkoordinasikan setiap bantuan penanganan pasca bencana dari berbagai pihak/donor sehingga diharapkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

## B. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai implementasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005.

Fungsi utama dari Satpol PP adalah sebagai garda depan penegakkan aturan daerah khususnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan kaitan dengan penegakkan aturan daerah ini adalah berupa Penertiban/razia terhadap pelanggaran permainan layang-layang, penginapan, tempat hiburan, senjata tajam dan lain-lain. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan terpadu penertiban bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait yaitu penertiban PKL (gerobak, gubuk liar, kios, lapak dan lain-lain), pembinaan/razia gepeng dan PSK, razia/penertiban tempat kost, penertiban bangunan yang melanggar ijin bangunan, penyuluhan/sosialisasi Perda tentang ketertiban umum serta pembinaan dan penataan PKL di Kota Pontianak.

Upaya penertiban bangunan/kios liar merupakan langkah terakhir yang ditempuh, setelah melakukan pendekatan dengan pemilik bangunan dan diberikan penjelasan dan penyuluhan. Setelah upaya tersebut tidak berhasil maka bagi pemilik bangunan/kios liar diberikan Surat Perintah Membongkar (SP). Surat Perintah 1 (SP-1) diberikan kesempatan kepada pemilik bangunan/kios liar selama 7 hari untuk membongkar sendiri bangunannya.

Surat Peringatan 2 (SP-2) diberikan kepada pemilik bangunan agar membongkar sendiri bangunannya dalam tempo 5 (lima) hari, apabila dalam waktu 5 (lima) hari pemilik bangunan tidak membongkar bangunannya, maka diberikan surat peringatan ke 3 (SP-3). Surat Peringatan ke 3 (SP-3) memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri dalam tempo waktu selama 3 hari. Apabila dalam jangka waktu kesempatan selama 3 hari pemilik bangunan belum juga membongkar bangunannya sendiri, maka dilakukan pembongkaran oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu dan di back up oleh Kepolisian sektor, Koramil maupun unsur/instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan. Berikut informasi mengenai kegiatan penertiban yang dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

**Tabel II-109**  
**Kegiatan Bintibmas yang Dilaksanakan Satpol PP Kota Pontianak Tahun 2009-2013\***

No	Kegiatan	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013*	
1.	Jumlah operasi rutin (patrol) yang dilaksanakan	102	39	81	90	22	334
2.	Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan Instansi terkait) yang dilaksanakan	76	99	42	42	192	451
3.	Jumlah pengawasan pejabat yang dilaksanakan	13	12	61	75	43	204
<b>Jumlah</b>		<b>191</b>	<b>150</b>	<b>184</b>	<b>207</b>	<b>257</b>	<b>989</b>

Sumber : Satpol PP, Ket :\*) bulan Maret 2013

**Tabel II-110**  
**Frekuensi Razia Layang-Layang Tahun 2010-2013\***

No.	Kecamatan	Tahun				Total
		2010	2011	2012	2013*	
1.	Pontianak Barat	5	4	2	-	11
2.	Pontianak Timur	2	4	-	-	6
3.	Pontianak Selatan	3	4	2	-	9
4.	Pontianak Utara	2	4	-	-	6
5.	Pontianak Kota	3	6	3	1	13
6.	Pontianak Tenggara	2	3	1	-	6
Jumlah		17	25	8	1	51

Sumber : Satpol PP, Ket :\*) bulan Maret 2013

**Tabel II-111**  
**Jumlah Keberhasilan Penertiban PKL Tahun 2010-2013**

No.	Kecamatan	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013 *	
1.	Pontianak Barat	145	294	55	82	13	11
2.	Pontianak Kota	254	350	254	20	18	6
3.	Pontianak Selatan	207	406	165	70	37	9
4.	Pontianak Tenggara	35	10	83	10	11	6
5.	Pontianak Timur	29	30	35	406	21	13
6.	Pontianak Utara	93	47	7	12	10	6
Jumlah		763	1.137	599	600	110	3.209

Sumber : Satpol PP Kota Pontianak, Ket :\*) bulan Maret 2013



## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

#### A. Pendapatan Per Kapita Penduduk

Selama periode 2009-2012, pendapatan perkapita penduduk per tahun di Kota Pontianak terus memperlihatkan tren kenaikan. Hal ini sejalan dengan geliat perekonomian kota yang juga semakin membaik dimana berimbas kepada kesejahteraan masyarakatnya yang juga secara umum meningkat. Di tahun 2012 pendapatan per kapita penduduk Kota Pontianak per tahun adalah sebesar Rp. 27.304.474,89 yang merupakan nilai pendapatan per kapita tertinggi di Propinsi Kalimantan Barat dibandingkan kabupaten/kota yang ada.

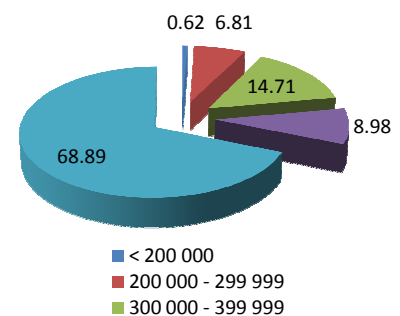
**Tabel II-112**  
Pendapatan Per Kapita Penduduk (Harga Berlaku) Kota Pontianak Tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Perkapita Penduduk/Tahun (Rp)
2009	21.200.579,58
2010	22.620.584,89
2011	24.588.026,26
2012	27.304.474,89
2013	30.802.165,90

Sumber : BPS Kota Pontianak Tahun 2014

#### B. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012, dapat dilihat bahwa ada sekitar 68,89 % penduduk di Kota Pontianak yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan  $\geq$  500.000 rupiah, dan prosentase jumlah penduduk yang pengeluarannya per kapitanya kurang dari 200.000 rupiah sebulan adalah sebanyak 0,62 %.



**Tabel II-113**  
Distribusi Prosentase Pengeluaran Per Kapita Penduduk  
Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2010-2012

Rentang Pengeluaran (Rp)	2010	2011	2012
< 200 000	2.58	1.27	0.62
200 000 - 299 999	7.90	7.15	6.81
300 000 - 399 999	15.12	8.90	14.71
400 000 - 499 999	12.71	10.02	8.98
$\geq$ 500 000	61.68	72.66	68.89
Jumlah	100	100	100

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2013

**Gambar II-32**  
Diagram Distribusi Prosentase  
Pengeluaran Per Kapita Penduduak  
Sebulan di Kota Pontianak Tahun  
2010-2012



Sedangkan apabila dilihat dari jumlah pengeluaran per bulan per rumah tangga, prosentase terbesar berada pada kisaran di atas Rp. 2.000.000,- per bulan untuk setiap rumah tangga. Hal ini secara umum memberikan gambaran paritas daya beli masyarakat Kota Pontianak cukup baik, artinya dengan kata lain dari sektor konsumsi memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam geliat perekonomian Kota Pontianak.

**Tabel II-114**  
**Prosentase Rumah Tangga Menurut Pengeluaran Per Bulan 2010 – 2012**

Golongan Pengeluaran	2011	2012
<500.000	0.52	0.32
500.000 - 999.999	7.39	5.72
1.000.000 - 1.499.999	16.67	13.04
1.500.000 - 1.999.999	14.43	13.67
≥ 2.000.000	61.00	67.25
Jumlah	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Pontianak Tahun 2013

### C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pola Konsumsi rumah tangga di Kota Pontianak selama tiga tahun terakhir memiliki struktur yang sama, dimana sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Pada tahun 2012, rata-rata nilai konsumsi makanan rumah tangga perbulan mencapai Rp 2.196.398,- atau naik sebanyak 4 % dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan, masing-masing rumah tangga rata-rata menghabiskan sebanyak Rp. 1.115.609,- perbulan, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sandang hanya menghabiskan Rp 355.094,- per bulan.

**Tabel II-115**  
**Rata-rata Nilai Konsumsi Rumah Tangga Per Bulan Menurut Kelompok Konsumsi (Rupiah)**  
**Tahun 2010-2012**

No	Kelompok Konsumsi	Rata-rata Nilai Konsumsi		
		2010	2011	2012
1	Bahan Makanan	993,937	1,229,617	1,215,430
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	628,761	882,576	980,968
3	Perumahan	853,181	785,762	1,115,609
4	Sandang	134,428	188,693	355,094
5	Kesehatan	131,585	305,475	275,582
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	204,985	305,771	363,428
7	Transportasi & Komunikasi	227,390	254,327	964,450

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2013

## 2.4.2 Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

### A. Jaringan Jalan



Pada tahun 2012, jalan di Kota Pontianak seluruhnya berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Pontianak dengan total panjang jalan mencapai 259.644 km. Dilihat dari Jenis permukaannya, sebagian besar jalan di Kota Pontianak merupakan jalan aspal yang panjangnya mencapai 91,26 % dari total panjang jalan di Kota Pontianak, sedangkan sisanya berupa jalan tanah dan beton.

**Tabel II-116**  
Kondisi Jalan Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Panjang jalan (Kondisi)						
	- Baik	Km	77.544	185.457	195.217	199.255	217.169
	- Sedang	Km	92.111	4.187	4.407	4.208	3.137
	- Rusak	Km	61.184	7.670	7.560	7.276	5.880
	- Rusak Berat	Km	21.887	60.379	52.460	48.905	36.904
2	Panjang jalan yang dipelihara	Km	252.726	257.692	259.644	259.644	263.090

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Tahun 2013

**Tabel II-117**  
Jenis Jalan di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013

No.	Jenis Jalan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Aspal	Km	203.842	222.053	224.005	236.954	239.618
2	Beton	Km	5.680	6.388	6.388	6.926	7.708
3	Telfor	Km	23,525	19,464	19,464	-	-
4	Tanah	Km	19.679	9.787	9.787	15.764	15.764

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Tahun 2013



## B. Pengelolaan Sampah



Volume sampah yang dihasilkan di Kota Pontianak berasal dari kegiatan rumah tangga (domestik) dan berasal dari kegiatan fasilitas sosial, perkantoran, pasar, pertokoan dan kegiatan lainnya (non domestik). Sebagai kota dengan tingkat urban yang tinggi, perilaku penduduk dalam menghasilkan sampah perkotaan relative besar. Untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dapat dilihat perkembangan kinerja pengolahan

sampah selama tahun 2009-2012 secara umum menunjukkan peningkatan baik sarana dan prasarana serta penanganan masalah persampahan di Kota Pontianak.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang dapat diangkut pertahun pada tahun 2012 sebanyak 438.252m<sup>3</sup>/tahun dari jumlah sampah sebanyak 526.377 m<sup>3</sup>/tahun atau jumlah sampah yang dapat diangkut sebesar 83,26%, jika dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah volume sampah sebanyak sebanyak 407.934 m<sup>3</sup>/tahun dengan jumlah sampah yang diangkut sebesar 73,85%. Untuk lebih jelas melihat perkembangan pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II-118**  
**Perkembangan Pengelolaan Sampah Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah produksi sampah	m <sup>3</sup> /tahun	552.367	567.834	502.146	526.377	586.243
2.	Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA	m <sup>3</sup> /tahun	407.934	410.606	397.897	438.252	438.750
	prosentase(%)	m <sup>3</sup> /tahun	73,85	72,32	79,24	83,26	74,84

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 2012 dan Hasil Pengolahan Data, 2013



Dalam pengelolaan persampahan di perlukan sarana dan prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPS). Untuk melihat perkembangan sarana dan prasarana TPS selama tahun 2009-2012 dapat dilihat dari jumlah TPS dan Transferdepo pada tahun 2012 sebanyak 111 buah jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 147. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dari pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kebersihan Pertamanan

yang berkomitmen untuk menutup TPS liar yang ada dan meminimalisir jumlah TPS. Untuk lebih jelasnya mengenai keberadaan jumlah TPS dan Transferdepo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-119**  
**Jenis TPS yang Ada di Kota Pontianak tahun 2008-2013**

No.	Jenis TPS	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Container	35	37	30	32	78	91
2.	Batako, Bak plat semen	100	79	147	68	35	35
3.	Transfer Depo	4	2	2	2	2	2
4.	Rumah Kompos				1	1	1
	Jumlah	138	118	179	103	116	129
5.	TPS liar di 6 kecamatan	23	15		15	13	11

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Untuk melayani dalam pengangkutan sampah selama tahun 2009 - 2012 dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang telah tersedia pada tahun 2012 dengan keseluruhan sebanyak 135 unit jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 32. Peningkatan armada ini terjadi pada jenis Armroll, kontainer, pick Up dan motor gerobak, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-120**  
**Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2009- 2013**

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah armada angkutan sampah (dumptruck)	buah	17	23	23	23	23
		Operasional/buah		15	15	14	17
2.	Jumlah armada angkutan sampah (armroll)	buah	10	11	13	23	23
		Operasional/buah		10	12	19	18
3.	Jumlah kendaraan pick up	buah	3	3	3	6	7
4.	Jumlah Buldozer	buah	-	1	1	1	1
5.	Jumlah Excavator	buah	1	1	1	2	1
6.	Jumlah Kontainer	buah		30	32	68	79
7.	Jumlah Motor Gerobak	buah	1	2	7	12	15
<b>Jumlah</b>			<b>32</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>135</b>

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 2013

Jumlah penduduk yang terlayani kebersihan dari tahun 2009 sebanyak 406.418 jiwa atau sebesar 74,73 % dan tahun 2012 meningkat dengan jumlah sebanyak 480.276 jiwa atau sebesar 83,28% untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-121**  
**Ruang Lingkup Pelayanan Kebersihan di Kota Pontianak Tahun 2009- 2013**

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Luas Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA)	Ha	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
2.	Luas wilayah Kota Pontianak	Km <sup>2</sup>	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82
3.	Jumlah Penduduk Kota Pontianak	Jiwa	543.842	554.764	565.856	576.694	647.622
4.	Jumlah Penduduk yang terlayani kebersihan	Jiwa	406.418	429.072	456.922	480.276	480.276

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, 2013

### C. Jaringan Drainase



Seluruh wilayah yang termasuk di dalam Wilayah Kota Pontianak telah dilayani oleh Saluran Drainase yang melayani 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Saluran drainase tersebut baik berupa saluran drainase Primer, Sekunder maupun drainase Lingkungan. Total saluran drainase primer yang ada di kota Pontianak adalah 131,87 Km yang melewati 6 kecamatan yang ada. Dari total tersebut 70,59% diantaranya merupakan saluran tanpa perkerasan (saluran tanah), 1,86% saluran dengan pemasangan batu, 3,14% saluran dengan turap beton bertulang dan 24,39% saluran dengan turap kayu. Berikut rekapitulasi saluran primer menurut jenis konstruksi per kecamatan di Kota Pontianak (dalam meter).

**Tabel II-122**  
**Jumlah dan Panjang Saluran Drainase Menurut Jenisnya Tahun 2013**

No.	Jenis Saluran	Panjang (m)	Konstruksi (m)				
			Tanah	Pasangan Batu	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	Primer	131.870	92.177	2.825	100	4.598	32.170
2	Sekunder	127.220	70.304	39.611	12.565	780	3.960
3	Tersier	345.715	236.362	32.335	77.018	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>604.805</b>	<b>398.843</b>	<b>74.771</b>	<b>89.683</b>	<b>5.378</b>	<b>36.130</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Tahun 2013

### D. Air Bersih

Di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, belum semua masyarakat Kota Pontianak memanfaatkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini terjadi karena instalasi PDAM belum menjangkau seluruh wilayah Kota Pontianak dan atau masyarakat tidak mau, tidak mampu memasang instalasi PDAM dikarenakan faktor ekonomi. Untuk mencukupi kekurangan air bersih, kebiasaan hidup masyarakat Kota Pontianak memanfaatkan air hujan, terutama untuk memasak dan minum. Sedangkan untuk kegiatan mandi dan mencuci, masyarakat memanfaatkan air permukaan seperti air kolam dan air sungai disamping menggunakan atau mengkonsumsi air ledeng (PDAM) sebagian masyarakat juga menggunakan sumur atau air tanah untuk keperluan mandi dan mencuci, dimana jarak dari septiktank dan sumur mata air yang digunakan untuk dikonsumsi rumah tangga juga harus diperhatikan sehingga air buangan dari septiktank tidak rembes ke dalam dan bercampur dengan air sumur resapan yang digunakan untuk mandi dan mencuci. Air sumur yang digunakan untuk mencuci dan mandi juga harus perlu diperhatikan kualitas air nya sehingga kesehatan masyarakat yang tinggal dan menggunakan air dilingkungan tersebut akan terjaga kesehatan nya.





IPA (1) Imam Bonjol – 150 lt/dtk



IPA (2) Imam Bonjol – 300 l/dtk



IPA (3) Imam Bonjol – 110 ltr/dtk



IPA (4) Imam Bonjol – 300 ltr/dtk

**Gambar II-33**  
**Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak**

Daerah pelayanan PDAM meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Pontianak dan sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya Dalam, Sungai Ambawang dan Sungai Kakap. Pembagian daerah pelayanan secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah yaitu:

1. Wilayah I meliputi Pontianak Barat dan Pontianak Kota
2. Wilayah II meliputi Pontianak Selatan, Tenggara dan sebagian Kabupaten Kubu Raya
3. Wilayah III meliputi Pontianak, Timur dan Utara serta sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Pada akhir Tahun 2007 jumlah pelanggan PDAM tercatat 65.927 pelanggan dan pada akhir Desember 2012 tercatat sebanyak 81.653 sambungan, dengan demikian dalam 5 tahun terakhir terjadi penambahan pelanggan sebesar 15.726 atau 23,9% dengan rata-rata pertumbuhan 4,8% atau 3.125 pelanggan per tahun dan Pontianak Timur dan Utara memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi 8,2% per tahun diikuti Pontianak Selatan dan Tenggara 4,3% per tahun serta Pontianak Barat dan Kota 3,7% pertahun.

Dari penyebaran pelanggan, Pontianak Barat dan Kota (Wilayah I) memiliki jumlah pelanggan terbanyak sebesar 43,9% atau 38.858 pelanggan diikuti Pontianak Selatan dan Tenggara dengan 34,4% atau 28.490 pelanggan serta Pontianak Timur dan Utara dengan 21,7% atau 17.693 pelanggan. Sampai akhir maret 2013 tercatat 83.111 pelanggan yang dilayani PDAM dengan tingkat pelayanan mencapai 75% penduduk terlayani.

**Tabel II-123**  
**Jumlah Pelanggan Berdasarkan Area Pelayanan Tahun 2009-2013**

Tahun	Area Pelayanan			Jumlah
	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	
2009	32.437	25.067	14.281	71.785
2010	33.225	26.297	15.553	75.075
2011	34.027	27.393	16.774	78.194
2012	38.858	28.112	17.683	81.653
2013*)	36.217	28.490	18.404	83.111

Sumber: PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

\*) Data pada akhir maret tahun 2013

**Tabel II-124**  
**Fasilitas Air Baku PDAM Kota Pontianak Tahun 2013**

1. Sumber Air Baku	: S. Kapuas	(Utama)
(Air Permukaan)	: S. Landak	(Cadangan)
2. Kapasitas Air Baku	: 1.210 l/d	(Normal)
	: (400-500) l/d	(Kemarau)
3. Intake Air Baku		
a. Imam Bonjol	: 860 l/d	(S. Kapuas)
b. Sei Javi Luar	: 50 l/d	(S.Kapuas)
c. Selat Panjang	: 300 l/d	(S. Landak)
d. Penepat	: 550 l/d	(S.Landak)
4. Reservoir Air Baku	Volume	Pemompaan
Parit Adam	1.000 m <sup>3</sup>	500 l/d
Kuala Mandor	1.000 m <sup>3</sup>	500 l/d
5. Pipe Transmisi Air Baku	: $\phi$ 600 mm DCCP - 24.300 m	

Sumber data: PDAM Tirta Khatulistiwa, 2013

**Tabel II-125**  
**Kinerja Penyediaan Air Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Tahun 2008-2013**

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan Pelayanan (%)	64,99	65,29	70,85	72,44	74,10	74
Tingkat Kehilangan Air	39,63	34,14	32,69	29,02	26,17	25,6
Kapasitas Produksi (lt/dt)					1.210	

Sumber: PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, 2014

Berdasarkan klasifikasi pelanggan, maka jumlah pelanggan terbanyak adalah pelanggan rumah tangga yang mencapai 90,13%, diikuti pelanggan niaga 7,78% dan pelanggan sosial 1,06%. Untuk pengembangan lima tahun ke depan, pelayanan air bersih diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi air bersih sehingga diharapkan akan mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat Kota Pontianak.



## E. Sanitasi Lingkungan

Secara umum kondisi sanitasi kota Pontianak saat ini belum ideal. Dengan kondisi saat ini khususnya untuk air limbah belum ada jaringan pemisah antara saluran air limbah dengan jaringan drainase. Saat ini saluran drainase berfungsi ganda, selain untuk menampung limpasan air hujan, juga difungsikan sebagai saluran buangan air limbah baik bagi rumah tangga maupun komersial. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kota Pontianak mengingat akan berhubungan dengan kualitas lingkungan di masa depan.

**Tabel II-126**  
**Rumah Tangga yang Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2013**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	RUMAH TANGGA				
			JUMLAH	JUMLAH DIPANTAU/ SAMPEL	% DIPANTAU	BER PHBS *	%
1	Pontianak Kota	Jend. Urip	301	301	100.00	144	47.84
2		Alianyang	440	440	100.00	243	55.23
3		Pal III	643	643	100.00	285	44.32
4		Karya Mulya	460	460	100.00	197	42.83
5	Pontianak Barat	Perum I	468	468	100.00	143	30.56
6		Perum II	1,048	1,048	100.00	397	37.88
7		KomYos	508	508	100.00	239	47.05
8		Pal V	415	415	100.00	232	55.90
9	Pontianak Selatan	Gg. Sehat	325	325	100.00	122	37.54
10		Purnama	360	360	100.00	158	43.89
11	Pontianak Tenggara	Kp. Bangka	397	397	100.00	229	57.68
12		Paris II	387	387	100.00	178	45.99
13	Pontianak Timur	Saigon	329	329	100.00	155	47.11
14		Kp. Dalam	450	450	100.00	147	32.67
15		Tambelan Sampit	346	346	100.00	107	30.92
16		Banjar Serasan	375	375	100.00	125	33.33
17		Tanjung Hulu	588	588	100.00	173	29.42
18		Parit Mayor	520	520	100.00	209	40.19
19	Pontianak Utara	Siantan Hilir	675	675	100.00	287	42.52
20		Siantan Tengah	369	369	100.00	118	31.98
21		Siantan Hulu	337	337	100.00	110	32.64
22		Telaga Biru	869	869	100.00	258	29.69
23		Khatulistiwa	565	565	100.00	208	36.81
JUMLAH (KAB/KOTA)			11,175	11,175	100.00	4,464	39.95

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2014

Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perilaku hidup masyarakat yang belum sadar sanitasi, beban lingkungan yang makin besar akibat pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, urbanisasi, serta kurang tersedianya sarana dan prasarana sanitasi. Masih kita dapati juga sebagian kecil masyarakat yang tinggal di tepian badan air menggunakan sungai untuk keperluan MCK.

Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan upaya dan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang sanitasi guna meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa kegiatan fisik maupun berupa upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Perlu disadari bahwa derajat kesehatan masyarakat yang optimal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, fisik, sosial, ekonomi dan budaya hidup masyarakat.

Secara umum, kualitas kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan, dimana hal ini terlihat dari akses masyarakat terhadap kepemilikan sarana dasar sanitasi yaitu jamban dan pengelolaan limbah keluarga/rumah tangga. Dari keluarga sampel (60% dari populasi), keluarga yang memiliki akses terhadap jamban keluarga baru mencapai 81,8% dan 89,92% diantaranya katagori jamban sehat sedangkan ±10% sisanya masih belum memenuhi standar kesehatan. Dalam pengelolaan air limbah rumah tangga, baru 51% yang mempunyai saluran air limbah dan hanya 36,44% yang kondisinya dikategorikan sehat. Berdasarkan data di atas maka masih ada ± 20% masyarakat yang tidak punya akses terhadap jamban dan itu artinya kemungkinan besar mereka melakukan aktivitas Buang Air Besar di sembarang tempat. Dalam hal pengelolaan air limbah, lebih dari 50% keluarga sampel tidak mempunyai saluran air limbah rumah tangga.

**Tabel II-127**  
**Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2013**

NO.	PUSKESMAS	JUMLAH KK	JAMBAN						TEMPAT SAMPAH (TPS) DAN TPA			PENGELOLAAN AIR LIMBAH					
			JML KK DIPERIKSA	JML KK MEMILIKI	JUMLAH SEHAT	% KK DIPERIKSA	% KK MEMILIKI	% SEHAT	JUMLAH TPS/TPA	JML DIPERIKSA	% TPS/TPA DIPERIKSA	JML KK DIPERIKSA	JML KK MEMILIKI	JUMLAH SEHAT	% KK DIPERIKSA	% KK MEMILIKI	% SEHAT
1	Siantan Hilir	9.045	700	400	400	7,74	57,14	100,00	4	4	100,00	700	0	0	7,74	0,00	-
2	Siantan Hulu	563	279	266	225	49,56	95,34	84,59	8	7	87,50	279	0	0	49,56	0,00	-
3	Telaga Biru	1.750	1424	1422	1174	81,37	99,30	74,50	2	2	100,00	1.424	0	0	81,37	0,00	-
4	Khatulistiwa	1.030	801	781	737	77,77	97,50	94,37	5	2	40,00	801	0	0	77,77	0	-
5	Siantan Tengah	2.319	1342	970	370	57,87	72,28	38,14	0	0	#DIV/0!	1.342	0	0	57,87	0	-
6	Saigon	4.160	922	595	583	22,16	64,53	97,98	2	2	100,00	922	0	0	22,16	0,00	-
7	Banjar Serasan	1.958	1958	1488	1203	100,00	76,00	80,85	0	0	#DIV/0!	1.958	0	0	100,00	0	-
8	Tambelan Sampit	1.967	1270	1270	53	30,00	100,00	4,17	1	1	100,00	1.270	0	0	64,57	0	-
9	Parit Mayor	647	476	341	251	73,57	71,64	73,61	0	0	#DIV/0!	476	0	0	73,57	0	-
10	Kampung Dalam	438	334	334	296	76,26	100,00	88,62	2	2	100,00	334	0	0	76,26	0	-
11	Tanjung Hulu	160	160	160	160	100,00	100,00	100,00	1	1	100,00	160	0	0	100,00	0	-
12	kampung Bali	35.534	19809	19079	13622	55,75	96,31	71,40	15	5	33,33	19.809	0	0	55,75	0	-
13	Alianyang	5.724	3242	3242	2514	56,64	100,00	77,54	13	10	76,92	3.242	0	0	56,64	0	-
14	Pal Tiga	958	705	705	705	73,59	100,00	100,00	6	6	100,00	705	0	0	73,59	0	-
15	Karya Mulia	4.286	3171	2537	2309	73,99	80,01	91,01	2	2	100,00	3.171	0	0	73,99	0,00	-
16	Perumnas 1	2.493	1478	1478	1398	59,29	100,00	94,59	12	12	100,00	1.478	0	0	59,29	0	-
17	Perumnas 2	11.506	5265	4435	4131	45,76	84,24	93,15	2	2	100,00	5.265	0	0	45,76	0	-
18	Kompos	7.663	2331	2331	2327	30,42	100,00	99,83	6	6	100,00	2.331	0	0	30,42	0	-
19	Pal Lima	633	633	611	611	100,00	96,52	100,00	5	5	100,00	633	0	0	100,00	0	-
20	GG Sehat	8.845	668	663	589	7,55	99,25	88,84	2	2	100,00	668	0	0	7,55	0	-
21	Purnama	8.243	636	636	636	7,72	100,00	100,00	3	3	100,00	636	0	0	7,72	0	-
22	Kampung Bangka	2.172	165	165	165	7,60	100,00	100,00	2	2	100,00	165	0	0	7,60	0,00	-
23	Paris II	4.302	2295	2295	2295	53,35	100,00	100,00	3	3	100,00	2.295	0	0	53,35	0	-
	Total	116.396	50064	46204	36754	43,01	92,29	79,55	96	79	82,29	50.064	0	0	43,01	0	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2013

## F. Perumahan dan Permukiman

Secara umum kondisi perumahan dan permukiman di Kota Pontianak sudah cukup baik, akan tetapi pada beberapa bagian wilayah kota masih terdapat kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni. Dalam kurun lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Pontianak telah berhasil mereduksi 64,76% kawasan kumuh yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai program perbaikan lingkungan permukiman serta bantuan rumah tidak layak huni baik yang didanai melalui APBD maupun APBN dan pihak swasta

**Tabel II-128**  
**Luas Kawasan Kumuh di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No.	Tahun	Luas
1.	2009	247,77 Ha
2.	2010	215,00 Ha
3.	2011	143,25 Ha
4.	2012	109,06 Ha
5.	2013	84,28 Ha

Sumber : Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Perumahan, 2014

**Tabel II-129**  
**Luas Kawasan Kumuh Per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2013**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1.	Pontianak Utara	4	23	11	760	15,76
2.	Pontianak Timur	6	19	14	1.110	21,46
3.	Pontianak Kota	3	15	10	822	14,04
4.	Pontianak Barat	3	20	14	1.259	22,10
5.	Pontianak Selatan	2	8	7	358	5,58
6.	Pontianak Tenggara	2	6	5	318	5,34
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>91</b>	<b>61</b>	<b>4.627</b>	<b>84,28</b>

Sumber : Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Perumahan, 2014

Mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Program PNPM Mandiri serta pihak swasta telah menangani sebanyak 3.958 unit rumah tidak layak huni melalui bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini sejalan dengan target kinerja penanganan rumah tidak layak huni dalam rencana jangka menengah yaitu sebanyak 500-1000 unit per tahun.

**Tabel II-130**  
**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

No	Sumber Dana	TAHUN					Total	Ket
		2009	2010	2011	2012	2013		
1	APBD Kota	185	273	266	266	<b>26</b>	<b>1016</b>	APBD
2	Bansos Kementerian Sosial	252	-	-	-		<b>252</b>	APBN
3	APBN (Paket) / PNPM Mandiri Perkotaan	13	10	10	199	<b>5</b>	<b>237</b>	APBN Sharing APBD
4	Kementerian Perumahan Rakyat		100	500	1358	485	<b>2443</b>	APBN
5	CSR	-	-	-	10		<b>10</b>	Pihak Ketiga
<b>Jumlah</b>		<b>450</b>	<b>383</b>	<b>776</b>	<b>1833</b>	<b>516</b>	<b>3958</b>	

Sumber : Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Perumahan, 2014

## G. Transportasi dan Perhubungan

Transportasi di Kota Pontianak umumnya ditunjang oleh kepemilikan kendaraan pribadi, baik berupa kendaraan roda dua maupun roda empat. Sejalan dengan pertambahan penduduk, data menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan pribadi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan (lihat Tabel II-86, hal 88). Untuk mengakomodir kondisi tersebut Pemerintah Kota Pontianak juga telah membangun berbagai sarana lalu lintas yang telah untuk menunjang pertumbuhan kendaraan bermotor seperti tarffict light, rambu-rambu lalu lintas, halte, jembatan penyeberangan dan zebra cross di jalan-jalan yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemeirntah Kota Pontianak.

Disisi lain, untuk menciptakan kelancaran lalu lintas, dalam lima tahun terakhir Pemerintah Kota sangat gencar melakukan pelebaran jalan-jalan kota, disamping juga dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan. Hal ini dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan lalu lintas serta meminimalisir terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

Untuk menciptakan aksesibilitas antar wilayah serta mengurangi beban kepadatan pada jalan-jalan utama kota, program yang telah dilakukan adalah merealisasikan jalan *inner ringroad* dan memperlebar jalan-jalan penghubung alternative. Program ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan jalan-jalan lingkungan (gang) sebagai penghubung jalan-jalan kolektor baik primer maupun sekunder untuk menopang fungsi sub-sub pusat pelayanan di beberapa bagian kota.

**Tabel II-131**  
**Sarana Lalu Lintas yang Dimiliki Kota Pontianak Tahun 2013**

No	Sarana Lalu Lintas	Jumlah
1	Traffic Light	16
2	Halte Kendaraan Angkutan Umum	23
3	Rambu Lalu Lintas	781
4	Zebra Cross	75
5	Jembatan Penyeberangan	1

Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatikan Kota Pontianak, 2014

Dalam rangka menunjang kelancaran sarana perhubungan dan aksesibilitas wanatar wilayah, kota Pontianak memiliki 1 unit terminal kelas B yang melayani kendaraan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang berlokasi di kelurahan Batulayang kecamatan Pontianak Utara. Saat ini ada kecenderungan berkurangnya jumlah angkutan public dalam kota, mengingat harga kendaraan pribadi khususnya motor relative terjangkau bagi warga masyarakat menyebabkan masyarakat lebih memilih memiliki kendaraan pribadi. Disisi lain aspek kenyamanan angkutan publik yang kurang menyebabkan semakin lama moda ini kurang diminati.

**Tabel II-132**  
**Data Terminal di Kota Pontianak**

NO	Nama Terminal	Lokasi	Luas Terminal (M <sup>2</sup> )	Kapasitas (Unit)	Jumlah Kendaraan yang ada (Unit)
1.	Terminal Batu Layang	Jl. Khatulistiwa	9.153	420	155
2.	Nipah Kuning	Jl. Kom Yos Sudarso	855	50	72
3.	Pal Lima	Jl. Husein Hamzah	745	60	4
4.	RSU. Sudarso	Jl. Dr. Sudarso			0
5.	Pasar Kemuning	Jl. Prof.M.Yamin	375	32	7
6.	Pasar Dahlia	Jl.H.R.A.Rahman	691	60	20
7.	Parit Mayor	Jl.Tanjung Raya II	525	40	15
8.	Pasar Seruni	Jl. Panglima Aim	1.023	55	12
9.	Pasar Siantan	Jl.Gst.S.Mahmud	1.777	75	56
10.	Harapan Jaya	Jl. Harapan Jaya	2.025	160	-
11.	Seroja	Jl. Cik Ditiro	0	0	64
12.	Pasar Cempaka	Komp. Kapuas Indah	1.200	-	105
13.	Kampung Bali	Jl. Sisinggamangaraja	-	-	98
14.	Mahakam/Menara	Jl. Mahakam	-	-	15
15.	Pasar Flamboyan	Jl.Gajahmada	-	-	14

Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pontianak, 2013

#### H. Jaringan Komunikasi

Sesuai data PT. Telkom Pontianak, saat ini telah dipasang sebanyak 43.672 satuan sambungan telepon kabel yang melayani seluruh wilayah kota Pontianak. Sejalan dengan perkembangan *mobile phone*, saat ini diperkirakan hampir seluruh rumah tangga telah mempunyai sarana komunikasi berupa *hand phone* sehingga memiliki akses yang baik terhadap informasi.

Arah perkembangan telekomunikasi saat ini berkembang menuju penyediaan akses data dengan dukungan jaringan *mobile phone* yang lebih baik sejalan dengan perkembangan teknologi 3G dan 4G. sehingga pengembangan telekomunikasi saat ini lebih kepada penyediaan akses internet seluas mungkin untuk mempermudah akses layanan informasi yang realtime.

#### I. Jaringan Listrik

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) Cabang Pontianak, bahwa pada kondisi akhir tahun 2012 yakni Bulan Desember, terdapat sebanyak 333.224 pelanggan yang tercatat di PT. PLN. Pelanggan ini meliputi rumah tangga, Industri, Perkantoran, Bisnis, Sosial, dan pelanggan prabayar. Produksi listrik PLN yang terjual selama tahun 2012 adalah sebanyak 796 milyar KWH, dimana golongan pelanggan yang paling banyak menggunakan listrik PLN adalah golongan rumah tangga dengan konsumsi listrik sebanyak 56,53 % dari total listrik yang diproduksi PLN, sedangkan pelanggan listrik Prabayar hanya mengkonsumsi listrik sebesar 4,03%

Di tahun 2012, dengan Jumlah rumah tangga yang ada sebanyak 131.121 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga pengguna listrik sebanyak 126.609 rumah tangga, maka rasio elektrifikasi mencapai 96,56%. Hal ini menunjukkan hampir seluruh rumah tangga telah memiliki sambungan listrik. Kedepan perlu perhatian lebih terhadap ketersediaan dan kualitas penyediaan energy listrik khususnya untuk menunjang kegiatan perekonomian, mengingat

salah satu permasalahan yang menjadi hambatan pengembangannya adalah masalah ketersediaan dan sustainabilitas energi listrik.

### 2.4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

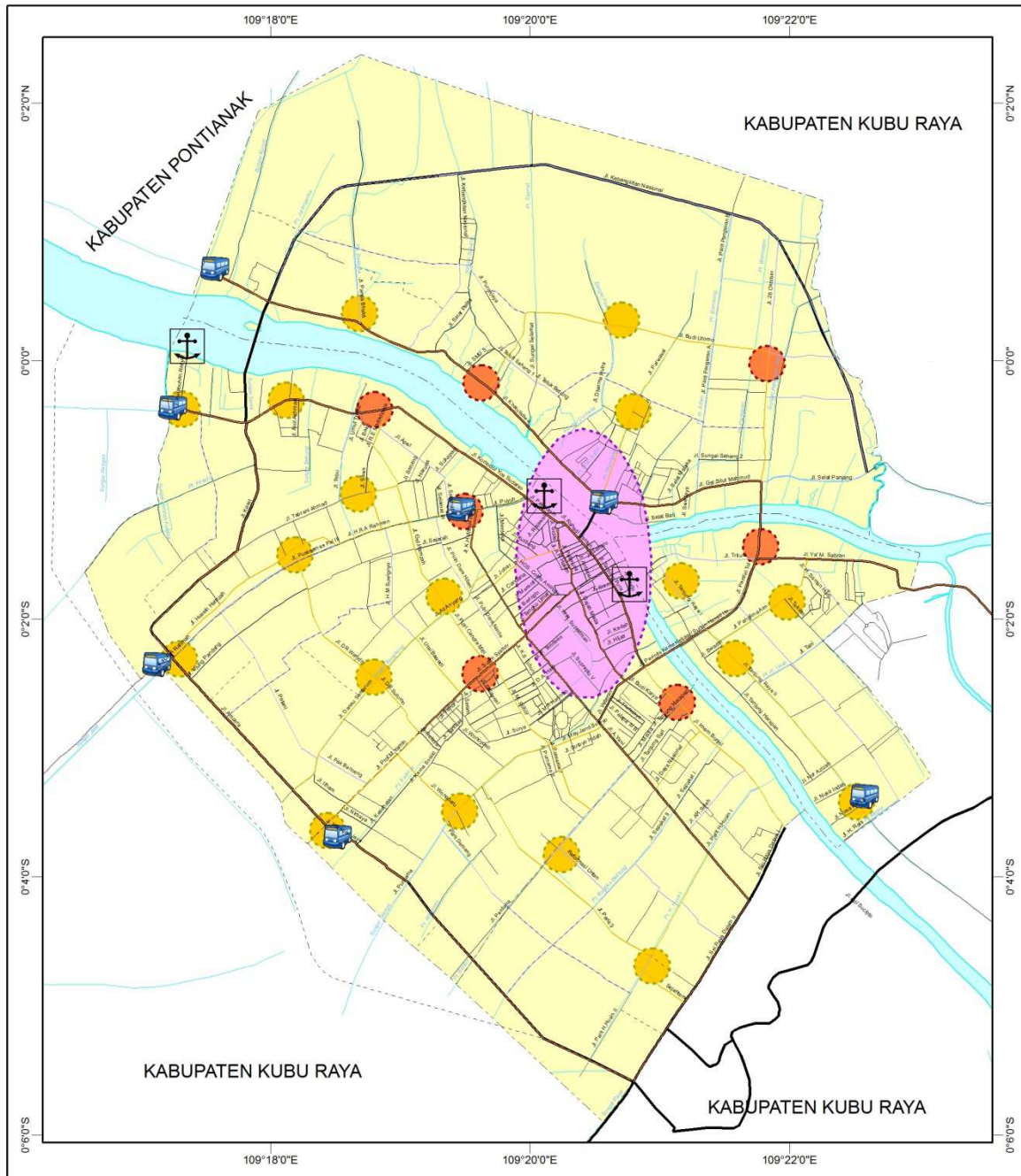
Kebijakan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013, disusun berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan SDM; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang serta pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang.

#### A. Struktur Ruang Kota

Secara garis besar, konsep pengembangan Kota Pontianak adalah ***Pengembangan Sistem Pelayanan Banyak Pusat***. Kota Pontianak yang terdiri dari 6 Kecamatan terbagi dalam 3 wilayah yang dibatasi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, maka Kota Pontianak diarahkan mempunyai 1 pusat pelayanan Kota dan yang mempunyai peran sebagai berikut:

- Pusat Pelayanan Pasar Skala Regional dapat berupa pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan dan atau
- Pusat Pelayanan Pemerintahan baik pemerintahan kota maupun pemerintahan provinsi dan atau
- Pusat Pelayanan Jasa Perbankan dan perhotelan serta jasa umum skala regional lainnya dan atau
- Pusat Pelayanan Fasilitas Peribadatan dan olahraga skala regional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam peta berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033.

**Gambar II-34**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kota Pontianak Tahun 2033**



## B. Pemanfaatan Ruang Kota

Secara garis besar, sampai 2033 ke depan, alokasi pemanfaatan ruang sebagian besar diperuntukan untuk kawasan permukiman dimana diestimasikan pada tahun 2033 nanti diperkirakan mencapai 40,42% (4.358 ha) dari total luas lahan yang dimiliki Kota Pontianak saat ini, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

**Tabel II-133**  
**Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Kota Pontianak Hingga Tahun 2033**

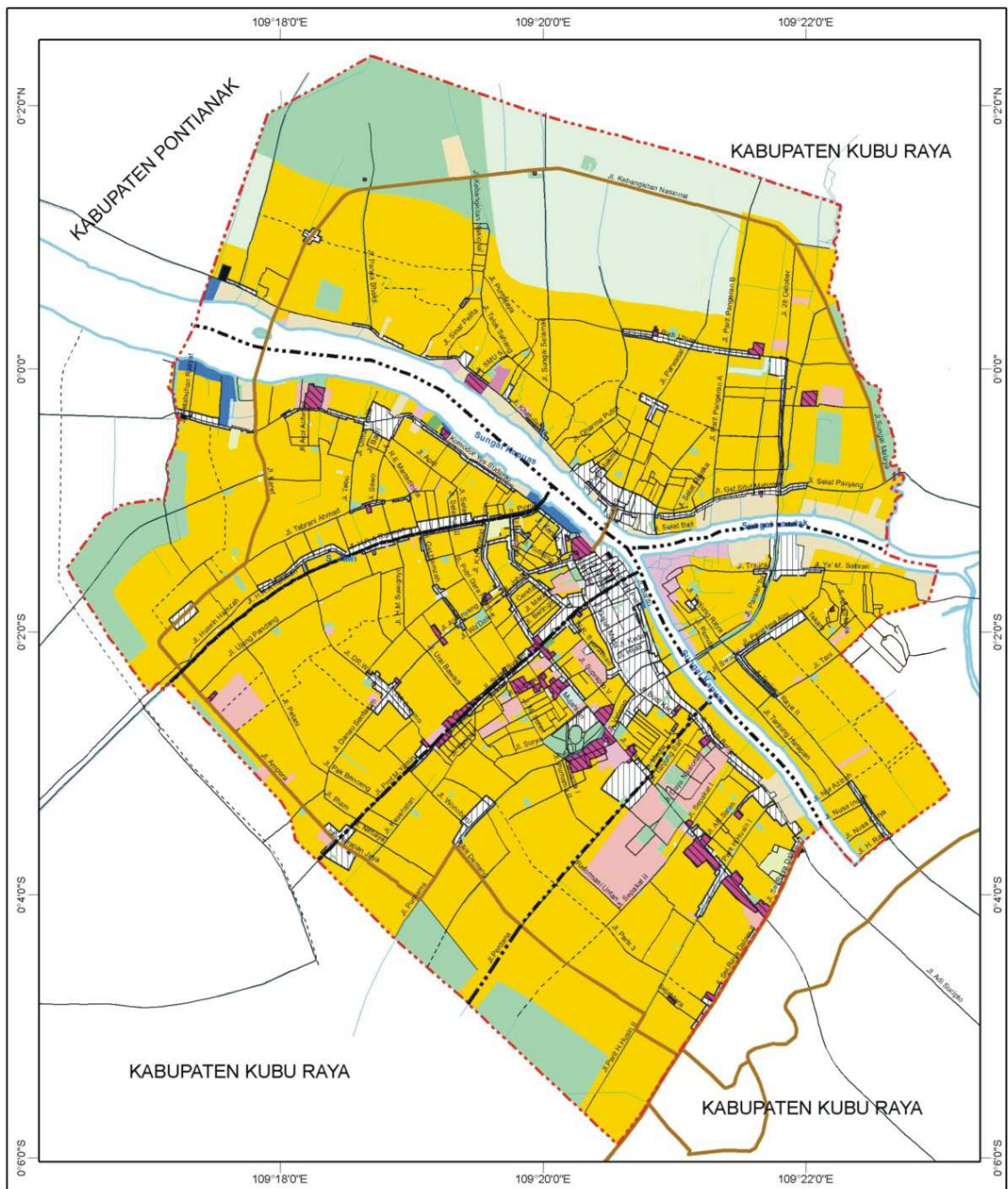
### I. Kawasan Lindung:

NO.	KAWASAN LINDUNG	LUAS (Ha)	prosentaseDARI LUAS KOTA (%)
1.	Kawasan Lindung Gambut	858,24	7,95
2.	Sempadan Sungai (Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Malaya)	53,10	0,49
	<b>JUMLAH</b>	<b>911,34</b>	<b>8,45</b>

### II. Kawasan Budidaya:

No	JENIS PEMANFAATAN RUANG	LUAS (Ha)		prosentaseTerhadap Luas Kota (%)
		EKSISTING TAHUN 2013	RENCANA TAHUN 2033	
1	Permukiman	3.685,72	4.358,00	40,42
2	Perdagangan dan Jasa	462,81	714,64	6,63
3	Perkantoran Pemerintahan dan Pelayanan umum	56,78	129,63	1,20
4	Industri dan Pergudangan	156,46	257,74	2,39
5	Pariwisata, Rekreasi dan Seni Budaya	10,41	67,88	0,63
6	Kawasan ruang terbuka non hijau;	0	276,8	*
7	Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;	0	153,06	*
8	Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;	0	1,92	*
9	Kawasan peruntukan lainnya			
	a. Kawasan peruntukan pertanian dan peternakan	4.127,79	944,59	8,76
	- Pertanian Hortikultura	4.127,79	774,62	7,18
	- Peternakan	0	169,97	1,58
	b. Kawasan peruntukan pelayanan umum;	352,74	542,87	5,03
	- Fasilitas Kesehatan	22,69	34,71	0,32
	- Fasilitas Pendidikan	195,18	357,5	3,32
	- Fasilitas Peribadatan	27,23	40,85	0,38
	- Lapangan Olahraga	54,97	70,64	0,61
	- Pemakaman Umum	29,90	43,98	0,41
	c. Kawasan peruntukan prasarana kota	984,68	1.090,15	10,11
	- Jaringan jalan, Terminal, Dermaga, Pelabuhan	974,41	1.067,60	9,90
	- Pembangkit Listrik	6,05	6,05	0,06
	- Tempat Pengolahan Akhir Sampah	4,22	16,5	0,15
10	Taman	112,55	271,82	2,52
	- Taman RT	55,05	77,37	0,72
	- Taman RW	27,50	38,67	0,36
	- Taman Kelurahan	18,00	23,17	0,21
	- Taman Kecamatan	12,00	15,66	0,15
	- Taman Kota	-	116,95	1,08
11	Hutan Kota	231,70	251,55	2,33
12	Jalur Hijau	63,38	165,01	1,53
	- Jalur Hijau Sepanjang Parit Primer & Sekunder	10,74	35,81	0,33
	- Jalur Hijau Sempadan Jalan	14,95	49,83	0,46
	- Jalur Hijau di bawah SUTT	-	53,92	0,50
	- Kawasan Penyangga TPA Sampah	10,35	20,69	0,19
	- Kawasan Penyangga Pembangkit Listrik PLN	2,38	4,76	0,04

Keterangan : \*) tidak dihitung %tasenya karena penggunaan lahannya hanya bersifat fungsi tambahan dari guna lahan utamanya  
Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033.



Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033.

**Gambar II-35**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Pontianak 2012-2033**

## 2.4.4 Iklim Investasi

### A. Perkembangan Investasi

Fungsi Investasi sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Pontianak antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah kecepatan perijinan, kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

**Tabel II-134**  
**Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 (juta rupiah)**

No.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Investasi PMDN	196.336,60	194.284,60	194.302,99	563.924,34	560.915,34
2	Jumlah investasi PMA	25.091,34	25.112,72	25.112,72	59.502,38	175.921,07
<b>TOTAL INVESTASI</b>		<b>221.427,94</b>	<b>219.397,32</b>	<b>219.415,71</b>	<b>623.426,72</b>	<b>736.836,41</b>

Sumber : BP2T Kota Pontianak, 2014 diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah investasi keseluruhan yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan asing tahun 2009 sebesar Rp.221.427.940.000,-, tahun 2010 sebesar Rp.219.397.320.000,-; tahun 2011 sebesar Rp.219.415.710.000,-; tahun 2012 sebesar Rp 623.426.720.000,- Terlihat pula bahwa investasi yang terjadi ditahun 2010 tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun sebesar 0,92 %, di tahun 2011 pertumbuhan investasi meningkat sebesar 0,01 % dan di tahun 2012 meningkat sebesar 1,84 %. Penurunan investasi yang terjadi di tahun 2010 berasal dari penanaman modal dalam negeri yang mengalami penurunan investasi hingga 1,05 %.

**Tabel II-135**  
**Ketentuan Upah Minimum**  
**Di Kota Pontianak, 2008-2013 (Rupiah)**

Tahun	UMK (Rp)
2008	720.000
2009	785.000
2010	845.000
2011	895.000
2012	995.000
2013	1.165.000

Sumber : BP2T Kota Pontianak, 2014

Perkembangan investasi di Kota Pontianak pada awal tahun 2009 – 2013 cenderung tetap, hanya pada tahun 2012 investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri meningkat hingga mencapai 190 %, dan penanaman modal asing meningkat 137 %. Peningkatan investasi ini pada umumnya disebabkan oleh berubahnya format pelaporan penanaman modal oleh investor sehingga terdapat beberapa proyek investasi yang pelaporannya jatuh pada tahun 2012 serta berubahnya posisi Industri Sumber Djantin menjadi proyek PMDN.



Hal lain yang juga berpengaruh pada investasi adalah iklim tenaga kerja serta kepastian aturan berusaha, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan upah minimum bagi tenaga kerja. Dalam kurun lima tahun, UMR Kota Pontianak telah berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian kota yang juga semakin baik. Di Tahun 2013 besaran UMR Kota Pontianak yang telah disepakati dan ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.165.000,-

## B. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas selalu diupayakan untuk diturunkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih kerap terjadi. Dengan masih adanya kejahatan ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu.

**Tabel II-136**  
**Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan**  
**di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2012**

No	Jenis Kejahatan Yang Dilaporkan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Pembakaran/Kebakaran	14	6	2	8
2	Kejahatan Mata Uang	1	0	0	0
3	Kesusilaan	68	0	0	0
4	Perjudian	111	83	56	84
5	Penculikan	5	4	0	0
6	Pembunuhan	8	10	5	2
7	Penganiayaan	400	331	631	653
8	Pencurian	727	1274	1755	2002
9	Perampokan/Curas	279	228	202	225
10	Pemerasan	18	11	10	5
11	Penggelapan	329	469	652	573
12	Penipuan	259	223	354	338
13	Merusak Barang	79	56	96	102
14	Penadahan	0	2	3	3
15	Pencurian Sepeda Motor	582	592	625	827
16	Lain-Lain	47	606	644	719
<b>Jumlah</b>		<b>2927</b>	<b>3895</b>	<b>5035</b>	<b>5541</b>

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Kalbar Tahun 2012, BPS Kalbar  
 Ket : Data tahun 2013 belum diterbitkan

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jenis kejahatan yang paling sering terjadi dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya adalah tindak kejahatan pencurian, pencurian sepeda motor dan kejahatan lainnya yang memberikan kontribusi sebesar 64% dari total kejahatan yang dilaporkan di tahun 2012. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Kota Pontianak sebagai ibukota propinsi dihuni oleh berbagai suku bangsa. Berdasarkan sejarahnya, potensi gesekan sosial antar entitas perlu diwaspadai. Akan tetapi dalam lima tahun terakhir tidak terjadi gejolak sosial yang memberikan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan, roda ekonomi dan pembangunan kota. Akan tetapi potensi konflik tersebut harus terus dijaga melalui program-program sosial yang secara intens terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan para aparat penegakan hukum di Kota Pontianak.

### C. Jumlah dan Lama Perijinan

Dalam memberikan pelayanan di bidang perizinan telah ditetapkan aturan tentang waktu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah jenis perizinan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum terutama tentang waktu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah perizinan. Tabel dibawah menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2009 – 2013 penyelesaian proses perizinan oleh BP2T semakin mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BP2T semakin tahun kualitasnya semakin membaik. Bahkan di tahun 2013 tingkat kesesuaian waktu pelayanan dan Perizinan dengan ketentuan yang berlaku mencapai 92,45 %. Hal ini berarti seluruh permohonan izin yang masuk hingga diterbitkan membutuhkan waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perizinan ini dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel II-137**  
**Kinerja Pemenuhan Standar Waktu Pelayanan Perizinan Tahun 2009 – 2013**

No.	URAIAN	TAHUN							
		2010		2011		2012		2013	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	SIUP	5	7	7	7	1	1	1	1
2	SITU/HO(*)	10	14	10	13	1	1	1	1
3	TDP	5	7	7	7	1	1	1	1
4	IMB	21	45	27	39	25	39	25	39
6	SIUJK	10	12	5	5	5	5	5	5
7	PERIKANAN	7	7	7	6	5	5	5	5
8	STIU	14	15	5	10	3	5	3	5
9	TDI/IUI	7	9	7	7	7	7	7	7

Sumber : BP2T Kota Pontianak, 2014



Dari tabel di atas dapat dijelaskan Pemerintah Kota melakukan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan perizinan seperti standar waktu pelayanan sesuai aturan untuk SIUP hanya 1 hari di tahun 2012 sedangkan ditahun 2011 standarnya adalah 7 hari, untuk SITU waktu yang dibutuhkan juga 1 hari, Tanda Daftar Perusahaan 1 hari, IMB 25 hari dari 27 hari di tahun sebelumnya, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi 5 hari kerja, Periklanan 5 hari dan tanda daftar industri 5 hari.

Terobosan maupun tingkat keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak tahun 2009 – 2013 sebagai berikut :

1. Memberlakukan pemberian pengurangan retribusi sebesar 2 % setiap hari keterlambatan dari tarif retribusi yang telah ditetapkan dan setinggi – tingginya 50 % dari jumlah tarif retribusi, dalam hal penyelenggara tidak memberikan pelayanan sesuai dengan batas waktu pelayanan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Publik.
2. Memberlakukan pelayanan SITU, SIUP dan TDP “1 HARI JADI”.
3. Menyederhanakan jumlah pelayanan perizinan dari 99 jenis pelayanan menjadi 29 jenis melalui Perwa nomor 55 Tahun 2011
4. Menggratiskan 25 (dua puluh lima) jenis retribusi pelayanan perizinan dari 29 pelayanan perizinan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
5. Menyelenggarakan proses perizinan dengan SIMYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu). Yang diberlakukan sejak Oktober 2011 sampai dengan saat ini. Dimana izin yang sudah diproses secara terintegrasi yaitu SITU, HO, SIUP dan TDP.
6. Melakukan penyederhanaan standar dan prosedur perizinan melalui Perwa Nomor 55 Tahun 2011 tentang Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
7. Melakukan penyederhanaan rumus dalam penghitungan retribusi IMB, sebagai bentuk kemudahan pelayanan bagi pemohon dalam menghitung retribusi
8. Melakukan pencantuman nominal biaya retribusi pada sertifikat izin sebagai bentuk transparansi biaya.

#### **D. Pajak-Pajak Daerah**

Kota Pontianak melakukan kegiatan Intensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga dilakukan peningkatan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, setiap tahun melakukan peremajaan database wajib pajak, mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi, menyediakan pelayanan satu atap dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kota Pontianak, melakukan kerja sama pemungutan pajak/retribusi daerah dengan pihak PLN dan PDAM untuk pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan.

Adapun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah diatur dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2012 atas Perubahan PERDA Nomor 6 Tahun 2010 Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel  
Pajak Hotel dikenakan besaran tarif sebesar 10% dan Pajak Rumah Kost dikenakan besaran tariff sebesar 5%.
- b. Pajak Restoran  
Besaran tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.
- c. Pajak Hiburan, meliputi beberapa kategori dengan besaran tarifnya sebagai berikut :
  - Jenis tontonan baik film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
  - Jenis pagelaran kesenian, musik, tari, busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
  - Jenis kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
  - Jenis pameran dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
  - Jenis diskotik, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%
  - Jenis karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%
  - Jenis sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
  - Jenis permainan bilyar, bowling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
  - Jenis pacuan kuda, kendaraan bermotor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
  - Jenis permainan ketangkasan keluarga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%
  - Jenis permainan ketangkasan amusement ditetapkan sebesar 75%
  - Jenis panti pijat, mandi uap/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%
  - Jenis pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
  - Jenis pijat refleksi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
  - Jenis pertandingan/pertunjukan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
  - Khusus hiburan pertunjukan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak 10%
- d. Pajak Reklame  
Tarif Pajak reklame terbagi atas dua yakni reklame produk rokok dan reklame diluar produk rokok, dengan besaran 25% dan 20%.
- e. Pajak Penerangan Jalan  
Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 9%, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.
- f. Pajak Parkir  
Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%
- g. Pajak Sarang Burung Walet  
Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)  
Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,3%.
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  
Tim bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5%.

Sebagai landasan regulasi retribusi, Peraturan Daerah yang telah diterbitkan adalah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan



- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - Retribusi Pelayanan Pasar
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
  - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan
  - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - Retribusi Tempat Pelelangan
  - Retribusi Terminal
  - Retribusi tempat Khusus Parkir
  - Retribusi Rumah Potong Hewan
  - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan
  - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - Retribusi Izin Gangguan
  - Retribusi Izin Trayek, dan
  - Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sedangkan Peraturan Walikota sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah diterbitkan mengenai Pajak Daerah antara lain:

- a. Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Pontianak.

#### **2.4.5 Sumber Daya Manusia**

##### **A. Kualitas Tenaga Kerja**

Angkatan kerja di Kota Pontianak dalam kurun 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Di tahun 2012 jumlah angkatan kerja tercatat 260.108 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 62,47%. Di sisi lain, tingkat pengangguran memperlihatkan tren penurunan dalam 4 tahun terakhir dengan angka di tahun 2012 tercatat 5,35%, turun cukup signifikan dibanding tahun 2011 yang berada pada posisi 7,26%.

**Tabel II-138**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
1.	Penduduk 15 Tahun ke atas (jiwa)	<b>388.590</b>	<b>397.630</b>	<b>406.709</b>	<b>420.502</b>	<b>421.659</b>
	- Angkatan Kerja	<b>239.183</b>	<b>260.892</b>	<b>260.108</b>	<b>257.761</b>	<b>257.761</b>
	Bekerja	216.746	240.576	246.189	241.982	241.982
	Pengangguran Terbuka	22.437	20.316	13.919	15.779	15.779
	- Bukan Angkatan Kerja	<b>149.407</b>	<b>136.738</b>	<b>156.272</b>	<b>163.898</b>	<b>163.898</b>
	Sekolah	38.201	36.175	40.097	52.185	52.185
	Mengurus Rumah Tangga	96.451	88.123	98.096	95.597	95.597
	Lainnya	14.755	12.440	19.947	16.116	16.116
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	<b>9,38</b>	<b>7,79</b>	<b>7,26</b>	<b>5,35</b>	<b>6,12</b>
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	<b>61,55</b>	<b>65,61</b>	<b>63,92</b>	<b>62,47</b>	<b>61,13</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2013

Ket : \* Angka Sementara

Kualitas SDM memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. Kualitas SDM yang dimiliki berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja ini dapat diukur dengan tingkat pendidikan dari angkatan kerja yang tersedia di daerah tertentu. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk maka semakin baik kualitas tenaganya.

Jika dilihat dari jumlah penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan di Kota Pontianak berumur 5 tahun keatas diklasifikasikan ke dalam 6 kategori diantaranya tidak tamat SD, tingkat SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/MA, D1/D2/D3 dan D4/S1/S2. Berdasarkan klasifikasi tersebut perkembangan penduduk berumur 5 tahun keatas di Kota Pontianak cukup menggembirakan, dimana angka yang menamatkan pada tingkat SD/MI terdapat peningkatan dimana pada tahun 2009 sebesar 14,51 % dan meningkat menjadi 19,98% di tahun 2011 begitu juga dengan tingkat D4/S1/S2 pada tahun 2009 sebesar 5,11 % meningkat menjadi 6,75 % di tahun 2011.

**Tabel II-139**  
**Penduduk Berumur 5 (lima) Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Tingkat Pendidikan	2009	%	2011	%	2013*	%
1	Tidak Tamat SD	156.096	31.75	128.200	24.97	105.289	18,87
2	SD/MI	71.318	14.51	102.605	19.98	147.618	26,45
3	SMP/MTS	84.979	17.29	86.524	16.85	88.097	15,79
4	SLTA/MA	139.422	28.36	145.867	28.41	152.610	27,34
5	D1/D2/D3	14.665	2.98	15.629	3.04	16.656	2,98
6	D4/S1/S2/S3	25.112	5.11	34.655	6.75	47.825	8,57
	<b>Jumlah</b>	<b>491.593</b>	<b>100,00</b>	<b>513.479</b>	<b>100,00</b>	<b>558.095</b>	<b>100,00</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2012

Ket : \* Perkiraan BAPPEDA Kota Pontianak

Jika ditinjau dari angkatan kerja yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan, di tahun 2012 terlihat bahwa dominasi pekerja berada pada level pendidikan SMA dan sederajat yaitu sebesar 36,61% sedangkan pekerja yang memiliki tingkat pendidikan D IV/S1 sebanyak 14,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya pekerja Kota Pontianak masih perlu ditingkatkan level pendidikannya.

## B. Dependency Ratio

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk Kota Pontianak tahun 2012 sebesar 46,91 yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 47 orang yang tidak produktif. Angka tersebut cenderung tetap apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2011. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif (65 tahun lebih).

**Tabel II-140**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2010-2013**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013*
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	154725	159146	161965	165713
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	21375	21526	21915	22190
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	176100	180672	183880	187899
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	374197	385184	391963	401166
<b>Rasio ketergantungan (3)/(4)</b>		<b>47.06</b>	<b>46.91</b>	<b>46.91</b>	<b>46,84</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2013

Ket : \* Perkiraan BAPPEDA Kota Pontianak





## BAB III

# GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

**P**enyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

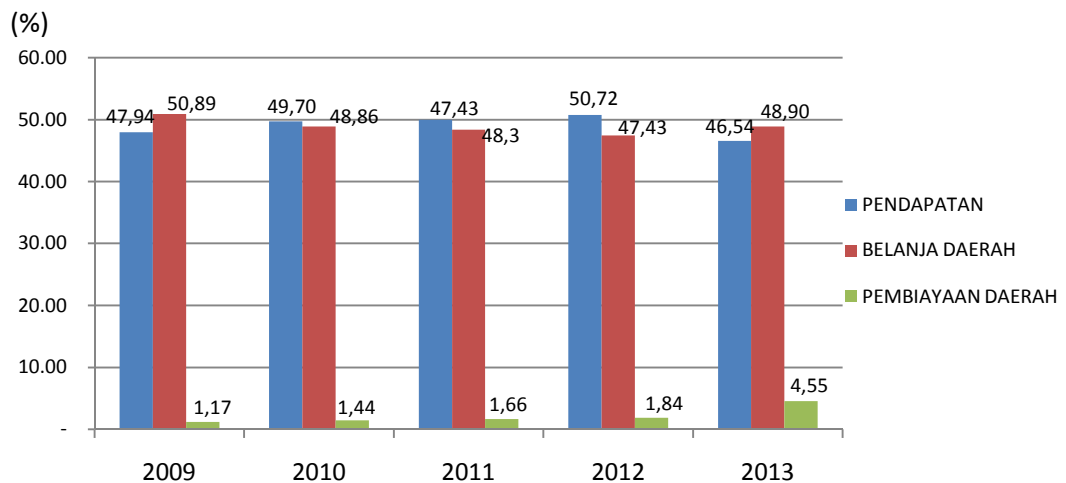
### 3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH

Tujuan digambarkannya kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai Pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan periode 5 (lima) tahun terakhir dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17

tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pengelolaan keuangan daerah menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara umum kinerja Pemerintah dianggap baik jika pendapatan daerah cenderung meningkat dan peningkatan ini di dorong oleh Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain pendapatan tersebut dapat dialokasikan ke belanja daerah dimana belanja langsung memiliki komposisi yang lebih besar dari pada belanja rutin.



**Gambar III-1**  
**Komposisi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Terhadap APBD Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2009–2013 yaitu dengan memperkirakan kondisi makro ekonomi nasional yang berdampak pada wilayah Kabupaten/Kota, antara lain : adanya rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), pemulihan ekonomi internasional yang berdampak pada pemulihan perekonomian nasional yang berimbas ke daerah, terjadinya laju penurunan inflasi dalam beberapa saat serta stabilitas harga bahan dasar dan sosial politik lokal serta nasional. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dari tahun 2009 – 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel III-1**  
**Komposisi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Terhadap APBD Kota Pontianak**  
**Tahun 2010 – 2014**

Komponen Apbd	2010	2011	2012	2013	2014*
Pendapatan Daerah	730,38	845,81	1.005,78	1.273,42	1.414,55
Belanja Daerah	764,42	862,20	1.015,61	1.321,93	1.464,73
Pembiayaan	34,01	16,39	9,83	48,50	50,34
<b>Volume Apbd</b>	<b>827,94</b>	<b>971,89</b>	<b>1.137,64</b>	<b>1.332,54</b>	<b>1.481,38</b>

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2013, diolah

Ket : \* Target

#### **A. Pendapatan Daerah**

Menurut Undang–undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Sistem Pembagian Keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Data menunjukkan bahwa pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Pontianak dari 2009 – 2013 mengalami rata – rata pertumbuhan pendapatan sebesar 15,13 %. Dimana penopang pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata bagian dana perimbangan terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencapai 63,31 %. Besarnya sumbangsih dana perimbangan terhadap pendapatan daerah ini dikarenakan besarnya dana alokasi umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dari tahun ke tahun.

Disisi lain dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dipicu oleh penyerahan pengelolaan beberapa pajak

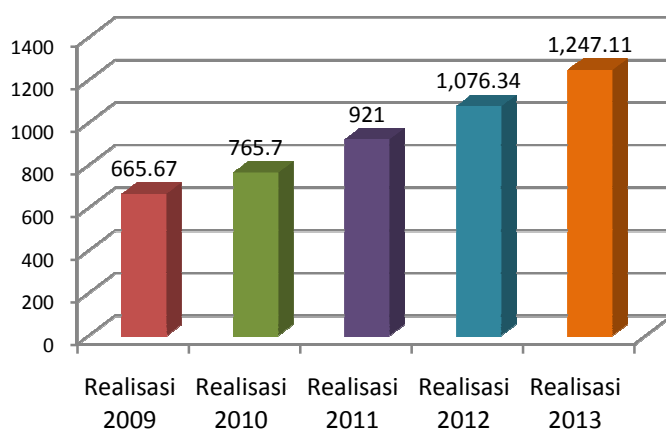


daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB serta intensifikasi dan optimalisasi potensi-potensi pendapatan, khususnya dari sisi pajak.

**Tabel III-2**  
**Realisasi Pendapatan Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>665,671,755,929.00</b>	<b>765,700,088,194.00</b>	<b>921,004,682,967.00</b>	<b>1,076,345,061,831.18</b>	<b>1,247,114,570,237.33</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>65,847,728,764.00</b>	<b>87,368,264,214.00</b>	<b>151,139,421,188.00</b>	<b>208,628,660,840.82</b>	<b>265,296,785,475.33</b>
1	PAJAK DAERAH	43,504,173,896.00	58,769,561,681.00	117,806,409,735.00	162,782,492,225.00	179,831,919,776.00
2	RETRIBUSI DAERAH	16,031,048,850.00	18,305,299,499.00	23,940,468,459.00	26,992,841,239.50	53,250,705,939.63
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH	1,848,725,555.00	1,899,421,499.00	2,056,428,426.00	2,246,318,191.49	8,553,670,659.30
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,463,780,463.00	8,393,981,535.00	7,336,114,568.00	16,607,009,184.83	23,660,489,100.40
	Share PAD	9.89	11.41	16.41	19.38	21.27
<b>B</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>499,640,062,069.00</b>	<b>499,166,051,965.00</b>	<b>542,387,713,353.00</b>	<b>659,548,774,706.00</b>	<b>699,877,420,402.00</b>
1	BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK	53,107,314,069.00	65,605,747,965.00	54,489,449,353.00	65,165,688,706.00	44,967,046,402.00
2	DANA ALOKASI UMUM	404,239,748,000.00	408,180,404,000.00	453,729,364,000.00	549,629,456,000.00	626,879,054,000.00
3	DANA ALOKASI KHUSUS	42,293,000,000.00	25,379,900,000.00	34,168,900,000.00	44,753,630,000.00	28,031,320,000.00
	Share perimbangan	75.06	65.19	58.89	61.28	56.12
<b>C</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>100,183,965,096.00</b>	<b>79,165,772,015.00</b>	<b>227,477,548,426.00</b>	<b>208,167,626,284.36</b>	<b>281,940,364,360.00</b>
1	PENDAPATAN HIBAH	-	-	277,458,750.00	-	-
2	DANA DARURAT	-	-	-	-	-
3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI & PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	53,388,204,696.00	62,017,019,683.00	87,044,264,396.00	112,996,263,284.36	119,653,577,360.00
4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	32,295,760,400.00	106,898,752,332.00	128,565,075,280.00	85,150,713,000.00	149,154,587,000.00
5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	14,500,000,000.00	10,250,000,000.00	11,590,750,000.00	10,020,650,000.00	13,132,200,000.00
	Share Lain lain pendapatan	15.05	23.40	24.70	19.34	22.61

Sumber : BPKAD Kota Pontianak Berbagai SKPD, diolah



**Gambar III-2**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013**

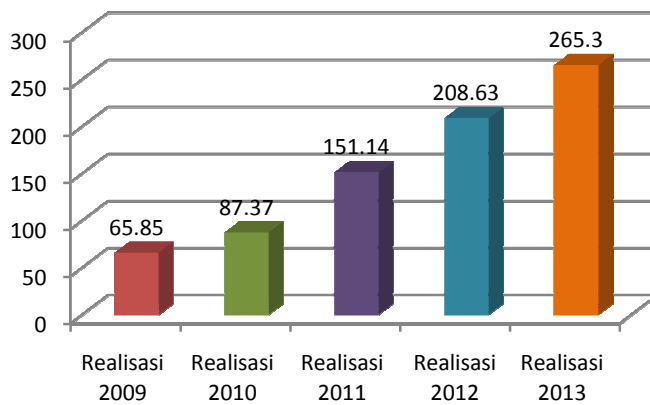
Walaupun sumbangan terbesar untuk pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, namun rata-rata pertumbuhan sumber pendapatan daerah tertinggi dicapai oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mencapai 37,71 %. Angka ini diatas dari pendapatan asli daerah yang rata – rata mencapai 34,69 % dan dana perimbangan yang hanya 7,64%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah didorong oleh adanya dana penyesuaian dan otonomi khusus yang diterima Pemerintah Daerah Kota Pontianak



khususnya pada tahun 2010 yang mencapai peningkatan hingga 231 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 106.898.752.332,- dari tahun 2009 hanya mencapai Rp. 32.295.760.400,-.

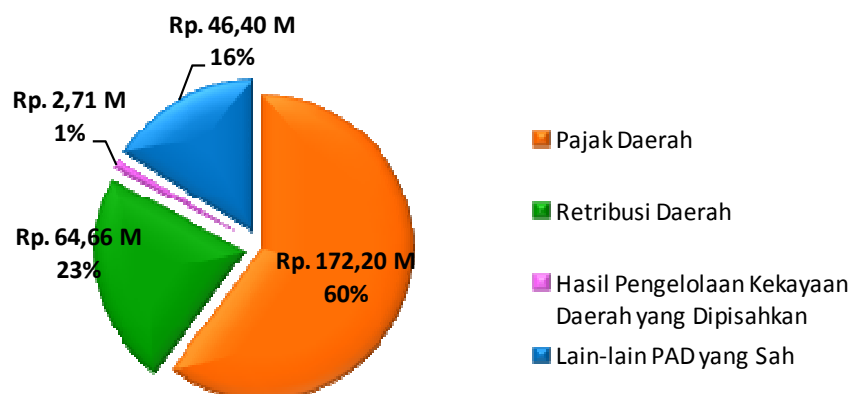
### A.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan yang dipungut tersebut harus diatur oleh Peraturan Daerah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2009–2013, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 34,69 %.



**Gambar III-3**  
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013

Apabila dilihat dari tahun awal 2009 sebesar Rp. 65,85 Milyar, dalam kurun waktu lima tahun terjadi lonjakan PAD empat kali lipat menjadi 265,3 Milyar. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang mana tidak lepas dariberbagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Kedepan untuk lebih mendorong kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, maka akan terus diupaya menggali lebih dalam potensi-potensi PAD yang memang harus diakui sampai saat ini belum optimal dalam pengelolaannya.

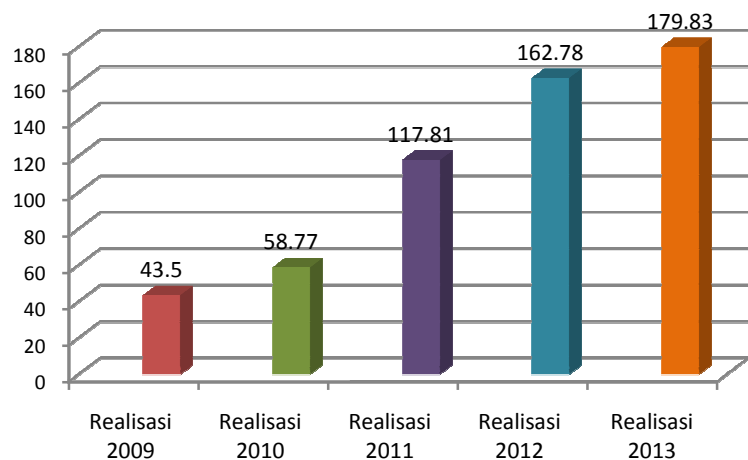


**Gambar III-4**  
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2013

## 1. Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rata – rata pertumbuhan Pajak Daerah ini mencapai 41,03 %. Pertumbuhan pajak daerah setiap tahunnya cenderung meningkat terutama pada tahun 2011 yang mencapai 100,45 % dari tahun 2010. Peningkatan ini didorong oleh dilimpahkannya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kondisi ini menunjukkan kinerja Aparat Pemerintah Kota dalam melakukan pemungutan PBB dan BPHTB sudah baik.



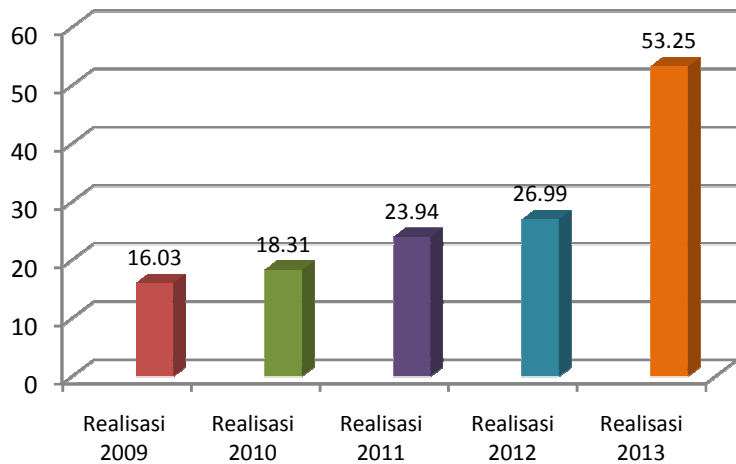
**Gambar III-5**  
**Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Kota Pontianak**  
**(dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013**

## 2. Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang–undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu. Dilihat dari realisasi pencapaian retribusi daerah dari tahun 2008 – 2013 , maka rata – rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari objek Retribusi Daerah sebesar 28,97%, dimana trend pertumbuhan retribusi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuatif.

Berfluktuasinya pertumbuhan ini pada umumnya disebabkan oleh semakin kecilnya kelompok jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan diperbaharainya beberapa Peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Dimana pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2008 tentang

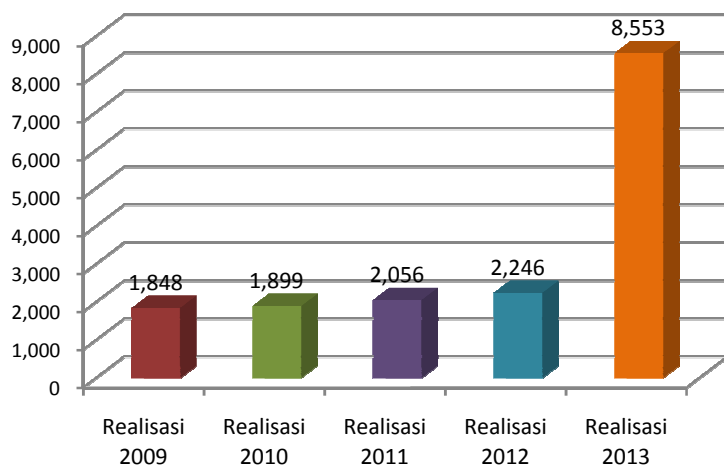
Sistim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dimana ruang lingkup pelayanan perizinan terdiri atas 99 jenis pelayanan dimana ruang lingkup ini berkurang menjadi 80 jenis perizinan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 18 tahun 2011 dan menjadi 29 jenis perizinan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011. Dan melalui Peraturan Walikota ini pula retribusi untuk perizinan tertentu hanya dipungut pada 23 jenis layanan perizinan yang diberikan dari 29 jenis pelayanan. Dengan adanya peraturan ini menunjukkan kinerja Pemerintah kota Pontianak terhadap pelayanan publik yang mendukung pendapatan daerah cukup baik.



**Gambar III-6**  
**Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Kota Pontianak**  
**(dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013**

### 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari penerimaan laba atas Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang terdiri dari PD. Kapuas Indah, PT. BPR Kota Pontianak, serta penyertaan modal ke PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dan PT. Bank Kalbar. Dari tabel 3.1 diketahui rata – rata pertumbuhan hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dari tahun 2009 – 2013 sebesar 65,89%. Trend pertumbuhan selama kurun waktu tersebut cenderung berfluktuatif, namun pada tahun 2013, pendapatan dari objek ini mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 280,79 % dari tahun sebelumnya yaitu 2012. Hal ini disebabkan adanya peningkatan laba usaha PDAM Tirta Khatulistiwa dan pembagian deviden PT Bank

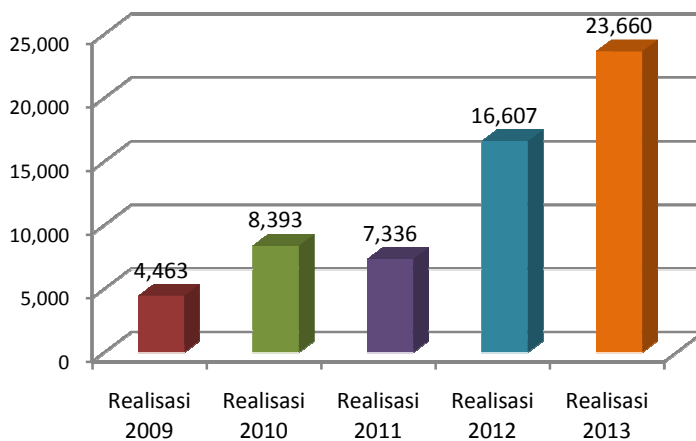


**Gambar III-7**  
**Pertumbuhan Hasil Perusahaan Milik Daerah Kota Pontianak**  
**(dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013**

Kalbar. Pertumbuhan sangat tinggi ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan milik Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengalami peningkatan sangat baik dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

#### 4. Lain –lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

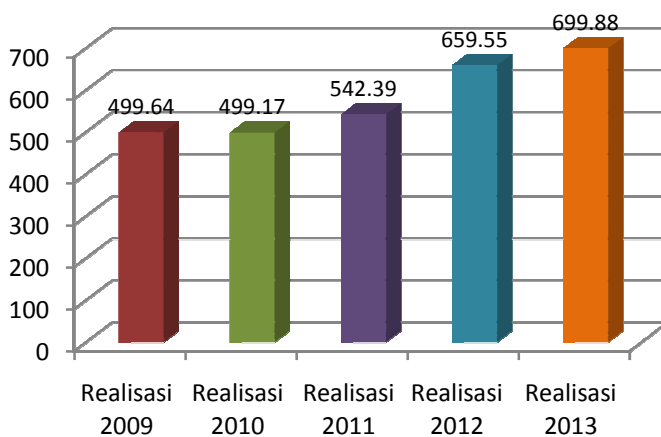
Sumber PAD ini diperoleh dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah seperti penerimaan pengelolaan aset. Kondisi pendapatan daerah yang bersumber dari objek ini pada umumnya mengalami fluktuasi yang cukup ekstrim, walaupun



**Gambar III-8**  
**Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Pontianak (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013**

rata – rata pertumbuhan objek pendapatan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2009 – 2013 sebesar 38,83 %. Kecenderungan fluktuasi yang cukup ekstrim ini disebabkan pada tahun tertentu terdapat penerimaan kontribusi pasar Flamboyan pada tahun anggaran 2013 dan lain-lain penerimaan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Jamkesmas). Berikut grafik perkembangan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### A.2 Dana Perimbangan

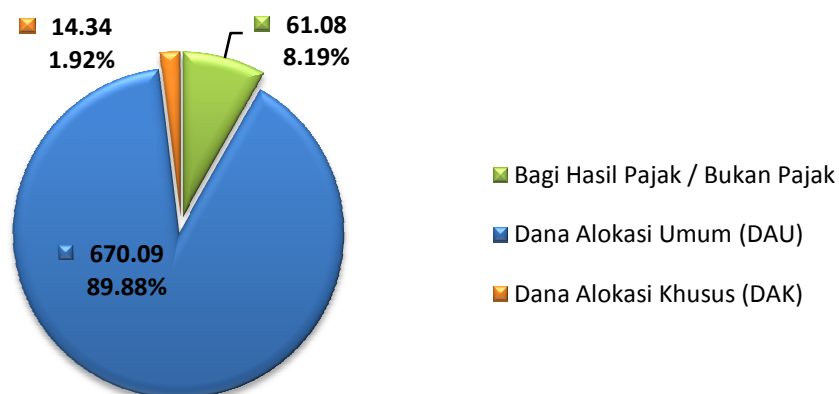


**Gambar III-9**  
**Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi . Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar

Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2009 – 2013 rata – rata pertumbuhan dana perimbangan yang dialokasikan sebesar 8,06 %.

Komponen Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, serta dana Alokasi Khusus. Besaran proporsi dana perimbangan ini sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang mana dinilai dari berbagai indikator yang ada di daerah serta tergantung pula besarnya pada total capaian pendapatan Negara. Di Kota Pontianak, Dana Alokasi Umum ini di Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp. 670,09 Milyar atau setara dengan 89,88% dari total Dana Perimbangan yang dialokasikan.

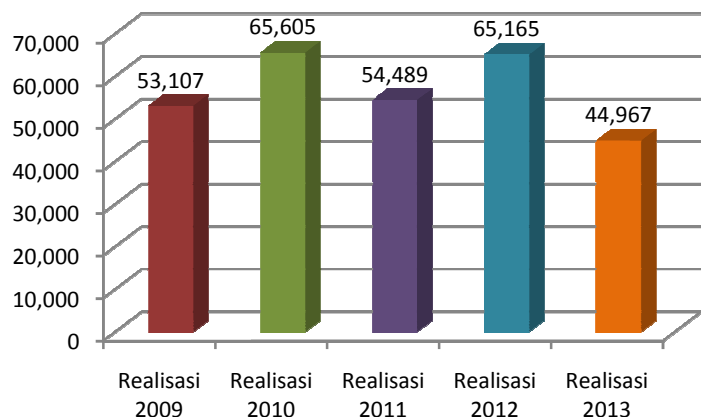


**Gambar III-10**  
Komposisi Dana Perimbangan (dalam Milyar) Kota Pontianak Tahun 2013

### 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana bagi hasil ini terdiri dari bagi hasil pajak yang bersumber dari PBB dan BPHTB. Namun terhitung 1 Januari 2011 jenis pajak ini sudah dilimpahkan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten di Indonesia.

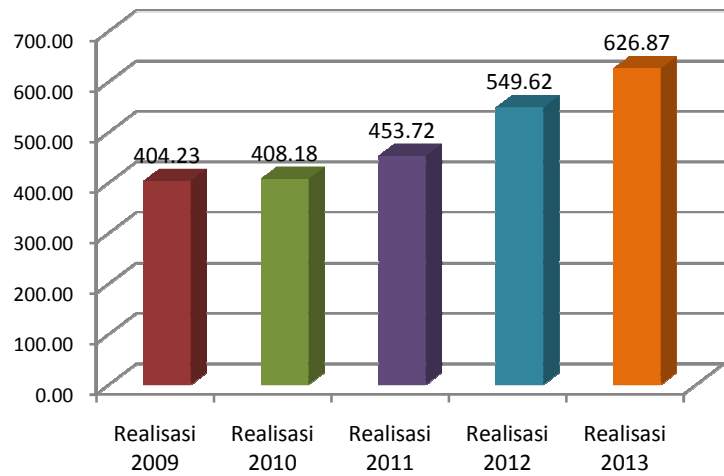
Bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari provisi sumber daya hutan (PSDH), bagi hasil tambang dan pertanian, dana reboisasi, pertambangan umum dan sumber daya alam perikanan juga tidak dimiliki daerah. Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk Kota Pontianak rata –rata pertumbuhannya pertahun mencapai 0,26 %.



**Gambar III-11**  
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013

## 2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.



**Gambar III-12**  
**Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum**  
**(dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013**

Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26 % (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri netto.

Rata-rata pertumbuhan dana alokasi umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dari tahun 2009–2013 sebesar 9,71 %. Rata – rata pertumbuhan cukup rendah dibanding dengan objek pendapatan lainnya namun Dana Alokasi Umum (DAU) ini dalam 5 (lima) tahun terakhir merupakan objek pendapatan terbesar yang mendukung pendapatan daerah.

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

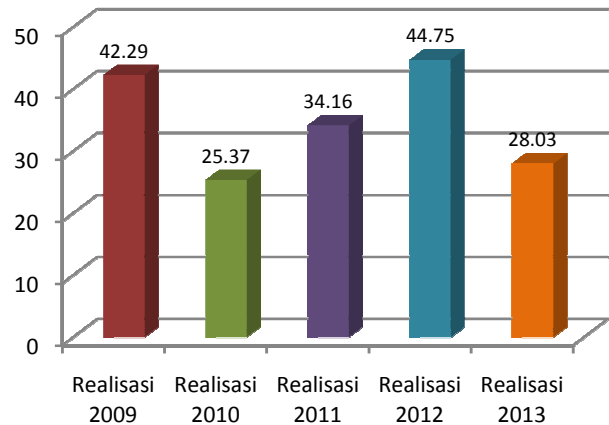
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah

- Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Rata – rata pertumbuhan dana alokasi khusus dari tahun 2009 – 2013 pada umumnya cenderung melambat 1,60 %. Walaupun rata – rata pertumbuhan objek pendapatan ini melambat namun kondisi ini menunjukkan kemandirian pendapatan daerah sudah mulai terlihat.

Kondisi ini juga tergantung kepada kebijakan program di tingkat pusat, apabila terdapat agenda-agenda khusus yang harus dipercepat pencapaiannya biasanya dialokasikan melalui DAK ini.

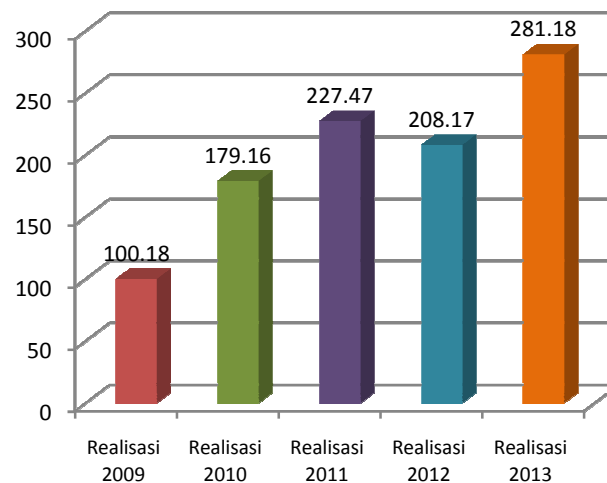


**Gambar III-13**  
Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (dalam Milyar) Tahun 2009 – 2013

### A.3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

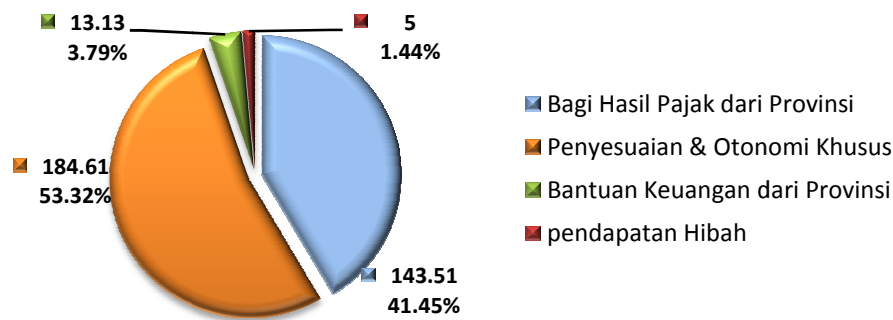
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 2009 -2013 sebesar 37,71 %. Terdapat 5 (lima) objek sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu :

- Pendapatan hibah, alokasi dana ini hanya diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun 2011.
- Dana Darurat
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, yang rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 27,60 %.
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus rata-rata pertumbuhannya mencapai 71,79 %. Tingginya rata-rata pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan objek ini di tahun 2010 yang mencapai peningkatan 231 % atau sebesar Rp. 106.898.752.332,- dari tahun 2009 yang hanya menerima Rp. 32.295.760.400,-
- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dari tahun 2009–2013 mencapai 57,59 %



**Gambar III-14**  
Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2009-2013





**Gambar III-15**  
**Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013**

## B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, pengukuran kinerja juga dilakukan pada sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Belanja yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada Program Prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung Belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional. Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembangunan dan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah seperti belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Berikut tabel yang menunjukkan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak dari tahun 2009 – 2013

**Tabel III-3**  
**Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>706,624,153,174.00</b>	<b>752,867,063,169.00</b>	<b>891,949,464,346.00</b>	<b>1,006,492,631,240.15</b>	<b>1,310,323,550,048.49</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>358,010,311,312.00</b>	<b>387,090,699,136.00</b>	<b>438,764,600,718.00</b>	<b>487,154,379,623.28</b>	<b>564,746,899,026.41</b>
1	BELANJA PEGAWAI	339,876,224,850.00	369,484,064,137.00	405,215,114,920.00	465,197,307,303.00	529,714,440,868.00
2	BELANJA BUNGA	449,643,012.00	377,692,245.00	305,741,478.00	234,480,650.28	161,839,944.41
3	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-
4	BELANJA HIBAH	9,810,000,000.00	8,603,348,800.00	19,316,893,750.00	15,076,450,000.00	30,317,103,660.00
5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7,399,535,700.00	8,398,996,000.00	12,665,442,600.00	5,383,360,850.00	3,357,689,085.00
6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROPINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-
7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	-	-	109,750,000.00	1,090,975,000.00	1,159,725,000.00
8	BELANJA TIDAK TERDUGA	474,907,750.00	226,597,954.00	1,151,657,970.00	171,805,820.00	36,100,469.00
	Share BTL	50.66	51.42	49.19	48.40	43.10
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>348,613,841,862.00</b>	<b>365,776,364,033.00</b>	<b>453,184,863,628.00</b>	<b>519,338,251,616.87</b>	<b>745,576,651,022.08</b>
1	BELANJA PEGAWAI	47,781,846,500.00	51,432,838,320.00	54,686,217,294.00	50,808,245,760.00	81,340,352,434.00
2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,857,593,358.00	116,523,768,220.00	160,409,045,378.00	166,095,190,525.00	212,935,703,139.00
3	BELANJA MODAL	185,974,402,004.00	197,819,757,493.00	238,089,600,956.00	302,434,815,331.87	451,300,595,449.08
	Share BL	49.34	48.58	50.81	51.60	56.90

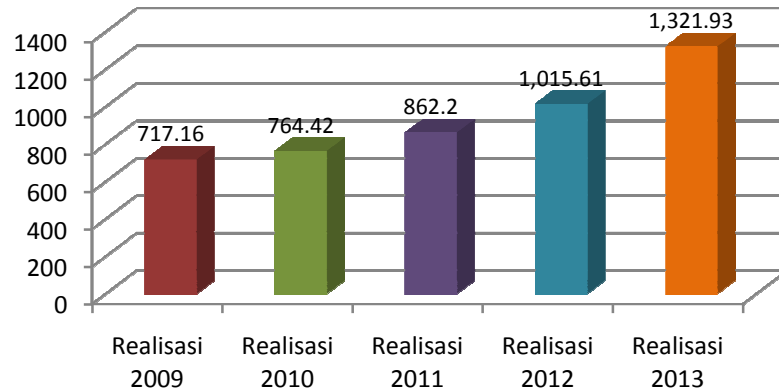
Sumber : Berbagai SKPD, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kota Pontianak selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2009–2013 cenderung meningkat. Rata-rata pertumbuhan yang terjadi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir tersebut mencapai 14,70 %. Belanja Langsung diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan setiap tahunnya juga cenderung meningkat.

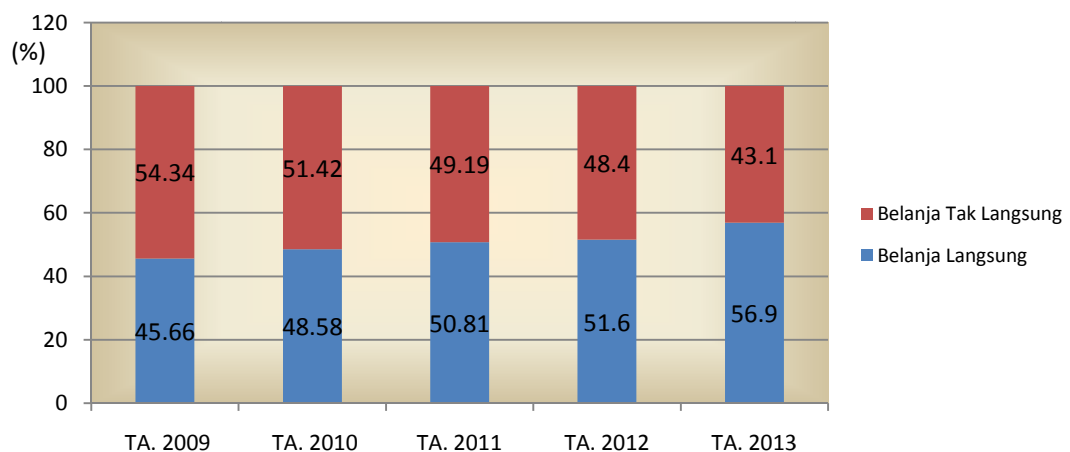
Apabila diamati dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung dalam empat tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan terus menurun. Sebaliknya porsi belanja langsung semakin meningkat di sisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang dianut Pemerintah Kota Pontianak adalah mengedepankan urusan-urusan yang berkenaan dengan masyarakat langsung. Artinya program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebenarnya apabila ditelisik jauh lebih dalam, di dalam belanja tidak langsung juga terdapat porsi belanja yang juga langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat seperti belanja hibah dan bantuan sosial yang obyeknya langsung kepada masyarakat ataupun kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penganggaran pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak telah *pro public*.



**Gambar III-16**  
**Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013**



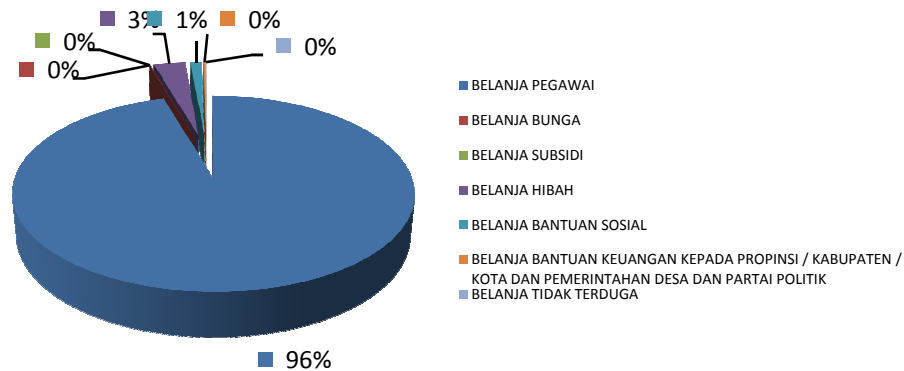
**Gambar III-17**  
**Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dalam Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009 - 2013**

### B.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung mencapai 12,13 %. Seperti yang terlihat pada grafik 3.1 belanja tidak langsung cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2009 – 2013. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah cukup baik dalam mengalokasikan dana yang lebih berpihak ke program pembangunan.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada propinsi/kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga.



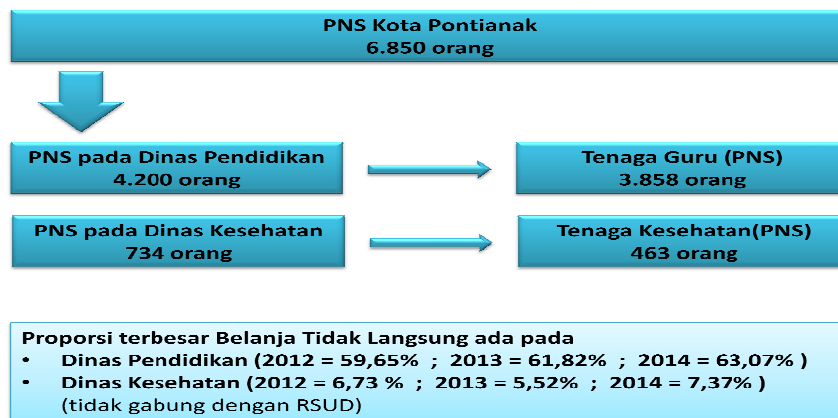
**Gambar III-18**  
**Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013**

Dari ke 8 (delapan) jenis objek Belanja Tak Langsung, yang menjadi pengeluaran rutin Pemerintah sepanjang tahun 2009–2013 adalah Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Pengeluaran Rutin Belanja Pegawai pertumbuhannya setiap tahun cenderung meningkat dimana rata – rata pertumbuhan pertahun mencapai 14,27 %. Peningkatan belanja pegawai disesuaikan dengan peningkatan jumlah aparatur yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Belanja Bunga cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga rata–rata pertumbuhannya melambat hingga 22,88 %. Untuk Belanja Hibah setiap tahun cenderung meningkat dimana pertumbuhannya mencapai 35,33 % namun Belanja Bantuan Sosial setiap tahunnya cenderung menurun sebesar 21,52 %. Belanja Tidak Terduga dialokasikan berfluktuatif namun cenderung menurun.

Dua jenis objek belanja tak langsung yang tidak dikeluarkan sepanjang tahun 2009 - 2013 yaitu Belanja Subsidi dan Belanja Bagi Hasil kepada propinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Sedangkan belanja untuk bantuan keuangan kepada propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik hanya dikeluarkan pada tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013.

Dari komponen belanja tidak langsung tersebut yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat adalah belanja pegawai yang dipergunakan untuk menggaji pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak.meningkatnya jumlah belanja pegawai ini adalah bukan dikarenakan jumlah pegawai negeri sipil yang terus bertambah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, akan tetapi mengakomodir kebijakan kenaikan gaji yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat serta untuk mengakomodir tunjangan sertifikasi guru yang jumlahnya cukup banyak. Khusus pos belanja pegawai ini perlu mendapatkan perhatian kedepan mengingat kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga akan menyentuh aspek penyesuaian pendapatan pegawai berdasarkan kinerja. Untuk itu perlu langkah-langkah

antisipasi apabila dalam penerapannya nanti akan berdampak pada peningkatan porsi belanja pegawai dalam pos belanja tidak langsung ini



**Gambar III-19**  
**SKPD dengan Porsi Belanja Pegawai Terbesar Tahun 2012**

**Tabel III-4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**  
**Pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2012 – 2013**

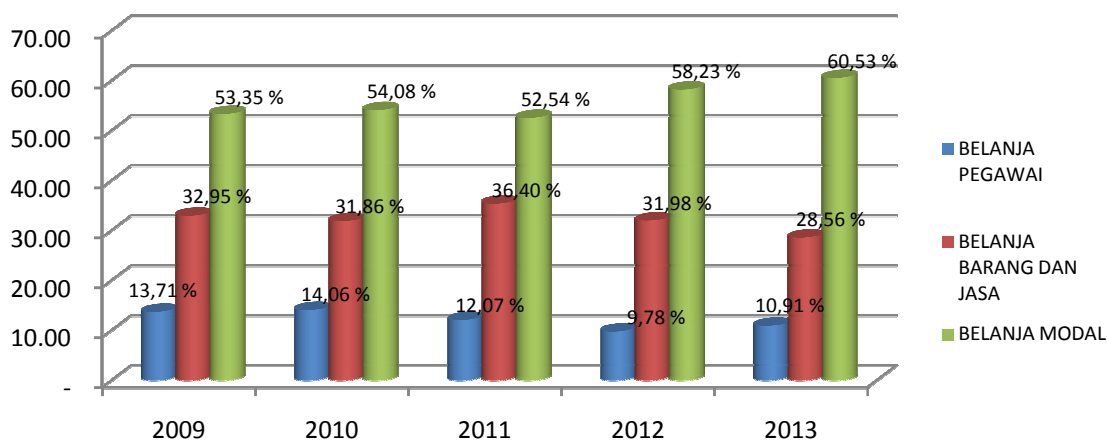
Pos Belanja	Realisasi 2012	Realisasi 2013
<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>15.081.450.000</b>	<b>30.317.103.660</b>
Belanja Hibah Kepada Masyarakat	2.471.000.000	2.433.000.000
Belanja Hibah Kepada Rumah Ibadah	5.407.500.000	7.816.000.000
Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	6.772.950.000	19.537.103.660
Belanja Hibah Kepada Mahasiswa	430.000.000	531.000.000
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>4.979.620.850</b>	<b>3.357.689.085</b>
Bantuan Sosial Akibat Resiko Sosial	959.620.850	731.825.085
Penataan rumah Tidak Layak Huni	1.995.000.000	1.995.000.000
Beasiswa untuk Siswa Kurang Mampu Ekonomi	2.025.000.000	630.864.000
Belanja Bantuan Prog. Nasional Pembedayaan Masyarakat	440.000.000	440.000.000

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2013

## B.2 Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rata-rata pertumbuhan belanja ini sebesar 17,27 %. Jenis objek yang dikeluarkan untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan

jasa serta belanja modal. Dari ketiga objek belanja langsung tersebut rata-rata pertumbuhan yang tertinggi dari tahun 2009-2013 berada pada belanja modal yaitu 21,14 % yang diikuti dengan belanja pegawai sebesar 14,96 % dan belanja barang dan jasa sebesar 12,46 %. Pengeluaran yang langsung terkait dengan peningkatan pembangunan adalah belanja modal dan barang dan jasa. Komposisi ketiga objek belanja ini terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut :



**Gambar III-20**  
**Komposisi Objek Belanja Langsung**  
**terhadap Belanja langsung Kota Pontianak 2009 -2013**

Dari grafik 3.2 di atas terlihat bahwa komposisi Belanja Modal sepanjang tahun 2009 – 2013 memiliki belanja terbesar dibanding dengan belanja lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dengan kebijakan *pro public* terlihat dengan nyata. Disisi lain komitmen ini perlu didukung dengan implementasi kinerja Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan dengan baik pula sehingga dampak positif yang dirasakan dalam pembelanjaan anggaran benar-benar sepenuhnya untuk masyarakat Kota Pontianak.

### C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Pos pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja dimana dimungkinkan adanya surplus ataupun deficit dalam penganggaran daerah. Pos pembiayaan ini dimanfaatkan untuk menyeimbangkan komponen belanja dan pendapatan. Sehingga rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi seluruhnya.

**Tabel III-5**  
**Rata – Rata Pertumbuhan Pembiayaan Dalam APBD Kota Pontianak**  
**Tahun 2009 – 2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
III	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>16,177,638,953.00</b>	<b>22,201,635,352.00</b>	<b>30,535,461,739.00</b>	<b>39,087,231,720.34</b>	<b>121,957,662,311.57</b>
A	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>16,781,597,592.00</b>	<b>22,805,593,991.00</b>	<b>35,139,420,378.00</b>	<b>59,691,190,359.34</b>	<b>121,957,662,311.57</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	16,641,297,592.00	22,626,593,991.00	35,034,660,378.00	59,590,680,359.34	108,939,662,311.57
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	<b>13,000,000,000.00</b>
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	140,300,000.00	179,000,000.00	104,760,000.00	100,510,000.00	18,000,000.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Laba Dari Bumd	-	-	-	-	-
	<b>Share PD</b>	<b>103.73</b>	<b>102.72</b>	<b>115.08</b>	<b>152.71</b>	<b>100.00</b>
B	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>603,958,639.00</b>	<b>603,958,639.00</b>	<b>4,603,958,639.00</b>	<b>20,603,958,639.00</b>	<b>-</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
2	PENYERTAAN MODAL (Investasi) PEMERINTAH DAERAH	-	-	1,000,000,000.00	15,000,000,000.00	-
3	Pembayaran Pokok Utang	603,958,639.00	603,958,639.00	603,958,639.00	603,958,639.00	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	<b>Share PPD</b>	<b>3.73</b>	<b>2.72</b>	<b>15.08</b>	<b>52.71</b>	<b>-</b>

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2013

Dari tabel diatas skenario pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak sepanjang tahun 2009-2013 rata-rata pertumbuhannya mencapai 52,97 %. Dimana pada umumnya pertumbuhan pembiayaan ini sepanjang tahun terus meningkat. Pembiayaan sendiri terdiri dari dua pos pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### C.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Secara garis besar sumber penerimaan dalam pembiayaan daerah dalam scenario Pembiayaan Kota Pontianak ini berasal dari tiga pos yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman serta pencairan dana cadangan.

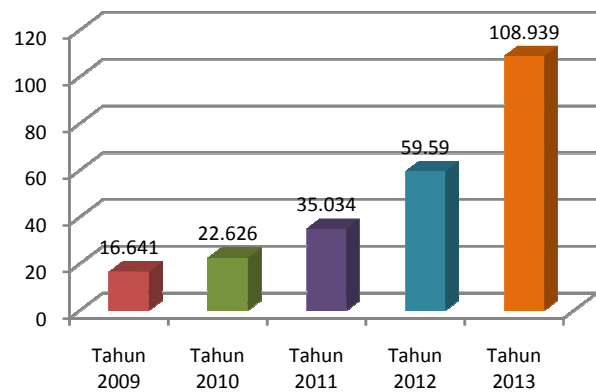
#### 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sumber pembiayaan daerah dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya merupakan sisa dari anggaran tahun sebelumnya yang dikembalikan ke kas daerah. Dari tabel di atas diketahui bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada umumnya meningkat dimana rata – rata pertumbuhan objek penerimaan daerah ini sebesar 40,69 %. Peningkatan terbesar



dalam kurun 2012 ke 2013 dimana melonjak dua kali lipat. Melonjaknya SILPA ini disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a. Efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pos-pos belanja dalam kegiatan tidak diserap dan pada akhirnya kembali menjadi SILPA.
- b. Kekurangcermatan dalam proses perencanaan penganggaran kegiatan sehingga menyebabkan *over cost* pada beberapa rekening belanja sedangkan target output kegiatan yang direncanakan telah tercapai dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Pada akhirnya dana yang telah dianggarkan tersebut tidak dapat terserap dan menjadi SILPA. Untuk hal ini harus mendapatkan perhatian kedepan sehingga deviasi anggaran rencana dengan yang terealisasi semakin kecil, salah satunya dengan menyusun/menyiapkan analisis belanja untuk tiap-tiap komponen/jenis-jenis pengeluaran sehingga dalam perencanaan penganggaran lebih realistis.



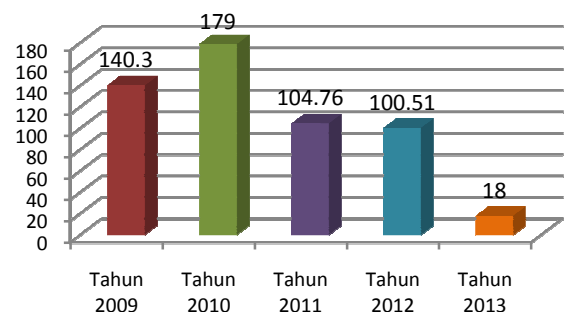
**Gambar III-21**  
**Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Dalam Pembiayaan Kota Pontianak**  
**Tahun 2009 -2013**

## 2. Pencairan Dana cadangan

Dana cadangan adalah dana yang dianggarkan tahun-tahun sebelumnya untuk disimpan sebagai cadangan dana untuk melakukan kegiatan yang direncanakan tahun kedepana. Dalam hal ini pembentukan dana cadangan di Pemerintah Kota Pontianak bertujuan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung 5 tahun sekali. Sesuai dengan jadwal, maka di tahun 2013 dilakukan pencairan dana cadangan untuk membiayai pemilu tersebut sebanyak Rp. 13 Milyar yang berlangsung satu putaran.

## 3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah pembayaran piutang Pemerintah Kota Pontianak dari pihak ketiga dalam kerangka kerjasama yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini penerimaan kembali pemberian pinjaman dalam APBD Kota Pontianak adalah berasal dari pinjaman dalam pembangunan Pasar Dahlia yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Besaran penerimaan kembali pemberian pinjaman ini dapat dilihat pada diagram di samping.



**Gambar III-22**  
**Pertumbuhan Penerimaan Kembali Pinjaman**  
**(Rp. Juta) Tahun 2009 -2013**

## **C.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari tiga pos pengeluaran yaitu Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, serta Pembayaran Pokok Utang. Adapun rincian pengeluaran pembayaran daerah adalah sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Dana Cadangan**

Pos ini merupakan pengeluaran pembiayaan yang berguna untuk membuat dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan lima tahun sekali. Idealnya pembentukan dana cadangan ini dicicil secara rutin tiap tahunnya sampai dengan besaran kebutuhan biaya pelaksanaan Pemilukada. Berdasarkan tabel di atas terlihat pengeluaran dilakukan di tahun 2011 dengan besaran Rp. 3 Milyar dan tahun 2012 sebesar Rp. 5 Milyar yang kemudian dicairkan pada tahun 2013 dengan total sejumlah Rp. 13 Milyar.

### **2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan modal ini berkaitan dengan investasi Pemerintah Kota Pontianak di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Bank Kalbar). Di tahun 2011 tambahan penyertaan modal pemerintah Kota Pontianak di Bank Kalbar sebesar Rp. 1 Milyar dan di tahun 2012 ditambahkan kembali Rp. 15 Milyar.

### **3. Pembayaran Pokok Utang**

Pos ini merupakan pengeluaran pembayaran hutang Pemerintah Kota Pontianak pada IBRD Bank Dunia dengan total pinjaman sebesar Rp. 9.059.379.582,- berdasarkan Loan Agreemen Nomor: LA-3854-IND tanggal 4 April 1995 dengan tenor pinjaman selama 20 tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan fisik dalam program KUDP (*Kalimantan Urban Development Projects*) melalui IBRD Bank Dunia. Angsuran tahunan yang harus dibayarkan Pemerintah Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 603,958,639,- yang akan berakhir di tahun 2015.

## **3.1.2 Neraca Daerah**

### **A. Aset**

Aset lancar pemerintah Kota Pontianak mengalami fluktuasi. Dalam periode 2009 sampai 2012 jumlah total aset lancar memperlihatkan tren kenaikan sejalan dengan penambahan saldo kas di Kas Daerah. Kemudian dari tahun 2012 ke tahun 2013 aset lancar mengalami penurunan sebesar 49,41% menjadi Rp. 123.548.237.039,57 yang disebabkan terutama oleh penurunan saldo kas di Kas Daerah.

Disisi lain investasi jangka panjang dalam bentuk investasi permanen pada perusahaan-perusahaan milik daerah seperti Bank Pasar, PDAM Kota Pontianak dan PD Kapuas Indah serta investasi pada BPD Bank Kalbar dalam kurun lima tahun terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan 42,33% pertahun dengan total nilai investasi mencapai Rp. 191,82 Milyar.

**Tabel III-6**  
**Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak**  
**Per 31 Desember 2009 – 31 Desember 2013 (Audited)**

NO	URAIAN	Tahun					R
		2009	2010	2011	2012	2013*)	
<b>I ASET</b>							
<b>1 ASET LANCAR</b>							
1.1	Kas di Kas Daerah	21.970.248.852,30	34.597.551.324,55	59.173.244.102,34	108.583.109.390,57	35.648.146.540,07	
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.195.000,00	114.449.150,00	21.746.000,00	46.773.575,00	1.005.277.750,00	
1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	679.756.654,00	437.286.803,00	417.436.257,00	356.746.196,00	2.514.284.697,00	
	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran				2.990.183,00	800,00	
	Kas di Bank				-	400,00	
1.4	Piutang Dana Perimbangan	1.567.485.225,91	-	-	-	-	
1.5	Piutang Pajak	187.467.734,95	806.970.517,00	579.085.320,00	57.195.855.030,00	61.108.291.923,00	
1.6	Piutang Retribusi	-	513.306.000,00	550.799.000,00	59.183.000,00	3.980.715.882,53	
1.7	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	
1.8	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	
1.9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
1.10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
1.11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	18.450.000,00	16.650.000,00	-	-	-	
1.12	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	84.445.900,00	-	-	-	-	
1.13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
1.14	Piutang Lainnya	-	-	184.908.429,00	5.002.650.429,00	29.957.093.015,38	
	Biaya dibayar dimuka				412.500.000,00	385.487.342,47	
1.15	Persediaan	3.341.615.955,34	3.873.120.504,00	5.798.115.108,25	12.931.691.081,66	18.086.205.032,90	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>27.857.665.322,50</b>	<b>40.359.334.298,55</b>	<b>66.725.334.216,59</b>	<b>184.591.498.885,23</b>	<b>152.685.503.383,35</b>	<b>28,36%</b>

NO	URAIAN	Tahun					R
		2009	2010	2011	2012	2013*)	
<b>2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
2.1.1	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	
2.1.2	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	
2.1.3	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
2.1.4	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	
2.1.5	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	
2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
2.2	Investasi Permanen						
2.2.1	Penyertaan Modal Bank BPD	5.539.000.000,00	5.539.000.000,00	6.539.000.000,00	11.539.000.000,00	21.539.000.000,00	
2.2.2	Penyertaan Modal Bank Pasar	6.460.210.000,00	6.425.209.719,00	5.609.684.493,00	6.753.826.412,00	7.607.828.700,00	
2.2.3	Penyertaan Pada PDAM Pontianak	103.000.000,00	29.622.856.717,86	80.731.853.765,36	136.974.371.250,14	157.248.857.099,79	
2.2.4	Penyertaan Pada PD. Kapuas Indah	5.560.709.000,00	6.118.944.000,00	5.312.211.305,23	6.321.552.573,38	4.946.794.657,67	
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>17.662.919.000,00</b>	<b>47.706.010.436,86</b>	<b>98.192.749.563,59</b>	<b>161.588.750.235,52</b>	<b>191.342.480.457,46</b>	<b>42,29%</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>17.662.919.000,00</b>	<b>47.706.010.436,86</b>	<b>98.192.749.563,59</b>	<b>161.588.750.235,52</b>	<b>191.342.480.457,46</b>	<b>42,29%</b>
<b>3</b>	<b>ASET TETAP</b>						
3.1	Tanah	512.105.416.328,00	514.699.716.828,00	457.207.453.255,00	459.556.328.463,72	463.236.134.788,72	
3.2	Peralatan dan Mesin	107.473.313.201,99	135.788.980.299,00	159.499.719.796,96	196.059.561.947,96	238.829.720.251,39	
3.3	Gedung dan Bangunan	396.978.100.985,33	449.062.013.107,33	520.730.657.634,59	601.354.697.476,21	847.555.365.002,57	
3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.146.432.216.131,41	1.221.575.515.995,41	1.297.807.530.679,41	1.420.662.145.083,41	1.650.654.520.822,99	
3.5	Aset Tetap Lainnya	6.438.470.994,00	11.747.173.705,00	13.008.307.305,68	15.347.670.190,68	58.638.582.981,68	
3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.678.353.771,00	47.164.313.231,00	77.790.754.509,00	124.476.247.967,36	7.146.812.901,00	
3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.200.105.871.411,73</b>	<b>2.380.037.713.165,74</b>	<b>2.526.044.423.180,64</b>	<b>2.817.456.651.129,34</b>	<b>3.266.061.136.748,35</b>	<b>9,35%</b>

NO	URAIAN	Tahun					R
		2009	2010	2011	2012	2013*)	
<b>4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	-	-	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	<b>62,50%</b>
4.1	Dana Cadangan	-	-	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	
<b>5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
5.1	Tunggakan UYHD	196.151.258,00	-	-	-	-	
5.2	Tagihan Penjualan Angsuran	7.108.075.457,00	6.781.725.457,00	6.689.565.457,00	6.587.705.457,00	6.569.705.457,00	
5.3	Tuntutan Perbendaharaan	-	280.597.158,00	209.757.700,00	194.757.700,00	190.257.700,00	
5.4	Tuntutan Ganti Rugi	-	254.285.477,00	324.320.477,00	305.535.477,00	301.635.477,00	
5.5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	61.299.283.080,00	62.658.262.751,28	62.658.262.751,28	
5.6	Aset Tak Berwujud	2.265.454.000,00	3.153.183.819,00	4.233.144.317,00	5.042.684.317,00	5.803.576.817,00	
5.7	Aset Lain-lain	428.065.477,00	15.073.500,00	36.214.228.880,00	4.509.344.868,00	2.063.929.363,00	
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>9.997.746.192,00</b>	<b>10.484.865.411,00</b>	<b>108.970.299.911,00</b>	<b>79.298.290.570,28</b>	<b>77.587.367.565,28</b>	<b>13,85%</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.255.624.201.926,23</b>	<b>2.478.587.923.312,15</b>	<b>2.802.932.806.871,82</b>	<b>3.250.935.190.820,37</b>	<b>3.687.676.488.154,44</b>	<b>11,55%</b>

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2014

Aset tetap yang terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya juga memperlihatkan kecenderungan kenaikan rata-rata pertumbuhan aset 9,28% dengan total nilai aset tetap mencapai Rp. 3,25 Trilyun di tahun 2013. Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak. Akan tetapi disisi lain nilai aset tanah mengalami fluktuasi disebabkan pelepasan beberapa aset tanah, baru pada tiga tahun terakhir (2011-2013) nilainya mulai kembali mengalami kenaikan dengan total nilai aset tanah mencapai Rp. 463,23 Milyar di tahun 2013.

Disisi lain aset lainnya yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain juga memperlihatkan tren kenaikan, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 17,22%. Porsi terbesar yang menyumbang perkembangan nilai aset lainnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga. Hal ini memberikan nilai positif sehingga perlu terus dikembangkan kedepannya.

## **B. Kewajiban**

Kewajiban adalah keharusan mentransfer aset sebagai akibat dari transaksi ataupun perjanjian dengan pihak lain di masa lalu. Secara umum kewajiban dalam neraca Pemerintah Kota Pontianak memperlihatkan penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata sebanyak 6,97%. Hal ini menunjukkan kondisi yang positif karena memperlihatkan bahwa kewajiban-kewajiban yang membebani keuangan daerah semakin berkurang.

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek seperti utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga dan bagian lancar utang jangka panjang lainnya. Porsi terbesar yang menyumbang total nilai kewajiban jangka pendek ini adalah bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban ini muncul sebagai akibat pinjaman untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan fisik dalam program KUDP (*Kalimantan Urban Development Projects*) melalui IBRD Bank Dunia. Kewajiban tahunan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 603,958,639,- yang akan berakhir di tahun 2015. Seiring dengan berkurangnya utang pokok yang telah dibayarkan maka jumlah kewajiban juga semakin menurun dengan tingkat penurunan sebesar 4,01% per tahunnya.

Kewajiban jangka panjang berupa utang jangka panjang lainnya juga memperlihatkan tren penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 39,35% pertahun. Pemerintah kota Pontianak tidak memiliki tanggungan kewajiban jangka panjang lainnya yang akan memberatkan kondisi keuangan daerah. Hal ini memberikan nilai positif dan optimis bahwa dimasa-masa mendatang focus pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban finansial.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi kewajiban lihat tabel neraca kewajiban berikut.

**Tabel III-7**  
**Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak**  
**Per 31 Desember 2009 – 31 Desember 2013 (Audited)**

NO	URAIAN	TAHUIN					R (%)
		2009	2010	2011	2012	2013*	
<b>II KEWAJIBAN</b>							
<b>1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>							
1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.596.425,00		234.480.650,30	193.275,00	19.954.160,00	
1.2	Utang Bunga				161.839.944,41	89.889.177,41	
1.3	Kewajiban Kepada Pihak Lain				2.990.183,00	800,00	
1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya.	981.650.884,22	909.700.117,23	603.958.638,80	603.958.638,80	603.958.638,80	
1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya				-	-	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>983.247.309,22</b>	<b>909.700.117,23</b>	<b>838.439.289,10</b>	<b>768.982.041,21</b>	<b>713.802.776,21</b>	<b>-8,34%</b>
<b>2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>							
2.1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
2.2	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
2.3	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
2.4	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
2.5	Utang Dalam Negeri - Obligasi						
2.6	Utang Jangka Panjang Lainnya	3.527.703.535,53	2.618.003.418,30	1.779.564.129,20	<b>1.013.765.546,01</b>	<b>319.917.729,80</b>	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>3.527.703.535,53</b>	<b>2.618.003.418,30</b>	<b>1.779.564.129,20</b>	<b>1.013.765.546,01</b>	<b>319.917.729,80</b>	<b>-93,57%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>4.510.950.844,75</b>	<b>3.527.703.535,53</b>	<b>2.618.003.418,30</b>	<b>1.782.747.587,22</b>	<b>1.033.720.506,01</b>	<b>-45,48%</b>

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2014



### C. Ekuitas Dana

Ekuitas dalam neraca pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Secara umum kondisi ekuitas dana menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 58,15% pertahunnya dan total nilai ekuitas dan amencapai Rp. 3,656 Trilyun di tahun 2013.

Dalam neraca Pemeirntah Kota Pontianak, entitas terdiri dari entittas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Dari ketiga komponen tersebut, ekuitas dana lancar khususnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam komponen pembiayaan APBD Pemerintah Kota Pontianak memberikan kontribusi terbesar dalam tren peningkatan necara ekuitas. Untuk tren pertumbuhan ekuitas dana lancar ini menunjukkan kecenderungan menurun rata-rata -86,76% dengan total nilai di tahun 2013 mencapai 122,23 Milyar. Kecenderungan menurunnya ekuitas dana lancar ini disebabkan penurunan SILPA yang signifikan di tahun 2013.

Dari sisi ekuitas dana investasi, tren positif juga terlihat dengan rerata pertumbuhan mencapai 58,77% dengan nilai total ekuitas dana investasi di tahun 2013 mencapai Rp. 3,53 Trilyun. Komponen yang memerikan kontribusi terbesar dalam ekuitas dana investasi ini adalah investasi jangka panjang pada BUMD dan BPD Bank Kalbar serta investasi dalam bentuk lainnya dengan nilai total investasi keduanya di tahun 2011 mencapai Rp. 166,68 Milyar.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa tiap tahunnya Pemerintah Kota Pontianak selalu mencadangkan sejumlah dana untuk kepentingan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun. Konsekuensi dari pencadangan dana ini tercatat sebagai bentuk ekuitas dana cadangan. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap komponen ekuitas dana dalam neraca Pemerintah Kota Pontianak, dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel III-8**  
**Neraca Ekuitas Dana Pemerintah Kota Pontianak**  
**Per 31 Desember 2009 – 31 Desember 2013 (Audited)**

NO	URAIAN	TAHUIN					R
		2009	2010	2011	2012	2013*	
<b>III</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
<b>1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>						
1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	597.679.762.742,79	682.926.824.333,62	774.229.734.463,60	108.939.662.311,57	38.142.477.477,07	
1.2	Pendapatan Ditangguhkan	-	-	-	46.773.575,00	1.005.277.750,00	
1.3	Cadangan Piutang	1.670.381.125,91	-	-	62.257.688.459,00	95.046.100.820,91	
1.4	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	412.500.000,00	385.487.342,47	
1.5	Cadangan Persediaan	-	-	-	12.931.691.081,66	18.086.205.032,90	
1.6	Dana Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(981.650.884,22)	(909.700.117,23)	(838.439.289,10)	(765.798.583,21)	(693.847.816,21)	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>598.368.492.984,48</b>	<b>682.017.124.216,39</b>	<b>773.391.295.174,50</b>	<b>183.822.516.844,02</b>	<b>151.971.700.607,14</b>	<b>(0,87)</b>
<b>2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
2.1	Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang	17.662.919.000,00	47.706.010.436,86	98.192.749.563,60	161.588.750.235,52	191.342.780.457,46	
2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	2.817.456.651.129,34	3.266.061.136.748,35	
2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	7.483.860.934,00	7.298.833.092,00	68.492.551.714,00	79.298.290.570,28	77.587.367.565,28	
2.4	Dana Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(3.527.703.535,53)	(2.618.003.418,30)	(1.779.564.129,20)	(1.013.765.546,01)	(319.917.729,80)	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>21.619.076.398,47</b>	<b>52.386.840.110,56</b>	<b>164.905.737.148,40</b>	<b>3.057.329.926.389,13</b>	<b>3.534.671.367.041,29</b>	<b>58.77%</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA UTK DIKONSOLIDASIKAN</b>						
3.1	R/K PPKD	(598.060.619.643,77)	(682.846.085.133,62)	(774.229.734.463,60)	-	-	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>(598.060.619.643,77)</b>	<b>(682.846.085.133,62)</b>	<b>(774.229.734.463,60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4</b>	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>						
4.1	diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>21.926.949.739,18</b>	<b>51.557.879.193,33</b>	<b>164.067.297.859,30</b>	<b>3.241.152.443.233,15</b>	<b>3.686.643.067.648,43</b>	<b>58.15%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>26.437.900.583,93</b>	<b>55.085.582.728,86</b>	<b>166.685.301.277,60</b>	<b>3.242.935.190.820,37</b>	<b>3.687.676.788.154,44</b>	<b>56.37%</b>

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2014

#### D. Analisis Rasio Terhadap Neraca Keuangan Daerah

Dalam tata kelola keuangan daerah, salah satu hal penting untuk mengetahui kemampuan keuangan di masa depan adalah implementasi manajemen keuangan secara ideal. Dalam konteks ini maka pada satu periode tertentu harus dibuat laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan aktivitas yang dijalankan oleh daerah. Dari laporan keuangan tersebut dapat diamati dan dicermati sejauhmana efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara optimal atau seberapa jauh pemakaian dana sendiri maupun dana pinjaman bagi perkembangan dan pertumbuhan daerah.

Pada umumnya dalam menganalisis laporan keuangan digunakan analisis rasio yang biasanya antara lain rasio likuiditas dan solvabilitas. Analisa rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan daerah. Analisis rasio dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang relevan dan signifikan antara pos-pos terpilih dari data laporan keuangan daerah. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Untuk

##### 1. Rasio Likuiditas

Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat dipersamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah hutang di pihak lain), juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di lain pihak. Rasio likuiditas keuangan daerah dapat dilihat dengan cara melihat rasio lancar dan rasio quick.

##### Rasio Lancar

Penilaian rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan besaran *current asset* dengan *current liabilities* untuk melihat tingkat kemampuan aktiva lancar daerah dalam memenuhi hutang jangka pendek secara tepat waktu. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio lancar} = \text{Aktiva Lancar} : \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio lancar sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel III-9  
Rasio Lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Aktiva Lancar	27,857,665,322.50	40,359,334,298.55	66,725,334,216.59	184.591.498.885,23	123.548.237.039,57
Kewajiban jangka pendek	983,247,309.22	909,700,117.23	838,439,289.10	768.982.041,21	1.317.761.415,01
<b>Rasio Lancar</b>	<b>28.33</b>	<b>44.37</b>	<b>79.58</b>	<b>240,05</b>	<b>93,76</b>

Sumber : Hasil Analisa

Menurut kriteria yang dibuat oleh Dun dan Bradstreet (D&B), angka rasio yang mengindikasikan besarnya kemampuan Pemda untuk mencairkan aset lancarnya untuk melunasi tagihan jangka pendeknya adalah lebih dari 4,0. Bila rasio yang diperoleh lebih kecil dari 1,5 maka diindikasikan Pemda akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan kriteria tersebut bila dibandingkan dengan rasio hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tidak mengalami kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya dalam jangka pendek.

### Rasio Quick

Rasio quick digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dcairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemda tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Quick} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}) : \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio lancar sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

**Tabel III-10**  
**Rasio Quick Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Aktiva Lancar (I)	27,857,665,322.50	40,359,334,298.55	66,725,334,216.59	66.725.334.216,59	66.725.334.216,59
Persediaan (II)	3,341,615,955.34	3,873,120,504.00	5,798,115,108.25	12.931.691.081,66	17.707.866.644,69
(I - II)	24,516,049,367.16	36,486,213,794.55	60,927,219,108.34	53.793.643.134,93	49.017.467.571,90
Kewajiban jangka pendek	983,247,309.22	909,700,117.23	838,439,289.10	768.982.041,21	1.317.761.415,01
<b>Rasio quick</b>	<b>24.93</b>	<b>40.11</b>	<b>72.67</b>	<b>69,95</b>	<b>37,20</b>

Sumber : Hasil Analisa

Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemda tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dari perhitungan rasio quick Kota Pontianak menunjukkan nilai diatas 1 dan setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar Pemerintah Kota Pontianak setelah dikurangi persediaan yang dimiliki sangat liquid untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimilikinya. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio lancar dan rasio quick pada diperoleh nilai yang tinggi. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Pontianak memiliki tingkat investasi persediaan yang cukup rendah.

## 2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka panjangnya maupun jangka pendek. Rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rasio solvabilitas keuangan daerah diwakili oleh Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Total Hutang terhadap Modal.

### Rasio Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari hutang. Formulasi yang dipakai adalah:

$$\text{Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset} = \text{Total Hutang} : \text{Total Aset}$$

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio lancar sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

**Tabel III-11**  
**Rasio Hutang Terhadap Total Aset Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Total Hutang	4,510,950,844.75	3,527,703,535.53	2,618,003,418.30	1.782.747.587,22	2.331.526.961,02
Total Aset	2,255,624,201,926.23	2,478,587,923,312.15	2,802,932,806,871.82	3.250.935.190.820,37	3.658.928.050.629,85
<b>Rasio Hutang Terhadap Total Aset</b>	<b>0.00200</b>	<b>0.00142</b>	<b>0.00093</b>	<b>0,00055</b>	<b>0,00064</b>

Sumber : Hasil Analisa

Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan baerarti semakin baik rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Pontianak adalah sebesar 0,0020 untuk Tahun 2009, kemudian semakin menurun pada Tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 0,00142 dan 0,00093. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak sangat solvabel dan tidak bergantung kepada hutang untuk memenuhi aset-asetnya.

### Rasio Hutang Terhadap Modal

Jadi rasio ini merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemda dan menunjukkan kemampuan modal Pemda untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \text{Total Hutang} : \text{Total Ekuitas}$$

**Tabel III-12**  
**Rasio Hutang Terhadap Modal Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2009-2013**

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Total Hutang	4,510,950,844.75	3,527,703,535.53	2,618,003,418.30	2,618,003,418.30	2,618,003,418.30
Total Ekuitas	21,926,949,739.18	51,557,879,193.33	167,067,297,859.30	3.249.152.443.233,15	3.656.596.523.668,83
<b>Rasio quick</b>	<b>0.21</b>	<b>0.07</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

Sumber : Hasil Analisa

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin sehat kondisi keuangan Pemda. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jika dibandingkan dengan hasil perhitungan terlihat bahwa kecenderungan nilai rasio ini semakin mengecil tiap tahunnya. Kondisi ini memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya jikalau memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada kreditur.

### 3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan dan Belanja Lima Tahun

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kota Pontianak dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Pontianak yang terus meningkat.

Pendanaan atau pembiayaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2015-2019 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2009-2014 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pembiayaan program kegiatan mendatang.

Proyeksi dilakukan terhadap tiga komponen APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan pendekatan kombinasi antara trend dan target berdasarkan kebutuhan. Selain itu juga perlu ditetapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan manajemen keuangan dalam lima tahun ke depan.

### **3.2.1 Proyeksi dan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah**

#### **A. Proyeksi Pendapatan**

Pendapatan daerah diperoleh melalui pajak, restribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Prinsip yang dianut adalah Keadilan berarti warga masyarakat dalam posisi yang sama dan harus diperlakukan sama dan selanjutnya adalah prinsip kewajaran dilandasi pada konsep kemampuan warga masyarakat, artinya warga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Melihat dari kondisi keuangan masa lalu, rata – rata peningkatan APBD Kota Pontianak antara 7 % – 10 %, dan untuk proyeksi pendapatan daerah Kota Pontianak sendiri dapat dilihat pada tabel III-13 dibawah.

#### **B. Arah Pengelolaan Pendapatan**

Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat
7. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat
8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah



Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pontianak mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mendatang akan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Kelembagaan dan Sistem Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
3. Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
4. Peningkatan Pelayanan Publik Masyarakat baik Kecepatan Pelayanan Pembayaran maupun Kemudahan untuk memperoleh Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak dan Restribusi Daerah
5. Pemanfaatan sumber daya Organisasi secara efektif dan efisien
6. Peningkatan sosialisasi
7. Peningkatan Kualitas Data Dasar Pajak dan Restribusi Daerah
8. Peningkatan Sinergitas dan Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pusat dan Instansi terkait.

### **3.2.2. Proyeksi dan Arah Pengelolaan Belanja Daerah**

#### **A. Proyeksi Belanja**

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan.

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimistic tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa kedepan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah

pusat. Hasil proyeksi belanja dalam lima tahun periode 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel III-13.

## **B. Arah Pengelolaan Belanja**

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah perlu disusun dalam kerangka sistimatis dan terpola. Belanja Daerah diarahkan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

Pengelolaan Belanja Daerah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan (input), keluaran (output) dan manfaat (outcome) yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Arah Pengelolaan Belanja Daerah Kota Pontianak** adalah sebagai berikut :

### **a. Transparansi dan Akuntabel**

Setiap Pengeluaran Belanja Langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan secara terbuka berarti pihak ketiga/swasta dan warga masyarakat mudah mendapatkan informasinya serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.

### **b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.

### **c. Optimalisasi Belanja Langsung**

Belanja Langsung mendukung tujuan pembangunan secara efisien dan efektif yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga masyarakat. Optimalisasi Belanja Langsung untuk membangun infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **d. Prioritas**

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja guna mendukung ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

**e. Tolok Ukur dan Target Kinerja**

Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program disertai dengan tolok ukur dan target kinerja yang meliputi masukan (input), output (keluaran) dan hasil (outcome) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**3.2.3. Proyeksi dan Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

**A. Proyeksi Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah dalam keuangan Pemerintah Kota Pontianak dipergunakan untuk mengatasi surplus/deficit anggaran. Skenario pembiayaan anggaran adalah anggaran deficit yang akan ditanggulangi dengan pembiayaan pembangunan khususnya dengan SILPA. Besaran SILPA yang direncanakan dari total volume APBD adalah berada di dalam kisaran 4-5,5%.

Dalam komponen pembiayaan ini juga diproyeksikan dana cadangan yang akan dipergunakan untuk membiayai Pilkada. Selain itu proyeksi juga didasarkan atas rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada BUMD dan BPD Bank Pasar sebagai bentuk investasi. Asumsi lain yang juga dimasukkan ke dalam proyeksi pembiayaan ini adalah alokasi untuk pembayaran pokok hutang yang akan selesai di tahun pertama RPJM ini. Untuk lebih jelasnya hasil proyeksi pembiayaan ini dapat dilihat dalam tabel III-13.

**B. Arah Pengelolaan Pembiayaan**

Didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah :

- a. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.
- b. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
- c. Komponen penerimaan laba dari BUMD diasumsikan tidak dimasukkan dalam kerangka penerimaan pembiayaan karena akan dimasukkan kembali sebagai bentuk penyertaan modal yang dipisahkan ke dalam neraca keuangan BUMD.

**Tabel III-13**  
**Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak**  
**Tahun 2015-2019**

KODE	URAIAN	PROYEKSI				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.518.817.244.627,92</b>	<b>1.630.754.075.557,00</b>	<b>1.750.940.650.925,55</b>	<b>1.879.984.976.898,76</b>	<b>2.018.539.869.696,20</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>372.203.579.867,85</b>	<b>439.566.593.059,13</b>	<b>488.836.898.141,11</b>	<b>541.649.248.273,94</b>	<b>590.012.309.890,45</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	314.182.813.531,93	345.641.819.734,02	385.249.472.644,57	430.173.070.605,96	470.047.380.051,04
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	43.437.575.835,92	62.067.804.449,11	69.056.556.620,54	76.045.308.791,98	83.034.060.963,41
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.359.250.000,00	17.580.000.000,00	19.253.900.000,00	21.953.900.000,00	23.653.900.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.223.940.500,00	14.276.968.876,00	15.276.968.876,00	13.476.968.876,00	13.276.968.876,00
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>798.632.837.541,16</b>	<b>830.830.585.398,19</b>	<b>888.229.076.427,57</b>	<b>949.690.269.625,05</b>	<b>1.015.504.519.978,99</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	45.882.124.662,77	49.361.196.631,09	53.191.266.525,31	57.406.459.750,95	62.044.378.977,76
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	737.689.691.378,39	765.655.316.192,10	818.433.033.698,50	874.848.794.860,16	935.153.375.236,60
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	15.061.021.500,00	15.814.072.575,00	16.604.776.203,75	17.435.015.013,94	18.306.765.764,63
<b>1.3</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>347.980.827.218,91</b>	<b>360.356.897.099,68</b>	<b>373.874.676.356,87</b>	<b>388.645.458.999,77</b>	<b>413.023.039.826,77</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah					
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	147.907.106.218,91	158.737.072.099,68	170.554.136.956,87	183.454.133.759,77	197.542.392.466,77
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	184.612.681.000,00	184.612.681.000,00	184.612.681.000,00	184.612.681.000,00	184.612.681.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan (Subsidi) Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.461.040.000,00	17.007.144.000,00	18.707.858.400,00	20.578.644.240,00	30.867.966.360,00
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.587.164.020.636,18</b>	<b>1.704.138.008.957,06</b>	<b>1.829.732.980.217,20</b>	<b>1.964.584.300.859,21</b>	<b>2.110.410.882.945,35</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>731.682.613.513,28</b>	<b>800.944.864.209,82</b>	<b>874.612.364.543,82</b>	<b>962.646.307.421,01</b>	<b>1.054.687.081.916,27</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	714.524.509.738,32	785.322.017.671,27	863.134.382.423,27	948.656.659.761,52	1.042.652.773.932,19
2.1.2	Belanja Bunga	189.188.142,34	143.168.612,81	108.343.215,59	81.989.006,77	62.045.391,53
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	9.065.415.632,62	7.458.590.425,74	3.426.774.217,46	5.538.722.348,04	4.219.894.376,99
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.703.500.000,00	6.871.087.500,00	7.042.864.687,50	7.218.936.304,69	7.002.368.215,55
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kabupaten / Kota					
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	1.150.000.000,00	900.000.000,00	1.150.000.000,00	750.000.000,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>855.481.407.122,90</b>	<b>903.193.144.747,24</b>	<b>955.120.615.673,38</b>	<b>1.001.937.993.438,20</b>	<b>1.055.723.801.029,09</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	85.548.140.712,29	90.319.314.474,72	95.512.061.567,34	100.193.799.343,82	103.305.427.304,45
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.754.050.279,33	289.021.806.319,12	305.638.597.015,48	320.620.157.900,22	338.699.866.213,21
2.2.3	Belanja Modal	496.179.216.131,28	523.852.023.953,40	553.969.957.090,56	581.124.036.194,15	613.718.507.511,43
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(68.346.776.008,26)</b>	<b>(73.383.933.400,06)</b>	<b>(78.792.329.291,65)</b>	<b>(84.599.323.960,45)</b>	<b>(91.871.013.249,15)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(27.794.473.991,74)</b>	<b>18.838.683.400,06</b>	<b>(9.117.920.708,35)</b>	<b>13.608.073.960,45</b>	<b>82.751.601.263,58</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>87.866.776.008,26</b>	<b>92.783.933.400,06</b>	<b>99.692.329.291,65</b>	<b>98.099.323.960,45</b>	<b>88.751.601.263,58</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.765.260.908,26	92.681.403.149,06	99.587.748.435,63	80.291.605.678,75	88.642.913.517,34
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				17.700.000.000,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	101.515.100,00	102.530.251,00	104.580.856,02	107.718.281,70	108.687.746,24
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Laba Dari BUMD					
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>115.661.250.000,00</b>	<b>73.945.250.000,00</b>	<b>108.810.250.000,00</b>	<b>84.491.250.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00		6.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	109.151.250.000,00	68.045.250.000,00	102.910.250.000,00	84.491.250.000,00	-
3.2.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) ke BPD Bank Kalbar	17.115.250.000,00	17.115.250.000,00	17.115.250.000,00	17.115.250.000,00	
3.2.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) ke PDAM Kota Pontianak	92.036.000.000,00	50.930.000.000,00	85.795.000.000,00	67.376.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Piutang	610.000.000,00				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	<b>Volume APBD (Pendapatan)</b>	<b>1.606.684.020.636,18</b>	<b>1.723.538.008.957,06</b>	<b>1.850.632.980.217,20</b>	<b>1.978.084.300.859,21</b>	<b>2.107.291.470.959,78</b>

Sumber : Hasil Analisa

### **3.2.4. Kebijakan Umum Anggaran**

Kebijakan umum anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengelola keuangan Pemerintah Kota Pontianak sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia yang dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan warga masyarakat.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Selaras peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah terus meningkat, Pemerintah Kota Pontianak merencanakan peningkatan pendapatan baik yang diupayakan melalui Pendapatan Asli Daerah, bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan maupun Pendapatan Lain-lain yang sah. Pertumbuhan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah menjadi faktor penting yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pada 5 (lima) tahun mendatang baik kuantitas dan kualitas pendapatan asli daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah unsur cukup penting mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Pada periode mendatang yaitu tahun anggaran 2015-2019 prediksi anggaran pendapatan semakin meningkat meskipun peningkatan tersebut relative tidak besar seiring dengan perubahan kondisi dan keadaan masa mendatang. Dari sisi prosentase kontribusi terhadap volume anggaran pendapatan, prediksi anggaran pendapatan mengalami peningkatan cukup baik sebesar 22 – 24%.

#### **B. Belanja Daerah**

Kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik, Secara spesifik, langkah efisiensi dan efektivitas belanja daerah harus menjad kebijakan yang diterapkan pada semua pos belanja daerah. Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Tidak Terduga.

##### **1. Belanja Langsung**

Belanja Langsung adalah belanja Pemerintah Daerah berhubungan langsung dengan program dan kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja Pegawai antara lain Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan, Belanja Kursus dan Hadiah/Penghargaan berupa Uang yang diserahkan kepada Warga Masyarakat. Belanja Modal diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak.

##### **2. Belanja Tidak Langsung**

Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat akan menaikkan gaji PNS, hal ini akan berpengaruh pada APBD Pemerintah Kota Pontianak

dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kenaikan Gaji PNS dibiayai oleh Dana Alokasi Umum sehingga harus diikuti oleh kenaikan dana dimaksud. Belanja Tidak Langsung yang signifikan adalah Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan kepada warga masyarakat dan berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan serta melakukan penyimpanan dana untuk pemilihan umum yang dicicil setiap tahun.

Tujuan belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai langkah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi resiko sosial masyarakat.

Mekanisme anggaran adalah bersifat block grant artinya warga masyarakat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan serta tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu Komitmen Pemerintah Kota Pontianak memperbaiki kualitas Pendidikan dan Kesehatan akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung mendatang dikarenakan akan terjadi peningkatan Belanja Subsidi Pendidikan dan Kesehatan.

Modal diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak.

### **C. Pembiayaan Daerah**

Didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja yaitu terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan maupun Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam Pembiayaan itu sendiri adalah Angsuran Hutang, Bantuan Modal dan Transfet ke Dana Cadangan.

### **D. Prediksi Ekonomi Makro**

Pelaksanaan APBD tidak lain adalah untuk memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan prediksi yang menggambarkan kondisi makro ekonomi Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang dimana implementasi rencana belanja akan memberikan pengaruhnya. Prediksi dilakukan dengan menggunakan perpaduan antara pendekatan tren dan target. Pendekatan tren dilakukan untuk melihat histori dari beberapa indikator ekonomi makro yang kemudian digunakan untuk memprediksi kinerja indikator tersebut lima tahun mendatang. Pendekatan target dilakukan untuk memberikan capaian nilai tertentu sebagai target atau stimulus dalam pelaksanaan APBD dalam bentuk program-program pembangunan. Adapun prediksi indikator ekonomi makro tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.



**Tabel III-14**  
**Prediksi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	PREDIKSI TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0	TAHUN - 1	TAHUN - 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>ASUMSI EKONOMI MAKRO</b>								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,95	6,98	7,00	7,20	7,25	7,32	7,32
2	Inflasi (%)	5,50	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
3	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)	20.337.793,53	23.028.483,61	26.079.757,69	29.587.485,10	33.581.795,59	38.138.845,25	38.138.845,25
4	PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. Juta)	8.503.230,87	9.096.756,38	9.733.529,33	10.434.343,44	11.190.833,34	12.010.002,34	12.010.002,34
5	Jumlah Penduduk (Jiwa)	598.977	610.326	621.890	633.673	645.679	657.912	657.913
6	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	587.223	604.651	616.108	627.781	639.676	651.796	651.796
7	Pendapatan per Kapita Berlaku (Rp)	34.633.850,39	38.085.553,57	42.329.865,46	47.130.255,41	52.498.157,31	58.513.501,93	58.513.501,93
8	Pendapatan per Kapita Konstan 2000 (Rp)	14.480.411,82	15.044.629,44	15.798.420,82	16.620.989,24	17.494.541,88	18.426.024,46	18.426.024,46
9	ICOR	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526
10	Kebutuhan Investasi (Rp. Milyar)	1.395,79	1.499,25	1.608,49	1.770,26	1.910,89	2.069,22	2.069,22
11	Angkatan Kerja (Jiwa)	266.048	274.601	283.430	292.542	301.947	311.655	311.655
12	Angka Pengangguran terbuka (%)	5,29	5,08	4,62	4,21	3,84	3,49	3,49

Sumber : Hasil Analisa



## BAB IV

# ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

**M**enemukan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat merupakan langkah penting dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah. Hal ini diperlukan selain untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan kebutuhan masyarakat, juga perlu untuk mendesain prioritas, arah dan strategi pembangunan jangka menengah.

Dinamisnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Pontianak dituntut untuk dapat menghadirkan perubahan yang nyata dalam perkembangan Kota Pontianak. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi. Berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kota Pontianak, dikelompokkan berdasarkan fungsi, urusan dan karakteristiknya.

### 4.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

#### 4.1.1. Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan daya dukung fisik dan lingkungan adalah sebagai berikut:

- Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;

- Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya system pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim;
- Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.
- Kurangnya penyediaan dan persebaran kawasan ruang terbuka hijau diseluruh kota;
- Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta diperparak pada musim tertentu disebabkan oleh pembakaran lahan yang terjadi pada Kabupaten Kubu Raya Maupun Kabupaten Pontianak yang berdampak pada Kota Pontianak;
- Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- Pengelolaan TPA dengan control Landfill dan sanitary landfill belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

#### **4.1.2. Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah**

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:

##### **A. Tata Ruang**

- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota..
- Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal;
- Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial;
- Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi bangunan dihubungkan dengan kesesuaian lahan, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa;
- Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang, sehingga banyak bangunan tanpa IMB;
- Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan permukiman dan pengembangan fasilitas pendukungnya;
- Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan local dalam konsep penataan kawasan kota.

##### **B. Keciptakarya**

- Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
- Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;

- Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage;

### C. Jalan dan Perhubungan

- Pesatnya penambahan kendaraan bermotor yang diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta penambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota;
- Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas hanya dihubungkan oleh satu akses jembatan dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota,;
- Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
- Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
- Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
- Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik;

### D. Sumber Daya Air dan Air Bersih

- Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
- Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
- Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
- Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi.
- Penyediaan air baku untuk pemerosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
- Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga.



#### **E. Komunikasi dan Informatika**

- Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government;
- Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
- Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

#### **4.1.3. Demografi dan Tenaga Kerja**

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan dan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

##### **A. Demografi**

- Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah, sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.
- Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien

##### **B. Tenaga Kerja**

- Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

#### **4.1.4. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

##### **A. Perekonomian Kota dan Investasi**

- Pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata;

- Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;
- Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah.
- Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
- Belum optimalnya kualitas pelayanan investasi;
- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal;

#### **B. Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM**

- Daya saing produk UMKM belum kuat akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah;
- Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
- Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial.
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- Akses pemodalannya bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- Belum terjalannya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar.

#### **C. Pariwisata**

- Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum terkonsep dengan baik sehingga lama tinggal wisatawan masih rendah;
- Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal;
- Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
- Belum optimalnya pengembangan wisata berbasis budaya dan air;
- Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
- Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkedala karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;





#### **D. Ketahanan Pangan**

- Masyarakat masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok sumber karbohidrat sehingga rawan akan keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan, disisi lain pengembangan keanekaragaman pangan lokal lainnya masih kurang;
- Kota Pontianak sangat tergantung kepada pasokan pangan dari luar kota/luar daerah sehingga rawan terhadap ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat rumah tangga;
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
- Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum ideal.

#### **E. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

- Belum konkrit dan jelasnya arah kebijakan pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis di Pontianak Utara menghambat pengembangan pertanian;
- Agribisnis yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas serta daya saing produk pertanian, masih belum berkembang;
- Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
- Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
- SDM, kelembagaan usaha perikanan dan sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
- Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produktifitas dan kualitas perikanan belum optimal;
- Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologis secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan belum berjalan dengan baik.
- Kebijakan dan konsep pengembangan hutan kota sebagai bagian dari RTH kota belum dapat diwujudkan dengan nyata;

#### **F. Energi**

- Rawannya ketersediaan, keberlanjutan dan konsistensi layanan energy listrik di kota Pontianak merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan industry perkotaan;



- Upaya memanfaatkan angin dan sinar matahari yang berlimpah serta biogas sebagai sumber pembangkit energy listrik terbarukan belum dikembangkan dan belum didukung komitmen kebijakan;

#### **4.1.5. Sosial dan Budaya**

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial dan budaya adalah sebagai berikut:

##### **A. Sosial**

- Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan.

##### **B. Pendidikan**

- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Manajemen Pengelolaan Sekolah).
- Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal belum mampu memenuhi ekspektasi/kebutuhan pasar tenaga kerja;
- Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang keahliannya.
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
- Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
- Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya;
- Fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum cukup memadai dan merata;
- Penyebaran Sumber Daya Manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif masih belum merata;
- Masih terdapat angka putus sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan formal dan non formal.

### **C. Kesehatan**

- Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
- Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
- Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- Belum optimalnya Kemitraan antara bidan dan dukun
- Kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko tinggi pada kehamilan dan belum semua ibu hamil dengan resiko tinggi terjangkau oleh Tenaga Kesehatan.
- Masih terjadinya kasus gizi buruk dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memantau pertumbuhan balita
- Masih belum tuntasnya penanganan wabah penyakit menular seperti DBD
- Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal baru sebatas pelayanan rawat jalan, sedangkan IGD dan rawat inap belum berfungsi karena keterbatasan SDM, sarana pra sarana dan peralatan medis..
- Sarana dan prasarana dan instalasi pendukung RSUD Kota Pontianak masih dalam tahap penyelesaian dan belum berfungsi dengan baik ketika RSUD mulai dioperasikan.

### **D. Kebudayaan**

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;

### **E. Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

### **F. Pembinaan Pemuda dan Olahraga**

- Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;

- Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- Sistem manajemen keolahragaan yang belum professional dari masing-masing cabang olahraga;
- Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb;
- Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masing sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal.
- Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlit yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi.

#### **G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi**

- Pemanfaatan teknologi informasi dan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;
- Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang;
- Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal;
- Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stakeholders masih kurang;

#### **4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan adalah sebagai berikut:

##### **A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan Pemerintahan**

- Pengembangan basis data yang akurat dan *up to date* sebagai landasan penyusunan rencana dan kebijakan belum dilakukan dengan baik;
- Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun;
- Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien;



- Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
- Belum optimalnya implementasi Good Governance.
- Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik.
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal.
- Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan;

#### **B. Sumber Daya Aparatur**

- Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur;
- Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya;
- Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
- Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian

#### **C. Hukum**

- Pemahaman, kesadaran dan budaya hukum dan disiplin belum menjadi kebiasaan masyarakat;
- Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- Penegakan supremasi hukum dan peraturan daerah masih lemah.

#### **D. Kerjasama**

- Kerjasama dan koordinasi internal antar bidang pembangunan belum maksimal terlaksana dengan ideal;
- Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dan koordinasi dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

#### **E. Pengelolaan Keuangan**

- Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah;
- Masih banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan belum efektifnya pengelolaan keuangan seperti:
  - a. Usulan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih sering terlambat.
  - b. Anggaran kas yang disampaikan SKPD sebagai dasar untuk membuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD masih sering terlambat.

- c. Pengajuan SPM dari seluruh SKPD sering tidak sesuai dengan anggaran kas mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat.
- d. Masih ada SKPD yang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang terlambat.
- Belum optimalnya pengumpulan pendapatan asli daerah akibat belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang data dan pembukuan khususnya operator konsul untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- Masih ada beberapa peraturan pelaksanaan yang belum selesai penyusunannya sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.

#### **E. Pelayanan Publik**

- Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
- Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan;
- Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima.
- Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan perijinan sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal.

## **4.2. ISU-ISU STRATEGIS**

### **4.2.1. Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam**

#### **A. Pencemaran**

Sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesatnya, saat ini Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai permasalahan pencemaran baik udara, air maupun tanah. Pencemaran udara sering terjadi pada musim kemarau disebabkan oleh asap akibat pembakaran lahan-lahan perkebunan ataupun ladang yang berada disekitar Kota Pontianak. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Badan lingkungan Hidup Kota Pontianak, sampai dengan bulan Maret tahun 2013 saja sudah tercatat 7,63% bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara yang buruk yang mana jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2012. Hal ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi Kota Pontianak, selain memicu munculnya ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) bagi penduduk, juga menyebabkan turunnya produktifitas akibat terganggunya penerbangan, terkendalanya proses produksi, dan lain sebagainya.

Disisi lain, pencemaran air saat ini sudah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi ini dapat dilihat secara langsung dari kualitas air di saluran drainase kota. Berdasarkan hasil pengamatan BLH Kota Pontianak Tahun 2013, pada Sungai Kapuas dan Sungai-sungai yang terhubung langsung menunjukkan bahwa pada musim kemarau parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, Nitrit (NO<sub>2</sub>) dan besi (Fe) semuanya melebihi baku mutu yang ditetapkan melalui PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya pencemaran air. Hal ini disebabkan oleh air limbah domestik (rumah tangga), komersial dan industri (UMKM) berupa sisa-sisa pencucian dan air mandi dibuang langsung pada saluran drainase.

Indikasi pencemaran tanah juga sudah mulai terjadi di Kota Pontianak. Keadaan ini terjadi akibat pada kawasan komersial terjadi ketidaktertiban pelaku usaha seperti bengkel, restoran, café dalam mengelola limbah hasil aktivitasnya sehingga menyebabkan tanah menjadi tercemar. Sedangkan di kawasan permukiman terjadi akibat tidak tersedia sistem pengumpulan air limbah menggunakan tanki septik baik berupa komunal maupun tunggal. Masyarakat saat ini menggunakan tempat penampungan limbah BAB menggunakan sumur penampungan yang tidak kedap sehingga menyebabkan air limbah menyebar di dalam tanah. Kondisi ini harus menjadi perhatian untuk keberlangsungan lingkungan.

### **B. Genangan dan Banjir**

Kondisi fisik wilayah Kota Pontianak yang datar dengan keberadaan cekungan dan tanah yang landai di beberapa bagian serta berada pada daerah muara sungai Kapuas menyebabkan kota ini sangat rentan terhadap potensi genangan air dan banjir khususnya pada wilayah-wilayah bantaran sungai. Disisi lain perubahan iklim yang terjadi juga telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Pontianak antara lain banjir, dan kekeringan.

Genangan dan banjir juga mulai terjadi pada kawasan-kawasan permukiman. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air akibat pelanggaran ketentuan KDB dan kecenderungan masyarakat menutup tanah dengan semen/beton. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya kapasitas dan daya tampung sungai dan saluran drainase akibat berbagai hal seperti penutupan/penyempitan parit, pembangunan di bantaran sungai/saluran, pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi serta perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di saluran dan sungai dapat menghambat aliran air. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

### **C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang dengan pesat, permasalahan lingkungan tak pelak merupakan problem yang sekarang ini mulai muncul. Pembangunan kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Hal ini untuk memastikan bahwa di masa depan lingkungan tetap dapat dinikmati generasi penerus dengan kualitas yang baik.

Dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana



dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

#### **4.2.2. Dinamika Demografi dan Sosial Budaya**

##### **A. Pertambahan dan Penyebaran Penduduk**

Kota Pontianak terus mengalami pertambahan penduduk dalam dekade terakhir. Pertambahan penduduk ini selain dari akibat alami yaitu kelahiran penduduk juga tidak terlepas dari fungsi strategis Kota Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari penghidupan di kota ini (urbanisasi dan *commuter*). Dalam lima tahun terakhir tercatat pertumbuhan penduduk mencapai 1,77%.

Secara geografis, persebaran penduduk relatif kurang merata. Sebagai besar penduduk terkonsentrasi di wilayah selatan Sungai Kapuas yang mana secara fisik memang lebih cepat pekungannya. Sedangkan secara administrative, wilayah kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah paling banyak penduduknya, namun apabila dibandingkan dengan luasan wilayahnya, Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah yang paling padat penduduknya yang mencapai 9.920 jiwa/km<sup>2</sup>.

Permasalahan yang adalah bagaimana laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dikelola dengan baik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan fisik kota dengan didukung jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar pembangunan perekonomian yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.





## **B. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan modal utama terlaksananya pembangunan. Semakin berkualitas sumber daya manusia, semakin baik pula mutu pembangunan yang dilaksanakan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk maka semakin baik kualitas SDM.

Jika dilihat dari jumlah penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan di Kota Pontianak berumur 5 tahun keatas, proporsi terbesar adalah tamatan SLTA atau sederajat yaitu sebanyak 28,41% disusul dengan tidak tamat SD sebanyak 24,97%. Sedangkan hanya 6,75% saja yang memiliki gelar sarjana/D4. Hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apalagi kedepan kita dihadapkan dengan pasar terbuka ASEAN dan AFTA yang memungkinkan serbuan tenaga asing dengan kualitas lebih baik yang menyebabkan kompetisi dalam mengisi lapangan kerja semakin tinggi.

## **C. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda**

Isu gender merupakan salah satu isu pokok lain yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka memperbesar peran serta perempuan secara aktif dalam pembangunan kota. Potensi perempuan sangatlah besar mengingat rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pontianak di tahun 2013 adalah 1,004 artinya jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Untuk itu perempuan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam segala bidang pemerintahan dan pembangunan.

Disisi lain peran anak dan pemuda juga tidak dapat dikesampingkan. Anak dan pemuda adalah gambaran masa depan sehingga perlu mendapatkan porsi yang sesuai dalam pembangunan seperti pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan, mendesain program-program yang mengakomodir anak-anak berbakat dan pemuda berprestasi serta kegiatan-kegiatan yang merangsang kreatifitas mereka sehingga terhindar dari aktifitas negatif dan tidak produktif.

## **D. Gesekan Sosial**

Sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat kota Pontianak merupakan tujuan bagi penduduk sekitar wilayahnya untuk beragam aktifitas. Penduduk yang datang dan tinggal di Kota Pontianak sangat beragam, baik dari sisi budaya, etnis maupun tingkat pendidikannya. Keragaman ini menjadikan Pontianak sebagai kota yang kaya dengan budaya multikultur dan tempat pertemuan budaya. Apabila tidak dikelola dengan baik, keragaman ini dapat menimbulkan berbagai masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta ketidakdisiplinan masyarakat dan kemiskinan.

Berkaca kepada sejarah terjadinya konflik berlatar belakang etnis yang pernah terjadi, potensi berulangnya kejadian tersebut selalu ada. Untuk itu perlu selalu mewaspadaai potensi tersebut dengan memperhatikan aspek pendekatan sosial dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Sehingga berbagai akibat yang mungkin timbul sebagaimana tersebut diatas dapat dihindari.

### **4.2.3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

#### **A. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pembangunan kota perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan nonkonvensional. Isu penting dalam pembiayaan pembangunan adalah peningkatan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi pajak daerah. Selain itu perlu dilakukan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari dua sumber tersebut yang dirasa saat ini masih sangat jauh dari potensi yang ada sebenarnya.

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam aspek pengelolaan keuangan daerah adalah tata kelola aset-aset daerah yang dirasa saat ini masih jauh dari kata optimal. Tata kelola aset ini menyangkut aspek manajemen data dan informasi aset-aset yang ada serta optimalisasi pemanfaatannya untuk mendapatkan imbal balik bagi pendapatan daerah.

Disisi lain, tata kelola keuangan daerah secara umum perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi efektif dan efisiennya keuangan daerah. Kemampuan dan profesionalitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai di level kota perlu ditingkatkan. Hal tersebut perlu dan penting dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan administrasi dan potensi penyelewengan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

#### **B. Reformasi Birokrasi**

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan perbaikan menyeluruh terhadap birokrasi yang ada. Reformasi birokrasi merupakan konsep perbaikan birokrasi dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Perbaikan bukan hanya mencakup aspek sistem birokrasi belaka akan tetapi juga meliputi budaya kerja dan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Isu penting menyangkut reformasi birokrasi ini adalah penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima. Selain itu isu lainnya dalam konteks ini adalah menciptakan sinergitas antar lembaga pemerintah, sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

Wujud nyata reformasi birokrasi ini dapat berupa berbagai program seperti penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government), penyederhanaan perizinan usaha dan izin mendirikan bangunan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system".

### **C. Pengembangan E-Government**

Pengembangan e-government merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Isu ini penting untuk digarisbawahi dalam rencana strategis Kota Pontianak karena kedepan faktor efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kendala kurangnya jumlah aparatur pemerintah dapat ditanggulangi dengan mengaplikasikan e-government dalam sistem pemerintahan.

Inovasi merupakan kata kunci dalam rangka memadukan sistem birokrasi yang bersifat rigid-formal dengan dinamis dan luwesnya e-government. Salah satu yang perlu dieksplorasi adalah pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien. Aplikasinya dapat berupa pembuatan sistem informasi untuk berbagai layanan publik guna mempermudah dan mempercepat proses kerja serta pengelolaan website sebagai media transparansi informasi publik.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah faktor keamanan data dari potensi *hacking*, keberlanjutan pengelolaan sistem informasi dan penyiapan keterampilan dan pengetahuan sumber daya apartur untuk menjalankan sistem tersebut. Diharapkan dengan implementasi e-government ini bermuara kepada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

### **D. Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah dan Internasional**

Pada era globalisasi dan kompetisi yang sedemikian ketat, untuk dapat eksis diperlukan kerjasama dan hubungan yang mutualisma antar daerah baik lingkup nasional, regional, dan global. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan skala kepentingan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Manfaat yang akan didapat dalam kerja sama ini dapat berupa transfer teknologi dan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu, berbagi pengalaman dalam keberhasilan penyelenggaraan sektor-sektor pembangunan serta *technical assistance* dalam bidang-bidang teknis tertentu.

Untuk mewujudkan hal ini dilakukan melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta meluaskan jaringan kerjasama dengan kota-kota di Negara lain yang telah berhasil mengelola kota dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Disisi lain dalam lingkup internal diperlukan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan kedepan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **E. Peningkatan Pelayanan Publik**

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen penikmat layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat.

Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan berbagai terobosan



dalam rangka perbaikan layanan publik seperti penyederhanaan jumlah dan mekanisme perijinan, penyusunan SOP pada tiap-tiap layanan publik serta peningkatan profesional aparatur. Akan tetapi hal tersebut belum cukup memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga diperlukan berbagai inovasi selain hal-hal konvensional yang telah dilakukan.. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang.

#### **4.2.4. Tata Ruang dan Infrastruktur Perkotaan**

##### **A. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota**

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033 memberikan dasar yang kuat bagi penataan ruang kota, maka salah satu langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai operasionalisasi rencana kota tersebut diperlukan peraturan walikota tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota. Selain itu untuk menjaga konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

##### **B. Pengembangan Sistem Transportasi**

Sejalan dengan perkembangan kota Pontianak yang sedemikian cepat, kebutuhan akan akses transportasi daerah yang lancar dan aman merupakan isu strategis yang harus diperhatikan. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang sedemikian tinggi disatu sisi, tidak diikuti dengan pertumbuhan jalan yang ideal disisi lain, sehingga kemacetan mulai sering terjadi. Oleh karena itu, perlu mulai dirintis pengembangan

sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi antara angkutan darat, sungai dan udara diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di Kota Pontianak. Setelah focus pada pelebaran jalan-jalan utama, sudah saatnya pengembangan transportasi mulai beranjak menuju penyediaan layanan transportasi misal. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor sudah harus dipertimbangkan mengingat semakin mahal dan langkanya BBM untuk kendaraan pribadi.

Selain pengembangan transportasi misal, juga perlu dibangun *inner ringroad* yang menghubungkan sub-sub pusat pelayanan kota. Hal ini perlu dilaksanakan selain untuk memacu pertumbuhan kawasan juga untuk memberikan alternative pilihan rute bagi kendaraan pribadi sehingga mengurangi beban jalan-jalan utama yang mulai sering terjadi macet. Aspek lain yang juga sangat penting dalam pengembangan sistem transportasi adalah jaringan transportasi dalam kota harus memperhatikan dan terkoneksi dengan sistem transportasi wilayah yang lebih luas sehingga dapat terintegrasi dalam konsep pengembangan wilayah yang lebih luas (kota Metropolitan Pontianak).

### **C. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota**

Isu terkait dengan perumahan dan permukiman adalah mengenai permasalahan kualitas lingkungan. Hal ini terkait dengan penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat yang memberikan dampak terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Di beberapa bagian Kota Pontianak khususnya permukiman pada tepian sungai Kapuas telah muncul kawasan-kawasan kumuh dengan sanitasi yang jauh dari ideal.

Disisi lain beberapa kawasan di bagian tengah kota juga mulai menampakkan penurunan fungsi akibat berbagai sebab, seperti dukungan utilitas yang buruk, degradasi lingkungan, citra kawasan sebagai dampak persoalan sosial yang muncul, dan lain sebagainya. Juga terjadi di beberapa bagian wilayah kota dimana perumahan yang dikembangkan dalam skala kecil tanpa mempertimbangkan keterhubungannya dengan kawasan permukiman sekitarnya sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti eksklusivitas, hambatan aksesibilitas kawasan serta gesekan sosial antar kawasan perumahan dengan permukiman yang berada di sekitarnya.

Untuk itu diperlukan konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan konsep kawasan yang jelas dengan memperhatikan kawasan secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur kota yang ideal. Juga diperlukan program perbaikan kawasan lingkungan permukiman dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali.

Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah sudah mulai harus dirintis pengembangan rumah secara vertikal baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat, mengingat keterbatasan dan nilai ekonomis lahan yang tinggi. Sedangkan pada kawasan kumuh perlu diupayakan

peningkatan kualitas huniannya serta penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang disesuaikan kebutuhan kawasan, bukan kebutuhan parsial/sebagian kawasan kecil belaka.

#### **D. Pengelolaan Air Bersih**

Air merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah bagi warganya. Semakin berkembangnya kota dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan primer tersebut semakin tinggi. Disisi lain pemerintah Kota Pontianak dihadapkan dengan situasi yang kadangkala sangat ekstrim seperti iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan terganggunya proses penyediaan air bersih. Intrusi air laut serta buruknya kualitas air baku bagi proses pengolahan air bersih menyebabkan tidak hanya kapasitas produksi tidak optimal tetapi juga mengakibatkan kualitas air bersih yang dihasilkan kurang baik, kontinuitas suplai air yang tidak terjaga serta peningkatan biaya pengolahan.

Isu strategis lain terkait dengan pengelolaan air bersih adalah tingkay pelayanan yang belum mencakup keseluruhan wilayah dan rumah tangga yang ada. Saat ini tingkat pelayanan air bersih mencapai 75% penduduk terlayani, artinya masih ada 25% lainnya yang masih belum dapat mengakses air bersih melalui jaringan yang dibangun. Target terdekat yang mutlak harus dipenuhi adalah Millenium Development Goals (MDGs) dimana di tahun 2015 harus mencapai tingkat pelayanan 80% penduduk. Untuk itu perlu upaya lebih meningkatkan kapasitas pelayanan sejalan dengan kebutuhan yang juga terus tumbuh, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang memiliki keterbatas akses layanan air bersih.

#### **E. Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan**

Kodisi sanitasi yang ada saat ini di Kota Pontianak cukup memprihatinkan terutama dalam hal pengelolaan air limbah domestik. Hal ini terjadi sebagai akibat belum adanya saluran pengumpul dan pengolah air limbah tersebut sehingga air limbah yang dihasilkan rumah tangga langsung dibuang ke saluran. Akibatnya hampir sebagian besar parit/saluran drainase yang ada terpolusi oleh limbah-limbah rumah tangga seperti bahan kimia sisa sabun cuci, sabun mandi, bahkan tercemar oleh air limbah kotoran.

Untuk itu isu strategis mengenai aspek sanitasi ini adalah bagaimana memobilisasi sumberdaya dan sumberdana yang ada untuk secara bersama-sama melakukan perubahan perilaku, membuat regulasi yang mengatur secara jelas arah pembangunan sanitasi Kota Pontianak serta merealisasikan instalasi pengolahan air limbah baik skala pribadi maupun komunal. Meskipun banyak sekali kendala yang dihadapi untuk melakukannya akan tetapi perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat penuntasan permasalahan sanitasi ini, mengingat semakin menurunnya kualitas lingkungan akibat tidak terkelolanya sektor sanitasi ini dengan baik.

### **4.2.5. Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**

#### **A. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi



geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini terlihat dari data prosentase jumlah penduduk miskin yang dirilis BPS di tahun 2010 tercatat 6,62% (36.600 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 242.772/kap/bulan), 2011 sebesar 6,15% (34.390 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 253.357/kap/bulan) dan di tahun 2012 tercatat sebanyak 5,77% (32.530 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 310.707/kap/bulan) penduduk Kota Pontianak masuk dalam kategori miskin. Secara administratif, Persentase rumah tangga miskin terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebesar 32,33 % atau 5.466 rumah tangga, diikuti oleh Kecamatan Pontianak Timur` sebesar 25,35 % atau 4.271, dan Kecamatan Pontianak Barat sebesar 22,18 % atau 3.737 rumah tangga.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

## **B. Penguatan Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, isu strategis yang harus diperhatikan adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.



### **C. Peningkatan Daya Saing Global**

Pontianak sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional Kalimantan Barat dan internasional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui promosi, penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Pontianak dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi ASEAN Free Trade Area (AFTA), AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asian Pacific Economic Cooperation (APEC).

### **D. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Sejalan dengan penambahan penduduk, isu strategis lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, mengingat berdasarkan data penduduk jumlah usia angkatan kerja di Kota Pontianak setiap tahunnya semakin meningkat sehingga tantangan penyediaan lapangan pekerjaan semakin besar.

Dilihat dari tren angka pengangguran, terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja sangat baik. Terbukti dengan angka pengangguran dalam 4 tahun terakhir terus menurun, bahkan di tahun 2012 menembus angka 5,35% jauh menurun dibandingkan tahun 2011 yang berada di angka 7,26. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dan kondisi perekonomian yang cukup stabil dan semakin membaik serta kinerja perkembangan dunia usaha yang mampu menyerap angkata kerja yang tersedia. Tantangan terbesar untuk mencegah naiknya kembali angka pengangguran adalah stabilitas perekonomian kota Pontianak yang notabene sangat terpengaruh oleh kondisi perekonomian nasional dan global, mengingat sektor utama yang menopang perekonomian kota ini adalah perdagangan, jasa dan konstruksi.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Millenium Development Goals (MDGs).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat relatif belum merata, hal ini terlihat dari ukuran PDRB per kapita penduduk di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Timur

lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Begitupula dari indikator angka kemiskinan di dua kecamatan tersebut merupakan angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi khusus diantaranya dengan membuka lebih banyak akses jalan di wilayah tersebut serta merancang program-program untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

#### **E. Pengembangan Pariwisata**

Kota Pontianak adalah kota yang berkembang karena lokasi strategis dan fungsi yang diembannya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Barat. Kota ini sangat sedikit dikaruniai kekayaan alam yang dapat dipergunakan untuk memacu perkembangannya. Efek positif dari hal tersebut adalah berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta konstruksi sebagai dynamo pertumbuhan ekonomi kota.

Disisi lain dengan beragam keunikan dan potensi lain yang dimilikinya, sangat memungkinkan untuk pengembangan pariwisata sebagai katalisator perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Untuk itu dalam perkembangannya, kedepan sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian dalam konsep pembangunan strategis kota Pontianak

#### **F. Pengembangan Perdagangan dan Jasa**

Sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa-jasa merupakan dua sektor teratas yang mendominasi struktur perekonomian kota Pontianak. Akumulasi kedua sektor tersebut menyumbang 44,04% terhadap PDBR Pontianak di tahun 2012. Kondisi ini perlu menjadi isu strategis karena kedepan untuk terus memacu dua sektor ini sebagai lokomotif perekonomian kota diperlukan berbagai terobosan baru agar dapat bersaing dalam kompetisi nasional, regional dan internasional.

Disisi lain yang juga perlu diantisipasi adalah kemungkinan kedua sektor ini menjadi jenuh karena kurangnya inovasi untuk terus dapat memacu pertumbuhannya. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan kebijakan-kebijakan dalam bentuk insentif dan disinsentif yang mampu merangsang perkembangannya. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan sector perdagangan dan jasa perlu terus diusahakan penyediannya.



### 4.3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Menemukenali, memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam merancang rencana strategis. Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi, memaksimalkan potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai pertumbuhan optimal.

Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi kedepan; internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

#### 4.3.1. Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan **peluang** dan **tantangan** yang dihadapi kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan kota. Tinjauan eksternal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi kota Pontianak baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis posisi (*positioning analysis*) berikut.

Dalam **lingkup regional**, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak berkedudukan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Pembangunan B (WP B) yang terdiri dari Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, merupakan pusat pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan utama pembangunan yang akan dikembangkan meliputi jasa pelayanan, perdagangan, pariwisata, dan agroindustri. Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berperan sebagai kota orde I, yang memiliki skala pelayanan regional dengan luas wilayah pelayanan mencakup sekitar 7.450 km<sup>2</sup>.

Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Kalimantan Barat, Kota Pontianak termasuk ke dalam pola kota Muara Kapuas dengan luas sekitar 18.300 km<sup>2</sup>. Pusat dari pola kota Muara Kapuas ini adalah Kota Pontianak. Dalam pola kota Muara Kapuas, kota-kota lainnya yang merupakan subpusat pelayanan terdiri dari Rasau Jaya, Mempawah, dan Ngabang. Kota Pontianak juga merupakan pusat dari kerangka kerjasama Pokusikarang (Pontianak, Kuala Mandor, Siantan, Sungai Kakap, Sungai Raya, dan Sungai Ambawang) dan KMP (Kawasan Metropolitan Pontianak).

Dalam **lingkup nasional** dan **internasional**, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, posisi Kota Pontianak diarahkan sebagai berikut:

1. Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan peran dan fungsi sebagai berikut :
  - Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya. Letak kota Pontianak yang dekat dengan Kuching dan Sabah (Malaysia), Bandar Seri Begawan (Brunai Darussalam), Singapura

- memberikan implikasi, aksesibilitas dan kinerja pelabuhan (sungai dan udara), terminal antarnegara, terminal antarprovinsi, maupun dengan wilayah hinterland-nya perlu ditingkat dalam kualitas yang memadai.
- Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
  - Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
  - Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.
  - Sebagai pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
  - Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
2. Sektor unggulan wilayah hinterland Kota Pontianak adalah tanaman pangan, perkebunan, industri, dan perikanan laut. Implikasi dari kondisi ini, dimana di lain pihak Kota Pontianak juga berperan sebagai pendorong daerah sekitarnya, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan ruang untuk memberikan jasa pelayanan untuk memwadahi kegiatan terkait dengan sektor unggulan di kawasan sekitarnya (berperan sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sektor unggulan maupun industri pengolahan tanaman pangan/perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).
  3. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dari Pontianak tersebut terdiri dari Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang. Untuk mewujudkan hal ini, maka mutlak diperlukan terjalannya integrasi yang saling menguntungkan antara Kota Pontianak dan kota tadi. Oleh karena itu, harus ada aksesibilitas yang tinggi yang menghubungkan Kota Pontianak dengan kota-kota tersebut.
  4. Kota Pontianak diarahkan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dalam sistem simpul transportasi laut Indonesia sedangkan bandara di Kabupaten Pontianak yang memiliki aksesibilitas tinggi ke kota Pontianak ditetapkan sebagai bandara udara kelas dua. Peran ini dikembangkan berkaitan dengan adanya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) sehingga diharapkan dapat bersaing dan menangkap peluang dalam perdagangan antar Negara khususnya ASEAN.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

#### A. Peluang

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik.

## **B. Tantangan**

1. Kondisi geografis wilayah kota Pontianak dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada muara sistem DAS Kapuas) memosisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu dan deforestasi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Kapuas yang semakin menurun sehingga intrusi air laut semakin jauh memberikan tantangan penyediaan air baku yang berkualitas dalam proses layanan air bersih.
2. Disparitas perkembangan wilayah yang masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
4. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.
5. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
6. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal
7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

### **4.3.2. Analisis Internal**

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan **kekuatan** dan **kelemahan** yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kota Pontianak sebagai berikut:

#### **A. Kekuatan**

1. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin.
2. Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa, kota tepian sungai, kota seribu parit merupakan modal untuk menjadi daya tarik pengembangan pariwisata



3. Status kota Pontianak sebagai ibukota propinsi serta lokasinya yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar orang dan barang memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.
4. Jumlah penduduk yang cukup besar dan kualitas sumber daya manusia Kota Pontianak yang lebih baik dibandingkan wilayah hinterland-nya merupakan sebuah potensi yang besar untuk menopang sekaligus aktor dalam pengembangan perekonomian dan fisik wilayah.
5. Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.
6. Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan.
7. Kewenangan yang dimiliki pemerintah kota semakin luas memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian.

#### **B. Kelemahan**

1. Kondisi geografis kota Pontianak yang berada di kawasan muara Sungai Kapuas dan topografi wilayah yang datar menyebabkannya sangat rentan terhadap bencana banjir, intrusi air laut serta angin puting beliung.
2. Keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan harga tanah yang tinggi berimplikasi biaya pembangunan yang juga semakin tinggi
3. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat
4. Sarana dan prasarana perkotaan belum ideal dan belum mampu menopang kebutuhan/perkembangan yang terjadi
5. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal
6. Sebagai pusat orientasi berbagai kegiatan, menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap



sistem transportasi kota diperparah tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kemacetan.

7. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
8. Masih ada potensi konflik dan kerawanan social antar suku, ras dan agama.
9. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.
10. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
11. Masih relative lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah.

#### **4.3.3. Analisis SWOT**

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan *SWOT analysis* dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam matrik berikut ini.





**Tabel IV-1**  
**Matrik SWOT Analysis**

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Globalisasi yang tidak mengenal batas memberikan peluang memainkan peran di kancan internasional.</li> <li>2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama internasional (ASEAN Free Trade Area).</li> <li>3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi.</li> <li>4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.</li> <li>5. Kebijakan nasional mengembangkan kota-kota Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.</li> <li>6. Dukungan wilayah hinterland dengan kekayaan SDA berlimpah menopang pertumbuhan kota</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRENGTHS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.</li> <li>2. Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa modal untuk daya tarik pariwisata</li> <li>3. Lokasinya yang strategis memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.</li> <li>4. Jumlah penduduk cukup besar dan kualitas SDM lebih baik dibandingkan wilayah hinterland-nya</li> <li>5. Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.</li> <li>6. Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan.</li> <li>7. Kewenangan semakin luas memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESSES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis sangat rentan terhadap bencana banjir, intrusi air laut serta angin puting beliung.</li> <li>2. Keterbatasan lahan menyebabkan harga tanah tinggi, biaya pembangunan semakin mahal.</li> <li>3. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat</li> <li>4. Sarana dan prasarana perkotaan belum ideal dan belum mampu menopang perkembangan yang terjadi</li> <li>5. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal</li> <li>6. Sebagai pusat orientasi berbagai kegiatan, menyebabkan menyebabkan kemacetan.</li> <li>7. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial.</li> <li>8. Masih ada potensi konflik dan kerawanan social antar suku, ras dan agama.</li> <li>9. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.</li> <li>10. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.</li> <li>11. Masih relative lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi potensi dan keunikan kota bersinergi dengan pengembangan teknologi informasi untuk menyambut pasar bebas AFTA.</li> <li>2. Memperkuat sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas internasional untuk mendukung fungsi pusat pertumbuhan koridor barat Kalimantan.</li> <li>3. Memobilisasi potensi partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya &amp; dana penunjang pembangunan.</li> <li>4. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi <i>good governance</i>.</li> <li>5. Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan</li> <li>6. Optimalisasi kerjasama antar wilayah</li> <li>7. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah</li> <li>8. Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota sektor tersier</li> <li>9. Mengembangkan teknologi informasi dalam kerangka e-government guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi teknologi serta masterplan pengendalian banjir dan bencana</li> <li>2. Optimalisasi lahan dengan pembangunan secara vertical</li> <li>3. Optimalisasi potensi pajak sert diversifikasi pajak daerah</li> <li>4. Pengembangan infrastuktur perkotaan dengan dukungan pendanaan propinsi dan pusat</li> <li>5. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan</li> <li>6. Evaluasi dan redesign kebijakan pengembangan transportasi kota</li> <li>7. penanganan masalah kesejahteraan social serta penggalan potensi sumber kesejahteraan sosial.</li> <li>8. Pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan penyebaran aktivitas perekonomian daerah serta ,enciptakan lapangan kerja</li> <li>9. Komitmen dan konsistensi implementasi rencana tata ruang</li> <li>10. peningkatan kedisiplinan melalui penegakan aturan</li> </ol>	

THREATS	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis dalam konstelasi yang lebih luas sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran dan deforestasi.</li> <li>2. Disparitas perkembangan wilayah masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.</li> <li>3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan tantangan bagi kelestarian LH</li> <li>4. Dominasi kawasan maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi pembangunan menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.</li> <li>5. Ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya.</li> <li>6. Sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal</li> <li>7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar wilayah dan dengan propinsi dalam kerangka pengelolaan DAS Kapuas.</li> <li>2. Merintis kerjasama internasional dengan kota-kota di Negara maju dalam kerangka pengembangan kapasitas dan <i>technical assistance</i> dan bantuan pembiayaan Negara donor sebagai alternative pembiayaan pembangunan</li> <li>3. Mematangkan kebijakan dan implementasi Kota Metropolitan Pontianak dalam rangka menciptakan struktur ruang wilayah yang ideal melalui forum kerjasama antar daerah yang terlibat.</li> <li>4. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta swasta dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan</li> <li>5. Peningkatan mitigasi lingkungan dalam rangka antisipasi perubahan iklim.</li> <li>6. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, perdagangan dan jasa yang berawawasan pelestarian lingkungan.</li> <li>7. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah timur dan utara untuk memacu perkembangan wilayah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review, evaluasi dan optimalisasi rencana tanggap darurat bencana dan kelembagaannya</li> <li>2. Stabilisasi harga pangan dan penguatan iklim usaha didukung pengelolaan persaingan usaha</li> <li>3. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>4. Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan</li> <li>5. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, pengarusutamaan gender dan optimalisasi perlindungan anak dan perempuan.</li> </ol>



## BAB V

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

**B**erdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 sendiri merupakan periode ketiga pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak untuk periode ketiga ini adalah penyediaan pendidikan berkualitas yang terjangkau dan pelaksanaan layanan kesehatan yang ideal untuk menunjang peningkatan IPM, peningkatan infrastruktur dan utilitas kota, menciptakan struktur tata ruang kota yang mendukung pemerataan pertumbuhan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga diarahkan untuk

pemantapan pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukum, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

## 5.1. VISI

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah (sebagaimana dijabarkan di atas), kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk lima tahun mendatang (2015-2019) adalah:

**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**

**Kota Khatulistiwa**, menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota propinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

**Berwawasan lingkungan** bermakna bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota.

**Terdepan dalam kualitas sumber daya manusia**, mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, religius, berkarakter, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Sehingga diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya.

**Prima dalam pelayanan publik**, mempunyai pengertian bahwa berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat. Dalam pengertian ini pelayanan publik yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, penyelenggaraan





layanan-layanan umum seperti perijinan, administrasi kependudukan serta fasilitas-fasilitas umum yang sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat.

**Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**, mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* yaitu: mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, penegakan disiplin dan ketaatan hukum yang setara pada tiap tataran kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mendorong transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan kemudahan akses informasi publik, menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat untuk membangun diri dan meraih kesejahteraan, meningkatkan daya respon para penyelenggaraan pemerintahan terhadap komplain dan kritikan masyarakat, membangun dengan orientasi ke depan secara berkelanjutan bukan dalam konsep yang sesaat dan parsial belaka, menjaga akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

## 5.2. MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.**
2. **Menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.**
3. **Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.**

4. **Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni;**
5. **Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing**

**Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis** merupakan perhatian Kota Pontianak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan karakter yang bermutu bagi masyarakatnya didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi pengetahuan agama, keluhuran nilai-nilai budaya bangsa serta keharmonisan hubungan antar masyarakatnya. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Misi menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik** tidak lain adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan mendorong partisipasi setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik, secara langsung maupun tidak langsung. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui transparansi dengan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Memberi peluang yang sama (kesetaraan) bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatkan kepekaan (daya tanggap) para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Membangun daerah berdasarkan orientasi kedepan yang jelas dalam mengikutsertakan warga didalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

**Misi meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah** ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana dasar perkotaan seperti prasarana jalan dan jembatan (untuk mengatasi kemacetan, dan pemerataan pertumbuhan serta perkembangan antar wilayah), prasarana drainase (untuk mengatasi/meminimalisir dampak dari banjir/genangan), prasarana air bersih untuk seluruh warga kota dalam rangka menyukseskan Millenium Development Goals, mengentaskan kawasan kumuh, menyediakan fasilitas umum dan utilitas perkotaan yang ideal, peningkatan sanitasi

kota, peningkatan kualitas jalan lingkungan, peningkatan kinerja transportasi dan perhubungan serta untuk meningkatkan prasarana perdagangan/pasar yang ada dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak.

**Misi mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni** ditujukan untuk mewujudkan pembangunan fisik kota Pontianak yang tertata baik, rapi, Indah, bersih dan . Hal itu dilandasi dengan konsep pembangunan keberlanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup dan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat yang tinggal dan berusaha di dalamnya mendapatkan rasa nyaman, aman, dan memiliki tempat tinggal yang layak huni dengan didukung fasilitas perkotaan yang ideal.

**Misi menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing** digagas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan lebih merata antar wilayah kota, meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, memberikan pelayanan perijinan usaha yang jelas, terukur dan cepat, memberikan insentif bagi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah serta membuka akses pemasaran produk-produk unggulan dan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata





### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

**Tabel V-1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Setiap Misi**

**Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.**

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
1 Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat	Prosentase jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan / dibina	%
		Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan (orang)	Orang
		Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi (orang)	Orang
		jumlah pembinaan pengurus lembaga keagamaan	Orang
		Prosentase jumlah jamaah haji Kota Pontianak yang difasilitasi	Orang
		Persentase jumlah jamaah haji Kota Pontianak yang difasilitasi	%
		Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina	Kelompok
		Jumlah penanganan konflik sosial	Kali
		Jumlah Sosialisasi/pertemuan/Penyuluhan wawasan kebangsaan untuk menunjang keharmonisan	Kali
2 Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Cakupan kajian seni	%
		Cakupan Gelaran seni	%
		Cakupan Fasilitas Seni	%
		Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian pagelaran seni dan budaya daerah	%
		prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik)	%
		Cakupan kajian seni	buah
3 Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Prosentase penanganan kasus KDRT perempuan dan anak	%
		Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender	tingkat
		Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG	%
		Terwujudnya Pontianak sebagai Kota Layak Anak	level
	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Prosentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70%	%
		Prosentase cakupan unmet need	%
		Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5%	%
		Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87%	%
4 Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan	Prosentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat propinsi/nasional	%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	Prosentase meningkatnya jumlah atlet berprestasi di tingkat propinsi dan nasional	%
		Prosentase meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	%
		Prosentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara	%
5 Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Melek Huruf	%
		Rata-rata lama sekolah	Tahun
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Angka
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs	Angka
		Rasio murid terhadap sekolah SD/MI	Angka
		Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs	Angka
		Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI	Angka
		Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs	Angka
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI	Angka
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs	Angka
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs	%
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI	%
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs	%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	Angka
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Angka
		Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs	Angka
		Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/SMK/MA	Angka
		Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja	%
		Prosentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi	%
		Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK	Angka
Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	Angka		
Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	Angka		

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)	%
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK	%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	Angka
		Angka Putus Sekolah SLTP/MTs	Angka
		Angka Putus Sekolah SLTA/SMK/MA	Angka
		Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor	Angka
		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha	%
		Prosentase Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%
		Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka
		Angka kelulusan SD/MI	Angka
		Angka kelulusan SLTP/MTs	Angka
		Angka kelulusan SMA/SMK/MA	Angka
		Nilai rata - rata ujian SD/MI	Angka
		Nilai rata - rata ujian SMP/MTs	Angka
		Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA	Angka
		Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	%
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) SD/MI	Angka
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) SLTP/MTs	Angka
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMA	Angka
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMK	Angka
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) MA	Angka
		Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal dan bimtek PNS	Orang
		Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS	%
		Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi	%
		Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru	%
	Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	Prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%
		Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)		
		Indikator	Satuan	
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD	%	
		Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)	%	
		Prosentase jumlah sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik	%	
	Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	Jumlah buku Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	buku	
		Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat yang menerima bantuan (jumlah unit taman bacaan masyarakat/ TBM)	unit	
		Jumlah kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	%	
		Jumlah ketersediaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center)	Unit	
	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	
		Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kearsipan	%	
		Jumlah arsip yang diinput dalam komputer	Arsip	
	6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Prosentase indeks kepuasan pasien	%
			Angka pasien pulang paksa	%
			Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat	%
			Bed Occupation Rate (BOR)	%
			Bed Tur Over (BTO)	hari/kali
Turn Over Interval (TOI)			hari	
Length Of Stay (LOS)			hari	
Gross Death Rate (GDR)			%	
Net Death Rate (NDR)			%	
Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium			%	
Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu SPM			%	
Tersedianya Sistem informasi RS berkualitas			%	
Terpenuhinya nilai baku mutu kesehatan lingkungan sekitar RS			%	
Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit			%	
Prosentase Cakupan pemenuhan alat kesehatan rumah sakit			%	
Jumlah dokter spesialis			Orang	
Prosentase perawat bersertifikat BTLS			%	
Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS			%	

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Bumil K4	%
		Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas	%
		Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil	%
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%
		Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	%
		Cakupan Pelayanan Nifas	%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	%
		Cakupan kunjungan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%
		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap	%
		Cakupan Kunjungan Bayi	%
		Cakupan Kepesertaan KB Aktif	%
		Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran	Angka
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka
		Cakupan pelayanan anak balita	%
		Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani	%
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka
		Prevalensi Balita dengan Berat Badan rendah/kekurangan gizi	%
		Persentase Balita Stunting	%
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%
		Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S)	%
		Persentase Balita yang naik berat badannya (N/D)	%
		Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita	%
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	%
		Rumah Tangga dengan Garam Beryodium Baik	%
		Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif	%
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	%
		Penemuan penderita diare	%
		Angka Kesakitan Diare per 1000 penduduk	Angka
		Penderita DBD yang Ditangani	%
Angka Bebas Jentik	Angka		
Prosentase Penderita malaria yang diobati sesuai standar	%		

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Prosentase Penderita kusta yang selesai berobat (RFT Rate)	%
		Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	%
		Penderita HIV/AIDS yang mendapat penanganan	%
		Prosentase Infeksi Menular Seksual Diobati	%
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun.	
		Prosentase Penyelidikan epidemiologi (PE)	%
		Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%
		Prosentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%
		Prosentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM	%
		Prosentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara	%
		Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM	%
		7 Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat
Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak	%		
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat	%		
Persentase Tempat Umum memenuhi syarat	%		
8 Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Persentase Rumah tangga sehat ber-PHBS	%
		Persentase Sekolah ber-PHBS	%
		Persentase Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	%
		Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS	%
		Persentase Tempat Kerja ber-PHBS	%
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	
		Prosentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%
		Rasio Posyandu per Satuan Balita	Angka
		Prosentase Pengobatan Tradisional Memenuhi Syarat STPT dan SIPT	%
		Prosentase Ranting SBH Aktif	%
		Prosentase Pesantren dengan Poskestren Aktif	%
Prosentase POS UKK Aktif	%		
9 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Prosentase Puskesmas Berakreditasi	%
		Persentase Puskesmas ISO	%
		Kepatuhan Petugas terhadap SOP	%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat	%

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%
		Persentase Rawat Jalan	%
		Persentase Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	%
		Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat	%
		Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa termasuk NAPZA	%
		Persentase RSJ yang memberikan layanan subspecialis utama dan NAPZA	%
		Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer	%
		Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga	%
		Persentase minimal memiliki Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	%
		Persentase Fasilitas kesehatan pemerintah (RS, Lab, Instalasi Farmasi, dan Dinas Kesehatan) yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	%
		Rasio Cabut Tambal	Angka
		Cakupan Puskesmas dan Jaringannya berkondisi Baik	%
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%
		Persentase Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan	%
		Persentase Industri Rumah Tangga Memenuhi Syarat	%
		Persentase instalasi farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	%
		Persentase Puskesmas perwatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%
		Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah	%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%
Jumlah Posyandu yang difasilitasi	unit		
10 Memastikan terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta ( <i>Universal Coverage</i> )	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar	%



Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
11 Menurunkan permasalahan sosial masyarakat	menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%
		Prosentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%
		Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%
		Prosentase panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%
		Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%
		Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%
		Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%
		Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial	%
		Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin	Kali
		Jumlah laporan Monev pelaksanaan program raskin	Laporan

**Misi 2 : Menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.**

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan	Orang
		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Orang
		Tingkat pemenuhan database kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG	orang/dokumen
		Tingkat pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara	%
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian (perubahan status cpns menjadi pns, SK penempatan dan SK pensiun tepat waktu)	%
		Tingkat Pemenuhan formasi jabatan	%
		Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian	Kasus

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Jumlah pegawai yang mendapat bantuan dan penghargaan/reward	orang
	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak	Nilai
		Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tepat waktu	%
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan
		Penyampaian LAKIP dan TAPKIN tepat waktu	Dokumen tepat waktu
		Prosentase SKPD yang melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	%
		Prosentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota bagi SKPD dengan tupoksi bersifat generik	%
		Prosentase SKPD yang telah menyusun SOP	%
		Prosentase rata-rata indeks kepuasan Masyarakat (IKM) unit Pelayanan Publik dalam Kategori "Baik"	%
		Prosentase SKPD yang telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan dokumen reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pontianak	%
		Prosentase perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008	%
		Prosentase SKPD yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku	%
		Prosentase jumlah SKPD yang telah memenuhi analisis jabatan dan analisis beban kerja	%
		Tersedianya pedoman evaluasi jabatan pemerintah Kota Pontianak	Tersedia
		prosentase proses pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan transparan	%
		Prosentase SKPD yang telah menyusun SK Budaya Kerja	%
		Prosentase SKPD yang telah memiliki Perwa SPM	%
		Prosentase SKPD yang mencapai target SPM	%
		Terlaksananya pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kegiatan
		jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga	Kali
		Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara-upacara dan seremonial	Kali
	Prosentase data rupa bumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	%	

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)		
		Indikator	Satuan	
		Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin	kegiatan sosialisasi	
		Jumlah laporan Monev pelaksanaan program raskin	dokumen	
		Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan	%	
		Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan	%	
		Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	BUMD	
		Prosentase kontribusi BUMD terhadap PAD	%	
	Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	jumlah berita yang dirilis	Berita	
		Jumlah iklan dan baliho/spanduk/banner	Buah	
		jumlah tayangan informasi pemerintah kota Pontianak pada televisi	Kali	
		jumlah kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik (publikasi)	publikasi	
		Jumlah jumpa pers dengan media massa	Kali	
		Jumlah edisi penerbitan majlh warta kota	edisi	
		Jumlah penyampaian informasi melalui mobil keliling	Kali	
		Jumlah informasi digital tentang kegiatan pemerintah (keping)	keping	
		Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.	%	
		Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.	%	
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nas, melalui :		
		Media Massa	Kli/th	
		Media Website (Media Online).		
		Media Tradisional.	Kli/th	
		Media Interpersonal.	buah	
		Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho).	buah	
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan.	%	
		Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	%	
		Prosentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti	%	
		Jumlah Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah	Kali	
		Jumlah rapat Forkorpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)	Kali	
		Jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti	Kerjasama	
		Tersedianya produk-produk hukum daerah yang mampu mendukung perkembangan dan dinamika yang berkembang	Prosentase peraturan daerah yang diajukan ke legislatif sesuai dengan Program Legislasi daerah	%
			Prosentase Peraturan Walikota yang diundangkan	%
			Prosentase Surat Keputusan Walikota yang diundangkan	%
			Prosentase Peraturan Daerah yang disesuaikan hasil klarifikasi	%

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)		
		Indikator	Satuan	
		Prosentase penyediaan e-dokumen hukum dipublikasikan	%	
		Prosentase Perda yang diimplementasikan	%	
		Prosentase perwa yang diimplementasikan	%	
		Prosentase Kajian Perda	%	
		Prosentase Kajian Perwa	%	
		Prosentase Kajian MOU/Perjanjian	%	
		Tersedianya forum diskusi Hukum	Tesedia	
		Tersedianya Panitia RANHAM	Tesedia	
		Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali)	Kali	
		Prosentase penyelesaian perkara perdata dan TUN	%	
		Prosentase penetapan kelurahan sadar hukum	%	
	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD	Prosentase Agenda kedewanan sesuai hasil rapat banmus	%	
		Prosentase realisasi rencana legislasi Perda	%	
		Jumlah raperda inisiatif DPRD yang disahkan	Perda	
		jumlah peningkatan wawasan anggota DPRD	Kali	
	Menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	
		Prosentase terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu	%	
		prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	
		Prosentase kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	
		Prosentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina	%	
		Prosentase jumlah dokumen peningkatan kinerja kelembagaan	%	
	Menjadikan database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	
		Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	
		Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	
		Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	%	
		Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran	%	
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	%	
		Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak	jiwa	
	2 Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif	Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang sesuai ketentuan	Dokumen
			Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Menengah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perda RPJMD 2015-2019
			Tersedianya dokumen Pembangunan Tahunan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perwa RRPD
Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)			Dokumen Nota Kesepakatan	
Prosentase dokumen hasil perencanaan Bappeda (bidang fispra, sosial budaya dan ekonomi) yang ditindaklanjuti oleh SKPD			%	

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Prosentase penjabaran program RPJMD kedalam RKP	%
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi	Dokumen
		Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	kegiatan
		Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	%
		Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	%
		Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)	%
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen
		Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya	Kegiatan
		Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	%
		Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	%
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana	Dokumen
		Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana	Kegiatan
		Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	%
		Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	%
		Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)	%
		Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan	Kegiatan
		Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasa digunakan untuk merumuskan kebijakan	Dokumen
		Tersedianya data dan informasi hasil-hasil pembangunan	Dokumen
		Terlaksananya penggunaan Teknologi Sistem Informasi berbasis Internet dalam penyebarluasan hasil-hasil pembangunan	%

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	%
		Tersedianya buku Pontianak Dalam Angka	Dokumen
		Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD (setiap lima tahun)	Dokumen
		Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJMD	Dokumen
		Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RKPd	Dokumen
		Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD	Dokumen
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen
3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Prosentase Kinerja SKPD Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masuk kategori "Baik"	%
		Prosentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti (LHP)	%
		Persentase Jumlah Temuan Inspektorat Kota Yang Selesai Ditindak Lanjuti	%
		Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
		Auditor memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan	%
4 Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan berdaya guna optima	Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	%
		Tingkat ketepatan waktu penerbitan SPD	%
	Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan tepat waktu	Prosentase realisasi penerbitan SP2D	%
		Prosentase penyelesaian advis SP2D (pengeluaran)	%
		Prosentase otorisasi penyelesaian Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan	%
	Terwujudnya penyampaian SPJ dan laporan keuangan tepat waktu	Prosentase SKPD menyampaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	%
		Penyusunan Laporan keuangan pemerintah kota tepat waktu sesuai SAP	%
		Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	%
	Terwujudnya validasi sistem pengelolaan aset daerah	Prosentase barang milik daerah yang terinventarisasi dalam SIMBADA dan SIMA	%
		Prosentase realisasi penghapusan aset milik Pemerintah Kota Pontianak	%
5 Meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah	Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Prosentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	%
		Prosentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	%
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Prosentase wajib pajak yang terdaftar melakukan pembayaran pajak	%

**Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.**

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)		
		Indikator	Satuan	
1 Menciptakan sistem kesiagaan tanggap bencana yang baik	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	presentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM	%	
		presentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran	%	
		Presentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran	%	
	Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	presentase korban bencana yang mendapatkan bantuan/ pertolongan	%	
		presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	%	
	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	presentase pemadam kebakaran swasta yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana	%	
		presentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	%	
	Melakukan pencegahan dini dan menanggulangi korban dari bencana alam	presentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan Tim Reaksi Cepat	%	
		presentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih	%	
		presentase pemahaman masyarakat dan pelajar dalam menghadapi bencana	%	
	Meningkatkan sarana dan prasarana kebakaran	presentase peningkatan ketersediaan peralatan pemadam	%	
		presentase peningkatan usia pakai peralatan pemadam	%	
	2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Presentase penambahan jalan kota dalam kondisi baik	%
			Presentase terbangunnya jalan inner ring road	%
Presentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan			%	
Presentase trotoar dengan kondisi yang baik			%	
Presentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik			%	
presentase/Rasio Jalan dengan kondisi baik			%	
presentase jembatan dengan kondisi baik			%	
Presentase Terbangunnya sistem infomasi/database jalan dan jembatan			%	
Presentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak			%	



Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)				
		Indikator	Satuan			
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase	Prosentase Panjang saluran drainase dan gorong- gorong dengan kondisi baik	%			
		panjang saluran drainase dan gorong-gorong kota dengan kondisi baik (m)	%			
		Prsentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat	%			
		presentase turap/talud/bronjong dengan konstruksi yang baik	%			
		Prosentase panjang saluran drainase dan gorong-gorong dengan kondisi baik	%			
		Panjang Saluran drainase kota dengan konstruksi yang baik (m)	%			
		Panjang saluran drainase yang dipelihara	%			
		Prosentase Peningkatan Aliran Air	%			
		Lama genangan (jam)	jam			
		Luas genangan	Ha			
		Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database sumber daya air	%			
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat-alat berat penunjang kegiatan	Prosentase alat berat yang kondisinya baik	%			
		Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektifitas antar wilayah				
			Persentase tingkat keberfungsian APILL dan rambu lalu lintas jalan	%		
			persentase terpeliharanya terminal dan halte dengan baik	%		
			Persentase Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%		
			Persentase Peningkatan Potensi Parkir	%		
			Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) (%)	%		
			Persentase peningkatan pelayanan angkutan darat	%		
			Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa	%		
			Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	%		
			Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	%		
			Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	%		
			Persentase Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	%		
			3 Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase PJU dalam kondisi baik	%
					Prosentase PJU ber meter	%
				Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Luas area penyapuan	m2
presentase sampah yang terangkut ke TPA	%					
presentase sampah yang tidak terangkut ke TPA	%					

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)		
		Indikator	Satuan	
		presentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT	%	
		presentase lahan TPA yang dikelola dengan sistem sanitary landfill	%	
		presentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	%	
		presentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik	%	
		presentase Peningkatan Realisasi Perimanan Retribusi Pelayanan Persampahan	%	
		presentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum	%/tahun	
		presentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)	%	
		presentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina	%/tahun	
		Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	presentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	%
			presentase luasan RTH kawasan perkotaan yang dikelola/dipelihara	%
	presentase luasan RTH yang dikelola oleh pihak ketiga		%	



**Misi 4 : Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni;**

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%
		Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	%
	Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup	%
		Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	%
		Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau	%
		Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%
2 Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Berkurangnya Luas Kawasan kumuh Perkotaan	Ha
		Berkurangnya Jumlah Rumah Tak Layak Huni	Unit
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%
		Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung sarana dan utilitas umum (PSU) (%)	%
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi	%
		Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak	%
	Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik	Prosentase gedung pemerintahan berkondisi baik sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan Cipta Karya	%
		Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kota	dokumen
		Jumlah Ketersediaan Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang	Peraturan

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Persentase Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota yang sesuai dengan peraturan perencanaan Tata Ruang	%
		Persentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti	%

**Misi 5 : Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing**

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
1 Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan	Prosentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan	%
		Prosentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional	%
		Prosentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak	%
		Prosentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpaduy (SIMYANDU) perizinan teknis daeah	%
		Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	%
		Prosentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	%
		Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	%
2 Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif	Terciptanya kemanan, ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	%
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	%
	Terciptanya kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Jumlah kegiatan pendidikan politik	kali
		Prosentase keterwakilan perempuan di parlemen	%
		jumlah kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik	kelompok sasaran

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
3 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Buah
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	hari
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Orang/tahun
		Jumlah usaha pariwisata yang dibina	Unit
		Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik)	%
	Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor	Prosentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%
		Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	%
		Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat	%
		Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%
		Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%
		Prosentase Besaran pemeriksaan alat di perusahaan	%
		Prosentase besaran pengujian peralatan di perusahaan	%
		Prosentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan	%
		Prosentase calon tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas pelatihan	%
		Prosentase kelengkapan peralatan uji	%
	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Prosentase UMKM yang dibina	%
		Prosentase koperasi aktif	%
		Prosentase peningkatan omzet KUMKM	%
		Prosentase akses pembiayaan KUMKM	%
		Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya	Unit
		Jumlah koperasi	Unit
		Jumlah UMKM	Unit
	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API	Orang
		Jumlah gudang yang diawasi	Unit
		Barang beredar yang diawasi	Jnis
		Alat UTTP yang ditera/tera ulang	buah
		Jumlah pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan	Orang
		Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat	%

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Jumlah PKL yang mendapat fasilitas Pemkot	PKL
		Jumlah IKM yang dibina	Unit
		Prosentase pemberian rekomendasi TDI/UII	%
		Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi	Unit
		Rasio IKM yang difasilitasi HaKI	Unit
		Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal	Unit
		Rasio IKM yang difasilitasi PIRT	Unit
		Jumlah pengujian produk makanan dan minuman	Sampel
	Meningkatnya produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanan	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)	
		a. Sawi	%
		b. Bayam	%
		c. Kangkung	%
		Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)	
		a. Sawi	%
		b. Bayam	%
		c. Kangkung	%
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)	
		a. Pepaya	%
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)	
		a. Pepaya	%
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)	
		a. Lidah Buaya	%
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)	
		a. Lidah Buaya	%
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)	
		a. Anggrek	%
		Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :	
		a. Padi	%
		b. Jagung	%
		c. Ubi Kayu	%
		d. Ubi Jalar	%
		e. Keladi	%
		Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :	
a. Padi	%		
b. Jagung	%		
c. Ubi Kayu	%		
d. Ubi Jalar	%		
e. Keladi	%		
Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)			
a. Sawi	%		
b. Bayam	%		
c. Kangkung	%		

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)	
		a. Sawi	%
		b. Bayam	%
		c. Kangkung	%
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)	
		a. Pepaya	%
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)	
		a. Pepaya	%
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)	
		a. Lidah Buaya	%
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)	
		a. Lidah Buaya	%
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)	
		a. Anggrek	%
		Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif	%
		Presentase peningkatan jumlah ketersediaan pangan asal hewan :	
		a. Daging Sapi	kg
		b. Daging Ayam	kg
		c. Daging Kambing	kg
		d. Daging Babi	kg
		Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	kali
		Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK	kelompok
		Prosentase penurunan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular strategis	%
		Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)	kelompok
		Jangka waktu pelayanan UPTD Agribisnis	
		Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi	
		Persentase Penurunan luasan lahan kritis	%
		Jumlah dokumen pengawasan tertib peredaran hasil hutan	%
		Prosentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%
		Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan	kelompok
		Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya :	
		a. Ikan Lele	%
		b. Ikan Mas	%
		c. Ikan Nila	%
		d. Ikan Lainnya	%



Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		Persentase Peningkatan Jumlah produksi benih komoditas perikanan air tawar	
		a. Ikan Lele	%
		b. Ikan Mas	%
		c. Ikan Nila	%
		Jumlah pengawasan tertib administrasi pelaku usaha kelautan dan perikanan (kali)	kali
		Persentase Peningkatan Jumlah kapal yang sandar/bongkar/muat di UPTD PPI	%
4 Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan	Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita	%
		Prosentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%
		Prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	%
		Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%
		Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan	%
		Jumlah penguatan cadangan pangan	ton
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%
5 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Prosentase peningkatan kelembagaan petani	%
		Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi	%





## BAB VI

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025. Tahapan dan strategi Tahun 2015-2019 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJM 2010-2014. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan dalam skema RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025 maka tahapan dan strategi Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari scenario tahapan jangka menengah III dari RPJP tersebut.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut haruslah sejalan dan konsisten. Sehingga setiap pencapaian dalam tahapan pembangunan jangka menengah adalah sebenarnya merupakan sebuah proses langkah untuk menggapai tujuan jangka panjang. Untuk itu agar terjalin strategi dan arah kebijakan yang seirama antara jangka menengah dan jangka panjang maka terlebih dahulu akan digambarkan arahan kebijakan jangka menengah yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk kemudian disarikan menjadi strategi dan arah kebijakan lima tahun mendatang.

### **6.1. ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025, tahapan rencana jangka menengah 2015-2019 merupakan periode lima tahunan ketiga dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang mana ditujukan untuk mewujudkan :

1. Pendidikan yang berkualitas yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan didukung biaya pendidikan yang bersumber dari APBD yang makin meningkat dan swasta yang makin berperan aktif positif, terus mengupayakan wajib belajar 12 tahun, peningkatan IPM, terus menurunkan angka buta aksara, melanjutkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, kelayakan mengajar, sertifikasi guru, terus mengupayakan pendidikan gratis bagi anak kurang mampu secara bertahap, didukung oleh pola hidup sehat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan anggaran kesehatan yang makin meningkat, sekaligus dibarengi dengan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam yang makin optimal dan penambahan dokter spesialis yang mencukupi kebutuhan.
2. Gerakan keteladanan para pemimpin terus berkembang, budaya patuh pada hukum makin kuat, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa terus diperkuat, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing, penumbuhan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan dan adanya antisipasi pengaruh negatif budaya global.
3. Pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung terus meningkat dan mencakup berbagai bidang kehidupan, gerakan KB makin kuat dan pemerataan persebaran penduduk antar kecamatan makin terwujud, masalah sosial makin terkendali dan angka kemiskinan terus menurun, termasuk korban NAPZA dan HIV/AIDS.
4. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing baik di pasar regional maupun di pasar internasional.
5. Terwujudnya koperasi dan usaha kecil menjadi pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan mandiri. Kondisi ini dicapai dengan mewujudnya keharmonisan dan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan usaha besar.
6. Pembangunan jangka menengah ketiga ini untuk peningkatan jalan sesuai standard, fungsi dan lebar, kualitas, sarana penunjang adanya jalur hijau, trotoir dan sarana penyandang cacat.
7. Disamping focus pada kualitas jalan juga secara bertahap bergeser ke arah peningkatan kualitas lingkungan yang menjadi visi kota.
8. Masyarakat mandiri/madani/*civil society* maka dalam penyediaan air bersih juga ditingkatkan peran swasta mengelola air bersih agar tercapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi dan daya saing .
9. Transportasi umum dan pribadi yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien .
10. Perencanaan tata ruang dan wilayah diarahkan agar lebih merata dalam pengembangan dan pertumbuhan serta mengurangi kesenjangan.

11. Pemanfaatan ruang yang optimal dan berkeadilan bagi kelompok masyarakat lapis menengah kebawah dalam wujud ruang untuk terbuka umum yang dimungkinkan untuk sector in formal. Serta didukung pengendalian tata ruang sesuai daya dukung lingkungan dan upaya untuk mendukung tercapainya kota perdagangan dan jasa .
12. Tahap ketiga RPJM ini diarahkan pada pematapan pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukum. Keamanan dan ketertiban ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran pemerintah ditahap ini sudah mulai bergeser ke peran regulator, fasilitator dan stimulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik yang bisa diperankan oleh swasta agar didorong untuk terus dikembangkan.

## 6.2. SKENARIO, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019

Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJP Kota Pontianak sebagaimana tersebut di atas, maka disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya akan jabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD). Skenario ini akan harus digunakan sebagai acuan dalam merancang focus dari berbagai program dan kegiatan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang di dalam RPJM ini.

Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing misi serta kebutuhan pendanaan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Adapun skenario tahunan dari RPJM Kota Pontianak 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

RKPD Tahun I 2015	RKPD Tahun II 2016	RKPD Tahun III 2017	RKPD Tahun IV 2018	RKPD Tahun V 2019
<b>Skenario:</b> Menyiapkan/meletakkan pondasi dasar pembangunan yang kokoh	<b>Skenario:</b> Membangun di atas fondasi dasar kokoh yang telah diletakkan	<b>Skenario:</b> Mendayagunakan dan memperkuat yang telah dibangun	<b>Skenario:</b> Memperkuat dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi	<b>Skenario:</b> Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi
<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meletakkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing,</li> <li>• Mereduksi</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun dan memantapkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing;</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendayagunakan dan menguatkan SDM berkualitas dan berdaya</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendayagunakan dan memantapkan SDM berkualitas dan berdaya</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendayagunakan dan mengoptimalkan SDM berkualitas dan berdaya saing,</li> </ul>



RKPD Tahun I 2015	RKPD Tahun II 2016	RKPD Tahun III 2017	RKPD Tahun IV 2018	RKPD Tahun V 2019
kemiskinan, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan kekumuhan</li> <li>• Meningkatkan infrastruktur kota (khususnya drainase, dan pembangunan <i>inner ringroad</i>),</li> <li>• Merintis sistem sanitasi perkotaan</li> <li>• Memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sector perdagangan, jasa dan pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereduksi kemiskinan,</li> <li>• Mereduksi pengangguran</li> <li>• Mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat;</li> <li>• Menurunkan kekumuhan</li> <li>• Pemerataan infrastruktur perkotaan,</li> <li>• Meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan <i>inner ringroad</i>) dan membangun jalan-jalan baru;</li> <li>• Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan,</li> <li>• Merintis sistem transportasi publik</li> </ul>	saing <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereduksi kemiskinan,</li> <li>• Mereduksi pengangguran</li> <li>• Pemerataan pembangunan fisik dan perekonomian</li> <li>• Memantapkan, infrastruktur perkotaan</li> <li>• Meningkatkan kualitas kenyamanan kota</li> <li>• Menurunkan kekumuhan dengan pendekatan pembangunan lingkungan permukiman</li> <li>• Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> <li>• Memajukan sistem transportasi publik</li> <li>• Meningkatkan akses keterhubungan antar wilayah utara dan selatan</li> </ul>	saing <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan berkualitas terjamin untuk seluruh warga</li> <li>• Pendidikan berkualitas bagi seluruh warga</li> <li>• Kemiskinan berkurang</li> <li>• Penyerapan nagkatan kerja tinggi</li> <li>• Akselerasi pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pemerataan kualitas infrastruktur perkotaan</li> <li>• Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> <li>• Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah</li> <li>• Memajukan sistem transportasi</li> <li>• Memperindah kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan berkurang dengan signifikan</li> <li>• Penyerapan nagkatan kerja tinggi</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi mantap</li> <li>• Pemerataan kualitas dan kuantittas infrastruktur perkotaan</li> <li>• Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> <li>• Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah</li> <li>• Memajukan sistem transportasi</li> <li>• Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota</li> </ul>

**Gambar VI-1**

**Skenario dan Fokus Pembangunan Pembangunan Tahunan Kota Pontianak Periode 2015-2019**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pentahapan pembangunan sebagaimana tertuang di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi tersebut sebagaimana dijabarkan dalam tabel-tabel berikut ini.

**Tabel VI-1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019**

<b>VISI:</b>			
<b>“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”</b>			
<b>MISI 1 :</b>			
<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1 Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama serta keharmonisan masyarakat	Memfasilitasi, melakukan pembinaan, mejalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas
2 Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Menijalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI
			Mengembangkan event dan promosi kebudayaan dan sarana prasarana kesenian untuk mendorong seni budaya dan ekonomi kreatif
		Melestarikan, megembangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan
		Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai khasanah seni budaya Kota Pontianak	Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian tempat, benda dan bangunan cagar budaya
3 Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender
	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera	Membentuk keluarga berkualitas melalui keluarga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4 Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan	Meningkatkan pemberdayaan potensi kepemudaan	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	Meningkatkan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
5 Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SMK/MA	Peningkatan akreditasi sekolah dan Penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System)
			Pelaksanaan Pemetaan Sekolah
		Mengurangi angka anak-anak keluarga miskin yang putus sekolah SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA	Meningkatkan motivasi dalam pembelajaran bagi siswa di sekolah
			Penyelenggaraan penyetaraan bagi masyarakat pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA dan Pemberian bantuan Operasional bagi sekolah pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA
		Penataan penempatan guru dan peningkatan manajemen pendidikan	
	Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	Meningkat mutu tenaga pendidik	Melaksanakan kegiatan penyetaraan pendidikan
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	Meningkatkan mutu pendidikan PAUDNI	Optimalisasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan PAUDNI
		Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus
Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan,	Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien	
		Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan	
		Pemasyarakatan iptek melalui media belajar sambil bermain	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip	
6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit	Pelayanan rumah sakit yang berfokus kepada kepuasan pelanggan	
		Meningkatkan kesedaran hidup bersih dan sehat	kampanye hidup bersih dan sehat bagi masyarakat	
		Meningkatkan efisiensi/ mutu layanan rumah sakit	Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar	
		Pemenuhan standar pelayanan rumah sakit	Peningkatan mutu dan manajemen rumah sakit	
		Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit	Mengadakan sarana dan prasarana memenuhi satandar yang ditentukan	
		Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terutama dokter spesialis dan paramedis	
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi	Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan bayi	
		Meningkatkan kesehatan balita dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
		Peningkatan gizi masyarakat	Penanganan dan pencegahan gizi buruk	
		Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	
	7 Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat	Pengembangan lingkungan yang sehat dan perilaku sehat
	8 Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Memperluas pembinaan, kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Memperluas cakupan promosi, penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat
9 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan	
		Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
10 Memastikan terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta ( <i>Universal Coverage</i> )	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan
11 Menurunkan permasalahan sosial masyarakat	menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatkan upaya pemberdayaan PMKS dan masyarakat dalam kepedulian sosial	Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
			Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	
		Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beras miskin	Peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penerima program raskin

#### Misi 2 :

**Menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur	Peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi	Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS
			Menciptakan sistem tata kelola dan informasi kepegawain yang andal
	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perbaikan dan efisiensi tata laksana, proses kerja, kelembagaan organisasi, administrasi serta pengukuran kinerja kelembagaan	Optimalisasi Sistem Pengukuran kinerja kelembagaan
			Peningkatan efektifitas dan efiseinsi Tata laksana dan proses kerja
		Peningkatan fungsi dan kapasitas kelembagaan	
			Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	
			Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM	
			Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratif kota	
			Menaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	
	Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah
			Meningkatnya publikasi informasi publik melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	Memalsimalkan media massa sebagai alat menyebarluaskan informasi publik
			Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengenalan produk unggulan daerah	Tersebaranya publikasi informasi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran promosi media cetak dan elektronik
	Tersedianya produk-produk hukum daerah yang mampu mendukung perkembangan dan dinamika yang berkembang	Mendorong optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar pimpinan, antar lembaga dan antar daerah	Mendorong optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar pimpinan, antar lembaga dan antar daerah	Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dan kerja sama antar lembaga, institusi di daerah dan antar daerah
			Mengevaluasi, menata dan mengkaji produk-produk hukum daerah	Mereview produk hukum daerah dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah
				Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika perkembangan yang terjadi
		Pembinaan hukum pada masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus hukum pemerintah kota	Menyediakan dukungan bantuan hukum bagi pemerintah kota dan melakukan edukasi pada masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD	mendorong terciptanya profesionalisme aparatur sekretariat dan Anggota legislatif	peningkatan koordinasi, komunikasi, pendidikan dan pelatihan aparatur serta anggota legislatif
	Menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan masyarakat luas
			Pembinaan dan koordinasi aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat
			Peningkatan kinerja lembaga kelurahan dan kecamatan
	Menjadikan database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal
2	Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang kota
			Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan baik substansi maupun ketentuan waktu
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan ekonomi kota
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pembangunan sosial budaya kota sesuai dinamika yang terjadi
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kota sesuai kebutuhan
			Menyediakan hasil-hasil kajian/studi/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah kota
			Menyebarkan informasi hasil-hasil perencanaan, kajian, studi serta evaluasi pembangunan kepada masyarakat luas
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui sistem pengawasan yang baik
			Meningkatkan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan intern dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4 Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan berdaya guna optimal	Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu	Menerapkan sistem pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah
	Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan tepat waktu	Menerapkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Terwujudnya penyampaian SPJ dan laporan keuangan tepat waktu	Menerapkan penyelenggaraan sistem penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah berbasis SAP	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai SAP
	Terwujudnya validasi sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah
5 Meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah	Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan sumber daya pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak daerah yang belum terealisasi
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Meningkatkan wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak daerah	Melakukan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak dan wajib pajak daerah

### Misi 3 :

**Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Menciptakan sistem kesiagaan tanggap bencana yang baik	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan relawan di Kota Pontianak	Mengadakan pelatihan kepada petugas pemadam dan relawan pemadam kebakaran
	Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Memenuhi kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	Pembelian peralatan petugas penanggulangan bencana
	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Mendata peristiwa bencana dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana	Meningkatkan keterampilan petugas tanggap bencana Pendataan penanganan peristiwa bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Melakukan pencegahan dini dan menanggulangi korban dari bencana alam	Sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana serta pelatihan rutin untuk relawan dan Tim TRC	Sosialisasi ke SMU/ SMK kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana Pelatihan rutin TRC dan relawan
	Meningkatkan sarana dan prasarana kebakaran	Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam dan usia pakai peralatan pemadam	Pembelian dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran
2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian	Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru
			Menyediakan database pengendalian jalan/jembatan dan meningkatkan rasio jalan/jembatan berkondisi baik
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase	Menciptakan sistem drainase yang mampu menanggulangi banjir dan genangan	Optimalisasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran
			Mengendalikan genangan dan banjir
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat-alat berat penunjang kegiatan	Pengadaan dan pemeliharaan berkala alat-alat berat	Pengadaan pralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja
	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektifitas antar wilayah	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air Meningkatkan dan menata parkir perkotaan	Pengembangan serta meningkatkan keandalan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana
Pengembangan sistem parkir yang baik pada kawasan-kawasan kota			
Mengoptimalkan sistem perangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat		Pengembangan sarana perhubungan sungai sebagai alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di ruas jalan darat	
Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalulintas	Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Dalam BerLalu Lintas		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3 Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Menerangi setiap ruas jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota	Meningkatkan cakupan ruas jalan kota dan lingkungan yang diterangi oleh PJU
	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan	Meningkatkan pelayanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
			Optimalisasi tata kelola Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
			Meningkatkan tata kelola Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pengolahan sampah
			Menggali potensi pembiayaan pengelolaan sampah dari masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pembuangan sampah
	Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya	Meningkatkan partisipasi serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah	
Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Perluasan, penataan dan pemeliharaan kualitas Ruang Terbuka Hijau perkotaan	

#### Misi 4 :

#### Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	Penegawasan dan penertiban tempat usaha
	Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran udara dan air dari kegiatan usaha	Pemasyarakatan regulasi lingkungan
		Meningkatkan kegiatan penghijauan lingkungan	Mendukung pelestarian lahan melalui penghijauan lingkungan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Respon cepat dan tanggap terhadap pengaduan yang masuk
2 Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penyederhaan perijinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah dsbnya. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat : bantuan stimulant rumah tidak layak huni/WC
		Merwujudkan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat , aman , teratur, harmonis dan berkelanjutan	Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih)
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan-jalan lingkungan
			Mendorong penyediaan PSU pada kawasan perumahan yang dibangun pengembang dan menyediakan dukungan PSU pada kawasan permukiman
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat	meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi
		Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan melalui integrasi program/kegiatan
	Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik	Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilyah melalui penataan kawasan	pengembangan dan peningkatan kualitas bangunan dan kawasan di Kota Pontianak
		Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

**Misi 5 :****Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan	Memperbaiki kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan capaian kinerja layanan perijinan dan penanaman modal
2 Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif	Terciptanya kewanibawaan, ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha	Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
		Menegakkan dan memasyarakatkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/ sosialisasi Perda
		Pengamanan aset daerah dan pengawalan pejabat daerah	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta memberdayakan Poskamling di Kelurahan
	Terciptanya kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Optimalisasi koordinasi dan pembinaan	Pembinaan sosial politik dan wawasan kebangsaan bagi parpol dan kelompok masyarakat
3 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Pontianak, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Pengembangan sumber daya, destinasi dan investasi wisata
			Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran
	Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor	Mengembangkan bursa tenaga kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatkan informasi pasar kerja
			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan
	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek	Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu
			Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi KUMKM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan
		Meningkatkan basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
	Meningkatnya produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan peranan UPTD SKPD	Penyediaan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura
4	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan	Meningkatkan capaian kinerja distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan
5	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan serta kelembagaannya
			Menambah keahlian Keterampilan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan metode baru





## BAB VII

# KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

**K**ebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang mengarahkan secara umum hal-hal penting yang akan menjadi pegangan dalam pelaksanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dengan target indikator kinerja beserta program menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program yang disampaikan dalam RPJM ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dituangkan lebih detil dan lengkap dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lebih lanjut untuk memantapkan landasan pelaksanaannya agar terjalin sinkronisasi yang baik terputus antara RPJM ini dengan Renstra SKPD, maka program yang terkait penyelenggaraan SPM maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Bab VIII Program Pembangunan Daerah yang disertai dengan target capaian program untuk 5 (lima) tahun.

### 7.1. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

Kebijakan umum pembangunan Kota Pontianak 2015-2019 diarahkan untuk :

- a. Melaksanakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.
- b. Melaksanakan program-program daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- c. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional pada masing-masing urusan pemerintahan dan pembangunan.

- d. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur perkotaan untuk mendukung daya saing.
- f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's* dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan), pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
- g. Meningkatkan pelayanan masyarakat disetiap lini pelayanan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai Kota.

## **7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **7.2.1. Program Pembangunan Penunjang Pencapaian Visi dan Misi**

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

**Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis.**

Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

#### **1. Urusan Pendidikan**

##### **Dinas Pendidikan**

- a. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
- b. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- c. Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan
- d. Program Pendidikan Dasar
- e. Program Pendidikan Menengah Universal
- f. Program Pendidikan Non Formal
- g. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Program Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

#### **2. Urusan Kesehatan**

##### **Dinas Kesehatan**

- a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita



- c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- f. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Makanan
- g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- j. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- l. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- m. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

#### **Rumah Sakit Umum Daerah**

- a. Program Pelayanan Prima Rumah Sakit
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Program Pelayanan Rumah Sakit
- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Pegadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- e. Program Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- f. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- g. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

### **3. Urusan Pemuda dan Olahraga**

#### **Dinas Pemuda dan Olahraga**

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- c. Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

### **4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana**

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak

### **5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

#### **Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana**

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Keluarga Sejahtera

## **6. Pemberdayaan Masyarakat**

### **Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana**

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
- b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

## **7. Sosial**

### **Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK) lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- f. Program Bantuan Sosial Korban Bencana
- g. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial

## **8. Kebudayaan**

### **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

## **9. Perpustakaan**

### **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

- a. Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
- b. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

## **10. Kearsipan**

### **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

- a. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip/Daerah
- b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

## **11. Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

### **Sekretariat Daerah**

- a. Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama
- b. Program Pelayanan Ibadah Haji
- c. Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat
- d. Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



## **12 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri**

### **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

**Misi 2 : Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.**

Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

### **1. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- c. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- e. Program Pengkajian dan Penelitian Terapan
- f. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan
- g. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

### **2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

#### **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

### **3. Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

#### **Sekretariat DPRD**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

#### **Sekretariat Daerah**

- a. Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
- b. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa konstruksi
- c. Program Pelayanan Prima Sekda
- d. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- e. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- f. Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD
- g. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

- i. Program Promosi daerah
- j. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan
- k. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri
- l. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- m. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- n. Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham
- o. Program Pembinaan dan Bantuan Hukum
- p. Program Intensifikasi Pelayanan masyarakat

#### **Inspektorat**

- a. Program Pengembangan Sumner Daya Aparat Inspektorat
- b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- c. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

#### **Badan Kepegawaian Daerah**

- a. Program Pendidikan Kedinasan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara
- e. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- f. Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil
- g. Program Peningkatan Disiplin Pegawai
- h. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

#### **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah



#### **Kecamatan**

- a. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
- b. Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
- d. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- e. Program Pembinaan Lembaga Masyarakat
- f. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan

#### **Dinas Pendapatan Daerah**

- a. Program Peningkatan Penerimaan Daerah
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah

#### **4. Urusan Komunikasi dan Informatika**

##### **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

- a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
- b. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### **Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah.**

Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

#### **1. Urusan Pekerjaan Umum**

##### **Dinas Pekerjaan Umum**

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
- c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Jalan dan Jembatan
- e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
- f. Program Peningkatan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
- g. Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Dan Normalisasi Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
- h. Program Pembangunan dan Peningkatan Turap/Talud/Bronjong
- i. Program Pengendalian Banjir
- j. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Dan Monitoring Saluran Drainase
- k. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- l. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat

## **2. Urusan Perhubungan**

### **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- b. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
- c. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ
- d. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- e. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
- f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai
- g. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

## **3. Urusan Penanggulangan Bencana**

### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- b. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- c. Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran

## **4. Urusan Lingkungan Hidup**

### **Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

- a. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Kebersihan
- c. Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat
- e. Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

## **Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni;**

Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

### **1. Urusan Lingkungan Hidup**

#### **Badan Lingkungan Hidup**

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Polusi
- d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- e. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

## **2. Urusan Penataan Ruang**

### **Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan**

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pemanfaatan Ruang
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

## **3. Urusan Cipta Karya dan Perumahan**

### **Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan**

- a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- b. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
- c. Program Pengembangan Perumahan
- d. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah

## **4. Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

### **Sekretariat Daerah**

- a. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

## **Misi 5 : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing**

Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

### **1. Urusan Penanaman Modal**

#### **Badan Pelayanan Perijinan Terpadu**

- a. Program Kebijakan Penanaman Modal
- b. Program Kerjasama Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan
- e. Program Pelayanan Penanaman Modal
- f. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- g. Program Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

### **2. Urusan Koperasi dan UKM**

#### **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM**

- a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM
- c. Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
- d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM
- f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

### **3 Urusan Ketenagakerjaan**

#### **Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

- a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
- d. Program Perlindungan dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan
- e. Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh
- f. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Tenaga Kerja

### **4. Urusan Ketahanan Pangan**

#### **Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- b. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
- c. Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani

### **5. Urusan Kelautan dan Perikanan**

#### **Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak**

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap
- b. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya
- d. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal
- e. Program Pengendalian dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- f. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

### **6. Pertanian**

#### **Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak**

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
- b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Pangan
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
- d. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian
- e. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal
- f. Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan

- g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- i. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan
- j. Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
- k. Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan

## **7. Kehutanan**

### **Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak**

- a. Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman
- b. Tertib Penatausahaan Hasil Hutan

## **8. Pariwisata**

### **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- d. Program Revitalisasi Objek Wisata

## **9. Perdagangan**

### **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM**

- a. Program Pengembangan Eksport
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- d. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional

## **10. Perindustrian**

### **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM**

- a. Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)
- b. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
- c. Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif

## **12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

- a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
- b. Program Penerapan Dan Penegakan Hukum Daerah
- c. Program Perlindungan Masyarakat

## **13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

### **Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat**

- a. Program Pembinaan Sosial Politik



### **7.2.2. Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi**

Program-program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan program-program yang terkait langsung dengan upaya mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun periode 2015-2019 berdasarkan urusan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakannya. Disamping itu, pada masing-masing SKPD terdapat pula beberapa program yang perencanaannya dibuat berdasarkan kebutuhan nyata SKPD yang bertujuan untuk mendukung pelayanan internal organisasi, administrasi umum dan/atau pelayanan aparatur. Program-program rutin/wajib yang juga didasarkan atas kebutuhan riil masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
  - Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT)
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, PKK)
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Keuangan
- g. Program Peningkatan Pelayanan Prima
  - Penyusunan Laporan IKM
- h. Program Pengembangan Data/Informasi
  - Penyusunan Data dan Profil SKPD
- i. Program Pengembangan Sistem Informasi
  - Pembuatan Sistem Informasi
  - Pengelolaan Website

### **7.2.3. Program Kewilayahan**

#### **A. Program Kewilayahan Internal**

Program kewilayahan internal merupakan upaya untuk menyeibangkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap perkembangan ekonomi antar wilayah Kecamatan di Kota Pontianak.

Sebagaimana telah diulas dalam sub bab 2.2.1 huruf D sebelumnya, berdasarkan analisis menggunakan Indeks Williamson nilai indeks Kota Pontianak di tahun 2012 berkisar pada angka 0,33-0,35 mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan semakin baik. Atau dengan kata lain ketimpangan pembangunan masih ada akan tetapi tingkatnya tidak terlalu jauh/tinggi. Sedangkan disisi lain dengan melihat tipologi Klassen dari masing-masing kecamatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat dua kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari tingkat pertumbuhan Ekonomi kota Pontianak (kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Timur), dan terdapat empat kecamatan yang memiliki PDRB perkapita penduduknya lebih rendah dari PDRB perkapita Kota Pontianak (Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Timur). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang masih relatif tertinggal adalah Kecamatan Pontianak Timur.

Apabila ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita Penduduk antar kecamatan seperti di atas terus berlanjut, maka dikhawatirkan pada masa-masa mendatang akan menimbulkan berbagai persoalan, di antaranya :

1. Makin tajamnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antarkecamatan, dimana kecamatan yang kuat akan semakin sejahtera dan kecamatan yang lemah kian tertinggal. Hal ini pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial.
2. Menumpuknya kegiatan ekonomi (*over capacity*) di wilayah tertentu, yang selanjutnya bisa mengganggu keseimbangan lingkungan maupun daya dukung lahan.
3. Tidak meratanya penyebaran penduduk antarkecamatan : meningkatnya migrasi penduduk ke wilayah yang sangat maju pertumbuhan ekonominya, namun jumlah pengangguran kian bertambah di wilayah yang lamban pertumbuhan ekonominya.
4. Terjadinya *idle capacity* maupun *idle spatial* (lahan kosong) di wilayah yang potensial akibat tidak tergarap secara optimal.
5. Tidak meratanya pembangunan prasarana dan sarana wilayah, baik dalam bentuk transportasi, energi, komunikasi, air bersih, fasilitas ekonomi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur wilayah lainnya. Kondisi seperti ini juga tidak kondusif bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.
6. Kemungkinan timbulnya berbagai persoalan lainnya.

Disamping itu terdapat perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan baik berdasarkan kondisi fisik wilayah maupun potensi yang timbul sebagai *multiplier effect* berkembangnya wilayah. Untuk mengantisipasi agar berbagai persoalan di atas tidak menjadi kenyataan, maka harus merancang strategi pembangunan wilayah yang berorientasi pada eksploitasi potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan diselaraskan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan, sehingga mampu mencapai visi kota Pontianak sebagai Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka tidak hanya diperlukan kebijakan-kebijakan fundamental, melainkan juga berbagai kebijakan intervensi yang selektif dan signifikan.

Kebijakan intervensi antara lain dapat berupa penetapan target pertumbuhan ekonomi yang optimistis dan tindakan politis (*political action*) yang kuat bagi Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur. Kebijakan intervensi Pemerintah Kota Pontianak dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan antar wilayah.

Pencapaian keseimbangan tersebut bukan berarti dengan cara menekan secara drastis tingkat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Barat, melainkan dengan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur menjadi jauh lebih besar dibandingkan rata-rata angka pertumbuhannya selama ini.

Sehubungan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka program pembangunan wilayah untuk lima tahun ke depan diarahkan sebagai berikut :

1. Memperbaiki distribusi atau sebaran penduduk, dengan mengarahkan pertumbuhan penduduk dari wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi (seperti Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan) ke wilayah yang kepadatan penduduknya rendah (Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur) dengan cara pengembangan wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, baik dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi yang baru, penciptaan lapangan kerja, penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana wilayah, peningkatan keamanan, maupun kebijakan yang bersifat insentif-disinsentif.
2. Pengembangan wilayah berdasarkan sektor-sektor yang dinilai berpotensi di masing-masing kecamatan antara lain:
  - a. **Kecamatan Pontianak Utara** diarahkan untuk dikembangkan sektor industri dan sektor pertanian kota, agroindustri dan kegiatan pergudangan untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan. Selain itu juga diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata berbasis keunikan wilayah yang dilalui garis khatulistiwa (tugu Khatulistiwa) dan simpul-simpul *waterfront city* serta kawasan sentra agribisnis.
  - b. **Kecamatan Pontianak Timur** diarahkan untuk pengembangan kegiatan utama pada kegiatan wisata alam, budaya dan sejarah (Makam Kesultanan Pontianak, Keraton Kadariah, dan Mesjid Jami Kadariah) dengan didukung pengembangan simpul-simpul *waterfront city* pada koridor sungai. Untuk mendukung perkembangan jumlah penduduk wilayah ini diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman terpadu dengan dukungan pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkotaan
  - c. **Kecamatan Pontianak Tenggara** dan **Selatan** diarahkan untuk pengembangan kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi dan perdagangan serta kawasan-kawasan permukiman
  - d. **Kecamatan Pontianak Barat** diarahkan untuk pengembangan kawasan perdagangan dan pergudangan untuk mendukung sektor jasa dan perdagangan.
  - e. **Kecamatan Pontianak Kota** diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa untuk menciptakan pusat-pusat pelayanan kota dengan didukung pengembangan kawasan permukiman terpadu sebagai hinterlandnya.
3. Lebih menggalakkan penciptaan lapangan kerja yang bersifat informal, yang memungkinkan dimasuki oleh berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan tenaga kerja Kota Pontianak dengan cara :
  - a. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian secara langsung melalui program pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bagi aparat pemerintah daerah, pengusaha swasta, dan masyarakat luas.

- b. Peningkatan wawasan dan informasi secara tak langsung melalui media cetak (surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, dan lain-lain), terutama mengenai hal-hal di bawah ini :
  - Informasi peluang usaha.
  - Kemampuan berkomunikasi (bahasa asing).
  - Pendidikan agama untuk memperkuat tata nilai dalam mengantisipasi budaya luar yang dibawa oleh wisatawan, investor, tenaga kerja, dan pedagang asing.
  - Pentingnya fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.
  - Berbagai ketrampilan khusus, seperti pembuatan cinderamata dan makanan khas Kota Pontianak.

## **B. Program Kewilayahan Eksternal**

Program kewilayahan eksternal merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menjalin kerja sama dengan Kabupaten Mempawah serta Kubu Raya, yang secara geografi berbatasan langsung dengan Kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pontianak Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan (Desa Sungai Raya), Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil)
- b. Kecamatan Pontianak Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil)
- c. Kecamatan Pontianak Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya (Desa Kapur) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang)
- d. Kecamatan Pontianak Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX) & (Desa Sungai Rengas)
- e. Kecamatan Pontianak Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang) dan (Desa Mega Timur) & (Desa Jawa Tengah)
- f. Kecamatan Pontianak Kota berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pall IX) & (Desa Punggur)

Sehubungan dengan kondisi-kondisi batas wilayah tersebut di atas, maka program pembangunan wilayah untuk lima tahun ke depan lebih di fokuskan dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah dalam mengatasi berbagai masalah infrastruktur, transportasi, ekonomi dan pelayanan publik dengan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
  - Fasilitasi Penetapan dan penegasan batas wilayah
  - Penentuan batas wilayah Kota dan Kabupaten Pontianak serta Kubu Raya
- b. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  - Mendorong berbagai kerjasama dalam pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan seperti: Pengelolaan TPA regional, kerjasama penyediaan air baku dan air bersih di kawasan perbatasan antar kota/kabupaten

- Mendorong terciptanya forum komunikasi dan koordinasi antar kabupaten kota yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat
- Pertukaran pengalaman dan keberhasilan serta pendampingan dalam pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat diadaptasikan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota berbatasan.

#### **7.2.4. Program Prioritas Berdasarkan Fokus Pembangunan Daerah**

Berdasarkan misi pembangunan jangka menengah yang telah paparkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat lima fokus area pembangunan yang akan diprioritaskan pada periode lima tahun mendatang (2015-2019) yaitu:

- 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**
- 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkotaan**
- 4. Menciptakan Tata Ruang Kota yang Nyaman dan Layak Huni**
- 5. Pemerataan, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**

Untuk menggapai tujuan dan sasaran pada fokus pembangunan sebagaimana tersebut di atas diperlukan program-program prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaiannya. Adapun program-program prioritas berdasarkan fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia**

Program prioritas untuk merealisasikan sasaran fokus pembangunan tersebut adalah:

##### **A. Urusan Pendidikan**

###### **Dinas Pendidikan**

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
- Program Manajemen pelayanan pendidikan
- Program Pendidikan Dasar
- Program Pendidikan Menengah Universal

##### **B. Urusan Kesehatan**

###### **Dinas Kesehatan**

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

###### **Rumah Sakit Umum Daerah**

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Program Pelayanan Rumah Sakit
- Pegadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

**C. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

**Dinas Pemuda dan Olahraga**

- Program Peningkatan peran serta kepemudaan
- Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

**D. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

**Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana**

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak

**F. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

**Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana**

- Program Keluarga Berencana

**G. Urusan Sosial**

**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK) lainnya
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

**H. Urusan Kebudayaan**

**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- Program Pengelolaan Keragaman Budaya

**I. Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

**Sekretariat Daerah**

- Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama
- Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat

**J. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat**

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

**2. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**

Program prioritas untuk merealisasikan sasaran fokus pembangunan tersebut adalah:

**A. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Program Pengkajian dan Penelitian Terapan
- Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

**B. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

- b. Program Penataan Administrasi Kependudukan

**C. Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

**Sekretariat DPRD**

- b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

**Sekretariat Daerah**

- Program Pelayanan Prima Sekda
- Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagan Organisasi Perangkat Daerah
- Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- Program Promosi daerah
- Program Pembinaan dan Bantuan Hukum

**Inspektorat**

- Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

**Badan Kepegawaian Daerah**

- Program Pendidikan Kedinasan
- Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara
- Program Peningkatan Disiplin Pegawai

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

**Kecamatan**

- Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
- Program Pembinaan Lembaga Masyarakat

**Dinas Pendapatan Daerah**

- Program Peningkatan Penerimaan Daerah
- Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah

**D. Urusan Komunikasi dan Informatika**

**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

- Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi



### **3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkotaan**

Program prioritas untuk merealisasikan sasaran fokus pembangunan tersebut adalah:

#### **A. Urusan Pekerjaan Umum**

##### **Dinas Pekerjaan Umum**

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
- Program Peningkatan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong
- Program Pembangunan dan Peningkatan Turap/Talud/Bronjong
- Program Pengendalian Banjir
- Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

#### **B. Urusan Perhubungan**

##### **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
- Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

#### **C. Urusan Penanggulangan Bencana**

##### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Program Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran

#### **D. Urusan Lingkungan Hidup**

##### **Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

- Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan
- Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Kebersihan
- Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
- Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

### **4. Menciptakan Tata Ruang Kota yang Nyaman dan Layak Huni**

Program prioritas untuk merealisasikan sasaran fokus pembangunan tersebut adalah:

#### **A. Urusan Lingkungan Hidup**

##### **Badan Lingkungan Hidup**

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Polusi

#### **B. Urusan Penataan Ruang**

##### **Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan**

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### **C. Urusan Cipta Karya dan Perumahan**

##### **Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan**

- Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan

- Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah

**D. Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

**Sekretariat Daerah**

- b. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

**5. Pemerataan, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**

Program prioritas untuk merealisasikan sasaran fokus pembangunan tersebut adalah:

**A. Urusan Penanaman Modal**

**Badan Pelayanan Perijinan Terpadu**

- Program Kerjasama Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

**B. Urusan Koperasi dan UKM**

**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM**

- Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM

**C. Urusan Ketenagakerjaan**

**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

**D. Urusan Ketahanan Pangan**

**Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani

**E. Urusan Kelautan dan Perikanan**

**Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak**

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya
- Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal
- Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Fungsi UPTD PPI

**F. Pertanian**

**Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak**

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan

#### **G. Pariwisata**

##### **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

#### **H. Perdagangan**

##### **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM**

- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional

#### **I. Perindustrian**

##### **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM**

- Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)
- Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
- Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif

#### **J. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

##### **Satuan Polisi Pamong Praja**

- Program Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah

#### **K. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

##### **Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat**

- Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat,
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Adapun keterkaitan antara kebijakan umum dengan program pembangunan serta Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.



**Tabel VII-1**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

**Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
				Indikator	Satuan	2014	2019						
1 Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama serta keharmonisan masyarakat	Memfasilitasi, melakukan pembinaan, mejalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas	Prosentase jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan / dibina	%	100%	100%	Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama di Kota Pontianak	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah			
				Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan (orang)	Orang	250 orang	300 orang						
				Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi (orang)	Orang	160 orang	200 orang						
				jumlah pembinaan pengurus lembaga keagamaan	Orang	580 orang	590 orang						
				Prosentase jumlah jemaah haji Kota Pontianak yang difasilitasi	Orang	100	100	Pelayanan Ibadah Haji					
				Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina	Kelompok	0	6	Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol	
				Jumlah penanganan konflik sosial	Kali	4	5						
				Jumlah Sosialisasi/pertemuan/Penyuluhan wawasan kebangsaan untuk menunjang keharmonisan	Kali/tahun	0	6						
2 Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Menjalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI	Cakupan kajian seni	%	50%	80%	Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
				Cakupan Gelaran seni	%	95	100	Pengelolaan keragaman budaya					
				Mengembangkan event dan promosi kebudayaan dan sarana prasarana kesenian untuk mendorong seni budaya dan ekonomi kreatif	Cakupan Fasilitas Seni	%	90	90			Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		
		Melestarikan, meembangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan	Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian pagelaran seni dan budaya daerah	%	75	85	Pengembangan nilai budaya					
				Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai khasanah seni budaya Kota Pontianak	Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian tempat, benda dan bangunan cagar budaya	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik)	%	4			10	Revitalisasi objek wisata Kota Pontianak	Pariwisata
						Cakupan kajian seni	%	50%			80%	Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
3 Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender	Prosentase penanganan kasus KDRT perempuan dan anak	%	100	100	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana
				Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender	tingkat	Netral	responsif	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak		
				Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG	%	75	90	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		
				Menjadikan kota Pontianak Layak Anak	level	Nindya	Utama	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak		
	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera	Membentuk keluarga berkualitas melalui keluarga	Prosentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	69,26	71	Keluarga berencana	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
		Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70%	%	86	90,46					
		Prosentase cakupan unmet need	%	15,25	10					
		Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5%	%	1,8	3,2	Bina Keluarga Sejahtera				
		Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87%	%	71,49	80					
4 Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan	Meningkatkan pemberdayaan potensi kepemudaan	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Prosentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat propinsi/nasional	%	100	100	Peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	Meningkatkan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Prosentase meningkatnya jumlah atlet berprestasi di tingkat propinsi dan nasional	%	50	100	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Olahraga	
				Prosentase meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	%	20	70			
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara	%	100	100	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga			
5 Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SMK/MA	Peningkatan akreditasi sekolah dan Penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System)	Angka Melek Huruf	%	99,83	99,98	Manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,85	12,00			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Angka	114,47%	117,36%	Pendidikan dasar		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs	Angka	111,12%	113,93%			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Angka	106,49%	109,18			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs	Angka	103,38%	105,99			
				Rasio murid terhadap sekolah SD/MI	Angka	388	388			
				Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs	Angka	331	347,44			
				Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI	Angka	32	33,33			
				Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs	Angka	34	35,35			
				Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI	Angka	1,21	1			
				Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs	Angka	1,33	1			
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs	%	28,39	33			
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI	%	82,37%	86,57%			
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs	%	55,43	58,26			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	Angka	101,00	103,55	Pendidikan Menengah Universal		
			Pelaksanaan Pemetaan Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/SMK/MA	Angka	94,04%	96,41%	Pendidikan Menengah Universal		
				Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja	%	50%	75%			
				Prosentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi	%	20%	45%			
				Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK	Angka	347	404			
				Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	Angka	32	32			
				Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	Angka	1,03	1,00			
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)	%	60,00%	65,00%			
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK	%	68,90%	72,41%			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
		Mengurangi angka anak-anak keluarga miskin yang putus sekolah SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA	Kegiatan motivasi dalam pembelajaran bagi siswa di sekolah	Angka Putus Sekolah SD/MI	Angka	0,10	0,70	Pendidikan non formal			
				Angka Putus Sekolah SLTP/MTs	Angka	0,08	0,60				
				Angka Putus Sekolah SLTA/SMK/MA	Angka	0,12	0,90				
				Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor	Angka	1 / 17	1 / 15				
				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha	%	80%	95%				
			Penyelenggaraan penyetaraan bagi masyarakat pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA dan Pemberian bantuan Operasional bagi sekolah pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA	Prosentase Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	75%	90%	Manajemen pelayanan pendidikan			
					Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	%	95%				100%
					Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka	104,85				107,50
					Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	119,84				122,87
					Angka kelulusan SD/MI	Angka	100,00				100,00
					Angka kelulusan SLTP/MTs	Angka	99,79				100,00
					Angka kelulusan SMA/SMK/MA	Angka	99,90				100,00
					Nilai rata - rata ujian SD/MI	Angka	7,17				7,54
					Nilai rata - rata ujian SMP/MTs	Angka	7,35				7,72
					Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA	Angka	7,16				7,53
		Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	%	70%	95%						
		Penataan penempatan guru dan peningkatan manajemen pendidikan	Rasio guru terhadap murid (sekolah)	SD/MI	Angka	25,00	20,00	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan			
				SLTP/MTs	Angka	21,00	19,00				
				SMA	Angka	25,00	21,00				
				SMK	Angka	19	16,00				
				MA	Angka	16	15,00				
				Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal dan bimtek PNS	Orang	30	30				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
				Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS	%	100%	100%			
				Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi	%	40%	70%			
				Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru	%	80%	95%			
	Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	Meningkat mutu tenaga pendidik	Melaksanakan kegiatan penyeteraan pendidikan	Prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,90	81,16			
				Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	69,81	77,07			
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	Meningkatkan mutu pendidikan PAUDNI	Optimalisasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan PAUDNI	Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD	%	37,52%	39,44	Pendidikan Anak Usia Dini		
				Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)	%	16,39%	26,40			
		Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus	Prosentase jumlah sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik	%	50%	77%	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus		
	Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan,	Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien	Jumlah buku Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	buku	25.443	33.943	Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan			Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat yang menerima bantuan (jumlah unit taman bacaan masyarakat/ TBM)	unit	5	12				
			Jumlah kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	%	6.739	7.437	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan			
Pemasyarakatan iptek melalui media belajar sambil bermain			Jumlah ketersediaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center)	Unit	1	6	Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip	Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	75	91,39	Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip/ daerah	Kearsipan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
			Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kearsipan	%	100	91,39	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan			
			Jumlah arsip yang diinput dalam komputer	Arsip	2.000	4.500	Peningkatan kualitas pelayanan Informasi kearsipan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit	Pelayanan rumah sakit yang berfokus kepada kepuasan pelanggan	Prosentase indeks kepuasan pasien	%	70	≥85	Pelayanan prima Rumah Sakit	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
				Angka pasien pulang paksa	%	5	≤5			
		Meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat	kampanye hidup bersih dan sehat bagi masyarakat	Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar	Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat	%	N/A	>95	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
					Bed Occupation Rate (BOR)	%	60-85	70-85	Pelayanan rumah sakit	
		Meningkatkan efisiensi/ mutu layanan rumah sakit	Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar	Bed Tur Over (BTO)	hari/kali	40-50	40-50	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		
				Turn Over Interval (TOI)	hari	1-3	1-3			
				Length Of Stay (LOS)	hari	6-9	6-9			
				Gross Death Rate (GDR)	%	<45	<45			
				Net Death Rate (NDR)	%	<25	<25			
		Pemenuhan standar pelayanan rumah sakit	Peningkatan mutu dan manajemen rumah sakit	Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium	%	100	100	Obat dan Perbekalan Kesehatan		
					Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu SPM	%	≥ 60%	≥ 80%	Standarisasi pelayanan kesehatan	
					Tersedianya Sistem informasi RS berkualitas	%	58,33	100	Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	
		Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit	Mengadakan sarana dan prasarana memenuhi satandar yang ditentukan	Terpenuhinya nilai baku mutu kesehatan lingkungan sekitar RS	%	100	100	Peningkatan kesehatan lingkungan		
					Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	%	80	100	Pegadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	
		Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terutama dokter spesialis dan paramedis	Prosentase Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	100	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit		
	Jumlah dokter spesialis				Orang	15	25	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
	Prosentase perawat bersertifikat BTLS				%	80	100			
	Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS	%	80	100						
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi	Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan bayi	Cakupan kunjungan Bumil K4	%	96,2	98	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas	%	94,23	95			
Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil				%	63,58	98				
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				%	98,73	100				
Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan				%	98,21	98				
Cakupan Pelayanan Nifas				%	92,87	95				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
				Indikator	Satuan	2014	2019						
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	%	57,64	85						
				Cakupan kunjungan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	95,78	97						
				Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap	%	95,78	97						
				Cakupan Kunjungan Bayi	%	78,43	95						
				Cakupan Kepesertaan KB Aktif	%	70,90	75						
				Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran		61,9	57,5						
				Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		18	10						
				Meningkatkan kesehatan balita dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita	%				60,55	95	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
						Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani	%				124,30	100	
						Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%				82,85	88	
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka			20,1	14						
		Peningkatan gizi masyarakat	Penanganan dan pencegahan gizi buruk	Prevalensi Balita dengan Berat Badan rendah/kekurangan gizi	%	13,07	<15	Perbaikan Gizi Masyarakat					
				Persentase Balita Stunting	%	24,56	<32						
				Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100						
				Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S)	%	62,53	80						
				Persentase Balita yang naik berat badannya (N/D)	%	72,05	80						
				Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita	%	85,45	90						
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	%	96,24	95						
				Rumah Tangga dengan Garam Beryodium Baik		98,36	90						
				Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif	%	73,44	80						
				Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	%	100	100						
				Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	Penemuan Penderita Diare	%		124,3	100	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
						Angka Kesakitan Diare per 1000 penduduk	Angka		214	214			
						Cakupan Penderita DBD yang Ditangani	%		100	100			
		Angka Bebas Jentik	Angka			69,11	95						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
				Angka Kesakitan Demam berdarah Dengue per 100.000 Penduduk	Angka	52	52			
				Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk	Angka	<1	<1			
				Persentase penderita malaria yang diobati sesuai standar	%	100	80			
				Persentase penderita kusta selesai berobat (RFT Rate)	%	100	100			
				Angka kesembuhan TB BTA positif	%	92,74	80			
				Penemuan pasien baru TB BTA positif	%	55,19	70			
				Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan	%	100	100			
				Persentase Kasus HIV terhadap resiko tinggi		3	3			
				Persentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati sesuai standar	%	100	100			
				Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	%	5/100.000	4/100.000			
				Persentase Penyelidikan epidemiologi (PE)	%	100	100			
				Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan	%	100	100			
				Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	58,62	100			
				Persentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM	%	20	40			
				Persentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara		5	15			
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM		25	100			
7	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat	Pengembangan lingkungan yang sehat dan perilaku sehat	Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak	%	96,65	76	Pengembangan Lingkungan Sehat	
					Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak	%	100	100		
					Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat	%	77	85	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Makanan	
					Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat	%	84,40	99		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
8 Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Memperluas pembinaan, kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Memperluas cakupan promosi, penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat	Persentase Rumah tangga sehat ber PHBS	%	38,80	60	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
				Persentase Sekolah ber PHBS	%	40	70			
				Persentase Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	%	30	50			
				Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS	%	50	70			
				Persentase Tempat Kerja ber-PHBS	%	40	60			
				Cakupan Kelurahan Siaga Aktif		89,96	100			
				Prosentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	32,06	73			
				Rasio Posyandu per Satuan Balita	Angka	1 : 217	1 : 182			
				Prosentase Pengobatan Tradisional Memenuhi Syarat STPT dan SIPT	%	25	45			
				Prosentase Ranting SBH Aktif	%	83	100			
				Prosentase Pesantren dengan Poskestren Aktif	%	40	60			
				Prosentase POS UKK Aktif	%	0	100			
9 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas Berakreditasi	%	0	100	Standarisasi dan Pelayanan Kesehatan		
				Persentase Puskesmas ISO	%	4,3	50			
				Kepatuhan Petugas terhadap SOP	%	80	100			
				Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat	%	80	80			
				Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	2,49	3			
				Persentase Rawat Jalan	%	102,94	100			
				Persentase Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	%	91,67	100			
				Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat	%	5	40			
				Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa termasuk NAPZA	%	10	50			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
				Prosentase RSJ yang memberikan layanan subspecialis utama dan NAPZA	%	10	100				
				Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer	%	10	50				
				Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga	%	1	4				
				Prosentase minimal memiliki Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	%	4	4				
				Prosentase Fasilitas kesehatan pemerintah (RS, Lab, Instalasi Farmasi, dan Dinas Kesehatan) yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	%	50	100				
				Rasio Cabut Tambal	Angka	2.5 : 1	2 : 1				
				Cakupan Puskesmas dan Jaringannya berkondisi Baik	%	34,76	100				Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	100	100				Obat dan Perbekalan Kesehatan
				Persentase Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan	%	60	80				Pengawasan Obat dan Makanan
				Prosentase Industri Rumah Tangga Memenuhi Syarat	%	70	90				
				Prosentase instalasi farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	%	25	45				
				Prosentase Puskesmas perwatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	90	100				
				Prosentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah	%	30	60				
				Prosentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	85	90				
Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Jumlah Posyandu yang difasilitasi	unit	300	360	Intensifikasi Pelayanan Masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah			
10 Memastikan terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Coverage)	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar	%	85	85	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Indikator	Satuan	2014	2019					
11 Menurunkan permasalahan sosial masyarakat	menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatkan upaya pemberdayaan PMKS dan masyarakat dalam kepedulian sosial	Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	74	84	Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		
				Prosentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	30	80	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
				Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	40	68	Pembinaan para penyandang cacat trauma				
			Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Prosentase panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	52	87	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo				
				Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	30	55	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial				
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	Bantuan sosial korban bencana				
				Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	10	30					
				Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial	%	0	95	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial				
			Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beras miskin	Peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penerima program raskin	Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin	Kali	2	2			Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
		Jumlah laporan Monev pelaksanaan program raskin			Laporan	2	2					



Misi 2 : Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penguang Jawab		
				Indikator	Satuan	2014	2019					
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur	Peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi	Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan	Orang	177	440	Pendidikan Kedinasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah		
				Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Orang	764	859	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
			Menciptakan sistem tata kelola dan informasi kepegawain yang andal	Tingkat pemenuhan database kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG	orang/dokumen	7642 / 6 dokumen	8150 / 6 dokumen	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian				
				Tingkat pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara	%	100	100	Pengadaan Aparatur Sipil Negara				
				Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian (perubahan status cpns menjadi pns, SK penempatan dan SK pensiun tepat waktu)	%	100	100	Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
				Tingkat Pemenuhan formasi jabatan	%	565	505	Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil				
				Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian	Kasus	1535	1531	Peningkatan Disiplin Pegawai				
				Jumlah pegawai yang mendapat bantuan dan penghargaan/reward	orang	357	4035	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai				
	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perbaikan dan efisiensi tata laksana, proses kerja, kelembagaan organisasi, administrasi serta pengukuran kinerja kelembagaan	Optimalisasi Sistem Pengukuran kinerja kelembagaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak	Nilai	CC	B	Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Sekretariat Daerah
				Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tepat waktu	%	100	100					
				Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan	2	2					
				Penyampaian LAKIP dan TAPKIN tepat waktu	Dokumen tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu					
				Prosentase SKPD yang melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	%	100	100					
			Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata laksana dan proses kerja	Prosentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota bagi SKPD dengan tupoksi bersifat generik	%	100%	100					
Prosentase SKPD yang telah menyusun SOP				%	100	100						
Prosentase rata-rata indeks kepuasan Masyarakat (IKM) unit Pelayanan Publik dalam Kategori "Baik"				%	80	100						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
			Peningkatan fungsi dan kapasitas kelembagaan	Prosentase SKPD yang telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan dokumen reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pontianak	%	79	100				
				Prosentase perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008	%	75%	100				
				Prosentase SKPD yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku	%	100	100				
			Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan	Prosentase jumlah SKPD yang telah memenuhi analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	100	100				
				Tersedianya pedoman evaluasi jabatan pemerintah Kota Pontianak	Tersedia	tersedia	tersedia				
			Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	prosentase proses pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan transparan	%	90	90				Program Fasilitasi dan pengembangan kebijakan jasa konstruksi
			Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM	Prosentase SKPD yang telah menyusun SK Budaya Kerja	%	50	100				Program Pelayanan Prima Sekda
				Prosentase SKPD yang telah memiliki Perwa SPM	%	100	100				
				Prosentase SKPD yang mencapai target SPM	%	100	100				
			Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratif kota	Prosentase data rupa bumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	%	100	100				Program Penataan Daerah Otonomi Baru
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin	kegiatan sosialisasi	2	2				Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
				Jumlah laporan Monev pelaksanaan program raskin	dokumen	2 dokumen	2 dokumen				
				Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan	%	90	90				
				Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan	%	100	100				
			Meningkatnya kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	BUMD	3				3
Prosentase kontribusi BUMD terhadap PAD	%	0,3			0,5						
Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya publikasi informasi publik melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	Memalsimalkan media massa sebagai alat menyebarkan informasi publik	jumlah berita yang dirilis	Berita	510	619	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media				
			jumlah iklan dan baliho/spanduk/banner	Buah	78	94					
			jumlah tayangan informasi pemerintah kota Pontianak pada televisi	Kali	110	133					
			jumlah kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik (publikasi)	publikasi	1.600	1.944					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penguang Jawab				
				Indikator	Satuan	2014	2019							
				Jumlah jumpa pers dengan media massa (kali)	Kali	24	29	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
				Jumlah edisi penerbitan majalah warta kota	edisi	4	4							
				Jumlah penyampaian informasi melalui mobil keliling	Kali	72	87							
				Jumlah informasi digital tentang kegiatan pemerintah (keping)	keping	75	91							
				Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.	%	83.19	95	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik						
				Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.	%	76.54	85							
				Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional, melalui :										
				Media Massa	Kli/th	4 kali/th	10 kali/th							
				Media Website (Media Online).		setiap hari	setiap hari							
				Media Tradisional.	Kli/th	2 kali/th	6 kali/th							
				Media Interpersonal.	buah	1	6 kali/th							
				Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho).	buah	4	12 kali/th							
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di	%	30%	50							
				Persentase Peningkatan Pelayanan KOMINFO	%	78	91	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi						
				Meningkatkan penyebaran informasi dan pengenalan produk unggulan daerah	Tersebar nya publikasi informasi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran promosi media cetak dan elektronik	Prosentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti	%	100			100	Program Promosi daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Sekretariat Daerah
				Mendorong optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar pimpinan, antar lembaga dan antar daerah	Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dan kerja sama antar lembaga, institusi di daerah dan antar daerah	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah	Kali	1			1	Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan		
						Jumlah rapat Forkorpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)	Kali	10			10	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri		
						Jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti	Kerjasama	4			4	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
				Tersedianya produk-produk hukum daerah yang mampu mendukung perkembangan dan dinamika yang berkembang	Mengevaluasi, menata dan mengkaji produk-produk hukum daerah	Mereview produk hukum daerah dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah	Prosentase peraturan daerah yang diajukan ke legislatif sesuai dengan Program Legislasi daerah	%			100	100	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
							Prosentase Peraturan Walikota yang diundangkan	%			90	90		
Prosentase Surat Keputusan Walikota yang diundangkan	%	100	100											
Prosentase Peraturan Daerah yang disesuaikan hasil klarifikasi	%	100	100											
Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika perkembangan yang terjadi	Prosentase penyediaan e-dokumen hukum dipublikasikan	%	90			90	Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham							
	Prosentase Perda yang diimplementasikan	%	100			100								
	Prosentase perwa yang diimplementasikan	%	100			100								

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
				Prosentase Kajian Perda	%	90	90	Program Pembinaan dan Bantuan Hukum			
				Prosentase Kajian Perwa	%	90	90				
				Prosentase Kajian MOU/Perjanjian	%	90	90				
				Tersedianya forum diskusi Hukum	Tesedia	Tesedia	Tesedia				
				Tersedianya Panitia RANHAM	Tesedia	Tesedia	Tesedia				
			Pembinaan hukum pada masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus hukum pemerintah kota	Menyediakan dukungan bantuan hukum bagi pemerintah kota dan melakukan edukasi pada masyarakat	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali)	Kali	3				3
					Prosentase penyelesaian perkara perdata dan TUN	%	75				75
Prosentase penetapan kelurahan sadar hukum	%	75			75						
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD	mendorong terciptanya profesionalisme aparatur sekretariat dan Anggota legislatif	peningkatan koordinasi, komunikasi, pendidikan dan pelatihan aparatur serta anggota legislatif	Prosentase Agenda kedewanan sesuai hasil rapat banmus	%	80	80	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Sekretariat DPRD		
			Prosentase realisasi rencana legislasi Perda	%	85%	85%					
			Jumlah raperda inisiatif DPRD yang disahkan	Perda	2 perda	2 perda					
			jumlah peningkatan wawasan anggota DPRD	Kali	6 kegiatan	6 kegiatan					
Menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan masyarakat luas	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	80	90	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Kecamatan		
			Prosentase terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu	%	100	100	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan				
			prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	80	90	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan				
		Pembinaan dan koordinasi aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat	Prosentase kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	75	85	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat				
			Prosentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina	%	80	90	Pembinaan lembaga masyarakat				
		Peningkatan kinerja lembaga kelurahan dan kecamatan	Prosentase jumlah dokumen peningkatan kinerja kelembagaan	%	100	100	Peningkatan kinerja kelembagaan				
		Menjadikan database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	95,08%			97,45%	Penataan Administrasi Kependudukan
Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%				79,75%	99,33%					
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	%				93,47%	80,43%					
Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran	%				86,59%	98,34%					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
				Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	%	61,90	72,05				
				Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak (jiwa)	%	660,060	698,000				
2 Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang kota	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan baik substansi maupun ketentuan waktu	Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Menengah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perda RPJMD 2015-2019	1	1				
				Tersedianya dokumen Pembangunan Tahunan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perwa RKPD	1 Perwa RKPD	1 Perwa RKPD				
				Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan				
				Prosentase dokumen hasil perencanaan Bappeda (bidang fispra, sosial budaya dan ekonomi) yang ditindaklanjuti oleh SKPD	%	44%	80%				
				Prosentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	75%	95%				
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan ekonomi kota	Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
					Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	kegiatan	4 kegiatan				4 kegiatan
					Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	%	2%				3,4
					Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	%	1%				3,30%
					Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)	%	0,50%				0,85%
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pembangunan sosial budaya kota sesuai dinamika yang terjadi	Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	4 dokumen	5 dokumen	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
					Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya	Kegiatan	3 kegiatan				3 kegiatan
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	%	5%	7,50%				
Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	%	1%			3,30%						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kota sesuai kebutuhan	Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana	Dokumen	3 dokumen	5 dokumen	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		
				Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana	Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan			
				Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	%	10%	12,50%			
				Prosentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	%	10%	17%			
					%	15%	17,50%			
			Menyediakan hasil-hasil kajian/studi/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah kota	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan	Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan		
				Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasa digunakan untuk merumuskan kebijakan	Dokumen	3 dokumen	6 dokumen			
			Menyebarluaskan informasi hasil-hasil perencanaan, kajian, studi serta evaluasi pembangunan kepada masyarakat luas	Tersedianya data dan informasi hasil-hasil pembangunan	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan		
				Terlaksananya penggunaan Teknologi Sistem Informasi berbasis Internet dalam penyebarluasan hasil-hasil pembangunan	%	33%	89%			
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	%	82%	100%			
				Tersedianya buku Pontianak Dalam Angka	Dokumen	1	1			
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD (setiap lima tahun)	Dokumen	0	1 dokumen	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
				Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJMD	Dokumen	0	1 dokumen			
				Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RKPDP	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
				Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD	Dokumen		1 dokumen			
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	1 dokumen		1 dokumen						
3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui sistem pengawasan yang baik	Meningkatkan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan intern dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Kinerja SKPD Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Insstansi Pemerintah (sAKIP) yang masuk kategori "Baik"	%	90	100	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Inspektorat
				Prosentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti (LHP)	%	100	100	Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
				Persentase Jumlah Temuan Inspektorat Kota Yang Selesai Ditindak Lanjuti	%	25%	50%	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
				Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP DPP	WTP				
				Auditor memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan	%	100	100		Pengembang Kapasitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat		
4 Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan berdaya guna optimal	Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu	Menerapkan sistem pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Tingkat ketepatan waktu penerbitan SPD	%	100	100				
	Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan tepat waktu	Menerapkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prosentase realisasi penerbitan SP2D	%	100	100				
				Prosentase penyelesaian advis SP2D (pengeluaran)	%	100	100				
				Prosentase otorisasi penyelesaian Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan	%	100	100				
	Terwujudnya penyampaian SPJ dan laporan keuangan tepat waktu	Menerapkan penyelenggaraan sistem penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah berbasis SAP	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai SAP	Prosentase SKPD menyampaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	%	100	100				
				Penyusunan Laporan keuangan pemerintah kota tepat waktu sesuai SAP	%	100	100				
				Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	%	100	100				
	Terwujudnya validasi sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah	Prosentase barang milik daerah yang terinventarisasi dalam SIMBADA dan SIMA	%	100	100	Penataan dan pengelolaan aset daerah			
				Prosentase realisasi penghapusan aset milik Pemerintah Kota Pontianak	%	100	100				
5 Meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah	Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan sumber daya pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak daerah yang belum terealisasi	Prosentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	%	17,22	7,18	Peningkatan penerimaan Daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian	Dinas Pendapatan Daerah	
				Prosentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	%	4,5	7	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Meningkatkan wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak daerah	Melakukan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak dan wajib pajak daerah	Prosentase wajib pajak yang terdaftar melakukan pembayaran pajak	%	43,89	65,00	Peningkatan Pengawasan penerimaan daerah			



Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
1 Menciptakan sistem kesiagaan tanggap bencana yang baik	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan relawan di Kota Pontianak	Mengadakan pelatihan kepada petugas pemadam dan relawan pemadam kebakaran	presentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM	%	78	88	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				presentase peningkatan kesiagaan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran	%	78	88			
				Presentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran	%	78	88			
	Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Memenuhi kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	Pembelian peralatan petugas penanggulangan bencana	presentase korban bencana yang mendapatkan bantuan/ pertolongan	%	80	93	Pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana	
				presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	%	80	93			
	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Mendata peristiwa bencana dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana	Meningkatkan keterampilan petugas tanggap bencana	presentase pemadam kebakaran swasta yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana	%	85	98	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana		
				Pendataan penanganan peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	%	85	98			
	Melakukan pencegahan dini dan menanggulangi korban dari bencana alam	Sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana serta pelatihan rutin untuk relawan dan Tim TRC	Sosialisasi ke SMU/ SMK kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana	presentase peningkatan kesiagaan dan keterampilan Tim Reaksi Cepat	%	88	100	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		
				presentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih	%	88	100			
				presentase pemahaman masyarakat dan pelajar dalam menghadapi bencana	%	88	100			
Meningkatkan sarana dan prasarana kebakaran	Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam dan usia pakai peralatan pemadam	Pembelian dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran	presentase peningkatan ketersediaan peralatan pemadam	%	75	85	Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran			
			presentase peningkatan usia pakai peralatan pemadam	%	75	85				
2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian	Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru	Presentase penambahan jalan kota dalam kondisi baik	%	77,2	95	Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum
				Presentase terbangunnya jalan inner ring road	%	39,38	53,88			
				Presentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan	%	45	82			
				Presentase trotoar dengan kondisi yang baik	%	16,77	29,52			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
				Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik	%	77.2	95	Peningkatan Jalan dan Jembatan			
				Menyediakan database pengendalian jalan/jembatan dan meningkatkan rasio jalan/jembatan berkondisi baik	presentase/Rasio Jalan dengan kondisi baik	%	67	95			Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
				presentase jembatan dengan kondisi baik	%	67	95				
				Prosentase Terbangunnya sistem informasi/database jalan dan jembatan	%	15	100	Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring jalan dan jembatan			
				Prosentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak	%	7.66	100				
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase	Menciptakan sistem drainase yang mampu menanggulangi banjir dan genangan	Optimalisasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran	Prosentase Panjang saluran drainase dengan kondisi baik	%	32,59	38,39	Pembangunan saluran drainase/koker/gorong-gorong			
				panjang saluran drainase kota dengan kondisi baik (m)	%	197100	232167				
				Prosentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat	%	31,75	34,32	Pembangunan dan Peningkatan turap/talud/bronjong			
				presentase turap/talud/bronjong dengan konstruksi yang baik	%	18,8	23,19				
				Prosentase drainase dan gorong-gorong kota dengan kondisi baik	%	21,06	22,13	Peningkatan saluran drainase/koker/gorong-gorong			
				Saluran drainase lingkungan dengan konstruksi yang baik (m)	%	127.352,00	133.867,41				
				Panjang saluran drainase yang dipelihara	%	604.805	392.272,07	Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			
				Prosentase Peningkatan Aliran Air	%	42	65				
				Mengendalian genangan dan banjir	Lama genangan (jam)	jam	>3	<2	Pengendalian Banjir		
					Luas genangan	Ha	4.445	3951			
Prosentase Terbangunnya sistem informasi/database sumber daya air	%	10	65		Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring Saluran Drainase						
Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat-alat berat penunjang kegiatan	Pengadaan dan pemeliharaan berkala alat-alat berat	Pengadaan pralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja	Prosentase alat berat yang kondisinya baik	%	25	55	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab				
				Indikator	Satuan	2014	2019							
	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektivitas antar wilayah	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air	Pengembangan serta meningkatkan keandalan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana	Persentase tingkat keberfungsian APILL dan rambu lalu lintas jalan	%	100,00	100,00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
				persentase terpeliharanya terminal dan halte dengan baik	%	80,00	90,00							
				Persentase Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	89.33	95				Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ			
		Meningkatkan dan menata parkir perkotaan	Pengembangan sistem parkir yang baik pada kawasan-kawasan kota	Persentase Peningkatan Potensi Parkir	%	0,00	95	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ						
				Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) (%)	%	37.53	60	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ						
				Persentase peningkatan pelayanan angkutan darat	%	90,00	95							
				Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa	%	100,00	100,00							
		Mengoptimalkan sistem perangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat	Pengembangan sarana perhubungan sungai sebagai alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di ruas jalan	Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	%	100,00	100,00	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan						
				Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	%	100,00	100,00	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP						
				Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	%	91.17	95	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai						
		Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalulintas	Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Dalam BerLalu Lintas	Persentase Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	%	61.43	75	Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						
		3 Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Menerangi setiap ruas jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota	Meningkatkan cakupan ruas jalan kota dan lingkungan yang diterangi oleh PJU	Prosentase PJU dalam kondisi baik	%	73			95	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum
						Prosentase PJU ber meter	%	25			75			
	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan	Meningkatkan pelayanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Luas area penyapuan	m2	309.600	693.000	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak				
				presentase sampah yang terangkut ke TPA	%	83,73	100							
				presentase sampah yang tidak terangkut ke TPA	%	16,27	0							
				Optimalisasi tata kelola Instalasi Pengolahan Limbah Tinja	presentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT	%	89 m3				3,50			
				Meningkatkan tata kelola Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah	presentase lahan TPA yang dikelola dengan sistem sanitary landfill	%	0				0,145			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pengolahan sampah	presentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	%	78	88	Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Kebersihan			
				presentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik	%	80	88				
			Menggali potensi pembiayaan pengelolaan sampah dari masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pembuangan sampah	presentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan	%	9.164 Milyar	14,52	Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			
				presentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum	%/tahun	250 orang	75				
			Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya	Meningkatkan partisipasi serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah	presentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)	%	0	41			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat
					presentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina	%/tahun	5 kelompok	17,65			
		Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Perluasan, penataan dan pemeliharaan kualitas Ruang Terbuka Hijau perkotaan	presentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	%	13,41	14,16			Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					presentase luasan RTH kawasan perkotaan yang dikelola/dipelihara	%	99,33	99,5			
					presentase luasan RTH yang dikelola oleh pihak ketiga	%	8 taman	24,14			

Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	Pegawasan dan penertiban tempat usaha	Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	41	65	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup
				Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	%	8	8			
	Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran udara dan air dari kegiatan usaha	Pemasyarakatan regulasi lingkungan	Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup	%		15	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		
				Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	55,55	15	Pengendalian polusi		
Meningkatkan kegiatan penghijauan lingkungan	Mendukung pelestarian lahan melalui penghijauan lingkungan	Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau	%		85	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam				
Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup	Respon cepat dan tanggap terhadap pengaduan yang masuk	Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%		85	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam				
2 Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penyederhaan perijinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah dsbnya.	Berkurangnya Luas Kawasan kumuh Perkotaan (Ha)	Ha	81,66	40	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cipta Karya dan Perumahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
			Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat : bantuan stimulant rumah tidak layak huni/WC	Berkurangnya Jumlah Rumah Tak Layak Huni (unit)	Unit	3,322	822			
				Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	50	70			
		Merwujudkan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat , aman , teratur, harmonis dan berkelanjutan	Perbaiki prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih)	Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	%	71	95	Pengembangan Perumahan dan Permukiman		
	Mendorong penyediaan PSU pada kawasan perumahan yang dibangun pengembang dan menyediakan dukungan PSU pada kawasan permukiman	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukunng sarana dan utilitas umum (PSU) (%)	%	70	85	Pengembangan perumahan				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat	meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi	Rumah Tangga	156,210	158,710	Penyehatan Lingkungan Permukiman		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
		Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan melalui integrasi program/kegiatan	Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak	%	75	95%	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian	Sekretariat Daerah
	Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik	Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan	pengembangan dan peningkatan kualitas bangunan dan kawasan di Kota Pontianak	Prosentase gedung pemerintahan berkondisi baik sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan Cipta Karya	%	40	90	Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Pemerintah	Cipta Karya dan Perumahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
				Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kota	dokumen	1	1			
		Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Ketersediaan Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang	Peraturan	1	1	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	
				Persentase Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota yang sesuai dengan peraturan perencanaan Tata Ruang	%	80	90	Pemanfaatan Tata Ruang		
		Persentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti	%	90	96	Pengendalian pemanfaatan ruang				

Misi 5 : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Indikator	Satuan	2014	2019					
1 Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan	Memperbaiki kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan capaian kinerja layanan perijinan dan penanaman modal	Presentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan	%	50	100	Kebijakan penanaman modal	Penanaman modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu		
				Presentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional	%	85	100	Kerja sama penanaman modal				
				Presentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak	%	75	100	Promosi Penanaman Modal				
				Presentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpaduy (SIMYANDU) perizinan teknis daeah	%	50	100	Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan				
				Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		10.000	14.000	Pelayanan Penanaman Modal				
				Presentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	%	40	100	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal				
				Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	%	40	100	Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal				
2 Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif	Terciptanya kewan, ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha	Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	%	95	100	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Menegakkan dan memasyarakatkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/ sosialisasi Perda	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	85			100	Penerapan dan penegakan hukum daerah
				Pengamanan aset daerah dan pengawalan pejabat daerah	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta memberdayakan Poskamling di Kelurahan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	%	95			100	Perlindungan masyarakat
	Terciptanya kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Optimalisasi koordinasi dan pembinaan	Pembinaan sosial politik dan wawasan kebangsaan bagi parpol dan kelompok masyarakat	Presentase keterwakilan perempuan di parlemen	%	30	30	Pembinaan Sosial Politik	Kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol		
				jumlah kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik	kelompok sasaran	0	5					
3 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Pontianak, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Pengembangan sumber daya, destinasi dan investasi wisata	presentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	%	5	10	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
				Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	hari	2	4					
			Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Orang/tahun	220	250 orang	Pengembangan kemitraan pariwisata				
				Jumlah usaha pariwisata yang dibina	Unit	718 usaha pariwisata	720 usaha pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Indikator	Satuan	2014	2019				
				prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik)	%	4	10	Revitalisasi Objek Wisata			
	Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor	Mengembangkan bursa tenaga kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatkan informasi pasar kerja	Prosentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	56	85	Peningkatan kesempatan kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
				Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	%	15	40	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
				Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat	%	10	35				
				Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	30				
			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan	Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	100	100	Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja			
				Prosentase besaran pemeriksaan alat di perusahaan	%	12	45	Perlindungan dan penegakan norma hukum ketenagakerjaan			
				Prosentase besaran pengujian peralatan di perusahaan	%	14	50				
				Prosentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan	%	90	95	Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh			
				Prosentase calon tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas pelatihan	%	40,00	90	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tenaga Kerja			
				Prosentase kelengkapan peralatan uji	%	73,00	100				
	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek	Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu	Prosentase UMKM yang dibina	%	5	15	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Prosentase koperasi aktif	%	59,32	63,11				
			Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi KUMKM	Prosentase peningkatan omzet KUMKM	%	0,66	2	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM			
				Prosentase akses pembiayaan KUMKM	%	2	3	Peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah			
		Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya	Unit	1000	1200	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM)			
				Jumlah koperasi	Unit	799	824		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM		
				Jumlah UMKM	Unit	5.222	6.488				
	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan	Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API	Orang	120	147	Pengembangan ekspor	Perdagangan		
				Jumlah gudang yang diawasi	Unit	12	12	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
				Barang beredar yang diawasi	Jnis	10	15	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			
				Alat UTPP yang ditera/tera ulang	buah	260	358				
				Jumlah pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan	Orang	3760	3800	Pembinaan dan Pengembangan pasar tradisional			
				Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat	%	85,71	86				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
				Jumlah PKL yang mendapat fasilitas Pemkot	PKL	287	300	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Koperasi dan UKM	
		Meningkatkan basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif	Jumlah IKM yang dibina	Unit	600	650	Pengembangan industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH)	Perindustrian	
				Prosentase pemberian rekomendasi TDI/IUI	%	93	98			
				Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi	Unit	40	90	Pengembangan industri logam mesin elektronika dan aneka		
				Rasio IKM yang difasilitasi HaKI	Unit	25 : 35	40 : 60	Pengembangan IKM dan industri kreatif		
				Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal	Unit	0	5 : 9			
				Rasio IKM yang difasilitasi PIRT	Unit	35 : 50	50 : 75			
				Jumlah pengujian produk makanan dan minuman	Sampel	230	270			
	Meningkatnya produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan peranan UPTD SKPD	Penyediaan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)				Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman hortikultura Berkelanjutan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak
				a. Sawi (%)	%	2,00	2,00			
				b. Bayam (%)	%	2,00	2,00			
				c. Kangkung (%)	%	2,00	2,00			
				Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)						
				a. Sawi (%)	%	0.00	0.00			
				b. Bayam (%)	%	0.00	0.00			
				c. Kangkung (%)	%	0.87	0.00			
				Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)						
				a. Pepaya (%)	%	3,00	0,47			
				Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)						
				a. Pepaya (%)	%	0.00	0.00			
				Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)						
				a. Lidah Buaya (%)	%	4,99	2,83			
				Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)						
				a. Lidah Buaya (%)	%	0.00	0.00			
				Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)						
				a. Anggrek (%)	%	2,00	2,00			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
				Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :				Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan		
				a. Padi	%	-	3,03			
				b. Jagung	%	-	0.00			
				c. Ubi Kayu	%	-	1,53			
				d. Ubi Jalar	%	-	0.00			
				e. Keladi	%	-	0.00			
				Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :				Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		
				a. Padi	%	0.00	3,03			
				b. Jagung	%	0.00	0.00			
				c. Ubi Kayu	%	0.00	1,53			
				d. Ubi Jalar	%	0.00	0.00			
				e. Keladi	%	0.00	0.00			
				Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)						
				a. Sawi	%	2.00	2.00			
				b. Bayam	%	2.00	2.00			
				c. Kangkung	%	2.00	2.00			
				Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)						
				a. Sawi	%	0.00	0.00			
				b. Bayam	%	0.00	0.00			
				c. Kangkung	%	0.87	0.00			
				Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)						
				a. Pepaya	%	3,00	0,47			
				Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)						
				a. Pepaya	%	0.00	0.00			
				Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)						
				a. Lidah Buaya	%	4,99	2,83			
				Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)						
				a. Lidah Buaya	%	0.00	0.00			
				Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)						
				a. Anggrek	%	2.00	2,00			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
				Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif	%	-	7,14	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi hasil Pertanian		
				Presentase peningkatan jumlah ketersediaan pangan asal hewan :				Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal		
				a. Daging Sapi	%	1,00	1,00			
				b. Daging Ayam	%	1,00	1,00			
				c. Daging Kambing	%	1,00	1,00			
				d. Daging Babi	%	1,00	1,00			
				e. Telur	%	1,00	1,00			
				Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan (kali)	kali	7	7	Peningkatan keamanan produk hewan		
				Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK (KUNAK)	kelompok	0	1	Peningkatan penerapan produksi peternakan		
				Presentase penurunan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	%	-	8,33	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		
				Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)	kelompok	-	1	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan		
				Persentase Peningkatan Jumlah Tamu yang Berkunjung di UPTD Agribisnis (%)	%	2,00	5,00	Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura		
				Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi (%)	%	0,00	5,00	Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan		
				Persentase Penurunan luasan lahan kritis	%	0,26	2,27	Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman	Kehutanan	
				Jumlah dokumen pengawasan tertib peredaran hasil hutan	dokumen	18	75	Tertib Penatausahaan Hasil Hutan		
				Presentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	5,00	5,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	
				Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan	Kelompok	-	3	Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan		
				Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya :				Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya		
				a. Ikan Lele	%	5,00	5,00			
				b. Ikan Mas	%	1,00	1,00			
				c. Ikan Nila	%	2,00	5,00			
				d. Ikan Lainnya	%	1,50	1,91			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja (outcomes)		Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Indikator	Satuan	2014	2019			
				Persentase Peningkatan Jumlah produksi benih komoditas perikanan air tawar				Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal		
				a. Ikan Lele	%	31,14	10,29			
				b. Ikan Mas	%	26,67	10,00			
				c. Ikan Nila	%	25,00	9,78			
				Jumlah pengawasan tertib administrasi pelaku usaha kelautan dan perikanan (kali)	kali	-	4,00	Pengendalian dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		
				Persentase Peningkatan Jumlah kapal yang sandar/bongkar/muat di UPTD PPI	%	5,88	41,80	Pengembangan dan Peningkatan produksi Perikanan tangkap dan fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan		
4 Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan	meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemenuhan ketersediaan dan distribus barang-barang konsumsi untuk keamanan pangan	Meningkatkan capaian kinerja distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan	Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita	%	90%	98%	Peningkatan ketahanan pangan	Ketahanan pangan	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				Prosentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80,2	95			
				Prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	%	90	97			
				Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	90	98			
				Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	95			
				Jumlah penguatan cadangan pangan	ton	50	100			
				Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	100			
5 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan serta kelembagaannya	Menambah keahlian Ketereampilan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan metode baru	Prosentase peningkatan kelembagaan petani	%	51	56	Pemberdayaan penyuluhan pertanian		
				Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi	%	16,5	40	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani		



## BAB VIII

# INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKASI PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas berisi program-program yang didesain baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak juga untuk pemenuhan layanan-layanan publik dan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Sedangkan pagu indikatif adalah perkiraan jumlah kebutuhan dana yang diperlukan untuk mencapai target indikator kinerja (*outcomes*) melalui pelaksanaan program-program yang kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan tahunan.

Program-program berdasarkan urusan pemerintahan daerah tersebut disajikan dengan dilengkapi informasi mengenai indikator kinerja program yang ditetapkan, target kinerja setiap tahun dalam periode RPJMD, dan indikasi pendanaan per tahun dan SKPD yang menjadi penanggung jawab program. Informasi mengenai indikator kinerja, target kinerja, dan indikasi pendanaan merupakan input penting dalam menyusun perencanaan tahunan, monitoring dan pengendalian dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan program serta evaluasi terhadap ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan. Program-program beserta indikator kinerja, target capaian dan indikasi pendanaan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dengan memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Harus dipahami bahwa pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung pendanaannya oleh APBD Kota Pontianak akan tetapi juga oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Propinsi Kalimantan Barat, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel VIII-1 ini hanya yang bersumber dari APBD Kota Pontianak. Rumusan program-program pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Pontianak dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel VIII-1  
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
1		<b>URUSAN WAJIB</b>														
1	01	<b>PENDIDIKAN</b>														
1	01	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Rasio guru terhadap murid (sekolah) SD/MI	25	25,00	1.541.597	24,00	1.557.013	23	1.572.583	22,00	1.588.309	20,00	1.604.192	Dinas Pendidikan
			Rasio guru terhadap murid (sekolah) SLTP/MTs	21	3,00		21,00			20,00		20,00		19,00		
			Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMA	25	25,00		24,00			23,00		22,00		21,00		
			Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMK	19	19,00		19,00			18,00		17,00		16,00		
			Rasio guru terhadap murid (sekolah) MA	16	16,00		16,00			15,00		15,00		15,00		
			Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal dan bimtek PNS	30 orang	30 orang		30 orang			30 orang		30 orang		30 orang		
			Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS	100%	100%		100%			100%		100%		100%		
			Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi	40%	50%	85.000	55%	85.850	60%	86.708	65%	87.576	70%	88.450		
			Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru	80%	83%	2.437.903	85%	2.462.282	87%	2.486.905	90%	2.511.774	95%	2.536.892		
			Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	63,90	65,00	2.997.608	67,15	3.027.584	73,87	3.057.860	76,00	3.088.439	81,16	3.119.323		
			Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	69,81	71,21		72,63			74,08		76,31		77,07		
1	01	02	Manajemen pelayanan pendidikan	Prosentase Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	75%	80%	378.512	83%	382.297	85%	386.120	87%	389.981	90%	393.881	
			Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	95%	95%	512.425	96%	517.549	97%	522.725	98%	527.952	100%	533.232		
			Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,85	105,37	32.020.806	105,90	31.799.336	106,43	32.161.318	106,96	32.437.483	107,50	32.761.857		
			Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	119,84	120,44		121,04			121,65		122,25		122,87		
			Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	6.029.758	100,00	6.632.733	100,00	6.699.061	100,00	6.766.051	100,00	6.833.712		
			Angka Kelulusan SMP/MTs	99,79	99,84		99,89			99,94		99,99		100,00		
			Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,90	99,95		100,00			100,00		100,00		100,00		
			Nilai rata - rata ujian SD/MI	7,17	7,24		7,31			7,39		7,46		7,54		
			Nilai rata - rata ujian SMP/MTs	7,35	7,42		7,50			7,57		7,65		7,72		
			Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA	7,16	7,23		7,30			7,38		7,45		7,53		



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
		Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	70%	75%	98.910	80%	99.889	85%	100.998	90%	101.907	95%	102.926		
		Angka Melek Huruf	99,83	99,86	850.364	99,89	858.868	99,92	887.458	99,95	876.131	99,98	884.892		
		Rata-rata lama sekolah	9,85	10		10,75		11,3		11,87		12			
1	01	03	Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan	Jumlah ketersediaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center)	1	2	631.881	3	638.200	4	644.582	5	651.027	6	657.538
1	01	04	Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,47%	115,04%	951.844	115,62%	961.362	116,20%	970.976	116,78%	980.685	117,36%	990.492
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	111,12%	111,68%		112,23%		112,80%		113,38%		113,93%		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	106,49%	107,02	299.000	107,56	301.990	108,10	305.000	108,64	308.060	109,18	311.140	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	103,38%	103,90		104,42		104,94		105,46		105,99		
			Rasio murid terhadap sekolah SD/MI	388	390	25.350.070	394	25.603.570	398	25.859.605	402	26.118.201	406,02	26.379.383	
			Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs	331	334		337		340		344		347,44		
			Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI	32	32		32		32		33		33,33		
			Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs	34	34		34		34		35		35,35		
			Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI	1,21	1,22		1,2		1,2		1,2		1		
			Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs	1,33	1,34		1,3		1,3		1,3		1		
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs	28,39	28,67		28,96		29,25		29,54		33,30		
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI	82,37%	83,19%		84,03%		84,87%		85,71%		86,57%		
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs	55,43	55,98		56,54		57,11		57,68		58,26		
1	01	05	Pendidikan Menengah Universal	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	101,00	101,51	1.269.820	102,01	1.282.953	102,52	1.295.343	103,04	1.308.297	103,55	1.321.380
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	94,04%	94,51%		94,98%		95,46%		95,93%		96,41%		
			Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja	50%	55%		60%		65%		70%		75%		
			Prosentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi	20%	25%		30%		35%		40%		45%		
			Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK	347	350	29.567.095	354	29.862.765	358	30.161.393	361	30.463.000	404	30.767.637	
			Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	38	38		36		34		33		32		
			Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	1,03	1,03		1,03		1,02		1,01		1,00		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)	60,00%	61,00%		62,00%		63,00%		64,00%		65,00%				
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK	68,90%	69,59%		70,28%		70,99%		71,70%		72,41%				
1	01	06	Pendidikan non formal	Angka putus sekolah SD/MI	0,10	0,10	209.415	0,09	211.510	0,08	213.625	0,08	215.781	0,70	217.918	
				Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,08		0,08		0,07		0,07		0,60		
				Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	0,12	0,11		0,10		0,10		0,90		0,90		
				Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor	1 / 17	1 / 17	1.298.398	1 / 17	1.311.382	1 / 16	1.324.496	1 / 16	1.337.741	1 / 15	1.351.118	
				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A,	80%	85%		87%		90%		92%		95%		
1	01	07	Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD	37,52%	37,90	1.475.000	38,28	1.489.750	38,66	1.504.647	39,05	1.519.693	39,44	1.534.890	
				Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)	16,39%	18,03		19,84		21,82		24,00		26,40		
1	01	08	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang membutuhkan khusus dengan kondisi baik	50%	53%	164.420	58%	166.064	64%	167.725	70%	169.402	77%	171.096	
<b>Jumlah</b>						<b>108.169.826</b>		<b>109.252.947</b>		<b>110.409.128</b>		<b>111.447.490</b>		<b>112.561.949</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>KESEHATAN</b>														
1	02	01	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran	61,9	60,9	475.088	59,3	574.492	58,5	631.941	58	695.135	57,5	762.649	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	18	18		17		12		11		10		
				Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	96,2	96		97		97		98		98		
				Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas	94,23	95		95		95		95		95		
				Cakupan imunisasi TT pada ibu hamil	63,58	96		97		97		98		98		
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,73	98		98		99		99		100		
				Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	98,21	96		96		97		97		98		
				Cakupan Pelayanan Nifas	92,87	95		95		95		95		95		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja	57,64	75		78		80		82		85		
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	95,78	95		95		95		96		97		
				Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap	95,78	95		95		95		96		97		
				Cakupan Kunjungan Bayi	78,43	80		80		85		90		95		
				Cakupan Kepesertaan KB Aktif	70,90	70		70		70		73		75		
1	02	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	20,1	20,1	35.860	15	60.000	14,5	68.000	14,2	78.000	14	90.000	
				Cakupan pelayanan anak balita	60,55	80		80		85		90		95		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
		Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani	124,3	100		100		100		100		100			
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	82,85	80		82		84		86		88			
1	02	03	Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	13,07	<15	1.063.409	<15	1.169.750	<15	1.276.091	<15	1.382.432	<15	1.418.773
			Persentase Balita Stunting	24,56	<32		<32		<32		<32		<32		
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100		100		100		100		100		
			Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S)	62,53	70		72		75		77		80		
			Persentase Balita yang naik berat badannya (N / D)	72,05	76		76		78		78		80		
			Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita	85,45	85		85		85		87		90		
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	96,24	95		95		95		95		95		
			Rumah Tangga dengan garam beriodium baik	98,36	90		90		90		90		90		
			Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif	73,44	75		77		80		80		80		
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga	100	100		100		100		100		100		
1	02	04	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan Penderita Diare	124,3	100	5.711.349	100	6.282.483	100	6.910.732	100,00	7.601.805	100	8.361.986
			Angka Kesakitan Diare per 1000 penduduk	214	214		214		214		214		214		
			Cakupan Penderita DBD yang Ditangani	100	100		100		100		100		100		
			Angka Bebas Jentik	69,11	75		80		85		90		95		
			Angka Kesakitan Demam berdarah Dengue per 100.000 Penduduk	52	52		52		52		52		52		
			Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk	<1	<1		<1		<1		<1		<1		
			Persentase penderita malaria yang diobati sesuai standar	100	80		80		80		80		80		
			Persentase penderita kusta selesai berobat (RFT Rate)	100	100		100		100		100		100		
			Angka kesembuhan TB BTA positif	92,74	80		80		80		80		80		
			Penemuan pasien baru TB BTA positif	55,19	70		70		70		70		70		
			Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan	100	100		100		100		100		100		
			Persentase Kasus HIV terhadap resiko tinggi	3	3		3		3		3		3		
			Persentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati sesuai standar	100	100		100		100		100		100		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	5/100.000	4/100.000		4/100.000		4/100.000		4/100.000		4/100.000			
		Persentase Penyelidikan epidemiologi (PE)	100	100		100		100		100		100			
		Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	100		100		100		100		100			
		Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	58,62	100		100		100		100		100			
		Persentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM	20	20		25		30		35		40			
		Persentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara	5	5		7,5		10		12,5		15			
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM	25	25		35		50		75		100			
1	02	05	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak	96,65	76	831.104	76	914.214	76	1.005.635	76	1.106.199	76	1.216.819
			Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak	100	100		100		100		100		100		
1	02	06	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Tempat Umum dan Makanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat	77	77	967.873	79	977.552	81	987.327	83	997.200	85	1.007.172
			Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat	84,4	87		90		93		96		99		
1	02	07	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga sehat ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	38,8	40	1.019.768	45	1.132.069	50	1.307.941	55	1.463.735	60	1.688.109
			Persentase Sekolah ber PHBS	40	40		45		50		60		70		
			Persentase Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	30	30		35		40		45		50		
			Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS	50	50		55		60		65		70		
			Persentase Tempat Kerja ber-PHBS	40	40		45		50		55		60		
			Prosentase Kelurahan Siaga Aktif	89,96	100		100		100		100		100		
			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	32,06	63		65		68		70		73		
			Rasio Posyandu per Satuan Balita	1 : 217	1 : 209		1 : 201		1 : 194		1 : 188		1 : 182		
			Persentase Pengobatan Tradisional Memenuhi Syarat STPT dan SIPT	25	25		30		35		40		45		
			Persentase Ranting SBH Aktif	83	83		100		100		100		100		
			Persentase Pesantren dengan Poskestren Aktif	40	40		45		50		55		60		
			Persentase POS UKK Aktif	0	100		100		100		100		100		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
1	02	08	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar.	85	85,00	5.070.400	85,00	5.577.440	85,00	6.135.184	85,00	6.748.702	85,00	7.423.573	
1	02	09	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Berakreditasi	0	20	757.121	40	1.015.000	60	1.060.000	80	1.105.000	100	1.045.000	
				Persentase Puskesmas ISO	4,3	10		20		30		40		50		
				Kepatuhan Petugas terhadap SOP	80	80		90		100		100		100		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat	80	80		80		80		80		80		
1	02	10	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100	100	33.373.303	100	46.412.000	100	50.460.000	100	54.460.000	100	58.515.000	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	2,49	3		3		3		3		3		
				Persentase Rawat Jalan	102,94	100		100		100		100		100		
				Persentase Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	91,67	100		100		100		100		100		
				Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat	5	5		10		20		30		40		
				Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa termasuk NAPZA	10	10		20		30		40		50		
				Persentase RSJ yang memberikan layanan subspecialis utama dan NAPZA	10	10		30		50		70		100		
				Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer	10	10		20		30		40		50		
				Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga	1	4		4		4		4		4		
				Persentase minimal memiliki Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	4	4		4		4		4		4		
				Persentase Fasilitas kesehatan pemerintah (RS, Lab, Instalasi Farmasi, dan Dinas Kesehatan) yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	50	50		70		80		90		100		
				Rasio Cabut Tambal	2,5 : 1	2 : 1		2 : 1		2 : 1		2 : 1		2 : 1		
1	02	11	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas dan Jaringannya berkategori Baik	34,76	50	4.739.276	60	15.000.000	80	15.000.000	90	15.000.000	100	15.000.000	
1	02	12	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	80	3.352.853	85	2.525.000	90	3.150.000	95	3.150.000	100	3.850.000	
				Persentase Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan	60	60		65		70		75		80		
1	02	13	Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Industri Rumah Tangga Memenuhi Syarat	70	70	48.236	75	216.518	80	298.030	85	333.030	90	370.636	
				Persentase instalasi farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	25	25		30		35		40		45		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
		Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90	90		90		95		95		100			
		Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah	30	30		40		50		55		60			
1	02	14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	65,31	85	20.920	85	55.000	85	60.000	90	80.000	90	80.000	
<b>Jumlah</b>					<b>57.466.560</b>		<b>81.911.518</b>		<b>88.350.881</b>		<b>94.201.238</b>		<b>100.829.717</b>		
		Pelayanan Prima Rumah Sakit	Prosentase indeks kepuasan pasien	70	≥70%	9.925	≥75%	20.000	≥77%	25.000	≥80%	27.500	≥85%	30.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Angka pasien pulang paksa		≤5%		≤5%		≤5%		≤5%		≤5%		
1	02	07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat	N/A	0,8	90.000	>80%	125.000	>85%	156.250	>90%	185.000	>95%	217.000	
1	02	15 Pelayanan rumah sakit	Bed Occupation Rate (BOR)	60-85	60-65%	1.969.780	70-85%	2.436.000	70-85%	2.819.300	70-85%	3.196.160	70-85%	3.768.392	
			Bed Tur Over (BTO)	40-50	40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		
1	02	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Turn Over Interval (TOI)	1-3	1-3 hari	14.178.555	1-3 hari	16.389.144	1-3 hari	18.774.973	1-3 hari	21.538.367	1-3 hari	24.260.441	
			Length Of Stay (LOS)	6-9	6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		
			Gross Death Rate (GDR)	<45	<45%o		<45%o		<45%o		<45%o		<45%o		
			Net Death Rate (NDR)	<25	<25%o		<25%o		<25%o		<25%o		<25%o		
1	02	12 Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium	100%	100%	3.000.000	100%	3.500.000	100%	4.225.000	100%	4.750.000	100%	5.290.745	
1	02	16 Pegadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	80	80%	27.735.827	85%	19.127.227	90%	7.150.000	95%	6.172.500	100%	6.207.000	
1	02	17 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100	100	300.000	100	360.000	100	437.500	100	501.250	100	580.500	
1	02	09 Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu SPM	≥ 60%	≥ 60%	135.000	≥ 65%	150.000	≥ 70%	50.000	≥ 75%	50.000	≥ 80%	50.000	
1	02	18 Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Tersedianya Sistem informasi RS berkualitas	58,33	80%	357.660	100%	225.000	100%	25.000	100%	28.750	100%	34.500	
1	02	19 Peningkatan kesehatan lingkungan	Persentase Terpenuhinya nilai baku mutu kesehatan lingkungan sekitar RS	100	100	5.000	100	7.500	100	10.000	100	11.500	100	13.800	
1	02	20 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah dokter spesialis	12	15	949.100	17	1.138.920	19	1.423.650	20	1.637.198	25	1.910.000	
			Prosentase perawat bersertifikat BTLS	75	80%		85%		90%		95%		100%		
			Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS	65	80%		85%		90%		95%		100%		
<b>Jumlah</b>					<b>48.730.847</b>		<b>43.478.791</b>		<b>35.096.673</b>		<b>38.098.225</b>		<b>42.362.378</b>		
<b>Jumlah Total Urusan</b>					<b>106.197.407</b>		<b>125.390.309</b>		<b>123.447.554</b>		<b>132.299.463</b>		<b>143.192.095</b>		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
1	03	PEKERJAAN UMUM														
1	03	01	Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring jalan dan jembatan	Prosentase Terbangunnya sistem informasi/database jalan dan jembatan	15	25	400.000	45	300.000	65	350.000	85	250.000	100	150.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Prosentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak	7,66	35	875.000	45	400.000	65	550.000	85	600.000	100	750.000	
1	03	02	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik	77,2	78,7	90.000.000	80,2	75.000.000	82,6	105.000.000	88,9	92.000.000	95	85.000.000	
1	03	03	Pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase penambahan jalan kota dalam kondisi baik	77,2	78,7	18.000.000	80,2	19.000.000	82,6	20.000.000	88,9	20.000.000	95	20.000.000	
				Prosentase terbangunnya jalan inner ring road	39,38	43,38	8.000.000	46,38	6.292.000	48,88	5.556.000	51,38	5.834.430	53,88	6.126.152	
				Prosentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan	45	47	5.040.000	65	5.292.000	70	5.556.000	75	5.834.340	82	6.126.152	
				Prosentase trotoar dengan kondisi yang baik	16,77	19,77	6.500.000	22,27	5.500.000	24,77	4.500.000	26,52	3.500.000	29,52	2.850.000	
1	03	04	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase/Rasio Jalan dengan kondisi baik (rutin)	67	70	8.000.000	73	7.500.000	76	8.250.000	80	7.700.000	95	9.000.000	
				Prosentase jalan dengan kondisi baik (periodik)	67	70	35.000.000	73	38.000.000	76	32.000.000	80	30.000.000	95	34.000.000	
1	03	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase PJU dalam kondisi baik	73	75	7.480.000	80	7.745.000	85	7.730.000	90	7.700.000	95	8.700.000	
				Prosentase PJU ber meter	25	35	1.800.000	45	2.000.000	55	2.500.000	65	3.000.000	75	2.500.000	
1	03	06	Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring Saluran Drainase	Prosentase Terbangunnya sistem informasi/database saluran drainase	10	15	100.000	35	850.000	40	100.000	45	100.000	65	850.000	
1	03	07	Pembangunan dan Peningkatan turap/talud/bronjong	Prosentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat	31,75	32,26	15.974.000	32,78	18.166.000	33,29	20.357.000	33,8	22.549.000	34,32	24.740.000	
				Prosentase turap/talud/bronjong dengan konstruksi yang baik	18,8	19,01		20,06		21,1		22,15		23,19		
1	03	08	Pembangunan saluran drainase/koker/gorong-gorong	Prosentase Panjang saluran drainase dengan kondisi baik	32,59	33,6	17.285.000	34,7	19.716.000	35,87	22.148.000	37,1	24.579.000	38,38	27.010.000	
				panjang saluran drainase kota dengan kondisi baik (m)	197100	203223		209866		216951		224406		232167		
1	03	09	Peningkatan saluran drainase/koker/gorong-gorong	Prosentase drainase dan gorong-gorong kota dengan kondisi baik	21,06	21,32	3.750.000	21,55	3.750.000	21,76	3.750.000	21,96	3.750.000	22,13	3.750.000	
				Saluran drainase lingkungan dengan konstruksi yang baik (m)	127.352,00	128.914,50		130.334,95		131.626,28		132.800,21		133.867,41		
1	03	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dipelihara	604805	316.806,8	8.458.000	403.208,71	10.773.000	399.521,80	11.781.000	395.893,18	12.884.000	392.272,07	14.090.000	
				Peningkatan Aliran Air (%)	42	52		67		66		65		65		
1	03	11	Pengendalian banjir	Lama genangan (jam)	>3	3	770.000	2,5	830.000	2,2	890.000	2	950.000	<2	1.010.000	
				Luas genangan (ha)	4445	4346		4248		4149		4050		3951		
1	03	12	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Prosentase alat berat yang kondisinya baik	25	30	9.314.625	35	3.355.356	45	3.398.124	50	4.243.030	55	990.181	
<b>Jumlah</b>							<b>236.746.625</b>		<b>224.469.356</b>		<b>254.416.124</b>		<b>245.473.800</b>		<b>247.642.485</b>	



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019		
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	
<b>1 04</b>	<b>CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN</b>													
1 04 01	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Berkurangnya Luas Kawasan kumuh Perkotaan (Ha)	81,66	70,00	549.018	60,00	576.469	55,00	605.293	50,00	623.451	40,00	642.155	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
		Berkurangnya Jumlah Rumah Tak Layak Huni (unit)	3,322	2,822		2,322		1,822		31,27		822		
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	50	50		55		60		65		70		
1 04 02	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	71	76	47.066.205	81	48.948.853	86	49.927.830	91	52.424.223	95	55.045.433	
1 04 03	Pengembangan perumahan	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung sarana dan utilitas umum (PSU) (%)	70	70	44.695.100	74	4.700.000	79	4.800.000	83	4.900.000	85	5.000.000	
1 04 04	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi	156,210	156,710	2.900.000	157,210	2.958.000	157,210	3.017.160	158,210	3.077.503	158,710	3.139.053	
1 04 05	Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung	Prosentase gedung pemerintahan berkondisi baik sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan Cipta Karya	40	50	43.221.742	60	47.543.917	70	52.298.308	80	54.913.224	90	57.658.885	
		Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kota (dokumen)	1	1		1		1		1		1		
<b>Jumlah</b>					<b>138.432.065</b>		<b>104.727.239</b>		<b>110.648.591</b>		<b>115.938.401</b>		<b>121.485.526</b>	
<b>1 05</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>													
1 05 01	Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Ketersediaan Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang	1	1	150.000	1	157.500	1	165.375	1	173.643	1	182.352	
1 05 02	Pemanfaatan Ruang	Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota yang sesuai dengan peraturan perencanaan Tata Ruang	80	80	150.000	82	157.500	84	173.643	85	182.325	90	185.500	
1 05 03	Pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti	90	90	523.640	93	539.349	94	544.742	95	550.190	96	555.692	
<b>Jumlah</b>					<b>823.640</b>		<b>854.349</b>		<b>883.760</b>		<b>906.158</b>		<b>923.544</b>	
<b>1 06</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>													
1 06 01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang sesuai ketentuan	1	Review Dok. RPJPD	508.912		534.358		561.075		589.129	1	1.225.885	BAPPEDA
		Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Menengah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perda RPJMD 2015-2019									1 Perda		
		Tersedianya dokumen Pembangunan Tahunan sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Perwa RKPD	1 Perwa RKPD				1 Perwa RKPD		1 Perwa RKPD		1 Perwa RKPD		
		Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan				4 Dokumen Nota Kesepakatan		4 Dokumen Nota Kesepakatan		4 Dokumen Nota Kesepakatan		
		Persentase dokumen hasil perencanaan Bappeda (bidang fispra, sosial budaya dan ekonomi) yang ditindaklanjuti oleh SKPD	44%	60%		65%		70%		75%		80%		
		Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	75%	80%		85%		90%		90%		95%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
					TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
1	06	02	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi	3 dokumen	3 dokumen	768.248	4 dokumen	797.911	3 dokumen	829.057	4 dokumen	861.760	3 dokumen	896.098	
				Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	4 kegiatan	4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	2%	2,99%		3%		3,20%		3,3		3,4		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	1%	2,50%		2,80%		3%		3,20%		3,30%		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)	0,50%	0,65%		0,70%		0,75%		0,80%		0,85%		
1	06	03	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya	4 dokumen	4 dokumen	965.009	5 dokumen	1.013.259	4 dokumen	1.063.922	5 dokumen	1.117.118	5 dokumen	1.172.974	
				Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	5%	5,50%		6%		6,50%		7,00%		7,50%		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	1%	2,50%		2,80%		3%		3,20%		3,30%		
1	06	04	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana	3 dokumen	4 dokumen	1.185.694	4 dokumen	1.244.978	5 dokumen	1.307.227	5 dokumen	1.372.589	5 dokumen	1.441.218	
				Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	10%	10,50%		11%		11,50%		12%		12,50%		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	10%	13,50%		14%		15%		16%		17%		
				Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)	15%	15,50%		16,00%		16,50%		17,00%		17,50%		
1	06	05	Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan	3 kegiatan	3 kegiatan	1.209.044	3 kegiatan	1.269.496	3 kegiatan	1.332.970	3 kegiatan	1.399.619	3 kegiatan	1.469.560	
				Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan digunakan untuk merumuskan kebijakan	3 dokumen	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019		
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	
1 06 06	Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan	Tersedianya data hasil pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	652.057	3 dokumen	679.678	3 dokumen	708.680	3 dokumen	739.133	3 dokumen	771.108	
		Terlaksananya penggunaan Teknologi Sistem Informasi berbasis Internet dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	33%	44%		56%		67%		78%		89%		
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	82%	82%		91%		91%		100%		100%		
		Tersedianya buku Pontianak Dalam Angka	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
1 06 07	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD (setiap lima tahun)		1 dokumen	831.984		731.833		768.424		967.789		847.188	
		Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJMD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
<b>Jumlah</b>					<b>6.120.948</b>		<b>6.271.513</b>		<b>6.571.355</b>		<b>7.047.137</b>		<b>7.824.031</b>	
<b>1 07</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>													
1 07 01	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase tingkat keberfungsian APILL dan rambu lalu lintas jalan	100,00	100,00	795.000	100,00	609.000	100,00	614.400	100,00	841.340	100,00	679.974	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		persentase terpeliharanya terminal dan halte dengan baik	80,00	80		85		85		90		90		
1 07 02	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) (%)	37.53	40	1.631.704	45	2.032.234	50	1.657.000	55	1.245.000	60	1.305.000	
		Persentase peningkatan pelayanan angkutan darat	90,00	90		90		95		95		95		
		Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1 07 03	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Persentase Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan	89.33	90	2.282.100	90	1.867.320	95	2.745.400	95	2.000.400	95	2.530.400	
		Persentase Peningkatan Potensi Parkir		90		90		95		95		95		
1 07 04	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	100,00	100,00	455.700	100,00	870.000	100,00	535.000	100,00	1.050.000	100	905.000	
1 07 05	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	100,00	100,00	133.000	100,00	270.000	100,00	120.000	100,00	100.000	100	150.000	
1 07 06	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sungai	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	91.17	95	569.192	95	861.464	95	601.464	95	976.464	95	806.464	
1 07 07	Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	61.43	65	3.626.262	65	3.326.252	70	1.476.262	75	626.262	75	726.262	
<b>Jumlah</b>					<b>9.492.958</b>		<b>9.836.270</b>		<b>7.749.526</b>		<b>6.839.466</b>		<b>7.103.100</b>	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
1	08	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>														
1	08	01	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	41%	20%	139.577	35%	153.535	40%	168.889	55%	185.778	65%	204.356	Badan Lingkungan hidup
				Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	8%	8%	907.000	8%	1.002.000	8%	1.103.000	8%	1.213.000	8%	1.338.000	
1	08	02	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup	0%	15%	891.828	15%	981.011	15%	1.079.112	15%	1.187.023	15%	1.305.729	
1	08	03	Pengendalian polusi	Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	55,55%	15%	1.008.000	15%	1.109.000	15%	1.220.000	15%	1.342.000	15%	1.476.000	
1	08	04	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau	0%	15%	302.089	35%	333.398	45%	366.738	65%	403.412	80%	443.753	
1	08	05	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan	0%	35%	110.000	40%	121.000	50%	133.100	60%	146.410	85%	161.051	
<b>Jumlah</b>							<b>3.358.494</b>		<b>3.699.944</b>		<b>4.070.839</b>		<b>4.477.623</b>		<b>4.928.889</b>	
1	08	06	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	Luas area penyapuan	309600 m2	396.000	19.536.072	510.000	21.430.842	554.400	22.251.911	606.600	23.437.548	693.000	25.625.652	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	83,73%	85,81%		87,9		91,01		95,21		100		
				Prosentase sampah yang tidak terangkut ke TPA	16,27			12,1		8,99		4,79		0		
				Prosentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT	89 m3	2,25		2,34		2,50		3,20		3,50		
				Prosentase lahan TPA yang dikelola dengan sistem sanitary landfill	0	0		0,672		0,096		0,12		0,145		
1	08	07	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	78%	80%	4.861.056	82	5.008.798	85	5.164.298	87	5.328.052	88	5.500.592	
				Prosentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik	80%	81%		82		85		87		88		
1	08	08	Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan	9.164 Milyar	5,94%	1.673.099	7,5	1.794.002	8,5	1.926.637	10	2.072.125	14,52	2.160.705	
				Prosentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum	250 orang	20%		35		60		65		75		
1	08	09	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat	Prosentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)	0	23%	800.000	25	800.000	30	1.600.000	36	1.600.000	41	1.600.000	
				Prosentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina	5 kelompok	40%		37,56		27,27		21,43		17,65		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019		
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	
1 08 10	Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Prosentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	13,41%	13,56	6.641.618	13,71	8.073.268	13,86	9.872.059	14,01	11.146.398	14,16	13.639.624	
		Prosentase luasan RTH kawasan perkotaan yang dikelola/dipelihara	99,33%	99,36		99,39		99,45		99,47		99,5		
		Prosentase luasan RTH yang dikelola oleh pihak ketiga	8 taman	17,24%		18,97		20,69		22,41		24,14		
Jumlah					33.511.845		37.106.910		40.814.905		43.584.123		48.526.573	
1 09	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL													
1 09 01	Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95,08%	95,55%	821.968	96,02%	887.170	96,49%	1.003.810	96,97%	1.089.820	97,45%	1.080.446	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	79,75%	84,19%		88,44%		92,21%		95,86%		99,33%		
		Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	93,47%	93,98%		92,39%		89,31%		85,20%		80,43%		
		Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran	86,59%	88,15%		90,32%		92,87%		95,54%		98,34%		
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	61,90	65,68		68,46		70,37		71,52		72,05		
		Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak (jiwa)	660,060	672,000		680,000		686,000		692,000		698,000		
Jumlah					821.968		887.170		1.003.810		1.089.820		1.080.446	
1 10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1 10 01	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase penanganan kasus KDRT perempuan dan anak	100	100	1.388.871	100	1.411.559	100	1.444.236	100	1.466.287	100	1.491.257	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana
1 10 02	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG	75	75	501.724	90	523.679	90	537.432	90	549.751	90	556.296	
		Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender	Netral	Sensitif		Sensitif		Sensitif		responsif		responsif		
1 10 03	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak	Terwujudnya Pontianak sebagai Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	1.093.878	Nindya	1.117.468	Utama	1.147.780	Utama	1.180.640	Utama	1.196.963	
Jumlah					2.984.473		3.052.706		3.129.448		3.196.678		3.244.516	
1 11	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA													
1 11 01	Program Keluarga Berencana	Prosentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%	69,26	70	1.089.721	70,25	1.198.693	70,4	1.318.524	70,55	1.450.418	71	1.755.006	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana
		Prosentase cakupan unmet need 5%	15,25	14,5		13,7		12,45		11,25		10		
		Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70%	86	88		90		90,2		90,35		90,46		
1 11 02	Program Bina Keluarga Sejahtera	Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5%	1,8	1,6	327.946	1,4	430.946	1,2	472.946	1	518.946	0,8	568.946	
		Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87%	71,49	72,5		73,7		76,8		78		80		
Jumlah					1.417.667		1.629.639		1.791.470		1.969.364		2.323.952	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
<b>1</b>	<b>12</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>														
1	12	01	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat kelurahan	persentase parrtisipasi aktif LPM dalam pembangunan kelurahan	100	100	845.000	100	895.000	100	945.000	100	995.000	100	1.040.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana
				Jumlah unit usaha kecil yang dilatih	50	60	190.000	75	217.600	85	242.000	100	285.000	120	285.000	
1	12	02	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta teknologi tepat guna	6	6	110.000	6	135.000	6	160.000	6	180.000	6	200.000	
<b>Jumlah</b>						<b>1.145.000</b>		<b>1.247.600</b>		<b>1.347.000</b>		<b>1.460.000</b>		<b>1.525.000</b>		
<b>1</b>	<b>13</b>	<b>SOSIAL</b>														
1	13	01	Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	74	76	1.162.789	78	1.279.068	80	1.406.975	82	1.547.672	84	1.702.439	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13	02	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Prosentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30	40	941.375	50	1.035.513	60	1.139.064	70	1.252.970	80	1.378.267	
1	13	03	Pembinaan para penyandang cacat trauma	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33	40	298.020	47	327.822	54	360.604	61	396.665	68	436.331	
1	13	04	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Prosentase panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	52	59	390.000	66	429.000	73	471.900	80	519.090	87	570.999	
1	13	05	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang nmenyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30	35	183.000	40	201.300	45	221.430	50	243.573	55	267.930	
1	13	06	Bantuan sosial korban bencana	Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerimabantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	200.000	100	260.000	100	332.000	100	418.400	100	522.080	
				Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	10	10		15		20		25		30		
1	13	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial	Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial	0	5	100.000	15	200.000	25	1.200.000	55	2.800.000	95	3.100.000	
<b>Jumlah</b>						<b>3.275.184</b>		<b>3.732.702</b>		<b>5.131.973</b>		<b>7.178.370</b>		<b>7.978.047</b>		
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>														
1	14	01	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	15	20	258.270	25	284.047	30	312.505	35	343.756	40	378.132	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat	10	15		20		25		30		35		
				Prosentase tenaga kerja yang mendapat peltihan kewirausahaan	0	6		12		18		24		30		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019					
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)				
1	14	02	Peningkatan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	56	62	256.200	68	281.820	74	310.002	82	341.002	85	375.102		
1	14	03	Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	100	100	382.500	100	420.750	100	462.825	100	509.108	100	560.018		
1	14	04	Perlindungan dan penegakan norma hukum ketenagakerjaan	Prosentase Besaran pemeriksaan alat di perusahaan	12	18	377.160	24	414.876	30	456.363	36	501.999	45	552.199		
				Prosentase Besaran pengujian peralatan di perusahaan	14	21		28		35		42		50			
1	14	05	Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh	Prosentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan	90,00	91	59.140	92	65.054	93	71.559	94	78.715	95	86.586		
1	14	06	Pengadaan Saranan dan Prasarana Tenaga Kerja	Prosentase calon tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas pelatihan	40,00	50	200.000	60	200.000	70	300.000	80	300.000	90	2.200.000		
				Prosentase kelengkapan peralatan uji	73,00	78	100.000	83	100.000	89	100.000	95	100.000	100	100.000		
<b>Jumlah</b>							<b>1.633.270</b>		<b>1.666.547</b>		<b>1.913.254</b>		<b>1.774.580</b>		<b>4.152.037</b>		
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>															
1	15	01	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Prosentase UMKM yang dibina	5	6	450.000	8	500.000	10	550.000	12	600.000	15	650.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Prosentase koperasi aktif	59,32	59,7		60,57		61,43		62,27		63,11			
1	15	02	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM	Prosentase peningkatan omzet KUMKM	0,66	0,66%	400.000	1,94%	450.000	1,98%	500.000	1,98%	600.000	2%	700.000		
1	15	03	Peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	Prosentase akses pembiayaan KUMKM	2	3%	1.500.000	3%	1.800.000	3%	1.900.000	3%	2.000.000	3%	2.500.000		
1	15	04	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya	1000	500	800.000	600	1.000.000	700	1.100.000	800	1.200.000	1200	1.300.000		
1	15	05	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi	799	804	500.000	809	600.000	814	700.000	819	800.000	824	900.000		
				Jumlah UMKM	5.222	5.326		5.578		5.853		6.138		6.488			
05	15	06	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah PKL yang mendapat fasilitas Pemkot	287	300	100.000	300	200.000	300	200.000	300	200.000	300	200.000		
<b>Jumlah</b>							<b>3.750.000</b>		<b>4.550.000</b>		<b>4.950.000</b>		<b>5.400.000</b>		<b>6.250.000</b>		
<b>1</b>	<b>16</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>															
1	16	01	Kebijakan penanaman modal	Prosentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan	50	55	200.000	60	220.000	65	242.000	75	225.000	100	275.000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
1	16	02	Kerja sama penanaman modal	Prosentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional	85	45	300.000	60	310.000	70	330.000	85	350.000	100	370.000		



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019		
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	
1 16 03	Promosi Penanaman Modal	Prosentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak	75	70	195.000	75	230.000	80	250.000	85	275.000	100	300.000	
1 16 04	Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan	Prosentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpadu (SIMYANDU) perizinan teknis daeah	50	50	150.000	65	180.000	70	200.000	85	250.000	100	300.000	
1 16 05	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal	12,012	10000	585.000	11,000	650.000	12,000	700.000	13,000	750.000	14,000	825.000	
1 16 06	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Prosentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	40	40	145.000	50	174.000	65	185.000	85	200.000	100	250.000	
1 16 07	Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	40	40	250.000	50	260.000	65	275.000	85	285.000	100	300.000	
<b>Jumlah</b>					<b>1.825.000</b>		<b>2.024.000</b>		<b>2.182.000</b>		<b>2.335.000</b>		<b>2.620.000</b>	
<b>1 17</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>													
1 17 01	Pengembangan Nilai Budaya	Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian pagelaran seni dan budaya daerah	n/a	75	238.881	75	250.000	80	250.000	85	275.000	85	275.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 02	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan kajian seni	50%	70%	329.282	75%	350.000	75%	350.000	80%	375.000	80%	375.000	
1 17 03	Pengelolaan keragaman budaya	Cakupan Gelaran seni	95	95%	700.000	95%	725.000	95%	750.000	95%	800.000	100%	825.000	
1 17 04	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Cakupan Fasilitas Seni	90	90%	425.745	90%	500.000	90%	550.000	90%	550.000	100%	575.000	
<b>Jumlah</b>					<b>1.693.908</b>		<b>1.825.000</b>		<b>1.900.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.050.000</b>	
<b>1 18</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>													
1 18 01	Peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat propinsi/nasional	100	50	1.300.000	60	1.430.000	75	1.470.000	85	1.600.000	100	1.750.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 02	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Prosentase meningkatnya jumlah atlet berprestasi di tingkat propinsi dan nasional	100	89,7	1.560.000	153	1.600.000	123	1.780.000	119,4	1.900.000	179,5	2.150.000	
		Prosentase meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	20	30		40		50		60		70		
1 18 03	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Prosentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara	100	100	4.115.000	100	1.350.000	100	1.350.000	100	1.650.000	100	1.750.000	
<b>Jumlah</b>					<b>6.975.000</b>		<b>4.380.000</b>		<b>4.600.000</b>		<b>5.150.000</b>		<b>5.650.000</b>	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
1	19	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>														
1	19	01	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	95%	96%	369.449	97%	443.339	98%	494.272	99%	543.699	100%	590.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	02	Penerapan dan penegakan hukum daerah	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%)	85%	87%	1.303.795	89%	1.564.554	93%	1.721.000	97%	1.893.100	100%	2.082.410	
1	19	03	Perlindungan masyarakat	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (%)	95%	96%	252.849	98%	272.000	100%	282.000	100%	294.000	100%	310.000	
				<b>Jumlah</b>			<b>1.926.093</b>		<b>2.279.893</b>		<b>2.497.272</b>		<b>2.730.799</b>		<b>2.982.410</b>	
1	19		Pembinaan Sosial Politik	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen (%)	30	30	242.500	30	370.250	30	773.270	30	976.000	30	1.560.000	Kantor Kesbangpol
				jumlah kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik (Kelompok sasaran)	0	5		5		5		5		5		
1	19		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina	0	2	1.025.000	3	1.293.000	4	1.740.000	5	1.995.000	6	2.540.000	
				Jumlah penanganan konflik sosial	4	4		4		5		5		5		
				Jumlah Sosialisasi/pertemuan/Penyuluhan wawasan kebangsaan untuk menunjang keharmonisan	0	6 kali setahun		6 kali setahun		6 kali setahun		6 kali setahun		6 kali setahun		
				<b>Jumlah</b>			<b>1.267.500</b>		<b>1.663.250</b>		<b>2.513.270</b>		<b>2.971.000</b>		<b>4.100.000</b>	
1	20	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>														
1	20		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	100	100	5.634.062	100	6.197.469	100	6.817.216	100	7.498.937	100	8.248.831	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Tingkat ketepatan waktu penerbitan SPD	100	100		100		100		100		100		
				Prosentase realisasi penerbitan SP2D	100	100		100		100		100		100		
				Prosentase penyelesaian advis SP2D (pengeluaran)	100	100		100		100		100		100		
				Prosentase otorisasi penyelesaian Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan	100	100		100		100		100		100		
				Prosentase SKPD menyampaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	100	100		100		100		100		100		
				Penyusunan Laporan keuangan pemerintah kota tepat waktu sesuai SAP	100	100		100		100		100		100		
				Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	100	100		100		100		100		100		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
1	20	Penataan dan pengelolaan aset daerah	Prosentase barang milik daerah yang terinventarisasi dalam SIMBADA dan SIMA	100	100	22.205.113	100	24.425.624	100	26.868.186	100	29.555.005	100	32.510.505	
			Prosentase realisasi penghapusan aset milik Pemerintah Kota Pontianak	100	100		100		100		100		100		
<b>Jumlah</b>						<b>27.839.175</b>		<b>30.623.093</b>		<b>33.685.402</b>		<b>37.053.942</b>		<b>40.759.336</b>	
1	20	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase Agenda kedewanan sesuai hasil rapat banmus	80%	80%	6.628.145	80%	7.870.634	80%	6.963.820	80%	7.473.895	80%	7.971.828	Sekretariat DPRD
			Prosentase realisasi rencana legislasi Perda	85%	85%		85%		85%		85%		85%		
			Jumlah raperda inisiatif DPRD yang disahkan	2 perda	2 perda		2 perda		2 perda		2 perda		2 perda		
			jumlah peningkatan wawasan anggota DPRD	6 kegiatan	6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		
<b>Jumlah</b>						<b>6.628.145</b>		<b>7.870.634</b>		<b>6.963.820</b>		<b>7.473.895</b>		<b>7.971.828</b>	
1	20	Peningkatan penerimaan Daerah	Prosentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	17,22	5,04	1.155.049	5,73	1.317.307	6,10	1.506.903	6,56	1.727.938	7,18	2.000.129	Dinas Pendapatan Daerah
1	20	Peningkatan Pengawasan penerimaan daerah	Prosentase wajib pajak yang terdaftar melakukan pembayaran pajak	43,89	47,50	1.029.413	50,00	1.142.325	55,00	1.269.174	60,00	1.462.050	65,00	1.608.358	
1	20	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	4,50	5,00	356.000	5,50	1.871.000	6,00	380.000	6,50	385.000	7,00	390.000	
<b>Jumlah</b>						<b>2.540.462</b>		<b>4.330.632</b>		<b>3.156.077</b>		<b>3.574.988</b>		<b>3.998.487</b>	
1	20	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan	80	82	2.312.409	84	2.543.649	86	2.798.015	99	3.077.817	90	3.385.599	Kecamatan
1	20	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Prosentase terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu	100	100	661.373	100	727.510	100	800.262	100	880.288	100	968.316	
1	20	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	80	82	2.336.400	84	2.570.040	86	2.827.044	88	3.109.745	90	3.420.724	
1	20	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	75	77	844.800	79	929.280	81	1.022.208	83	1.124.429	85	1.236.872	
1	20	Pembinaan lembaga masyarakat	Prosentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina	80	82	1.496.615	84	1.646.277	86	1.810.904	88	1.991.995	90	2.191.194	
1	20	Peningkatan kinerja kelembagaan	Prosentase jumlah dokumen peningkatan kinerja kelembagaan	100	100	99.000	100	108.900	100	119.790	100	131.769	100	144.946	
<b>Jumlah</b>						<b>7.750.597</b>		<b>8.525.656</b>		<b>9.378.223</b>		<b>10.316.043</b>		<b>11.347.651</b>	
1	20	Pendidikan Kedinasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan	177	201	1.649.019	640	4.574.525	472	3.821.755	550	3.086.331	440	2.319.945	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek	764	695	1.910.187	946	1.943.008	904	1.985.008	855	1.992.008	859	2.009.508	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019		
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	
1 20	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Tingkat pemenuhan database kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG	7642	7756	162.440	8150	180.643	8150	186.332	8150	195.361	8150	195.461	
1 20	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara	100	100	670.855	100	811.734	100	892.908	100	982.198	100	1.080.418	
1 20	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian (perubahan status cpns menjadi pns, SK penempatan dan SK pensiun tepat waktu)	100	100	474.301	100	348.518	100	383.021	100	421.323	100	463.456	
1 20	Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil	Tingkat Pemenuhan formasi jabatan	565	355	467.536	505	606.950	505	667.645	505	734.409	505	807.850	
1 20	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian	1535	3230	502.765	1533	546.163	1532	572.137	1532	572.137	1531	598.305	
1 20	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapat bantuan dan penghargaan/reward	357	3420	407.701	3835	815.676	3935	831.676	3985	849.676	4035	869.676	
<b>Jumlah</b>					<b>6.244.804</b>		<b>9.827.217</b>		<b>9.340.482</b>		<b>8.833.443</b>		<b>8.344.619</b>	
1 20	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat	Auditor memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan	100%	100%	307.621	100%	310.697	100%	313.804	100%	316.942	100%	320.112	Inspektorat
1 20	Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti (LHP)	100%	100%	265.500	100%	268.155	100%	270.836	100%	273.544	100%	276.280	
1 20	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Kinerja SKPD Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masuk kategori "Baik"	90%	92%	301.150	94%	304.161	96%	307.203	98%	310.275	100%	313.377	
1 20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Jumlah Temuan Inspektorat Kota Yang Selesai Ditindak Lanjuti	25%	30%	2.427.417	35%	2.451.691	40%	2.476.208	45%	2.500.970	50%	2.525.979	
		Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP DPP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
<b>Jumlah</b>					<b>2.994.375</b>		<b>3.334.704</b>		<b>3.368.051</b>		<b>3.401.731</b>		<b>3.435.748</b>	
1 20	Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tepat Waktu	100%	100%	1.526.000	100%	1.657.643	100%	1.801.402	100%	1.958.436	100%	2.190.019	Sekreariat Daerah
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	2 Laporan	2		2		2		2		2		
		Penyampaian Lakip dan Tapkin Pemerintah Kota Pontianak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Prosentase SKPD yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Prosentase SKPD yang melaksanakan sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Prosentase jumlah SKPD yang telah memenuhi analisis jabatan dan analisis beban kerja	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
		Prosentase SKPD yang telah menyusun SOP	100%	100%		100%		100%		90%		100%			
		Prosentase SKPD yang telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan dokumen reformasi Pemerintah Kota Pontianak	79%	100%		100%		100%		100%		100%			
		Rosentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota bagi SKPD dengan Tupoksi bersifat Generik	54%	84%		100%		100%		100%		100%			
		Prosentase rata-rata indeks kepuasan Masyarakat (IKM) unit Pelayanan Publik dalam Kategori "Baik"	80%	100%		100%		100%		100%		100%			
		Prosentase Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008	75%	100%		100%		100%		100%		100%			
		Tersedianya pedoman evaluasi jabatan pemerintah Kota Pontianak	Tersedia	Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia			
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota pontianak	CC	CC		B		B		B		B			
1	20	Program Pelayanan Prima Sekda	Prosentase SKPD yang telah menyusun SK Budaya Kerja	50%	60%	892.000	70%	899.500	80%	907.750	90%	916.825	100%	926.807	Sekreariat Daerah
			Prosentase SKPD yang telah memiliki Perwa SPM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Prosentase SKPD yang mencapai target SPM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1	20	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti	4	4	605.000	4	635.250	4	667.013	4	700.363	4	735.381	
1	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase data rupa bumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	100	100	4.947.136	100	5.194.493	100	5.454.217	100	5.726.928	100	6.013.275	
1	20	Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan	Jumlah fasilitasi koordinasi antar instansi dan kerjasama daerah	1	1	39.970	1	41.969	1	44.067	1	46.270	1	48.584	
1	20	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Jumlah rapat Forkorpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)	10	10	407.660	10	428.043	10	449.445	10	471.917	10	495.513	
1	20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase peraturan daerah yang diajukan ke legislatif sesuai dengan Program Legislasi daerah	100	100	543.553	100	597.908	100	657.699	100	723.469	100	795.816	
			Prosentase Peraturan Walikota yang diundangkan	90	90		90		90		90		90		
			Persentase Surat Keputusan Walikota yang diundangkan	100	100		100		100		100		100		
			Prosentase Peraturan Daerah yang disesuaikan hasil klarifikasi	100	100		100		100		100		100		
1	20	Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham	Prosentase penyediaan e-dokumen hukum dipublikasikan	90%	90%	681.915	90%	721.534	90%	763.686	90%	808.554	90%	856.333	
			Prosentase Perda yang diimplementasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Prosentase Perwa yang diimplementasikan												
			Prosentase Kajian Perda												
			Prosentase Kajian Perwa	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
			Prosentase Kajian MoU												

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019		
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	
1	20	Program Pembinaan dan Bantuan Hukum	Tersedianya forum Diskusi hukum	Tersedia	Tersedia									
			Tersedianya Panitia RANHAM	Tersedia	Tersedia									
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali)	3 Kali	3 Kali	909.536	3 Kali	994.369	3 Kali	1.087.379	3 Kali	1.189.369	3 Kali	1.301.221
			Persentase penyelesaian perkara perdata dan TUN	75%	75%		75%		75%		75%		75%	
1	20	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah berita yang dirilis	510 Berita	510 Berita	2.049.896	535 Berita	2.152.391	562 Berita	2.260.011	590 Berita	2.373.011	619 Berita	2.491.662
			Jumlah iklan dan balih/spanduk/banner	78 Buah	78 Buah		81 Buah		85 Buah		90 Buah		94 Buah	
			Jumlah tayangan informasi pemerintah kota pontianak pada televisi	110 Kali	110 kali		115 kali		121 buah		127 kali		133 buah	
			Jumlah kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik (Publikasi)	1600 Publikasi	1600 publi kasi		1680 publi kasi		1764 publi kasi		1852 publi kasi		1944 publi kasi	
			Jumlah jumpa pers dengan media massa	24 Kali	24 kail		25 kali		26 kali		27 kali		29 kali	
1	20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan	Jumlah edisi penerbitan majalah warta kota	4 edisi	4 edisi	345.920	4 edisi	363.216	4 edisi	381.377	4 edisi	400.446	4 edisi	420.468
			Jumlah penyampaian informasi melalui mobil keliling	72 kali	72 kali		75 kali		79 kali		83 kali		87 kali	
			Jumlah informasi digital tentang kegiatan pemerintah	75 keping	75 keping		78 keping		82 keping		85 keping		91 keping	
1	20	Program Promosi daerah	Prosentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti	100	100	2.544.992	100	2.672.242	100	2.805.854	100	2.946.146	100	3.093.454
1	20	Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin	2 Kegiatan Sosialisasi	2	125.000	2	131.250	2	137.813	2	144.703	2	151.938
			Jumlah Laporan Monev pelaksanaan program raskin	2 Dokumen Laporan Monev	2		2		2		2		2	
			Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan	90%	90%	257.000	90%	284.000	90%	313.000	90%	365.000	90%	408.000
			Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
1	20	Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD	Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	3	3	136.332	3	143.149	3	150.306	3	157.821	3	165.712
			Prosentase kontribusi BUMD terhadap PAD	0,3	0,3		0,35		0,4		45		0,5	
1	20	Program Fasilitas dan pengembangan kebijakan Jasa konstruksi	Persentase proses pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan transparan	90	90	139.000	90	149.000	90	157.000	90	170.000	90	178.000
2	21	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak	70	80	265.210	80	280.000	85	289.000	90	297.000	95	299.000
1	20	Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama	Prosentase Jumlah Rumah ibadah yang mendapatkan bantuan / dibina	35 Rumah Ibadah	100%	1.061.631	100%	1.179.541	100%	1.306.615	100%	1.524.396	100%	1.581.004
			Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan	250 Orang	250 orang		270 orang		280 orang		290 orang		300 orang	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
		Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi	160 Orang	160 orang		170 orang		180 orang		190 orang		200 orang			
		Jumlah pembinaan pengurus lembaga keagamaan	580 Orang	580 orang		585 orang		585 orang		590 orang		590 orang			
1	20	Program Pelayanan Ibadah Haji	80	80	493.741	80	543.115	80	597.427	80	633.767	80	463.120		
1	20	Program Intensifikasi Pelayanan masyarakat	300	320	1.521.509	330	1.673.659	340	1.841.025	350	2.025.128	360	2.227.641		
<b>Jumlah</b>					<b>17.967.001</b>		<b>19.084.628</b>		<b>20.270.683</b>		<b>21.621.115</b>		<b>22.652.929</b>		
<b>Jumlah Bidang Urusan</b>					<b>71.964.559</b>		<b>83.596.564</b>		<b>86.162.738</b>		<b>92.275.157</b>		<b>98.510.598</b>		
<b>1</b>	<b>21</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>													
1	21	01 Peningkatan ketahanan pangan	Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita	90%	90%	95.000	92%	105.500	94%	116.550	96%	128.205	98%	140.525	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
			Prosentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,2	80,5	130.000	82,5	145.000	90	160.000	93	176.000	95	190.000	
			Prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	90	90	62.513	90	68.764,30	95	75.640,73	96	83.204,80	97	91.528,28	
			Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	90	44.746,60	92	52.000	94	58.200	98	64.020	98	70.422	
			Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan	90	91	46.511,30	92	52.000	93	60.000	94	66.000	95	72.600	
			Jumlah penguatan cadangan pangan (ton)	50	60	435.000	70	510.000	80	660.000	90	700.000	100	760.000	
			Prosentase penanganan daerah rawan pangan	100	100	93.538	100	101.000	100	118.000	100	119.301,3	100	121.330,3	
1	21	02 Pemberdayaan penyuluhan pertanian	Prosentase peningkatan kelembagaan petani	51	52	82.235	53	90.500	64	102.300	55	105.000	56	115.500	
1	21	03 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani	Prosentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi	16,5	20	238.285	25	266.100	30	297.900	35	287.000	40	309.200	
<b>Jumlah</b>					<b>1.227.829</b>		<b>1.390.864</b>		<b>1.648.591</b>		<b>1.728.731</b>		<b>1.871.106</b>		
<b>1</b>	<b>24</b>	<b>KEARSIPAN</b>													
1	24	01 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip/ daerah	Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	75	75,19	250.000	78,95	300.000	82,9	350.000	87,04	400.000	91,39	450.000	Kantor Arpusda
1	24	02 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kearsipan	75	75,19	250.000	79,54	300.000	82,89	350.000	87,04	400.000	91,39	450.000	
1	24	03 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah arsip yang diinput dalam komputer	2.000	2.500	250.000	3.000	300.000	3.500	350.000	4.000	400.000	4.500	450.000	
<b>Jumlah</b>					<b>750.000</b>		<b>900.000</b>		<b>1.050.000</b>		<b>1.200.000</b>		<b>1.350.000</b>		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
<b>1</b>	<b>25</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>														
1	25	01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.	83.19	85	350.000	90	375.000	90	400.000	95	450.000	95	500.000	Dinas Perhubungan
				Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.	76.54	78		80		80		85		85		
				Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional, melalui :												
				Media Massa	4 kali/th	4 kali/th		5 kali/th		7 kali/th		10 kali/th		10 kali/th		
				Media Website (Media Online).	setiap hari	setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		
				Media Tradisional.	2 kali/th	2 kali/th		3 kali/th		3 kali/th		4 kali/th		6 kali/th		
				Media Interpersonal.	1	3 kali/th		3 kali/th		4 kali/th		5 kali/th		6 kali/th		
				Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho).	4	6 kali/th		12 kali/th		12 kali/th		12 kali/th		12 kali/th		
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan.	30%	30		35		40		45		50		
1	25	02	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Peningkatan Pelayanan KOMINFO	%	78	744.213	80	650.000	80	650.000	85	750.000	91	700.000	
<b>Jumlah</b>							<b>1.094.213</b>		<b>1.025.000</b>		<b>1.050.000</b>		<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>	
<b>1</b>	<b>26</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>														
1	26	01	Pengembangan dan pengolahan bahan pustaka	Jumlah buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	25.443	26.543	425.000	27.643	450.000	29.746	475.000	31.843	500.000	33.943	550.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
				Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat yang menerima bantuan (jumlah unit taman bacaan masyarakat/ TBM)	5	6		7		9		10		12		
1	26	02	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	6.739	6.873	15.000	7.011	20.000	7.151	25.000	7.193	30.000	7.437	35.000	
<b>Jumlah</b>							<b>440.000</b>		<b>470.000</b>		<b>500.000</b>		<b>530.000</b>		<b>585.000</b>	
<b>2</b>		<b>URUSAN PILIHAN</b>														
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>PERTANIAN</b>														
2	01	01	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman hortikultura Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)			656.140		895.000		1.017.000		1.079.400		1.202.280	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan
				a. Sawi (%)	2,00	3,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				b. Bayam (%)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019		
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	
		c. Kangkung (%)	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00	2,00		2,00		
		Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)												
		a. Sawi (%)	0,00	0,00	0,00		4,96		2,00			0,00		
		b. Bayam (%)	0,00	0,00	0,00		3,59		2,00			0,00		
		c. Kangkung (%)	0,87	0,00	0,00		5,00		2,00			0,00		
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)												
		a. Pepaya (%)	3,00	0,45	3,17		1,32		0,31			0,47		
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)												
		a. Pepaya (%)	0,00	0,00	1,86		2,00		0,00			0,00		
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)												
		a. Lidah Buaya (%)	4,99	13,39	2,00		1,96		1,92			2,83		
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)												
		a. Lidah Buaya (%)	0,00	0,00	0,00		2,99		0,00			0,00		
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)												
		a. Anggrek (%)	2,00	2,94	2,00		2,00		2,00			2,00		
2	01	02	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan			70.000		132.000		182.000		184.000		234.000
			Persentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :											
			a. Padi (%)	0,00	6,90	0,00		3,23		3,13		3,03		
			b. Jagung (%)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
			c. Ubi Kayu (%)	0,00	0,00	1,98		1,18		1,55		1,53		
			d. Ubi Jalar (%)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
			e. Keladi (%)	0,00	0,00	0,00		3,00		2,00		0,00		
2	01	03	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			300.995		303.050		315.000		315.000		340.000
			Persentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :											
			a. Padi (%)	0,00	6,90	0,00		3,23		3,13		3,03		
			b. Jagung (%)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
			c. Ubi Kayu (%)	0,00	0,00	1,98		1,18		1,55		1,53		
			d. Ubi Jalar (%)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
			e. Keladi (%)	0,00	0,00	0,00		3,00		2,00		0,00		
			Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)											
			a. Sawi (%)	2,00	3,00	2,00		2,00		2,00		2,00		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
		b. Bayam (%)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
		c. Kangkung (%)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
		Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)													
		a. Sawi (%)	0,00	0,00		0,00		4,96		2,00		0,00		0,00	
		b. Bayam (%)	0,00	0,00		0,00		3,59		2,00		0,00		0,00	
		c. Kangkung (%)	0,87	0,00		0,00		5,00		2,00		0,00		0,00	
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)													
		a. Pepaya (%)	3,00	0,45		3,17		1,32		0,31		0,47		0,47	
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)													
		a. Pepaya (%)	0,00	0,00		1,86		2,00		0,00		0,00		0,00	
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)													
		a. Lidah Buaya (%)	4,99	13,39		2,00		1,96		1,92		2,83		2,83	
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)													
		a. Lidah Buaya (%)	0,00	0,00		0,00		2,99		0,00		0,00		0,00	
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)													
		a. Anggrek (%)	2,00	2,94		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
2	01	04	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi hasil Pertanian	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif	-	43,48	892.405	9,09	650.212	8,33	677.500	7,69	735.000	7,14	775.000
2	01	05	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal	Persentase peningkatan jumlah ketersediaan pangan asal hewan :			183.412		217.953		309.698		301.319		358.328
			a. Daging Sapi (%)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
			b. Daging Ayam (%)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
			c. Daging Kambing (%)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
			d. Daging Babi (%)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
			e. Telur (%)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
2	01	06	Peningkatan keamanan Pangan produk hewan	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan (kali)	7	7,00	168.059	7,00	177.965	7,00	217.805	7,00	232.113	7	282.704
2	01	07	Peningkatan penerapan Teknologi peternakan	Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK (KUNAK)	0	1	351.456	1	1.757.278	1	1.933.005	1	1.159.803	1	1.275.783
2	01	08	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Prosentase penurunan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	-	3,33	174.218	3,45	191.640	7,14	210.804	7,69	231.884	8,33	255.073
2	01	09	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)	-	-		1	33.458	1	36.804	1	40.484	1	44.532
2	01	10	Program Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Persentase Peningkatan Jumlah Tamu yang Berkunjung di UPTD Agribisnis (%)	2,00	2,99	1.461.503	4,99	2.046.104	5,00	2.864.546	5,00	4.010.365	5,00	5.614.511
2	01	11	Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan	Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi (%)	0,00	6,38	260.219	5,88	718.206	5,56	837.906	5,26	957.607	5,00	1.077.308
		<b>Jumlah</b>				<b>4.518.407</b>		<b>7.122.865</b>		<b>8.602.068</b>		<b>9.246.975</b>		<b>11.459.519</b>	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019			
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)		
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>KEHUTANAN</b>													
2	02	01 Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman	Persentase Penurunan luasan lahan kritis (%)	0,26	0,44	91.925	0,73	375.000	1,18	431.250	1,79	495.937	2,27	570.328	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	02	02 Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	Jumlah dokumen pengawasan tertib peredaran hasil hutan (dokumen)	18	20	32.000	25	36.800	50	42.320	60	48.668	75	55.968	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan
<b>Jumlah</b>						<b>123.925</b>		<b>411.800</b>		<b>473.570</b>		<b>544.605</b>		<b>626.296</b>	
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													
2	03	01 Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (%)	5,00	5,00	77.498	5,00	392.210	5,00	485.236	5,00	602.109	5,00	749.193	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	03	02 Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan	-	3	183.046	3	291.530	3	430.422	3	404.504	3	471.991	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	03	03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya :			420.175		716.882		937.861		1.230.573		1.621.916	
			a. Ikan Lele (%)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			b. Ikan Mas (%)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
			c. Ikan Nila (%)	2,00	2,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			d. Ikan Lainnya (%)	1,50	1,18		1,90		1,90		1,80		1,91		
2	03	04 Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal	Persentase Peningkatan Jumlah produksi benih komoditas perikanan air tawar			598.850		779.160		973.348		1.218.065		1.526.943	
			a. Ikan Lele (%)	31,14	8,93		11,00		9,55		11,84		10,29		
			b. Ikan Mas (%)	26,67	7,89		14,63		8,51		9,80		10,00		
			c. Ikan Nila (%)	25,00	6,67		17,50		10,21		8,59		9,78		
2	03	05 Program Pengendalian dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan tertib administrasi pelaku usaha kelautan dan perikanan (kali)	-	2	20.000	3	22.400	3	25.088	4	28.099	4	31.470	
2	03	06 Program Pengembangan dan Peningkatan produksi Perikanan tangkap dan fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	Persentase Peningkatan Jumlah kapal yang sandar/bongkar/muat di UPTD PPI	5,88	5,88	433.101	14,70	1.370.126	23,53	1.662.283	32,35	1.314.922	41,18	980.657	
<b>Jumlah</b>						<b>1.732.670</b>		<b>3.572.308</b>		<b>4.514.238</b>		<b>4.798.271</b>		<b>5.382.170</b>	
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>PARIWISATA</b>													
2	04	01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5	5	688.475	7	792.783	8	889.200	9	985.618	10	985.618	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2	2 hari		2 hari		3 hari		3 hari		4 hari		
2	04	02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	718 usaha pariwisata	718 usaha pariwisata	66	718 usaha pariwisata	75.000	718 usaha pariwisata	75.000	720 usaha pariwisata	77.500	720 usaha pariwisata	80.000	
2	04	03 Pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	220	225 orang	163.653	230 orang	165.000	240 orang	165.000	250 orang	170.000	250 orang	175.000	
2	04	04 Program Revitalisasi Objek Wisata	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik)	4	5	137.400	7	142.000	8	145.000	9	145.000	10	150.000	
<b>Jumlah</b>						<b>989.594</b>		<b>1.174.783</b>		<b>1.274.200</b>		<b>1.378.118</b>		<b>1.390.618</b>	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>PERDAGANGAN</b>														
2	05	01	Pengembangan ekspor	Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API	120	127	100.000	132	150.000	137	200.000	142	200.000	147	200.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	05	02	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah gudang yang diawasi	12	12	125.000	12	130.000	12	135.000	12	140.000	12	145.000	
2	05	03	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang beredar yang diawasi (jenis)	10	11	250.000	12	275.000	13	300.000	14	325.000	15	330.000	
				Alat UTTP yang ditera/tera ulang	260	280		300		330		340		358		
2	05	04	Pembinaan dan pengembangan pasar tradisional	Jumlah pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan (orang)	3760	3765	1.800.000	3775	2.100.000	3785	2.400.000	3795	2.700.000	3800	3.000.000	
				Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat	85,71%	85,71%		0,86		0,86		0,86		86		
<b>Jumlah</b>						<b>2.275.000</b>		<b>2.655.000</b>		<b>3.035.000</b>		<b>3.365.000</b>		<b>3.675.000</b>		
<b>2</b>	<b>06</b>	<b>INDUSTRI</b>														
2	06	01	Pengembangan industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH)	Jumlah IKM yang dibina	600	610	1.800.000	620	1.950.000	630	2.100.000	640	2.250.000	650	2.350.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
				Prosentase pemberian rekomendasi TDI/UII	93%	94%		95%		96%		97%		98%		
2	06	02	Pengembangan industri logam mesin elektronika dan aneka	Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi ( Unit Usaha )	40	50	1.200.000	60	1.300.000	70	1.400.000	80	1.500.000	90	1.500.000	
2	06	03	Pengembangan IKM dan industri kreatif	Rasio IKM yang difasilitasi HaKI	25 : 35	25 : 40	1.800.000	30 : 45	1.900.000	35 : 50	2.000.000	35 : 55	2.100.000	40 : 60	2.200.000	
				Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal	-	1 : 5		2 : 6		3 : 7		4 : 8		5 : 9		
				Rasio IKM yang difasilitasi PIRT	35 : 50	35 : 60		40 : 60		45 : 70		50 : 70		50 : 75		
				Jumlah pengujian produk makanan dan minuman	230	235		245		250		255		270		
<b>Jumlah</b>						<b>4.800.000</b>		<b>5.150.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.850.000</b>		<b>6.050.000</b>		
<b>3</b>		<b>URUSAN LAINNYA</b>														
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>														
3	01	01	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM	78%	80%	821.981	82%	903.847	84%	994.231	86%	1.093.654	88%	1.203.020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran	78%	80%		82%		84%		86%		88%		
				Prosentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran	78%	80%		82%		84%		86%		88%		
3	01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Prosentase korban bencana yang mendapatkan bantuan/ pertolongan	80%	85%	61.457	87%	67.602	89%	74.362	91%	81.799	93%	89.979	
				Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	80%	85%		87%		89%		91%		93%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL 2014	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				
				TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			
3	01	03	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Prosentase pemadam kebakaran swasta yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana	85%	90%	504.836	92%	555.320	94%	610.852	96%	671.938	98%	739.131	
				Prosentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	85%	90%		92%		94%		96%		98%		
3	01	04	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan Tim Reaksi Cepat	88%	92%	415.450	94%	456.995	96%	502.694	98%	552.964	100%	608.260	
				Prosentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih	88%	92%		94%		96%		98%		100%		
				Prosentase pemahaman masyarakat dan pelajar dalam menghadapi bencana	88%	92%		94%		96%		98%		100%		
3	01	05	Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran	Prosentase peningkatan ketersediaan peralatan pemadam	75%	77%	392.144	79%	431.358	81%	474.494	83%	521.944	85%	574.138	
				Prosentase peningkatan usia pakai peralatan pemadam	75%	77%		79%		81%		83%		85%		
<b>Jumlah</b>						<b>2.195.868</b>		<b>2.415.122</b>		<b>2.656.633</b>		<b>2.922.299</b>		<b>3.214.528</b>		
<b>Grand Total</b>						<b>763.680.935</b>		<b>760.431.650</b>		<b>808.438.317</b>		<b>830.308.428</b>		<b>873.459.436</b>		



## BAB IX

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

**P**enetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi walikota Pontianak pada akhir periode masa jabatan yaitu 2019. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak. Penyusunan indikator kinerja daerah ini diselaraskan dengan:

1. Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan RPJMP 2013 – 2018;
2. Tujuan, Sasaran serta Skenario Pentahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJP Kota Pontianak 2005-2025;
3. Tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs);
4. Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan mencakup 15 sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2015-2019 yang direncanakan. Hal ini menuntut adanya ukuran kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun penetapan indikator kinerja Pembangunan Kota Pontianak 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel XI-1  
Penetapan Indikator Makro Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>INDIKATOR UMUM</b>								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,95	6,98	7,00	7,20	7,25	7,32	7,32
2	Inflasi (%)	5,5	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
3	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)	20.337.793,53	23.028.483,61	26.079.757,69	29.587.485,10	33.581.795,59	38.138.845,25	38.138.845,25
4	PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. Juta)	8.503.230,87	9.096.756,38	9.733.529,33	10.434.343,44	11.190.833,34	12.010.002,34	12.010.002,34
5	Pendapatan per Kapita Berlaku (Rp)	34.633.850,39	38.085.553,57	42.329.865,46	47.130.255,41	52.498.157,31	58.513.501,93	58.513.501,93
6	Pendapatan per Kapita Konstan 2000 (Rp)	14.480.411,82	15.044.629,44	15.798.420,82	16.620.989,24	17.494.541,88	18.426.024,46	18.426.024,46
7	Angka Pengangguran Terbuka (%)	5,29	5,08	4,62	4,21	3,84	3,49	3,49
8	Angka Kemiskinan (%)	5,37	5,09	4,94	4,82	4,65	4,50	4,50
9	Indeks Pembangunan Manusia	75,42	76,04	76,66	77,28	77,91	78,35	78,35
	a. Angka Melek Huruf (%)	96,84	97,40	97,96	98,52	99,09	99,67	99,67
	b. Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,07	69,48	70,11	71,59	72,18	73,00	73,00
	c. Pengeluaran Riil Perkapita (Rp/Bulan)	651.135,98	653.992,66	656.861,88	659.743,68	662.638,12	665.545,27	665.545,27
	e. Lama Sekolah (Tahun)	9,95	10,00	10,75	11,30	11,87	12,00	12,00
10	Opini Terhadap Audit Lapoaran Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Nilai LAKIP Pemerintah Kota Pontianak	CC	CC	B	B	B	B	B
12	Persentase Kinerja SKPD Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Insstansi Pemerintah (LAKIP) yang masuk kategori "Baik"	90%	93%	95%	98%	100%	100%	100%
13	Cakupan Pelayanan Air Bersih (%)	65,6	67,8	73,4	80,4	82,2	87,0	87,0
14	Kapasitas Pengolahan Air Bersih	1450 lt/detik	1750 lt/detik	1950 lt/detik	1950 lt/detik	2200 lt/detik	2500 lt/detik	2500 lt/detik

**Tabel IX-2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>I URUSAN WAJIB</b>								
<b>1 PENDIDIKAN</b>								
1	Rasio guru terhadap murid (sekolah) SD/MI	25	25,00	24,00	23	22,00	20,00	20,00
2	Rasio guru terhadap murid (sekolah) SLTP/MTs	21	3,00	21,00	20,00	20,00	19,00	19,00
3	Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMA	25	25,00	24,00	23,00	22,00	21,00	21,00
4	Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMK	19	19,00	19,00	18,00	17,00	16,00	16,00
5	Rasio guru terhadap murid (sekolah) MA	16	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,85	105,37	105,90	106,43	106,96	107,50	107,50
7	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	119,84	120,44	121,04	121,65	122,25	122,87	122,87
8	Angka Melek Huruf	99,83	99,86	99,89	99,92	99,95	99,98	99,98
9	Rata-rata lama sekolah	9,85	10	10,75	11,3	11,87	12	12
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	106,49%	107,02	107,56	108,10	108,64	109,18	109,18
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	103,38%	103,90	104,42	104,94	105,46	105,99	105,99
12	Rasio murid terhadap sekolah SD/MI	388	390	394	398	402	406,02	410,0802
13	Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs	331	334	337	340	344	347,44	350,9144
14	Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI	32	32	32	32	33	33,33	33,6633
15	Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs	34	34	34	34	35	35,35	35,7035
16	Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
17	Prosentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
18	Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK	347	350	354	358	361	404	404
19	Angka putus sekolah SD/MI	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,70	0,70
20	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,60	0,60
21	Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	0,12	0,11	0,10	0,10	0,90	0,90	0,90
22	Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik	50%	53%	58%	64%	70%	77%	77%
<b>2 KESEHATAN</b>								
1	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran	61,9	60,9	59,3	58,5	58	57,5	57,5
2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	18	18	17	12	11	10	10
3	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	96,2	96	97	97	98	98	98
4	Cakupan imunisasi TT pada ibu hamil	63,58	96	97	97	98	98	98



NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,73	98	98	99	99	100	100
6	Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	98,21	96	96	97	97	98	98
7	Cakupan Pelayanan Nifas	92,87	95	95	95	95	95	95
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja	57,64	75	78	80	82	85	85
9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	95,78	95	95	95	96	97	97
10	Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap	95,78	95	95	95	96	97	97
11	Cakupan Kunjungan Bayi	78,43	80	80	85	90	95	95
12	Cakupan Kepesertaan KB Aktif	70,90	70	70	70	73	75	75
13	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	20,1	20.1	15	14.5	14.2	14	14
14	Cakupan pelayanan anak balita	60,55	80	80	85	90	95	95
15	Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani	124,3	100	100	100	100	100	100
16	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	82,85	80	82	84	86	88	88
17	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	13,07	<15	<15	<15	<15	<15	<15
18	Persentase Balita Stunting	24,56	<32	<32	<32	<32	<32	<32
19	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Balita yang naik berat badannya (N / D)	72,05	76	76	78	78	80	80
21	Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita	85,45	85	85	85	87	90	90
22	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	96,24	95	95	95	95	95	95
23	Rumah Tangga dengan garam beryodium baik	98,36	90	90	90	90	90	90
24	Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif	73,44	75	77	80	80	80	80
25	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	100	100
26	Penemuan Penderita Diare	124,3	100	100	100	100,00	100	100
27	`	214	214	214	214	214	214	214
28	Cakupan Penderita DBD yang Ditangani	100	100	100	100	100	100	100
29	Angka Bebas Jentik	69,11	75	80	85	90	95	95
30	Angka Kesakitan Demam berdarah Dengue per 100.000 Penduduk	52	52	52	52	52	52	52
31	Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
32	Persentase penderita malaria yang diobati sesuai standar	100	80	80	80	80	80	80
33	Persentase penderita kusta selesai berobat (RFT Rate)	100	100	100	100	100	100	100
34	Angka kesembuhan TB BTA positif	92,74	80	80	80	80	80	80
35	Penemuan pasien baru TB BTA positif	55,19	70	70	70	70	70	70
36	Persentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
37	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	5/100.000	4/100.000	4/100.000	4/100.000	4/100.000	4/100.000	4/100.000

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
38	Persentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara	5	5	7,5	10	12,5	15	15
39	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM	25	25	35	50	75	100	100
40	Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak	96,65	76	76	76	76	76	76
41	Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak	100	100	100	100	100	100	100
42	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat	77	77	79	81	83	85	85
43	Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat	84,4	87	90	93	96	99	99
44	Persentase Rumah tangga sehat ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	38,8	40	45	50	55	60	60
45	Persentase Sekolah ber PHBS	40	40	45	50	60	70	70
46	Persentase Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	30	30	35	40	45	50	50
47	Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS	50	50	55	60	65	70	70
48	Persentase Tempat Kerja ber-PHBS	40	40	45	50	55	60	60
49	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif	89,96	100	100	100	100	100	100
50	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	32,06	63	65	68	70	73	73
51	Rasio Posyandu per Satuan Balita	1 : 217	1 : 209	1 : 201	1 : 194	1 : 188	1 : 182	1 : 182
52	Persentase Pengobatan Tradisional Memenuhi Syarat STPT dan SIPT	25	25	30	35	40	45	45
53	Persentase Pesantren dengan Poskestren Aktif	40	40	45	50	55	60	60
54	Persentase POS UKK Aktif	0	100	100	100	100	100	100
55	Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar.	85	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85
56	Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat	80	80	80	80	80	80	80
57	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100	100
58	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	2,49	3	3	3	3	3	3
59	Persentase Rawat Jalan	102,94	100	100	100	100	100	100
60	Persentase Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	91,67	100	100	100	100	100	100
61	Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat	5	5	10	20	30	40	40
62	Persentase RSUD Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa termasuk NAPZA	10	10	20	30	40	50	50
63	Persentase RSJ yang memberikan layanan subspecialis utama dan NAPZA	10	10	30	50	70	100	100

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
64	Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer	10	10	20	30	40	50	50
<b>3 PEKERJAAN UMUM</b>								
1	Prosentase terbangunnya jalan inner ring road	39,38	43,38	46,38	48,88	51,38	53,88	53,88
2	Prosentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan	45	47	65	70	75	82	82
3	Prosentase trotoar dengan kondisi yang baik	16,77	19,77	22,27	24,77	26,52	29,52	29,52
<b>4 CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN</b>								
1	Berkurangnya Jumlah Rumah Tak Layak Huni (unit)	3,322	2,822	2,322	1,822	31,27	822	822
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	50	50	55	60	65	70	70
3	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung sarana dan utilitas umum (PSU) (%)	70	70	74	79	83	85	85
4	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi	156,210	156,710	157,210	157,210	158,210	158,710	158,710
<b>6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>								
1	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	2%	2,99%	3%	3,20%	3,3	3,4	3,4
2	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	1%	2,50%	2,80%	3%	3,20%	3,30%	3,30%
3	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)	0,50%	0,65%	0,70%	0,75%	0,80%	0,85%	0,85%
4	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	5%	5,50%	6%	6,50%	7,00%	7,50%	7,50%
5	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang Sosial Budaya yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	1%	2,50%	2,80%	3%	3,20%	3,30%	3,30%
6	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran daerah (APBD Kota Pontianak)	10%	10,50%	11%	11,50%	12%	12,50%	12,50%
7	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran Daerah (APBD Provinsi)	10%	13,50%	14%	15%	16%	17%	17%

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
8	Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan anggaran nasional (APBN)	15%	15,50%	16,00%	16,50%	17,00%	17,50%	17,50%
<b>7 PERHUBUNGAN</b>								
1	persentase terpeliharanya terminal dan halte dengan baik	80,00	80	85	85	90	90	90
2	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) (%)	37.53	40	45	50	55	60	60
3	Persentase Peningkatan Potensi Parkir		90	90	95	95	95	95
4	Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
5	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
<b>8 LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1	Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
2	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan	9.164 Milyar	5,94%	7,5	8,5	10	14,52	14,52
3	Prosentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina	5 kelompok	40%	37,56	27,27	21,43	17,65	17,65
<b>10 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1	Prosentase penanganan kasus KDRT perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
<b>11 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>								
1	Prosentase cakupan unmet need 5%	15,25	14,5	13,7	12,45	11,25	10	10
2	Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70%	86	88	90	90,2	90,35	90,46	90,46
<b>13 SOSIAL</b>								
1	Prosentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30	40	50	60	70	80	80
2	Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	10	10	15	20	25	30	30
<b>14 KETENAGAKERJAAN</b>								
1	Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	56	62	68	74	82	85	85

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM						TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019						
2	Prosentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan	90,00	91	92	93	94	95					95	
<b>15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>													
1	Prosentase peningkatan omzet KUMKM	0,66	0,66%	1,94%	1,98%	1,98%	2%					2%	
2	Prosentase akses pembiayaan KUMKM	2	3%	3%	3%	3%	3%					3%	
3	Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya	1000	500	600	700	800	1200					1200	
4	Jumlah PKL yang mendapat fasilitas Pemkot	287	300	300	300	300	300					300	
<b>16 PENANAMAN MODAL</b>													
1	Prosentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	40	40	50	65	85	100					100	
2	Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	40	40	50	65	85	100					100	
<b>18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>													
1	Prosentase meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	20	30	40	50	60	70					70	
<b>19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>													
1	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen (%)	30	30	30	30	30	30					30%	
2	Jumlah penanganan konflik sosial	4	4	4	5	5	5					5	
3	Jumlah Sosialisasi/pertemuan/Penyuluhan wawasan kebangsaan untuk menunjang keharmonisan	0	6 kali setahun	6 kali setahun	6 kali setahun	6 kali setahun	6 kali setahun					6 kali setahun	
<b>20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>													
1	Prosentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	17,22	5,04	5,73	6,10	6,56	7,18					7,18	
2	Prosentase wajib pajak yang terdaftar melakukan pembayaran pajak	43,89	47,50	50,00	55,00	60,00	65,00					65,00	
3	Prosentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00					7,00	
4	prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	80	82	84	86	88	90					90	
5	Prosentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina	80	82	84	86	88	90					90	
6	Jumlah pegawai yang mendapat bantuan dan penghargaan/reward	357	3420	3835	3935	3985	4035					4035	
7	Prosentase penetapan kelurahan sadar hukum	75%	75%	75%	75%	75%	75%					75%	
8	Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin	2 Kegiatan Sosialisasi	2	2	2	2	2					2	

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
9	Jumlah Laporan Monev pelaksanaan program raskin	2 Dokumen Laporan Monev	2	2	2	2	2	2
10	Prosentase Jumlah Rumah ibadah yang mendapatkan bantuan / dibina	35 Rumah Ibadah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan	250 Orang	250 orang	270 orang	280 orang	290 orang	300 orang	300 orang
12	Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi	160 Orang	160 orang	170 orang	180 orang	190 orang	200 orang	200 orang
13	Jumlah pembinaan pengurus lembaga keagamaan	580 Orang	580 orang	585 orang	585 orang	590 orang	590 orang	590 orang
14	Jumlah posyandu yang difasilitasi	300	320	330	340	350	360	360
<b>21 KETAHANAN PANGAN</b>								
1	Prosentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,2	80,5	82,5	90	93	95	95
2	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase peningkatan kelembagaan petani	51	52	53	64	55	56	56
<b>II URUSAN PILIHAN</b>								
<b>1 PERTANIAN</b>								
1	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)							
	a. Sawi (%)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	b. Bayam (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	c. Kangkung (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Prosentase penurunan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	-	3,33	3,45	7,14	7,69	8,33	8,33
<b>2 KEHUTANAN</b>								
1	Jumlah dokumen pengawasan tertib peredaran hasil hutan (dokumen)	18	20	25	50	60	75	75
<b>3 KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
1	Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan	-	3	3	3	3	3	3,00
	a. Ikan Lele (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	b. Ikan Mas (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	c. Ikan Nila (%)	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	d. Ikan Lainnya (%)	1,50	1,18	1,90	1,90	1,80	1,91	1,91
2	Persentase Peningkatan Jumlah kapal yang sandar/bongkar/muat di UPTD PPI	5,88	5,88	14,70	23,53	32,35	41,18	41,18
<b>4 PARIWISATA</b>								
1	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik)	4	5	7	8	9	10	10

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>5 PERDAGANGAN</b>								
1	Jumlah pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan (orang)	3760	3765	3775	3785	3795	3800	3800
<b>6 INDUSTRI</b>								
2	Jumlah pengujian produk makanan dan minuman	230	235	245	250	255	270	270
<b>III URUSAN LAINNYA</b>								
<b>1 PENANGGULANGAN BENCANA</b>								
1	Prosentase korban bencana yang mendapatkan bantuan/pertolongan	80%	85%	87%	89%	91%	93%	93%
2	Prosentase pemahaman masyarakat dan pelajar dalam menghadapi bencana	88%	92%	94%	96%	98%	100%	100%

**Tabel IX-3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>I URUSAN WAJIB</b>								
<b>1 PENDIDIKAN</b>								
1	Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru	80%	83%	85%	87%	90%	95%	95%
3	Prosentase Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	75%	80%	83%	85%	87%	90%	90%
4	Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	95%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
5	Jumlah ketersediaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center)	1	2	3	4	5	6	6
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,47%	115,04%	115,62%	116,20%	116,78%	117,36%	117,36%
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	111,12%	111,68%	112,23%	112,80%	113,38%	113,93%	113,93%
8	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI	82,37%	83,19%	84,03%	84,87%	85,71%	86,57%	87,44%
9	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs	55,43	55,98	56,54	57,11	57,68	58,26	58,84
10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)	60,00%	61,00%	62,00%	63,00%	64,00%	65,00%	65,00%
11	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK	68,90%	69,59%	70,28%	70,99%	71,70%	72,41%	73,14%
12	Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor	1 / 17	1 / 17	1 / 17	1 / 16	1 / 16	1 / 15	1 / 15
13	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha	80%	85%	87%	90%	92%	95%	95%
14	Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD	37,52%	37,90	38,28	38,66	39,05	39,44	39,44
15	Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)	16,39%	18,03	19,84	21,82	24,00	26,40	26,40
<b>2 KESEHATAN</b>								
1	Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas	94,23	95	95	95	95	95	95
2	Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S)	62,53	70	72	75	77	80	80



NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
3	Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kasus HIV terhadap resiko tinggi	3	3	3	3	3	3	3
5	Persentase Penyelidikan epidemiologi (PE)	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga	1	4	4	4	4	4	4
8	Persentase Fasilitas kesehatan pemerintah (RS, Lab, Instalasi Farmasi, dan Dinas Kesehatan) yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	50	50	70	80	90	100	100
9	Rasio Cabut Tambal	2.5 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1
10	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	80	85	90	95	100	100
11	Persentase Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan	60	60	65	70	75	80	80
12	Persentase instalasi farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	25	25	30	35	40	45	45
13	Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah	30	30	40	50	55	60	60
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	65,31	85	85	85	90	90	90
15	Prosentase indeks kepuasan pasien	70	≥70%	≥75%	≥77%	≥80%	≥85%	≥85%
16	Angka pasien pulang paksa	5	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%
17	Bed Occupation Rate (BOR)	60-85	60-65%	70-85%	70-85%	70-85%	70-85%	70-85%
18	Bed Tur Over (BTO)	40-50	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali
19	Turn Over Interval (TOI)	1-3	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari
20	Length Of Stay (LOS)	6-9	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari
21	Gross Death Rate (GDR)	<45	<45%o	<45%o	<45%o	<45%o	<45%o	<45%o
22	Net Death Rate (NDR)	<25	<25%o	<25%o	<25%o	<25%o	<25%o	<25%o
23	Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
24	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	80	80%	85%	90%	95%	100%	1
25	Prosentase Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100	100	100	100	100	100	100
<b>3 PEKERJAAN UMUM</b>								
1	Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database jalan dan jembatan	15	25	45	65	85	100	100
2	Prosentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak	7.66	35	45	65	85	100	100
3	Prosentase PJU ber meter	25	35	45	55	65	75	75

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
4	Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database saluran drainase	10	15	35	40	45	65	65
5	Prsentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat	31,75	32,26	32,78	33,29	33,8	34,32	34,32
6	Prosentase turap/talud/bronjong dengan konstruksi yang baik	18,8	19,01	20,06	21,1	22,15	23,19	23,19
7	Saluran drainase lingkungan dengan konstruksi yang baik (m)	127.352,00	128.914,50	130.334,95	131.626,28	132.800,21	133.867,41	133.867,41
8	Panjang saluran drainase yang dipelihara	604805	316.806,8	403.208,71	399.521,80	395.893,18	392.272,07	392.272,07
9	Peningkatan Aliran Air (%)	42	52	67	66	65	65	65
10	Lama genangan (jam)	>3	3	2,5	2,2	2	<2	<2
11	Luas genangan (ha)	4445	4346	4248	4149	4050	3951	3951
12	Prosentase alat berat yang kondisinya baik	25	30	35	45	50	55	55
<b>4 CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN</b>								
1	Prosentase gedung pemerintahan berkondisi baik sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan Cipta Karya	40	50	60	70	80	90	90
2	Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kota (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1
<b>5 PENATAAN RUANG</b>								
1	Jumlah Ketersediaan Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang	1	1	1	1	1	1	1
3	Prosentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti	90	90	93	94	95	96	96
<b>6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>								
1	Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang sesuai ketentuan		1 Review Dok. RPJPD				1	1
2	Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Menengah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perda RPJMD 2015-2019					1 Perda	1 Perda
3	Tersedianya dokumen Pembangunan Tahunan sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Perwa RKPd	1 Perwa RKPd	1 Perwa RKPd	1 Perwa RKPd	1 Perwa RKPd	1 Perwa RKPd	1 Perwa RKPd
4	Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen Nota Kesepakatan
5	Tersedianya data hasil pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
6	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dipublikasikan	82%	82%	91%	91%	100%	100%	100%
7	Tersedianya buku Pontianak Dalam Angka	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
8	Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD (setiap lima tahun)		1 dokumen				-	-
<b>7 PERHUBUNGAN</b>								
1	Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	61.43	65	65	70	75	75	75
<b>8 LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1	Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
2	Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau	0%	15%	35%	45%	65%	80%	80%
3	Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	0%	35%	40%	50%	60%	85%	85%
4	Luas area penyapuan (m2)	309.600	396.000	510.000	554.400	606.600	693.000	693.000
5	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	83,73%	85,81%	87,9	91,01	95,21	100	100
6	Prosentase sampah yang tidak terangkut ke TPA	16,27		12,1	8,99	4,79	0	0
7	Prosentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT	89 m3	2,25	2,34	2,50	3,20	3,50	3,50
8	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	78%	80%	82	85	87	88	88
9	Prosentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik	80%	81%	82	85	87	88	88
10	Prosentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)	0	23%	25	30	36	41	41
11	Prosentase luasan RTH kawasan perkotaan yang dikelola/dipelihara	99,33%	99,36	99,39	99,45	99,47	99,5	99,5
12	Prosentase luasan RTH yang dikelola oleh pihak ketiga	8 taman	17,24%	18,97	20,69	22,41	24,14	24,14
<b>9 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>								
1	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95,08%	95,55%	96,02%	96,49%	96,97%	97,45%	97,45%
2	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	79,75%	84,19%	88,44%	92,21%	95,86%	99,33%	99,33%
3	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	93,47%	93,98%	92,39%	89,31%	85,20%	80,43%	80,43%
4	Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran	86,59%	88,15%	90,32%	92,87%	95,54%	98,34%	98,34%
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	61,90	65,68	68,46	70,37	71,52	72,05	72,05
6	Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak (jiwa)	660,060	672,000	680,000	686,000	692,000	698,000	698,000

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>13 SOSIAL</b>								
1	Prosentase panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	52	59	66	73	80	87	87
2	Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30	35	40	45	50	55	55
<b>14 KETENAGAKERJAAN</b>								
1	Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase Besaran pemeriksaan alat di perusahaan	12	18	24	30	36	45	45
3	Prosentase Besaran pengujian peralatan di perusahaan	14	21	28	35	42	50	50
<b>15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>								
1	Prosentase UMKM yang dibina	5	6	8	10	12	15	15
<b>16 PENANAMAN MODAL</b>								
1	Prosentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpadu (SIMYANDU) perizinan teknis daerah	50	50	65	70	85	100	100
2	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal	12,012	10000	11,000	12,000	13,000	14,000	14,000
<b>17 KEBUDAYAAN</b>								
1	Cakupan kajian seni	50%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
2	Cakupan Gelaran seni	95	95%	95%	95%	95%	100%	100%
3	Cakupan Fasilitas Seni	90	90%	90%	90%	90%	100%	100%
<b>18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
1	Prosentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara	100	100	100	100	100	100	100
<b>19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>								
1	Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina	0	2	3	4	5	6	6
<b>20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>								
1	Tingkat ketepatan waktu penerbitan SPD	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase realisasi penerbitan SP2D	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
3	Prosentase penyelesaian advis SP2D (pengeluaran)	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase otorisasi penyelesaian Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan	100	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase SKPD menyampaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	100
6	Penyusunan Laporan keuangan pemerintah kota tepat waktu sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	100
7	Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
8	Prosentase barang milik daerah yang terinventarisasi dalam SIMBADA dan SIMA	100	100	100	100	100	100	100
9	Prosentase realisasi penghapusan aset milik Pemerintah Kota Pontianak	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Agenda kedewanan sesuai hasil rapat banmus	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
11	jumlah peningkatan wawasan anggota DPRD	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
12	Prosentase terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
13	Prosentase jumlah dokumen peningkatan kinerja kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100
14	Tingkat pemenuhan database kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG	7642	7756	8150	8150	8150	8150	8150
15	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian (perubahan status cpns menjadi pns, SK penempatan dan SK pensiun tepat waktu)	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian	1535	3230	1533	1532	1532	1531	1531
17	Persentase Kinerja SKPD Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masuk kategori "Baik"	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
18	Persentase Jumlah Temuan Inspektorat Kota Yang Selesai Ditindak Lanjuti	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
19	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	2 Laporan	2	2	2	2	2	2
21	Prosentase SKPD yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Prosentase jumlah SKPD yang telah memenuhi analisis jabatan dan analisis beban kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Prosentase SKPD yang telah menyusun SOP	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
24	Rosentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota bagi SKPD dengan Tupoksi bersifat Generik	54%	84%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Prosentase rata-rata indeks kepuasan Masyarakat (IKM) unit Pelayanan Publik dalam Kategori "Baik"	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Prosentase Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Tersedianya pedoman evaluasi jabatan pemerintah Kota Pontianak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
28	Prosentase SKPD yang telah memiliki Perwa SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti	4	4	4	4	4	4	4
30	Persentase data rupa bumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	100	100	100	100	100	100	100
31	Jumlah fasilitasi koordinasi antar instansi dan kerjasama daerah	1	1	1	1	1	1	1
32	Jumlah rapat Forkorpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)	10	10	10	10	10	10	10
33	Prosentase Peraturan Walikota yang diundangkan	90	90	90	90	90	90	90
34	Persentase Surat Keputusan Walikota yang diundangkan	100	100	100	100	100	100	100
35	Prosentase Peraturan Daerah yang disesuaikan hasil klarifikasi	100	100	100	100	100	100	100
36	Prosentase penyediaan e-dokumen hukum dipublikasikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
37	Prosentase Perda yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Prosentase Perwa yang diimplementasikan							
39	Prosentase Kajian Perda							
40	Prosentase Kajian Perwa							
41	Prosentase Kajian MoU							
42	Tersedianya Panitia RANHAM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
43	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali)	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
44	Persentase penyelesaian perkara perdata dan TUN	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
45	Jumlah berita yang dirilis	510 Berita	510 Berita	535 Berita	562 Berita	590 Berita	619 Berita	619 Berita
46	jumlah tayangan informasi pemerintah kota pontianak pada televisi	110 Kali	110 kali	115 kali	121 buah	127 kali	133 buah	133 buah
47	jumlah kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik (Publikasi)	1600 Publikasi	1600 publi kasi	1680 publi kasi	1764 publi kasi	1852 publi kasi	1944 publi kasi	1944 publi kasi
48	jumlah jumpa pers dengan media massa	24 Kali	24 kali	25 kali	26 kali	27 kali	29 kali	29 kali
49	Jumlah edisi penerbitan majalah warta kota	4 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi
50	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
51	Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	Persentase jumlah jemaah haji Kota Pontianak yang difasilitasi	80	80	80	80	80	80	80
53	Jumlah posyandu yang difasilitasi	300	320	330	340	350	360	360
<b>21 KETAHANAN PANGAN</b>								
1	Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	90	92	94	98	98	98
<b>22 KEARSIPAN</b>								
1	Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	75	75,19	78,95	82,9	87,04	91,39	91,39
2	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kearsipan	75	75,19	79,54	82,89	87,04	91,39	91,39
3	Jumlah arsip yang diinput dalam komputer	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	4500
<b>23 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.	76.54	78	80	80	85	85	85
2	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional, melalui :							
	- Media Massa	4 kali/th	4 kali/th	5 kali/th	7 kali/th	10 kali/th	10 kali/th	10 kali/th
	- Media Website (Media Online).	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
	- Media Tradisional.	2 kali/th	2 kali/th	3 kali/th	3 kali/th	4 kali/th	6 kali/th	6 kali/th
	- Media Interpersonal.	1	3 kali/th	3 kali/th	4 kali/th	5 kali/th	6 kali/th	6 kali/th
	- Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho).	4	6 kali/th	12 kali/th	12 kali/th	12 kali/th	12 kali/th	12 kali/th
3	Persentase Peningkatan Pelayanan KOMINFO	%	78	80	80	85	91	91
<b>24 PERPUSTAKAAN</b>								
1	Jumlah buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	25.443	26.543	27.643	29.746	31.843	33.943	33.943
2	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat yang menerima bantuan (jumlah unit taman bacaan masyarakat/ TBM)	5	6	7	9	10	12	12
3	Jumlah kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	6.739	6.873	7.011	7.151	7.193	7.437	7.437
<b>II URUSAN PILIHAN</b>								
<b>1 PERTANIAN</b>								
1	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan (kali)	7	7,00	7,00	7,00	7,00	7	7,00

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
2	Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK (KUNAK)	0						1,00
3	Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)		-	-	1	1	1	1
4	Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi (%)	0,00	6,38	5,88	5,56	5,26	5,00	5,00
<b>3 KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
1	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya :							
2	Jumlah pengawasan tertib administrasi pelaku usaha kelautan dan perikanan (kali)		-	2	3	3	4	4
<b>4 PARIWISATA</b>								
1	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	718 usaha pariwisata	718 usaha pariwisata	718 usaha pariwisata	718 usaha pariwisata	720 usaha pariwisata	720 usaha pariwisata	720 usaha pariwisata
2	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	220	225 orang	230 orang	240 orang	250 orang	250 orang	250 orang
<b>5 PERDAGANGAN</b>								
1	Jumlah gudang yang diawasi	12	12	12	12	12	12	12
2	Barang beredar yang diawasi (jenis)	10	11	12	13	14	15	15
3	Alat UTPP yang ditera/tera ulang	260	280	300	330	340	358	358
<b>6 INDUSTRI</b>								
1	Prosentase pemberian rekomendasi TDI/IU	93%	94%	95%	96%	97%	98%	0,98
2	Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi (Unit Usaha)	40	50	60	70	80	90	90
3	Rasio IKM yang difasilitasi HaKI	25 : 35	25 : 40	30 : 45	35 : 50	35 : 55	40 : 60	40 : 60
4	Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal	-	1 : 5	2 : 6	3 : 7	4 : 8	5 : 9	5 : 9
5	Rasio IKM yang difasilitasi PIRT	35 : 50	35 : 60	40 : 60	45 : 70	50 : 70	50 : 75	50 : 75
<b>III URUSAN LAINNYA</b>								
<b>1 PENANGGULANGAN BENCANA</b>								
1	Prosentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM	78%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
2	Prosentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran	78%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
3	Prosentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	85%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
4	Prosentase peningkatan usia pakai peralatan pemadam	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%



**Tabel IX-4**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Daya Saing**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>I URUSAN WAJIB</b>								
<b>1 PENDIDIKAN</b>								
1	Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal dan bimtek PNS	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
2	Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi	40%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
3	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	63,90	65,00	67,15	73,87	76,00	81,16	81,16
4	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	69,81	71,21	72,63	74,08	76,31	77,07	77,07
5	Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,79	99,84	99,89	99,94	99,99	100,00	100,00
7	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,90	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Nilai rata - rata ujian SD/MI	7,17	7,24	7,31	7,39	7,46	7,54	7,54
9	Nilai rata - rata ujian SMP/MTs	7,35	7,42	7,50	7,57	7,65	7,72	7,72
10	Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA	7,16	7,23	7,30	7,38	7,45	7,53	7,53
11	Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
12	Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI	1,21	1,22	1,2	1,2	1,2	1	1
13	Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs	1,33	1,34	1,3	1,3	1,3	1	1
14	Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs	28,39	28,67	28,96	29,25	29,54	33,30	33,30
15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	101,00	101,51	102,01	102,52	103,04	103,55	103,55
16	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	94,04%	94,51%	94,98%	95,46%	95,93%	96,41%	96,41%
17	Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	38	38	36	34	33	32	32
18	Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00
<b>2 KESEHATAN</b>								
1	Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	58,62	100	100	100	100	100	100
2	Persentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM	20	20	25	30	35	40	40
3	Persentase Ranting SBH Aktif	83	83	100	100	100	100	100
4	Persentase Puskesmas Berakreditasi	0	20	40	60	80	100	100
5	Persentase Puskesmas ISO	4,3	10	20	30	40	50	50
6	Kepatuhan Petugas terhadap SOP	80	80	90	100	100	100	100
7	Persentase minimal memiliki Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	4	4	4	4	4	4	4
8	Persentase Puskesmas dan Jaringan nya berkondisi Baik	34,76	50	60	80	90	100	100

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
9	Persentase Industri Rumah Tangga Memenuhi Syarat	70	70	75	80	85	90	90
10	Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90	90	90	95	95	100	100
11	Persentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat	N/A	0,8	>80%	>85%	>90%	>95%	>95%
12	Persentase Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu SPM	≥ 60%	≥ 60%	≥ 65%	≥ 70%	≥ 75%	≥ 80%	≥ 80%
13	Persentase Tersedianya Sistem informasi RS berkualitas	58,33	80%	100%	100%	100%	100%	1
14	Persentase Terpenuhinya nilai baku mutu kesehatan lingkungan sekitar RS	100	100	100	100	100	100	100
15	Jumlah dokter spesialis	12	15	17	19	20	25	25
16	Persentase perawat bersertifikat BTLS	75	80%	85%	90%	95%	100%	1
17	Persentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS	65	80%	85%	90%	95%	100%	1
<b>3 PEKERJAAN UMUM</b>								
1	Persentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik	77,2	78,7	80,2	82,6	88,9	95	95
2	Persentase penambahan jalan kota dalam kondisi baik	77,2	78,7	80,2	82,6	88,9	95	95
3	Persentase/Rasio Jalan dengan kondisi baik (rutin)	67	70	73	76	80	95	95
4	Persentase jalan dengan kondisi baik (periodik)	67	70	73	76	80	95	95
5	Persentase PJU dalam kondisi baik	73	75	80	85	90	95	95
6	Persentase Panjang saluran drainase dengan kondisi baik	32,59	33,6	34,7	35,87	37,1	38,38	38,38
7	panjang saluran drainase kota dengan kondisi baik (m)	197100	203223	209866	216951	224406	232167	232167
8	Persentase drainase dan gorong-gorong kota dengan kondisi baik	21,06	21,32	21,55	21,76	21,96	22,13	22,13
<b>4 CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN</b>								
1	Berkurangnya Luas Kawasan kumuh Perkotaan (Ha)	81,6	70	60	55	50	40	40
2	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	71	76	81	86	91	95	95
<b>5 PENATAAN RUANG</b>								
1	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota yang sesuai dengan peraturan perencanaan Tata Ruang	80	80	82	84	85	90	90
<b>6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>								
1	Persentase dokumen hasil perencanaan Bappeda (bidang fispra, sosial budaya dan ekonomi) yang ditindaklanjuti oleh SKPD	44%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
2	Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	75%	80%	85%	90%	90%	95%	95%
3	Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
4	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial budaya	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
6	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
7	Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
8	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
9	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
10	Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan digunakan untuk merumuskan kebijakan	3 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
11	Terlaksananya penggunaan Teknologi Sistem Informasi berbasis Internet dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	33%	44%	56%	67%	78%	89%	89%
12	Tersedianya laporan evaluasi pencapaian target kinerja RPJMD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
13	Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
14	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
15	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
<b>7 PERHUBUNGAN</b>								
1	Persentase tingkat keberfungsian APILL dan rambu lalu lintas jalan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase peningkatan pelayanan angkutan darat	90,00	90	90	95	95	95	95
3	Persentase Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan	89.33	90	90	95	95	95	95
4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	91.17	95	95	95	95	95	95
<b>8 LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1	Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	41%	20%	35%	40%	55%	65%	65%

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
2	Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	55,55%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
3	Prosentase lahan TPA yang dikelola dengan sistem sanitary landfill	0	0	0,672	0,096	0,12	0,145	0,145
4	Prosentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum	250 orang	20%	35	60	65	75	75
5	Prosentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	13,41%	13,56	13,71	13,86	14,01	14,16	14,16
<b>10 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1	Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG	75	75	90	90	90	90	90
2	Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender	Netral	Sensitif	Sensitif	Sensitif	responsif	responsif	responsif
3	Terwujudnya Pontianak sebagai Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama
<b>11 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>								
1	Prosentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%	69,26	70	70,25	70,4	70,55	71	71
2	Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5%	1,8	1,6	1,4	1,2	1	0,8	0,8
3	Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87%	71,49	72,5	73,7	76,8	78	80	80
<b>12 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>								
1	persentase parttisipasi aktif LPM dalam pembangunan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah unit usaha kecil yang dilatih	50	60	75	85	100	120	120
3	jumlah peserta teknologi tepat guna	6	6	6	6	6	6	6
<b>13 SOSIAL</b>								
1	Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	74	76	78	80	82	84	84
2	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33	40	47	54	61	68	68
3	Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial	0	5	15	25	55	95	95

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>14 KETENAGAKERJAAN</b>								
1	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	15	20	25	30	35	40	40
2	prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat	10	15	20	25	30	35	35
3	Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	6	12	18	24	30	30
4	Prosentase calon tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas pelatihan	40,00	50	60	70	80	90	90
5	Prosentase kelengkapan peralatan uji	73,0	78	83	89	95	100	100
<b>15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>								
1	Prosentase koperasi aktif	59,32	59,7	60,57	61,43	62,27	63,11	63,11
2	Jumlah koperasi	799	804	809	814	819	824	824
3	Jumlah UMKM	5.222	5.326	5.578	5.853	6.138	6.488	6.488
<b>16 PENANAMAN MODAL</b>								
1	Prosentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan	50	55	60	65	75	100	100
2	Prosentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional	85	45	60	70	85	100	100
3	Prosentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak	75	70	75	80	85	100	100
<b>17 KEBUDAYAAN</b>								
1	Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pelestarian pagelaran seni dan budaya daerah	n/a	75	75	80	85	85	85
<b>18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
1	Prosentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat propinsi/nasional	100	50	60	75	85	100	100
2	Prosentase meningkatnya jumlah atlet berprestasi di tingkat propinsi dan nasional	100	89,7	153	123	119,4	179,5	179,5
<b>19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>								
1	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
2	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%)	85%	87%	89%	93%	97%	100%	100%
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (%)	95%	96%	98%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik (Kelompok sasaran)	0	5	5	5	5	5	5
<b>20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>								
1	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase realisasi rencana legislasi Perda	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3	Jumlah raperda inisiatif DPRD yang disahkan	2 perda	2 perda	2 perda	2 perda	2 perda	2 perda	2 perda
4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan	80	82	84	86	99	90	90
5	Prosentase kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	75	77	79	81	83	85	85
6	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan	177	201	640	472	550	440	440
7	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek	764	695	946	904	855	859	859
8	Tingkat pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara	100	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat Pemenuhan formasi jabatan	565	355	505	505	505	505	505
10	Auditor memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti (LHP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penyampaian Lakip dan Tapkin Pemerintah Kota Pontianak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
14	Prosentase SKPD yang melaksanakan sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Prosentase SKPD yang telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan dokumen reformasi Pemerintah Kota Pontianak	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota pontianak	CC	CC	B	B	B	B	B
17	Prosentase SKPD yang mencapai target SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Prosentase peraturan daerah yang diajukan ke legislatif sesuai dengan Program Legislasi daerah	100	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah iklan dan baliho/spanduk/banner	78 Buah	78 Buah	81 Buah	85 Buah	90 Buah	94 Buah	94 Buah

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
20	Jumlah penyampaian informasi melalui mobil keliling	72 kali	72 kali	75 kali	79 kali	83 kali	87 kali	87 kali
21	Jumlah informasi digital tentang kegiatan pemerintah	75 keping	75 keping	78 keping	82 keping	85 keping	91 keping	91 keping
22	Prosentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti	100	100	100	100	100	100	100
23	Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	3	3	3	3	3	3	3
24	Prosentase kontribusi BUMD terhadap PAD	0,3	0,3	0,35	0,4	45	0,5	0,5
25	Persentase proses pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan transparan	90	90	90	90	90	90	90
26	Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak	70	80	80	85	90	95	95
<b>21 KETAHANAN PANGAN</b>								
1	Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
2	Prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	90	90	90	95	96	97	97
3	Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan	90	91	92	93	94	95	95
4	Jumlah penguatan cadangan pangan (ton)	50	60	70	80	90	100	100
5	Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi	16,5	20	25	30	35	40	40
<b>23 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
1	Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.	83.19	85	90	90	95	95	95
2	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan.	30%	30	35	40	45	50	50
<b>II URUSAN PILIHAN</b>								
<b>1 PERTANIAN</b>								
1	Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)							
	a. Sawi (%)	0.00	0.00	0.00	4,96	2,00	0.00	0.00
	b. Bayam (%)	0.00	0.00	0.00	3,59	2,00	0.00	0.00
	c. Kangkung (%)	0.87	0.00	0.00	5,00	2,00	0.00	0.00
2	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)							
	a. Pepaya (%)	3,0	0,45	3,17	1,32	0,31	0,47	0,4
3	Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)							
	a. Pepaya (%)	0.00	0.00	1,86	2,00	0.00	0.00	0.00
4	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)							
	a. Lidah Buaya (%)	4,99	13,39	2,00	1,96	1,92	2,83	2,8

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
5	Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)							
	a. Lidah Buaya (%)	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00
6	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)							
	a. Anggrek (%)	2,0	2,94	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0
7	Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :							
	a. Padi (%)	0,00	6,90	0,00	3,23	3,13	3,03	3,0
	b. Jagung (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Ubi Kayu (%)	0,00	0,00	1,98	1,18	1,55	1,53	1,5
	d. Ubi Jalar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Keladi (%)	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00
8	Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :							
	a. Padi (%)	0,00	6,90	0,00	3,23	3,13	3,03	3,0
	b. Jagung (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Ubi Kayu (%)	0,00	0,00	1,98	1,18	1,55	1,53	1,5
	d. Ubi Jalar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Keladi (%)	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00
9	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)							
	a. Sawi (%)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	b. Bayam (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	c. Kangkung (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)							
	a. Sawi (%)	0,00	0,00	0,00	4,96	2,00	0,00	0,00
	b. Bayam (%)	0,00	0,00	0,00	3,59	2,00	0,00	0,00
	c. Kangkung (%)	0,87	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00
11	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)							
	a. Pepaya (%)	3,0	0,45	3,17	1,32	0,31	0,47	0,4
12	Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)							
	a. Pepaya (%)	0,00	0,00	1,86	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)							
	a. Lidah Buaya (%)	4,99	13,39	2,00	1,96	1,92	2,83	2,8
14	Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)							
	a. Lidah Buaya (%)	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00
15	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)							
	a. Anggrek (%)	2,00	2,94	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0



NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
16	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif	-	43,48	9,09	8,33	7,69	7,14	7,14
17	Presentase peningkatan jumlah ketersediaan pangan asal hewan :							
	a. Daging Sapi (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	b. Daging Ayam (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	c. Daging Kambing (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	d. Daging Babi (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	e. Telur (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Persentase Peningkatan Jumlah Tamu yang Berkunjung di UPTD Agribisnis (%)	2,00	2,99	4,99	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>2 KEHUTANAN</b>								
1	Persentase Penurunan luasan lahan kritis (%)	0,25	0,44	0,73	1,18	1,79	2,27	2,27
<b>3 KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
1	Prosentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Persentase Peningkatan Jumlah produksi benih komoditas perikanan air tawar							
	a. Ikan Lele (%)	31,14	8,93	11,00	9,55	11,84	10,29	10,29
	b. Ikan Mas (%)	26,67	7,89	14,63	8,51	9,80	10,00	10,00
	c. Ikan Nila (%)	25,00	6,67	17,50	10,21	8,59	9,78	9,78
<b>4 PARIWISATA</b>								
1	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5	5	7	8	9	10	10
2	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari	4 hari	4 hari
<b>5 PERDAGANGAN</b>								
1	Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API	120	127	132	137	142	147	147
2	Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat	85,71%	85,71%	0,86	0,86	0,86	86	86
<b>6 INDUSTRI</b>								
1	Jumlah IKM yang dibina	600	610	620	630	640	650	650

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
		TAHUN - 0 2014	TAHUN - 1 2015	TAHUN - 2 2016	TAHUN - 3 2017	TAHUN - 4 2018	TAHUN - 5 2019	
<b>III URUSAN LAINNYA</b>								
<b>1 PENANGGULANGAN BENCANA</b>								
1	Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran	78%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
2	Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	80%	85%	87%	89%	91%	93%	93%
3	Prosentase pemadam kebakaran swasta yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana	85%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
4	Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan Tim Reaksi Cepat	88%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
5	Prosentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih	88%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
6	Prosentase peningkatan ketersediaan peralatan pemadam	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%



## BAB X

# PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

**D**okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini merupakan rencana-rencana strategis yang akan mengarahkan perkembangan Kota Pontianak beserta target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut. Jangka waktu rencana RPJM Kota Pontianak ini disesuaikan dengan masa jabatan walikota terpilih.

Untuk menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJM ini, maka perlu ditetapkan pedoman transisi/peralihan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini dalam rangka untuk menjembatani terjadinya kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah mengingat di tahun terakhir masa jabatan walikota yang juga merupakan jangka waktu berlakunya RPJM ini, akan terjadi jeda waktu sebelumnya ditetapkannya RPJM yang baru.

### 10.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak mulai tahun 2015 hingga 2019. Sebelum RPJM yang baru selesai disusun, perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJM Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RKP Tahun 2020 serta menyelesaikan agenda-agenda pembangunan yang telah digariskan dalam RPJM tahun 2015-2019 ini.

Selanjutnya Kepala Daerah Kota Pontianak yang terpilih pada tahun 2019 tetap mempunyai ruang gerak yang luas dalam menyusun RPJM tahun 2020-2024 disesuaikan dengan visi dan misi yang diusungnya selama kampanye dan disesuaikan dengan agenda-agenda pokok RPJM Kota

Pontianak Tahun 2005-2025. Program transisi tahun 2019 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

## 10.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota Pontianak untuk lima tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan walikota Pontianak. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2015-2019 ini, maka perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab oleh seluruh SKPD di Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat serta segenap stakeholder pembangunan.
2. Konsep program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokok dalam RPJM ini tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas program dan kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
3. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2015-2019 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Pontianak dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
4. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Pontianak dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak;
5. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar





melaksanakan program-program dalam RPJM ini dengan sebaik-baiknya;

6. Setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, tanpa terkecuali, berkewajiban menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019. Dalam hal ini BAPPEDA Kota Pontianak berkewajiban melakukan fasilitasi, asistensi dan pendampingan selama proses penyusunan tersebut;
7. Setiap Satuan Kerja yang ada berkewajiban menjamin konsistensi dan harmoni antara RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
8. Penjabaran lebih lanjut RPJM Tahun 2015-2019 ini untuk setiap tahunnya harus dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
9. Penyusunan RKPD Kota Pontianak harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kota;
10. RKPD Kota Pontianak harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
11. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Pontianak merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
12. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
13. Dalam implementasi RPJMD Tahun 2015-2019 ini, setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaannya, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparatur yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat luas;



14. Dalam rangka menjaga konsistensi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Tahun 2015-2019 ini, maka pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut:
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
  - b. Bappeda Kota Pontianak menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
  - d. Bappeda Kota Pontianak menyusun evaluasi capaian tahunan RPJM berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
15. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target capaian sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJM ini, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
16. Apabila terjadi hal yang diluar kendali Pemerintah Kota Pontianak yang menyebabkan terhambat dan melencengnya berbagai rencana yang telah disusun di dalam RPJM ini, maka strategi, arah kebijakan dan program dan target capaian yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Pontianak untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.



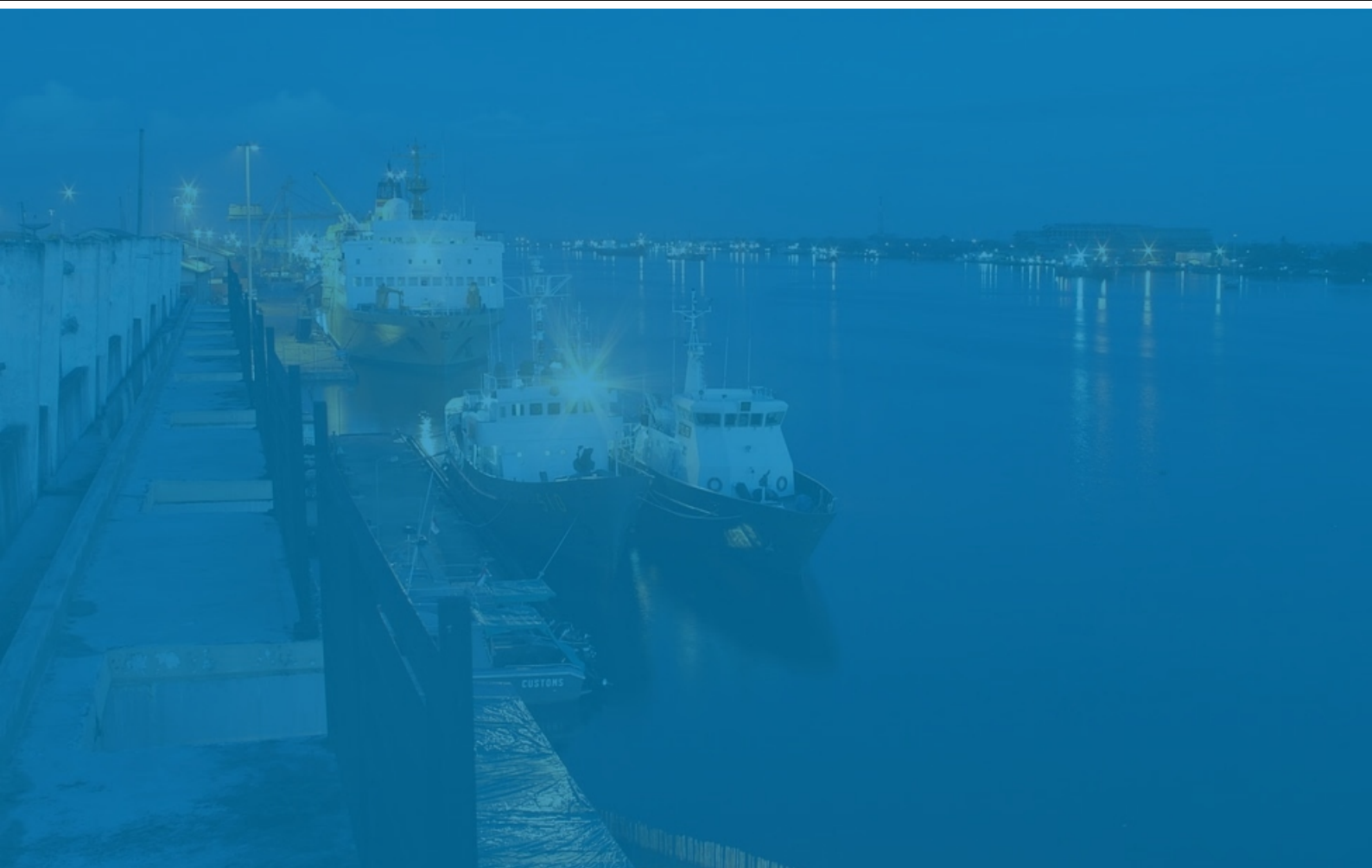


## BAB XI PENUTUP

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Pontianak selama kurun waktu 5 tahun mendatang (2015-2019). RPJM Tahun 2015-2019 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan nasional selama lima tahun mendatang.

Sebagai tanggungjawab bersama untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta, serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan DPRD Kota Pontianak, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.

WALIKOTA PONTIANAK  
  
SUTARMIDJI



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak**  
Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561 - 734294 Fax. 0561 - 733045 Pontianak 78111  
website : [www.bappeda.pontianakkota.go.id](http://www.bappeda.pontianakkota.go.id) - email : [bappeda@pontianakkota.go.id](mailto:bappeda@pontianakkota.go.id)